BADAN POM

BBPOM di Mataram

Inges Solah!

Informatif - Gesit - Solutif - Ramah

#bangga melayani bangsa

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif















# LAPORAN KINERJA

## Balai Besar POM di Mataram

KEMENTERIAN PANRB
WBBM
ZONA INTEGRITAS

2025

# TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA

## PENGARAH

Kepala Balai Besar POM di Mataram

## KETUA

Firman Rakhman, S.Si., Apt.

## SEKRETARIS

Fatimah Tri Wulandari, A.Md

## ANGGOTA


Basuki Murdi Hartono, SH


Hardiono Adisaputra, S.Farm., Apt.


Abdillah Wibisono, S.Farm, Apt., M.LabQAMgt.


Wayan Krisnayanti, S.Farm, Apt.


Muhammad Romadhoni, S.Si.


Otniel Pratama Pangkung, S.E.


Yuniar Windiasti, S.Si.


Miftahul Azizah, A.Md.


IGA Natari Panca Hayati, S.Si, Apt.


I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si.


Syamsul Hady, SH


Sri Dewi Puspita Susilawati, S.Si, Apt.


Mohammad Ibnu Fajri, S.Si.


Nanang Setyadi Santoso, S.E.


Kadek Bagus Krisna Candra, A.Md.

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

# KATA PENGANTAR



**Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt**
**Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram**

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 yang menjadi bentuk pertanggungjawaban berkelanjutan atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang Capaian Kinerja dan merupakan bentuk akuntabilitas pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang telah disusun oleh Kepala BBPOM di Mataram dan disahkan oleh Kepala Badan POM. Pencapaian target kinerja dilakukan melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja. Hal tersebut selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2025 yang merupakan awal tahun periode Rencana Strategis BBPOM di Mataram Tahun 2025-2029 diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*). Rekomendasi perbaikan

kinerja saat ini menjadi dasar upaya tindak lanjut untuk peningkatan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram pada tahun berikutnya.

Kami menyadari bahwa keberhasilan yang dicapai tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah berkontribusi dalam pengawasan obat dan makanan demi melindungi masyarakat.

Mataram, 27 Februari 2026
Kepala Balai Besar POM di Mataram

Yogi Abaso ataram, S.Si, Apt

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari periode Rencana Strategis 2025-2029. Evaluasi capaian kinerja tahun 2025 didasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Terdapat 22 kegiatan utama (Rincian Output) untuk menunjang pencapaian 8 sasaran kegiatan dan 28 indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK). Dari 8 sasaran kegiatan yang ditetapkan, 6 sasaran memperoleh kategori “Sangat Baik”, sementara 2 sasaran lainnya berada pada kategori “Baik.” BBPOM di Mataram pada Tahun 2025 memperoleh Nilai Kinerja Organisasi sebesar 104,39% dengan kriteria “Istimewa”.

Dari total 28 IKSK yang diukur pencapaiannya pada Tahun 2025, terdapat 14 indikator yang capaiannya dengan kriteria “Sangat Baik”, 9 indikator dengan kriteria “Baik”, serta 5 indikator dengan kriteria ‘’Tidak Dapat Disimpulkan’’. Persentase capaian target indikator kinerja BBPOM di Mataram berada dalam rentang 97,38% hingga 119,65%. Capaian terendah tercatat pada Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM, sementara capaian tertinggi diperoleh dari Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO. Data ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, BBPOM di Mataram telah mengoptimalkan kinerjanya dalam mencapai target kegiatan tahun 2025.

Hasil capaian tiap sasaran kegiatan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan rata-rata capaian sebesar 106,38%.
2. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi dengan capaian 100,00%.
3. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT dengan rata-rata capaian 101,19%.
4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu dengan capaian sebesar 110,00%.
5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT dengan capaian sebesar 101,71%.
6. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT dengan capaian sebesar 108,89%.
7. Layanan Publik UPT yang Prima dengan capaian sebesar 105,11%.
8. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal dengan capaian sebesar 99,20%.

Realisasi capaian 28 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

a. 14 (empat belas) Indikator dengan kriteria Sangat Baik (dengan notifikasi biru dan capaian 100% < x ≤ 110%) terdiri dari :
    1. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan realisasi 99,71 % atau tercapai 108,38% dari target 92%.
    2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder realisasi 99,40 % atau tercapai 100,61% dari target 98,8%.
    3. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan realisasi 100,00 % atau tercapai 109,89% dari target 91%.
    4. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan realisasi 92,68 % atau tercapai 109,04% dari target 85%.
    5. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan realisasi 98,57 % atau tercapai 102,68% dari target 96%.
    6. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan realisasi 97,33 % atau tercapai 106,96% dari target 91%.
    7. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar realisasi 94,40 % atau tercapai 102,61% dari target 92%.
    8. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT realisasi 105,69 % atau tercapai 105,69% dari target 100%.
    9. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium realisasi 89,70 % atau tercapai 109,79% dari target 81,70%.
    10. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT realisasi 92,79 atau tercapai 104,76% dari target 88,57%.
    11. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT realisasi 93,57 atau tercapai 101,71% dari target 92%.
    12. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar realisasi 98,00 atau tercapai 108,89% dari target 90%.
    13. Indeks Pelayanan Publik UPT realisasi 4,94 atau tercapai 105,11% dari target 4,70%.
    14. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM realisasi 90,93 atau tercapai 101,03% dari target 90,00.
b. 9 (sembilan) Indikator dengan kriteria Baik (dengan notifikasi hijau dan capaian 90% < x ≤ 100%) terdiri dari :
    1. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT realisasi 100,00 % atau tercapai 100,00% dari target 100,00%.
    2. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman realisasi 20,00 % atau tercapai 100,00% dari target 20,00%.

3. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan realisasi 63,00 % atau tercapai 100,00% dari target 63,00%.
4. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan realisasi 13 atau tercapai 100,00% dari target 13.
5. Jumlah desa pangan aman realisasi 4 atau tercapai 100,00% dari target 4.
6. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas realisasi 1 atau tercapai 100,00% dari target 1.
7. Nilai AKIP UPT BPOM realisasi 82,55 atau tercapai 98,39% dari target 83,90.
8. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM realisasi 5 atau tercapai 100,00% dari target 5.
9. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM realisasi 2,97 atau tercapai 97,38% dari target 3.05.

c. 5 (lima) Indikator dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan (dengan notifikasi abu-abu dan capaian ≥ 110%) terdiri dari :
    1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan realisasi 100,00 % atau tercapai 112,36% dari target 89%.
    2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO realisasi 31,11 % atau tercapai 119,66% dari target 26%.
    3. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan realisasi 100,00 % atau tercapai 117,65% dari target 85%.
    4. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan realisasi 99,48 % atau tercapai 111,03% dari target 96,60%.
    5. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan realisasi 15,73 atau tercapai 112,04% dari target 14,04.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, **BBPOM di Mataram** memperoleh alokasi anggaran APBN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp20.815.994.000. Sejalan dengan arahan Presiden terkait efisiensi belanja perjalanan dinas dan program *non quick win*, anggaran tersebut sempat mengalami pemblokiran yang cukup besar sehingga dana yang dapat dimanfaatkan berkurang menjadi Rp14.236.747.000 (68,39%). Selanjutnya pada bulan Maret 2025 dilakukan Relaksasi Pemanfaatan Efisiensi Anggaran TA 2025, dengan pemanfaatan kembali blokir anggaran pada Rincian Output (RO) sebesar Rp 2.984.534.000,00 sehingga dana yang dapat dimanfaatkan bertambah menjadi Rp17.221.281.000 (82,73%).

Pada Triwulan III dilakukan revisi melalui optimalisasi antar satuan kerja untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai serta menyesuaikan realisasi Semester I. Revisi tersebut menetapkan total pagu DIPA

menjadi Rp20.670.330.000 dengan dana efektif sebesar Rp17.075.617.000. Selanjutnya, pada Triwulan IV dilakukan pembukaan blokir untuk rincian output layanan publik (BAH.001), sehingga total anggaran final yang dapat digunakan pada tahun 2025 menjadi Rp17.177.620.000.

Secara umum, pengelolaan anggaran Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang efisien dengan Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,05, Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0,05, dan capaian efisiensi 100%. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah berjalan efektif serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian indikator dan target yang ditetapkan. Dengan sumber daya yang tersedia, BBPOM di Mataram mampu menghasilkan kinerja optimal melalui pemanfaatan anggaran yang efisien dan tepat sasaran.

Meski demikian, beberapa kendala masih dihadapi, antara lain keterbatasan sumber daya dan dukungan teknis, dinamika kebijakan nasional yang memengaruhi target capaian, serta penyesuaian anggaran akibat pemblokiran selama tahun berjalan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, telah dilakukan reviu dan penyesuaian target Rincian Output (RO) maupun target IKSK dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 agar lebih realistis, tindak lanjut atas seluruh rekomendasi periode sebelumnya, serta pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi sebagai dasar perbaikan kinerja. Laporan Kinerja ini juga dijadikan rujukan utama dalam penyusunan perencanaan periode berikutnya agar kebijakan, program, dan target yang dirumuskan semakin efektif, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kinerja.

Melalui pemantauan berkala terhadap indikator yang belum mencapai target maupun yang melampaui 110%, penyesuaian kebijakan berbasis evaluasi kinerja, serta optimalisasi sumber daya dan anggaran, diharapkan BBPOM di Mataram dapat terus meningkatkan mutu pengawasan Obat dan makanan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

# HIGHLIGHT KINERJA

Sebagai bagian dari komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, BBPOM di Mataram terus memperkuat inisiatif pemberantasan korupsi. Berbagai langkah strategis telah dilakukan, mulai dari penguatan sistem pengawasan internal, penerapan layanan berbasis digital untuk mengurangi potensi penyimpangan, hingga peningkatan budaya integritas di lingkungan kerja. Melalui upaya ini, BBPOM di Mataram bertekad untuk menciptakan layanan publik yang profesional, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Upaya yang telah dilakukan sebagai berikut:

a. Penyampaian surat kepada stakeholder tentang himbauan semangat anti gratifikasi;
b. Penandatanganan pakta integritas seluruh Aparatur Sipil Negara BBPOM di Mataram;
c. Pelaporan anti gratifikasi dan benturan kepentingan seluruh pegawai;
d. Survei integritas petugas fungsi pemeriksaaan kepada pemilik/penanggung jawab sarana pengawasan Obat dan makanan;
e. Pencantuman tidak menerima gratifikasi pada surat tugas dan laporan tindak lanjut hasil pengawasan;
f. Penyediaan Kanal pengaduan lapor ke Kepala Balai yang dapat diakses oleh eksternal maupun internal;
g. Sertifikasi dan implementasi ISO 37001:2015 tentang sistem manajemen anti-penyuapan (SMAP)

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Balai Besar POM di Mataram menjalankan perannya secara terencana, berkelanjutan, dan konsisten dengan dukungan penuh dari seluruh jajaran. Setiap kegiatan dilaksanakan dengan dedikasi dan komitmen tinggi guna mewujudkan visi dan misi organisasi. Komitmen tersebut tercermin dari berbagai penghargaan yang berhasil diraih, antara lain:

Balai Besar POM di Mataram berhasil meraih predikat **Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani** dari Kementerian PANRB







BBPOM di Mataram masuk menjadi **5 terbaik *Green Laboratorium*** dan sebagai pemenang untuk kategori Sumber dan Siklus Material

**Juara 1 Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis** Komunitas (PPABK) Tingkat nasional Regional Tengah







**Juara 3 Lomba Sekolah dengan PJAS Aman** Tingkat Nasional Kategori SD/MI Sederajat Region Tengah

Sebagai UPT **Terbaik 1 Pengelola Kegiatan Desa Pangan Aman** Tingkat Nasional







BBPOM di Mataram sebagai UPT dengan **Kinerja Keseluruhan Pengendalian AMR Terbaik** Kategori Balai Besar POM

Laboratorium BBPOM di Mataram **peringkat 1 Penilaian standar kemampuan Laboratorium**







Balai Besar POM di Mataram meraih penghargaan **Terbaik Pertama Implementasi Digitalisasi Pembayaran Kategori Pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)** dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mataram

**UMKM Kosmetik Terbaik 1** Tingkat Nasional dalam inovasi Skincare yang AMAN & BERKELANJUTAN







| No | UPT | Positif | Netral |
|---|---|---|---|
| 1 | BBPOM di Mataram | 666 | 0 |
| 2 | BBPOM di Makassar | 527 | 7 |
| 3 | BBPOM di Jakarta | 485 | 0 |
| 4 | BPOM di Bengkulu | 418 | 0 |
| 5 | BBPOM di Serang | 406 | 11 |

| No | UPT | Positif | Netral |
|---|---|---|---|
| 6 | BBPOM di Palembang | 328 | 5 |
| 7 | BBPOM di Medan | 306 | 1 |
| 8 | BBPOM di Surabaya | 290 | 0 |
| 9 | BPOM di Ambon | 275 | 0 |
| 10 | BBPOM di Banda Aceh | 254 | 2 |

UPT BPOM **Paling Banyak Diberitakan**

**Peringkat terbaik 3 Nilai AKIP tahun 2025** dengan nilai final evaluasi **82,55**




Menyukseskan implementasi Reformasi Birokrasi serta sebagai upaya menghadapi perubahan lingkungan strategis yang dinamis, BBPOM di Mataram telah membuat dan mengembangkan inovasi-inovasi untuk mendukung peningkatan kinerja, antara lain:

**1. ODS *(One Day Service) dan OHS (One Hours Service)***

Merupakan inovasi dalam percepatan penyelesaian pengujian sampel barang bukti kasus kepolisian, dengan waktu penyelesaian 1 (satu) hari untuk sampel ODS dan ODS Weekend, serta 1 (satu) jam untuk sampel OHS. Layanan ini juga tetap beroperasi pada akhir pekan maupun hari libur nasional.

Sebagai satuan kerja yang berkomitmen mewujudkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan prima, Balai Besar POM di Mataram melakukan terobosan melalui pengembangan inovasi ODS (One Day Service). ODS merupakan layanan pengujian pihak ketiga (eksternal), terutama untuk sampel obat dan NAPZA, dengan waktu penyelesaian hasil uji dalam 1 (satu) hari.

**2. GAS PAMAN**

Inovasi Keluarga Sadar PaInovasi Keluarga Sadar Pangan Aman (GAS-PAMAN) merupakan terobosan yang memanfaatkan pedagang sayur keliling sebagai agen diseminasi informasi kepada ibu rumah tangga, dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan penerapan praktik keamanan pangan hingga ke tingkat keluarga. Pelaksanaan inovasi GAS-PAMAN diawali dengan kegiatan penyuluhan keamanan pangan kepada pedagang sayur yang ditetapkan sebagai Kader GAS-PAMAN.

Pada tahun 2025, dilakukan penambahan kader GAS-PAMAN yang berfokus di Kota Mataram sebanyak 8 (delapan) orang kader, yang terdiri dari 3 (tiga) laki-laki dan 5 (lima) perempuan. Penambahan kader ini difokuskan pada satu wilayah guna memperkuat efektivitas pembinaan dan pendampingan, sehingga peran kader dalam mengedukasi masyarakat terkait keamanan pangan dapat berjalan lebih optimal, intensif, dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk penguatan kapasitas, telah dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada seluruh kader baru sebagaimana yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kader mengenai keamanan pangan, komunikasi risiko, teknik penyuluhan kepada keluarga, serta mekanisme pelaporan dan monitoring kegiatan kader. Dengan adanya Bimtek tersebut, kader diharapkan memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan peran sebagai agen perubahan di tingkat keluarga dan komunitas.

Penambahan kader GAS-PAMAN tahun 2025 telah mengintegrasikan prinsip Pengarusutamaan Gender (PUG), yang tercermin dari keterwakilan laki-laki dan perempuan dalam komposisi kader. Keterlibatan perempuan yang lebih dominan menunjukkan penguatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan terkait pemilihan dan pengolahan pangan yang aman di tingkat keluarga. Namun demikian, partisipasi laki-laki juga menjadi aspek penting dalam mendorong kesetaraan peran dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan pangan.

Dengan komposisi tersebut, program GAS-PAMAN diharapkan mampu mendorong pembagian peran yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam menjaga keamanan pangan; meningkatkan efektivitas edukasi kepada keluarga sebagai unit terkecil masyarakat serta mewujudkan perubahan perilaku masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pendekatan ini memperkuat implementasi GAS-PAMAN sebagai inovasi yang responsif gender serta mendukung pembangunan masyarakat yang berkeadilan.

### 3. GEMILANG PRO UMKM




GEMILANG Pro-UMKM (Gerakan Lintas Lembaga Mengawal Daya Saing Produk UMKM) merupakan program yang bertujuan meningkatkan keterlibatan serta sinergi pendampingan UMKM lintas lembaga, khususnya bagi UMKM di bidang pangan olahan, obat tradisional, dan kosmetika, guna memperluas cakupan pembinaan.

Sepanjang tahun 2025, Program GEMILANG Pro-UMKM berkontribusi terhadap terbitnya 244 nomor izin edar baru untuk produk obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan.

### 4. GOBAK SODOR




GOBAK SODOR (Gencarkan Obat dan Makanan Aman dengan Sosialisasi *Door to Door*) merupakan inovasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang dipadukan dengan kegiatan pengujian menggunakan test kit. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode jemput bola ke sarana peredaran obat dan makanan serta ke pusat-pusat keramaian masyarakat.

Pelaksanaan inovasi GOBAK SODOR dimulai pada tahun 2024. Inovasi ini merupakan pengembangan dari inovasi MANIS (Minggu Asyik Ngobrol Informatif dan Solutif) dan POMPI Blusukan, yang bertujuan memperluas cakupan KIE terkait obat dan makanan aman kepada masyarakat, meskipun dengan

keterbatasan jumlah personel. Selain itu, inovasi ini juga diarahkan untuk meningkatkan Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pentingnya obat dan makanan yang aman.

**5. BPOM Mataram on Air**




Merupakan inovasi pembuatan konten dalam format *reels* dan *podcast* di Instagram dan Youtube akun resmi BBPOM di Mataram serta berkolaborasi dengan influencer lokal NTB.

**6. I-CONIC**

I-CONIC (*Instrument Consultation Clinic*) merupakan inovasi layanan pemeliharaan dan perawatan instrumen laboratorium yang dilaksanakan oleh "dokter alat" BBPOM di Mataram. Proses pengujian di Balai Besar POM di Mataram menggunakan berbagai instrumen yang memerlukan pemeliharaan berkala dengan biaya yang relatif besar. Dalam penggunaannya, instrumen tersebut tidak terlepas dari potensi gangguan atau kendala teknis.

Melalui I-CONIC, layanan maintenance dilakukan oleh personil laboratorium yang telah mengikuti pelatihan teknis, sehingga permasalahan atau gangguan pada instrumen laboratorium dapat ditangani secara mandiri dengan cepat. Kehadiran inovasi ini diharapkan mampu meminimalkan hambatan dalam proses pengujian serta menjaga keberlangsungan layanan laboratorium secara optima serta efisiensi anggaran pemeliharaan dan perbaikan alat laboratorium.

**7. Duta Anti Gratifikasi**

Inovasi Duta Anti Gratifikasi ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BBPOM di Mataram berdasarkan mekanisme seleksi dan penilaian sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Duta Anti Gratifikasi yang terpilih bertugas melaksanakan sosialisasi mengenai pengendalian gratifikasi dan pencegahan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan. Kegiatan sosialisasi dilakukan secara berkala, baik secara langsung (luring maupun daring) maupun tidak langsung melalui media video dan media sosial, kepada pegawai serta masyarakat.

Duta Antigratifikasi juga telah menyosialisasikan program Pengendalian Gratifikasi dan Whistle Blowing System kepada seluruh pegawai, pelaku usaha, dan masyarakat penerima layanan Balai Besar POM di Mataram. Seluruh kegiatan tersebut telah dilaporkan secara rutin setiap bulan sepanjang tahun 2025.

**8. SI OPA LAGI JJ**

SiOpa Lagi JJ (Sistem Pengoperasian Alat Laboratorium Jarak Jauh) merupakan inovasi yang memanfaatkan aplikasi remote access, salah satunya TeamViewer, untuk mendukung pengoperasian instrumen laboratorium secara jarak jauh. Melalui aplikasi tersebut, peralatan laboratorium seperti HPLC, TLC System, GC, AAS, LC-MS/MS, dan GC-MS dapat diakses dan dioperasikan oleh personel tanpa harus berada langsung di laboratorium.

Dengan sistem ini, personel dapat mengendalikan instrumen secara penuh baik dari ruang kerja maupun dari rumah (WFH). Aplikasi remote access yang digunakan dinilai mudah dan aman karena setiap perangkat dilindungi dengan user ID dan kata sandi khusus, sehingga keamanan akses tetap terjaga.

**9. PERCEPAT (Persediaan Cepat dan Tepat)**

PERCEPAT merupakan alat bantu dalam pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) berupa persediaan, sekaligus mendukung penguatan digitalisasi proses bisnis sebagai upaya peningkatan tata kelola BMN yang lebih akuntabel dan tertib. Pada tahap awal, PERCEPAT diperkenalkan dan diimplementasikan secara terbatas untuk pengelolaan reagensia pada gudang reagensia dengan pengguna yang berasal dari fungsi pengujian. Selanjutnya, sistem ini dikembangkan melalui pembaruan data yang mencakup pengelolaan Alat Tulis Kantor (ATK) pada gudang ATK, sehingga pengguna tidak lagi terbatas pada fungsi pengujian, tetapi juga melibatkan perwakilan dari masing-masing fungsi.

PERCEPAT mendokumentasikan seluruh proses permintaan dan persetujuan secara sistematis sehingga menghasilkan jejak audit yang jelas. Dengan demikian, sistem ini memungkinkan penelusuran terkait pihak yang mengajukan permintaan, jenis barang yang diminta, serta waktu pengajuan. Data tersebut selanjutnya dapat diolah menjadi laporan penggunaan yang mendukung analisis tingkat konsumsi dan perencanaan anggaran, serta mempermudah pengelolaan dan perencanaan kebutuhan sumber daya.

**10. SIMPEL BMN**

Inovasi SIMPEL BMN (Sistem Pemeliharaan BMN) merupakan sistem administrasi dan pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN) berbasis aplikasi web. Pada tahun 2025, SIMPEL BMN telah diimplementasikan dan beroperasi dengan baik. Selain itu, pada bulan Desember 2025 dilakukan pengembangan aplikasi melalui penambahan fitur pemeliharaan non-aset guna meningkatkan efektivitas dan cakupan pengelolaan BMN.

**11. SI MANIS MULAI KESEL**




Inovasi Si Manis Mulai Kesel (Sistem Manajemen Terintegrasi Mutu, Laboratorium, serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja) merupakan terobosan untuk mengintegrasikan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001, Sistem Manajemen Laboratorium ISO/IEC 17025, serta Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ISO 45001 menjadi Sistem Manajemen BPOM Terintegrasi. Integrasi tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan sistem manajemen di Balai Besar POM di Mataram.

Implementasi inovasi Si Manis Mulai Kesel dimulai sejak Januari 2021 sesuai dengan Rencana Pelaksanaan (Renlak) Inovasi. Seluruh SOP mikro di BBPOM di Mataram telah diintegrasikan ke dalam ketiga sistem manajemen tersebut. Dalam rangka replikasi inovasi ini ke seluruh unit BPOM di Indonesia, Si Manis Mulai Kesel telah diusulkan kepada BPOM RI untuk dilakukan kajian dan dimasukkan ke dalam lingkup integrasi sistem manajemen di lingkungan BPOM.

**12. Kantin Kejujuran**




Inovasi ini menerapkan konsep *self-service system* atau sistem layanan mandiri, di mana pembeli mengambil barang yang diinginkan dan melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang tertera. Kantin kejujuran beroperasi tanpa penjaga maupun penjual. Produk makanan dan minuman ditata dengan dilengkapi daftar harga yang jelas.

Sistem pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai. Untuk pembayaran non tunai dengan menggunakan QRIS dan pembayaran tunai disediakan kotak pembayaran untuk menampung uang dari para pembelit. Apabila terdapat kelebihan pembayaran, pembeli mengambil dan menghitung sendiri uang kembalian dari kotak tersebut sesuai dengan nominal yang seharusnya diterima.

### 13. B-Care

Inovasi ini terdiri atas tiga program kegiatan yang saling terintegrasi. Program pertama adalah BBPOM Mataram Berbagi, yang merupakan kegiatan sosial kemanusiaan dalam bentuk pemberian bantuan atau donasi kepada masyarakat yang membutuhkan. Program kedua adalah BBPOM Mataram Beriman, yaitu kegiatan pembinaan mental dan spiritual melalui ceramah keagamaan atau siraman rohani bagi pegawai BBPOM di Mataram. Selanjutnya, terdapat program Sedekah Mudah & Berkah yang merupakan kegiatan penghimpunan dana infak atau sedekah dari ASN BBPOM di Mataram melalui kotak B-Care maupun pemanfaatan aplikasi pembayaran elektronik (e-payment) melalui Easy B-Care. Dana infak atau sedekah yang terkumpul dari program tersebut kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui kegiatan BBPOM Mataram Berbagi.

### 14. Kasino Naik Sepeda




Inovasi **Kasino Naik Sepeda** (Identifikasi Simultan Asam Retinoat dan Hidrokinon pada Sediaan Kosmetika secara Ultra High Performance Liquid Chromatography–Photodiode Array) merupakan pengembangan metode analisis untuk mendeteksi secara simultan hidrokuinon dan asam retinoat dalam sediaan kosmetika. Pengembangan ini dilakukan sebagai respons atas metode yang tercantum dalam Peraturan Kepala BPOM Tahun 2011 tentang Metode Analisis Kosmetika, yang masih menggunakan HPLC konvensional dan dijalankan secara terpisah untuk masing-masing senyawa sehingga memerlukan waktu analisis relatif lebih lama.

Melalui inovasi ini, analisis dilakukan menggunakan instrumen Ultra High Performance Liquid Chromatography (UHPLC) dengan detektor PDA, kolom Hypersil GOLD® C18 (150 mm × 2,1 mm; 3 µm), serta fase gerak metanol–asam format 0,1% dengan sistem gradien dan laju alir 0,35 mL/menit. Deteksi dilakukan pada panjang gelombang 290 nm untuk hidrokuinon dan 354 nm untuk asam retinoat, sehingga proses pengujian menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien.

### 15. SI INA BIKIN TEH MANIS




Inovasi **Si Ina Bikin Teh Manis** (Identifikasi Bahan Kimia Obat dalam Produk Obat Tradisional secara TLC-MS) merupakan metode pengujian Bahan Kimia Obat (BKO) pada obat tradisional yang dirancang untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi analisis. Proses pengujian diawali dengan preparasi sampel, kemudian dilanjutkan dengan analisis menggunakan metode KLT-Densitometri. Hasil dari pengujian tersebut selanjutnya dikonfirmasi dengan instrumen LC-MS/MS untuk memperoleh tingkat akurasi dan sensitivitas yang lebih tinggi. Dengan demikian, satu kali proses preparasi dapat menghasilkan data yang komprehensif dan andal. Melalui penerapan inovasi ini, pengujian obat tradisional yang terindikasi mengandung BKO dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan sensitif, sehingga mendukung upaya pencegahan dampak negatif BKO terhadap kesehatan masyarakat.

### 16. SIPROVAL

SIPROVAL
Sistem Informasi Program & Evaluasi

Siproval merupakan Sistem Informasi Program dan Evaluasi yang memuat data perencanaan kinerja, penganggaran dan perbendaharaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja. Pada fitur dashboard disajikan informasi mengenai realisasi dan persentase capaian Indikator Kinerja, realisasi serta progres atau persentase capaian output, realisasi anggaran per bulan, serta Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

Pada menu monitoring dan evaluasi, dilakukan penginputan data capaian kinerja dan output setiap bulan oleh penanggung jawab data pada masing-masing fungsi atau bagian, yang selanjutnya diverifikasi oleh penanggung jawab data tingkat Balai. Data kinerja yang telah diverifikasi tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai dasar pengisian laporan pada aplikasi SAKTI, sistem monitoring dan evaluasi Bappenas, BPOM Operational Center (BOC), serta aplikasi SIMETRIS (data RHPK

### 17. SIAP MELAYANI




SIAP MELAYANI merupakan inovasi pelayanan publik Balai Besar POM di Mataram yang mengintegrasikan permohonan layanan, edukasi, dan komunikasi masyarakat dalam satu platform digital. Melalui sistem yang transparan dan terstruktur, masyarakat dapat mengakses informasi, mengajukan layanan, serta berinteraksi secara lebih mudah, cepat, dan akuntabel. Inovasi ini mendukung terwujudnya pelayanan publik yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan.

**18. Berugak Virtual**

Berugak Virtual, yaitu ruang layanan berbasis digital yang memungkinkan masyarakat berinteraksi secara langsung dengan petugas. Melalui platform ini, masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan, pengaduan, maupun permintaan informasi terkait Obat dan Makanan dalam suasana yang terbuka, komunikatif, dan humanis. Kehadiran inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas komunikasi serta mendorong peningkatan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan BBPOM di Mataram.

**19. E-SEMU**

Inovasi E-SEMU merupakan sistem digital yang dikembangkan untuk mendukung pengelolaan dokumen sistem manajemen mutu secara lebih efektif dan efisien. Melalui sistem ini, seluruh dokumen terkait mutu dapat diakses, dikelola, serta diperbarui dengan lebih terstruktur, aman, dan mudah ditelusuri sesuai dengan standar yang berlaku.

Penerapan E-SEMU juga memperkuat aspek transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi sistem mutu, sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara real-time. Dengan hadirnya inovasi ini, BBPOM di Mataram semakin siap menghadapi tantangan pengawasan obat dan makanan melalui sistem yang lebih modern, terintegrasi, dan berbasis teknologi. E-SEMU sekaligus menjadi wujud komitmen dalam memberikan pelayanan yang profesional serta memastikan kepatuhan standar mutu secara konsisten dan berkelanjutan.

# DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR 1

RINGKASAN EKSEKUTIF 5

HIGHLIGHT 9

DAFTAR ISI 21

DAFTAR GAMBAR 23

DAFTAR TABEL 29

BAB I. PENDAHULUAN 37

1.1 LATAR BELAKANG 37

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI 38

1.3 STRUKTUR ORGANISASI 41

1.4 ISU STRATEGIS 41

1.5 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS 51

BAB II. PERENCANAAN KINERJA 59

2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA 59

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 64

2.3 PERJANJIAN KINERJA 66

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) 76

2.5 METODE PENGUKURAN 88

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 93

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 93

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA SASARAN KEGIATAN 1 99

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA SASARAN KEGIATAN 2 214

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA SASARAN KEGIATAN 3 222

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA SASARAN KEGIATAN 4 251

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA SASARAN KEGIATAN 5 261

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA SASARAN KEGIATAN 6 268

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA SASARAN KEGIATAN 7 274

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA SASARAN KEGIATAN 8 283

3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASII EVALUASI SEBELUMNYA 309

3.3 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA 345

3.4 REALISASI ANGGARAN 346

BAB IV. PENUTUP 375

4.1 KESIMPULAN 375

4.2 SARAN 379

LAMPIRAN 381

# DAFTAR GAMBAR


| | | |
|---|---|---|
| **1.1** | Empat Inti Kegiatan Fungsi BBOM di Mataram | **40** |
| **1.2** | Struktur Organisasi BBPOM di Mataram | **41** |
| **1.3** | Peta Wilayah Kerja UPT BPOM di Provinsi NTB | **55** |
| **1.4** | Grafik Sarana Produksi di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram Tahun 2025 | **56** |
| **1.5** | Grafik Sarana Distribusi di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram Tahun 2025 | **56** |
| **2.1** | Misi Presiden (Asta Cita) | **60** |
| **3.1** | Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada Aplikasi e-Performance | **94** |
| **3.2** | Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster | **107** |
| **3.3** | Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase fasilitas pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster | **114** |
| **3.4** | Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster | **123** |
| **3.5** | Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster | **131** |
| **3.6** | Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster | **138** |
| **3.7** | Perbandingan Target, Realisasi dan % Capaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder tahun 2024 dengan tahun 2025 | **144** |

| | | |
|---|---|---|
| **3.8** | Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster | **146** |
| **3.9** | Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster | **154** |
| **3.10** | Grafik Total Temuan per Jenis Sarana Pangan | **161** |
| **3.11** | Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster | **163** |
| **3.12** | Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster | **170** |
| **3.13** | Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster | **176** |
| **3.14** | Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster | **184** |
| **3.15** | Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster | **190** |
| **3.16** | Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster | **195** |
| **3.17** | Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster | **202** |
| **3.18** | Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster | **207** |

| | | |
|---|---|---|
| **3.19** | Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster | **214** |
| **3.20** | Jumlah Total Responden dan Indeks Rata - rata efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) | **221** |
| **3.21** | Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster | **223** |
| **3.22** | Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster | **233** |
| **3.23** | Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Jumlah desa pangan aman Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster | **237** |
| **3.24** | Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster | **243** |
| **3.25** | Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster | **252** |
| **3.26** | Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster | **260** |
| **3.27** | Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster | **267** |
| **3.28** | Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase indikator Layanan Publik UPT yang prima Tahun 2025 dengan Tahun 2024 | **273** |
| **3.29** | Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Indeks Pelayanan Publik UPT Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster | **275** |
| **3.30** | Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Nilai Pembangunan ZI UPT BBPOM di Mataram Tahun 2024 hingga Tahun 2025 | **284** |

| | | |
|---|---|---|
| **3.31** | Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster | **285** |
| **3.32** | Perbandingan Target, Realisasi dan % Capaian indikator Nilai AKIP UPT BPOM tahun 2024 dengan tahun 2025 | **290** |
| **3.33** | Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Nilai AKIP UPT BPOM Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster | **291** |
| **3.34** | Rincian Nilai IKPA Tahun 2025 | **296** |
| **3.35** | Rincian Nilai EKA Tahun 2025 | **296** |
| **3.36** | Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster | **297** |
| **3.37** | Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster | **303** |

# DAFTAR TABEL


| | | |
|---|---|---|
| **1.1** | Kebutuhan SDM BBPOM di Mataram Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) Tahun 2025 | **51** |
| **2.1** | Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BBPOM di Mataram Tahun 2025 | **64** |
| **2.2** | Perjanjian Kinerja BBPOM di Mataram Tahun 2025 | **67** |
| **2.3** | Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Revisi) | **72** |
| **2.4** | Tabel Direktif Penugasan Kepala Balai Besar Pom di Mataram Tahun 2025 | **75** |
| **2.5** | Tabel Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Awal | **77** |
| **2.6** | Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 | **82** |
| **3.1** | Pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2025 | **94** |
| **3.2** | Pencapaian Sasaran Kegiatan Tahun 2025 | **97** |
| **3.3** | Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 1 BBPOM di Mataram Tahun 2025 | **99** |
| **3.4** | Target, realisasi dan %capaian Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | **105** |
| **3.5** | Perbandingan Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti se suai ketentuan Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029) | **107** |
| **3.6** | Matriks Rekomendasi Indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 | **109** |
| **3.7** | Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase sampel Se diaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 | **111** |
| **3.8** | Target, realisasi dan %capaian Persentase fasilitas pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO | **112** |
| **3.9** | Perbandingan Persentase fasilitas pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029) | **113** |
| **3.10** | Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO Tahun 2025 | **116** |

| | | |
|---|---|---|
| **3.11** | Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO Tahun 2025 | **117** |
| **3.12** | Target, realisasi dan %capaian Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | **120** |
| **3.13** | Hasil Perhitungan Persentase Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Balai Besar POM di Mataram | **120** |
| **3.14** | Data Pengujian Sampel Pangan Olahan Tahun 2025 | **121** |
| **3.15** | Perbandingan Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029) | **123** |
| **3.16** | Matriks Rekomendasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 | **125** |
| **3.17** | Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase sampel Pa ngan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 | **127** |
| **3.18** | Target, realisasi dan %capaian Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT | **128** |
| **3.19** | Jumlah dan Asal Sampel KLB KP | **129** |
| **3.20** | Perbandingan Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029) | **130** |
| **3.21** | Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT Tahun 2025 | **132** |
| **3.22** | Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT | **134** |
| **3.23** | Target, realisasi dan %capaian Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | **136** |
| **3.24** | Data Pengujian Sampel PIRT | **137** |
| **3.25** | Perbandingan Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029) | **138** |
| **3.26** | Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 | **140** |

| | | |
|---|---|---|
| **3.27** | Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | **141** |
| **3.28** | Target, realisasi dan %capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | **143** |
| **3.29** | Target, Realisasi dan % Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | **143** |
| **3.30** | Perbandingan Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029) | **146** |
| **3.31** | Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Tahun 2025 | **147** |
| **3.32** | Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | **149** |
| **3.33** | Target, realisasi dan % capaian Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | **151** |
| **3.34** | Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 | **152** |
| **3.35** | Perbandingan Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029) | **153** |
| **3.36** | Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 | **155** |
| **3.37** | Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase ssarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 | **157** |
| **3.38** | Target, realisasi dan %capaian Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | **159** |
| **3.39** | Sarana Produksi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 | **159** |

| | | |
|---|---|---|
| **3.40** | Perbandingan Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029) | **162** |
| **3.41** | Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 | **164** |
| **3.42** | Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 | **166** |
| **3.43** | Target, realisasi dan %capaian Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | **168** |
| **3.44** | Hasil Pemeriksaan Fasilitas Sarana distribusi Sediaan Farmasi tahun 2025 | **168** |
| **3.45** | Perbandingan Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029) | **169** |
| **3.46** | Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 | **171** |
| **3.47** | Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 | **173** |
| **3.48** | Target, realisasi dan %capaian Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | **174** |
| **3.49** | Sarana Distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 | **175** |
| **3.50** | Perbandingan Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029) | **175** |
| **3.51** | Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 | **177** |
| **3.52** | Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 | **178** |
| **3.53** | Target, realisasi dan %capaian Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | **181** |

| | | |
|---|---|---|
| **3.54** | Target dan realisasi Iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan tahun 2025 | **182** |
| **3.55** | Persentase capaian Iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan tahun 2025 | **182** |
| **3.56** | Perbandingan Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029) | **183** |
| **3.57** | Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Tahun 2025 | **186** |
| **3.58** | Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 | **187** |
| **3.59** | Target, realisasi dan %capaian Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar | **188** |
| **3.60** | Perbandingan Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029) | **189** |
| **3.61** | Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar Tahun 2025 | **191** |
| **3.62** | Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar Tahun 2025 | **193** |
| **3.63** | Target, realisasi dan %capaian Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | **194** |
| **3.64** | Perbandingan Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029) | **195** |
| **3.65** | Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT Tahun 2025 | **196** |
| **3.66** | Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT Tahun 2025 | **199** |
| **3.67** | Target, realisasi dan %capaian Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | **200** |

| | | |
|---|---|---|
| **3.68** | Perbandingan Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029) | **201** |
| **3.69** | Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Tahun 2025 | **203** |
| **3.70** | Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Tahun 2025 | **204** |
| **3.71** | Target, realisasi dan %capaian Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman | **206** |
| **3.72** | Perbandingan Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029) | **206** |
| **3.73** | Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2025 | **208** |
| **3.74** | Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2025 | **210** |
| **3.75** | Target, realisasi dan %capaian Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | **212** |
| **3.76** | Jumlah sarana produksi fortifikasi yang diawasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram pada tahun 2025 | **212** |
| **3.77** | Perbandingan Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra | **213** |
| **3.78** | Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 | **216** |
| **3.79** | Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 | **218** |
| **3.80** | Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 3 BBPOM di Mataram Tahun 2025 | **220** |

| | | |
|---|---|---|
| **3.81** | Indeks Survei Tatap Muka dan Media Kegiatan Efektivitas KIE Tahun 2025 | **221** |
| **3.82** | Target, realisasi dan %capaian Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | **222** |
| **3.83** | Perbandingan Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029) | **223** |
| **3.84** | Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Tahun 2025 | **225** |
| **3.85** | Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Tahun 2025 | **229** |
| **3.86** | Target, realisasi dan %capaian Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | **232** |
| **3.87** | Perbandingan Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029) | **233** |
| **3.88** | Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Tahun 2025 | **234** |
| **3.89** | Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Tahun 2025 | **235** |
| **3.90** | Target, realisasi dan %capaian Jumlah desa pangan aman | **237** |
| **3.91** | Perbandingan Jumlah desa pangan aman Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029) | **237** |
| **3.92** | Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Jumlah desa pangan aman Tahun 2025 | **239** |
| **3.93** | **Tabel 3.93** Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Jumlah desa pangan aman Tahun 202 | **240** |
| **3.94** | Target, realisasi dan %capaian Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | **241** |
| **3.95** | Perbandingan Jumlah pasar pangan aman Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029) | **242** |
| **3.96** | Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Tahun 2025 | **245** |

| | | |
|---|---|---|
| **3.97** | Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Tahun 2025 | **247** |
| **3.98** | Target, realisasi dan %capaian Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | **250** |
| **3.99** | Jumlah UMKM yang didampingi dan memeproleh rekomendasi Tahun 2025 | **250** |
| **3.100** | Perbandingan Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029) | **251** |
| **3.101** | UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Tahun 2025 | **253** |
| **3.102** | Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Tahun 2025 | **254** |
| **3.103** | Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Tahun 2025 | **257** |
| **3.104** | Target, realisasi dan %capaian Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | **258** |
| **3.105** | Target dan Realisasi Perkara serta Keberhasilan Penindakan Tahun 2025 | **259** |
| **3.106** | Perbandingan Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029) | **260** |
| **3.107** | Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Tahun 2025 | **261** |
| **3.108** | Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Tahun 2025 | **263** |
| **3.109** | Target, realisasi dan %capaian Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | **266** |

| | | |
|---|---|---|
| **3.110** | Perbandingan Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029) | **266** |
| **3.111** | Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Tahun 2025 | **268** |
| **3.112** | Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Tahun 2025 | **270** |
| **3.113** | Target, realisasi dan %capaian Indeks Pelayanan Publik UPT | **272** |
| **3.114** | Hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik untuk Masing-Masing Komponen Tahun 2025 | **273** |
| **3.115** | Perbandingan Indeks Pelayanan Publik UPT Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029) | **274** |
| **3.116** | Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik UPT Tahun 2025 | **277** |
| **3.117** | Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Indeks Pelayanan Publik UPT Tahun 2025 | **278** |
| **3.118** | Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 8 BBPOM di Mataram Tahun 2025 | **279** |
| **3.119** | Bobot Penilaian Komponen Pengungkit Nilai Pembangunan ZI | **280** |
| **3.120** | Bobot Penilaian Komponen Hasil Nilai Pembangunan ZI | **281** |
| **3.121** | Target, realisasi dan %capaian Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM | **281** |
| **3.122** | Penilaian Evaluasi ZI BBPOM di Mataram Tahun 2025 dan 2024 | **281** |
| **3.123** | Perbandingan Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029) | **284** |
| **3.124** | Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM Tahun 2025 | **285** |
| **3.125** | Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM | **287** |
| **3.126** | Kriteria Nilai AKIP | **288** |

| | | |
|---|---|---|
| **3.127** | Target, realisasi dan %capaian Nilai AKIP UPT BPOM | **289** |
| **3.128** | Hasil Penilaian AKIP Tahun 2024-2025 | **289** |
| **3.129** | Perbandingan Nilai AKIP UPT BPOM Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029) | **290** |
| **3.130** | Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Nilai AKIP UPT BPOM BPOM Tahun 2025 | **292** |
| **3.131** | Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Nilai AKIP UPT BPOM | **293** |
| **3.132** | Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran | **294** |
| **3.133** | Target, realisasi dan %capaian Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM | **295** |
| **3.134** | Rincian Nilai IKPA tahun 2025 dari BBPOM di Mataram | **295** |
| **3.135** | Rincian Nilai EKA tahun 2025 dari BBPOM di Mataram | **296** |
| **3.136** | Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029) | **296** |
| **3.137** | Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM Tahun 2025 | **298** |
| **3.138** | Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM | **299** |
| **3.139** | Tabel Kategori Tingkat Maturitas | **300** |
| **3.140** | Tingkat Maturitas | **300** |
| **3.141** | Target, realisasi dan %capaian Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | **301** |
| **3.142** | Perbandingan Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM BPOM Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029) | **302** |
| **3.143** | Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM Tahun 2025 | **304** |
| **3.144** | Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | **305** |
| **3.145** | Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil evaluasi Sebelumnya | **309** |
| **3.146** | Realisasi anggaran berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2025 | **347** |

| | | |
|---|---|---|
| **3.147** | Realisasi Anggaran Rincian Output Tahun 2025 | **347** |
| **3.148** | Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja dan Sasaran Kinerja BBPOM di Mataram Tahun 2025 | **350** |
| **3.149** | Tingkat Efisiensi | **360** |
| **3.150** | Nilai Efisiensi Masing-masing Sasaran Kegiatan BBPOM di Mataram Tahun 2025 | **360** |

*Halaman ini sengaja dikosongkan*



Inges Solah!

Informatif - Gesit - Solutif - Ramah

# BAB I
# PENDAHULUAN

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun laporan akuntabilitas kinerja. Laporan ini berfungsi sebagai instrumen evaluasi atas pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap keberhasilan serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

SAKIP merupakan suatu sistem pertanggungjawaban kinerja yang terintegrasi, meliputi perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Penguatan implementasi SAKIP juga ditegaskan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menekankan pentingnya pemantauan dan evaluasi secara komprehensif guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkinerja tinggi.

Sebagai bagian dari instansi pemerintah, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja. Laporan Kinerja BBPOM di Mataram Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis BBPOM di Mataram Tahun 2025–2029 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Laporan Kinerja disusun bukan hanya sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan sebagai mekanisme evaluasi atas efektivitas pengawasan obat dan makanan di wilayah NTB terhadap risiko-risiko strategisnya.

Pada periode 2025–2029, BBPOM di Mataram sebagai perpanjangan tangan pusat didaerah dalam mendukung Indikator Kinerja Utama Badan POM juga dihadapkan pada dua isu strategis utama yang dipengaruhi oleh dinamika eksternal, yaitu isu kesehatan dan pembangunan ekonomi. Dalam bidang kesehatan, tantangan yang dihadapi antara lain pengawasan mutu obat dan makanan untuk mendukung Sistem Kesehatan Nasional (SKN), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), pengendalian

Antimicrobial Resistance (AMR), persiapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta jaminan keamanan pangan di tengah dampak perubahan iklim global.

Sementara itu, dari aspek pembangunan ekonomi, sektor obat dan makanan merupakan komoditas strategis yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional di luar sektor migas. Tantangan yang turut dihadapi meliputi dinamika sosial dan ekonomi global, perubahan kondisi ekonomi domestik, liberalisasi perdagangan, serta pesatnya perkembangan teknologi. Menyikapi berbagai tantangan tersebut, BBPOM di Mataram mengedepankan transformasi paradigma pengawasan obat dan makanan yang mencakup pengawasan premarket, postmarket, hingga penindakan terhadap pelanggaran. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta penguatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan juga menjadi fokus utama. Selain itu, upaya pencegahan terus diintensifkan melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggung jawab atas produksi dan distribusi obat dan makanan. Partisipasi aktif masyarakat sebagai konsumen juga didorong guna meminimalkan risiko serta mengurangi ketergantungan pada pengawasan yang berbasis jumlah sumber daya manusia.

Sebagai penguatan kebijakan, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2024 menjadi landasan penting dalam pengawasan peredaran obat dan makanan secara daring, yang mencakup obat, bahan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Regulasi ini mempertegas peran BBPOM di Mataram dalam menjamin keamanan produk yang diperdagangkan melalui platform digital. Untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, BBPOM di Mataram berkomitmen memperkuat kapasitas pengawasan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir, mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatkan efektivitas penindakan agar memberikan efek jera. Keterlibatan aktif pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam menjamin keamanan dan mutu obat serta makanan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BBPOM di Mataram senantiasa mengintegrasikan prinsip Pengarusutamaan Gender (PUG). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengawasan Obat dan Makanan serta layanan publik yang diberikan dapat diakses secara adil oleh kelompok rentan, termasuk perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas di wilayah Nusa Tenggara Barat.

## 1.2. Gambaran Umum Organisasi

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 03 Tahun 2025 tentang

Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan ketentuan tersebut, UPT BPOM diklasifikasikan menjadi 23 (dua puluh tiga) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, 30 (tiga puluh) Balai Pengawas Obat dan Makanan, serta 23 (dua puluh tiga) Loka Pengawas Obat dan Makanan.

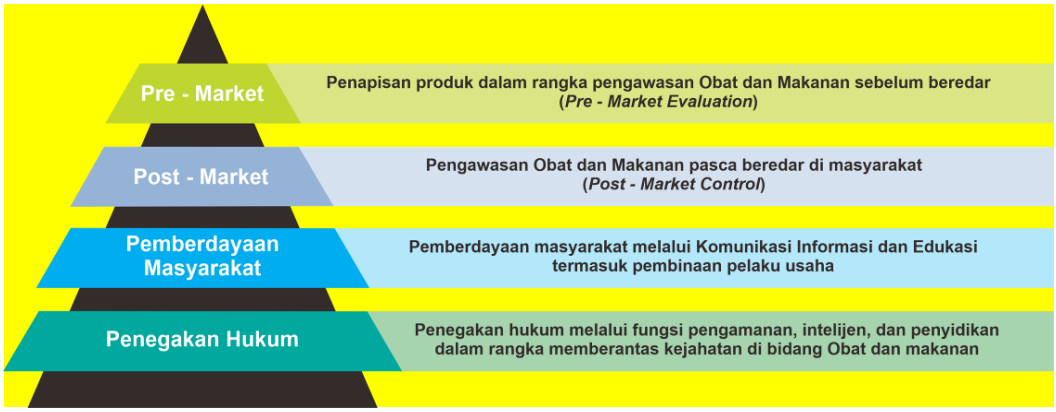
Kedudukan BBPOM di Mataram berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dipimpin oleh seorang Kepala yang Secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Mataram didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan sebagai landasan teknis, antara lain: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; serta sejumlah peraturan pemerintah, antara lain PP Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi, PP Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, PP Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor, PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, PP Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, PP Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, serta PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

Di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri atas 2 (dua) pulau besar dengan total 10 kabupaten/kota, tugas pengawasan Obat dan Makanan diampu oleh dua UPT BPOM dengan pembagian wilayah kerja sebagai berikut.

a. BBPOM di Mataram melaksanakan pengawasan di pulau Lombok dengan lima kabupaten/kota, yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Lombok Utara.
b. Balai POM di Bima bertanggung jawab atas pengawasan di pulau Sumbawa dengan lima kabupaten/kota lainnya, yakni Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Secara umum, BBPOM di Mataram memiliki empat kegiatan utama yang mencerminkan pelaksanaan fungsi pengawasan obat dan makanan, yaitu:




**Gambar 1.1** Empat Inti Kegiatan Fungsi BBPOM di Mataram

Sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, BBPOM di Mataram sebagai UPT Badan POM memiliki tugas dan fungsi:

**Tugas**

Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

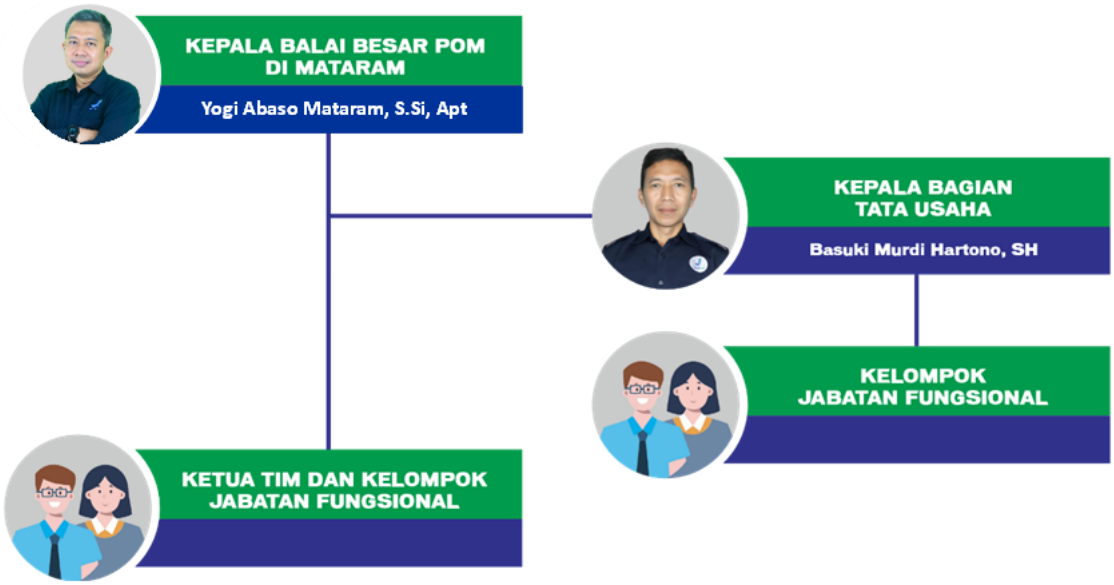
**Fungsi**

a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

## 1.3. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, struktur organisasi BBPOM di Mataram sebagai berikut:




**Gambar 1.2** Struktur Organisasi BBPOM di Mataram

## 1.4. Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja BBPOM di Mataram antara lain:

### MARAKNYA PENYALAHGUNAAN OBAT-OBAT TERTENTU (OOT)

Maraknya penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu (OOT) di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram merupakan isu strategis yang telah berkembang sejak tahun 2016 dan menimbulkan risiko operasional serta risiko sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, penyalahgunaan obat-obatan seperti PCC, Carnophen, Somadril, tramadol, trihexyphenidyl, dextromethorphan, dan OOT lainnya menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, khususnya peredaran gelap tramadol yang tidak hanya menyasar orang dewasa tetapi juga remaja. Kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas

generasi penerus, sehingga dapat menghambat kontribusi BBPOM di Mataram dalam mendukung pencapaian visi Badan POM untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sepanjang periode 2021 hingga 2025, tercatat sebanyak 65 kasus peredaran gelap tramadol, trihexyphenidyl, dextromethorphan, dan OOT lainnya yang ditangani BBPOM di Mataram. Hal ini menunjukkan masih tingginya permintaan dan pasokan terhadap sediaan farmasi ilegal.

Temuan produk ilegal tersebut mengindikasikan bahwa tingginya akses pembelian, khususnya melalui platform daring, menjadi faktor pendorong utama peredaran dan penyalahgunaan obat ilegal. Di sisi lain, hal ini juga mencerminkan komitmen berkelanjutan Badan POM bersama Kepolisian Republik Indonesia dalam memberantas peredaran obat dan makanan ilegal demi melindungi masyarakat dari risiko produk yang tidak aman. Ancaman serius terhadap kesehatan publik mendorong Presiden Republik Indonesia mencanangkan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat pada Oktober 2017, yang dilaksanakan secara serentak di seluruh provinsi, termasuk Provinsi NTB, melalui kerja sama lintas sektor dengan pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait. Aksi nasional tersebut mengedepankan strategi terpadu di bidang pencegahan, pengawasan, dan penindakan hukum guna memberikan efek jera.

Seiring perkembangan teknologi, tren dan modus kejahatan di bidang obat dan makanan semakin bergeser ke pemanfaatan media daring, sehingga menuntut adaptasi strategi pengawasan dan penegakan hukum. BBPOM di Mataram menyadari bahwa pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan obat ilegal tidak dapat dilakukan secara mandiri, mengingat cepat dan luasnya jaringan produksi serta distribusi ilegal. Oleh karena itu, penguatan koordinasi lintas sektor terus dilakukan, khususnya dalam kerangka *Criminal Justice System* (CJS), dengan melibatkan aparat penegak hukum, Bea dan Cukai, ASPERINDO, *Indonesian E-Commerce Association* (idEA), serta pemangku kepentingan lainnya. Penegakan hukum ini dilandasi oleh kesamaan persepsi bahwa tindak pidana di bidang obat dan makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang dapat merusak tatanan kehidupan dan berdampak besar terhadap masa depan generasi bangsa.

Dalam upaya menekan peredaran OOT, BBPOM di Mataram menerapkan strategi kolaboratif berbasis komunitas dengan menggandeng Bhabinkamtibmas, Babinsa, Bea Cukai, ASPERINDO, tokoh agama, Gerakan Pramuka, serta Tim Penggerak PKK sebagai agen cegah tangkal di tingkat akar rumput. Pendekatan ini memperluas jangkauan edukasi dan pengawasan hingga ke kelompok masyarakat rentan. Di samping penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku peredaran obat ilegal, BBPOM di Mataram juga memperkuat upaya komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), antara lain melalui kerja sama dengan PT Bintang Toedjoe dalam sosialisasi bahaya penyalahgunaan obat di lingkungan sekolah guna menanamkan kesadaran sejak dini.

Melalui sinergi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, BBPOM di Mataram berkomitmen menciptakan lingkungan yang lebih aman dari ancaman peredaran dan penyalahgunaan obat ilegal.

## RENDAHNYA KESADARAN PELAKU USAHA, SEHINGGA MASIH DITEMUKAN PRODUK OBAT DAN MAKANAN YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN

Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki potensi ekonomi yang besar, khususnya pada sektor pertanian, pariwisata, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Untuk menjamin keberlanjutan serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penguatan UMKM menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong industrialisasi daerah. UMKM berperan strategis dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan ketahanan ekonomi daerah. Oleh karena itu, UMKM yang berdaya saing dan berkelanjutan diharapkan mampu berkolaborasi dengan industri skala besar dan terintegrasi dalam rantai pasok (*supply chain*) sektor industri.

Seiring dengan meningkatnya jumlah UMKM di NTB dari tahun ke tahun, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, antara lain keterbatasan permodalan, perizinan, bahan baku, pemasaran, pengelolaan keuangan, serta inovasi produk. Di samping itu, rendahnya kesadaran sebagian pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan di bidang Obat dan Makanan masih menjadi isu strategis dan operasional. Hal ini tercermin dari hasil pemeriksaan sarana produksi pangan pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa sebanyak 20,37% sarana UMKM masih Tidak Memenuhi Ketentuan. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh kurangnya komitmen pelaku usaha dalam penjaminan mutu dan keamanan pangan, keterbatasan pengetahuan dan kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta lemahnya kelembagaan pengawasan mutu dan keamanan pangan.

Kondisi tersebut menimbulkan risiko strategis dan operasional, antara lain meningkatnya risiko masyarakat terpapar produk Obat dan Makanan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga berpotensi membahayakan kesehatan, serta adanya potensi intimidasi atau ancaman dari pelaku pelanggaran terhadap petugas pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan langkah pengendalian yang terintegrasi dan berkelanjutan guna meminimalkan risiko tersebut.

Sebagai bagian dari upaya pengendalian, Balai Besar POM di Mataram menerapkan penguatan kolaborasi melalui pendekatan 5 Pilar Pengawasan, yaitu Pemerintah, Pelaku Usaha, Masyarakat, Akademisi, dan Media. Selain itu, peningkatan pendampingan kepada pelaku usaha melalui kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan keamanan dan mutu produk. Penguatan Criminal Justice System

(CJS) juga menjadi bagian penting dalam memastikan penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

## PESATNYA PERTUMBUHAN UMKM

Pesatnya pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan isu eksternal strategis yang memberikan dampak signifikan terhadap kinerja organisasi. Perkembangan UMKM mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat serta tingginya kebutuhan terhadap layanan perizinan dan pengawasan. Di sisi lain, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai risiko, antara lain risiko strategi, risiko reputasi, dan risiko *fraud*, khususnya terkait praktik pemberian gratifikasi kepada petugas dalam proses perolehan izin edar.

Meningkatnya jumlah pelaku UMKM yang mengajukan perizinan dapat membuka celah terjadinya penyimpangan apabila tidak diimbangi dengan sistem layanan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Praktik gratifikasi tidak hanya berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi serta mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagai upaya mitigasi risiko, organisasi telah dan terus melakukan penguatan pengendalian internal melalui digitalisasi layanan publik guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses perizinan. Selain itu, penyediaan layanan *Whistleblowing System* (WBS) menjadi sarana pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran secara aman dan bertanggung jawab. Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan berbasis ISO 37001:2016, serta penyusunan dan sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP), menjadi langkah strategis dalam membangun budaya kerja yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi.

Di samping risiko yang ada, pertumbuhan UMKM juga menghadirkan peluang positif bagi organisasi dan masyarakat. Peningkatan aktivitas UMKM berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat serta berpotensi meningkatkan nilai Indeks Persepsi Pelayanan (IPP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Dengan pengelolaan risiko yang tepat dan penguatan tata kelola, isu eksternal ini dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas layanan publik, kepercayaan masyarakat, dan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Sejalan dengan program strategis industrialisasi Pemerintah Daerah Provinsi NTB yang bertumpu pada pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal, BBPOM di Mataram turut berperan aktif dalam mendukung peningkatan daya saing UMKM. Sinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait diwujudkan melalui pembinaan dan pendampingan UMKM agar mampu memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk. Dukungan BPOM

kepada UMKM dilakukan melalui berbagai upaya percepatan, penyederhanaan perizinan, serta pendampingan yang berkelanjutan.

Pada tahun 2025, BBPOM di Mataram melalui inovasi Gemilang Pro UMKM telah melaksanakan pendampingan kepada pelaku UMKM dan berhasil menerbitkan sebanyak 256 sertifikat, izin penerapan, dan rekomendasi. Inovasi ini tidak hanya menjadi sarana peningkatan kepatuhan pelaku usaha, tetapi juga membuka peluang strategis dalam meningkatkan nilai Indeks Pengawasan Pangan (IPP) dan Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPAK). Dengan demikian, upaya penguatan UMKM yang selaras dengan pengawasan Obat dan Makanan diharapkan dapat mendukung transformasi ekonomi NTB yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berorientasi pada perlindungan kesehatan masyarakat.

### KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) MANDALIKA DAN SEMAKIN BANYAKNYA EVENT *SPORT TOURISM* BERSKALA INTERNASIONAL DI NTB

Keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika serta meningkatnya penyelenggaraan kegiatan *sport tourism* berskala internasional di Nusa Tenggara Barat merupakan isu eksternal strategis yang berdampak signifikan terhadap meningkatnya aktivitas usaha, arus wisatawan, serta peredaran produk obat dan makanan di wilayah NTB. Dinamika ini menuntut penguatan peran pengawasan guna memastikan perlindungan kesehatan masyarakat dan menjaga kepercayaan publik terhadap kualitas produk yang beredar.

Dalam konteks tersebut, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan peredaran obat dan makanan, khususnya dalam mengantisipasi beredarnya produk ilegal dan tidak memenuhi ketentuan yang berisiko terhadap kesehatan. Peningkatan aktivitas ekonomi dan penyelenggaraan event internasional berpotensi meningkatkan risiko strategi dan risiko operasional apabila tidak diimbangi dengan pengawasan yang efektif, responsif, dan berbasis risiko.

Sebagai upaya mitigasi, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram melaksanakan pendampingan serta peningkatan daya saing UMKM NTB melalui program Inovasi Gemilang Pro UMKM. Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi, standar keamanan, mutu produk, serta kepatuhan dalam peredaran obat dan makanan. Pendekatan pembinaan yang terintegrasi dengan pengawasan ini bertujuan menciptakan ekosistem usaha yang sehat, aman, dan berdaya saing, sejalan dengan penguatan tata kelola pelayanan publik.

Di sisi lain, pengembangan KEK Mandalika dan maraknya *event sport tourism* internasional membuka peluang strategis berupa meningkatnya investasi di NTB, pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta peningkatan citra daerah sebagai destinasi wisata dan investasi yang aman dan terpercaya. Peran aktif Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dalam menjaga keamanan produk dan kualitas pelayanan turut mendukung percepatan pencapaian predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dengan pengelolaan risiko yang terukur dan sinergi lintas sektor, isu eksternal ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

**PERUBAHAN IKLIM (*CLIMATE CHANGE*)**

Perubahan iklim merupakan isu global yang menjadi ancaman serius bagi kelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan manusia, termasuk di Indonesia. Fenomena ini dipicu oleh berbagai faktor, antara lain peningkatan emisi gas rumah kaca serta aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan. Dampak perubahan iklim dirasakan di berbagai sektor, seperti pertanian, ketahanan pangan, dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah komprehensif yang mencakup upaya pengendalian, mitigasi, serta adaptasi guna mencegah dampak yang lebih parah.

Balai Besar POM (BBPOM) di Mataram turut berperan aktif dalam mendukung BPOM *Net Zero Carbon Programme* melalui berbagai upaya ramah lingkungan, seperti penggunaan lampu sensor gerak hemat energi, penghijauan di area perkantoran, pengolahan kompos, serta pemilahan sampah organik dan anorganik. Langkah-langkah tersebut merupakan bentuk efisiensi energi dan pengurangan emisi karbon dalam operasional kantor, sejalan dengan prinsip keberlanjutan yang diusung BPOM. Selain itu, Laboratorium BBPOM di Mataram juga telah memperoleh predikat *Green Laboratory* berdasarkan penilaian dari P3OMN.

BPOM juga secara berkelanjutan mendorong industri pangan untuk melakukan pemilahan limbah organik dan anorganik serta menggunakan kemasan pangan ramah lingkungan yang mudah terurai, dapat didaur ulang, dan aman bagi lingkungan serta kesehatan manusia. Upaya ini penting dalam rangka mengurangi limbah plastik yang berpotensi mencemari ekosistem darat maupun laut.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan obat dan makanan, BPOM mendorong penerapan prinsip *Triple Bottom Line* (TBL) yang mencakup aspek sosial (*people*), lingkungan (*planet*), dan ekonomi (*profit*) secara berkelanjutan. Komitmen BPOM terhadap pelestarian lingkungan diwujudkan melalui berbagai inisiatif yang mendukung keberlanjutan

lingkungan, termasuk pemberian apresiasi kepada industri yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Dengan berbagai langkah tersebut, BBPOM di Mataram berkomitmen untuk mendukung mitigasi perubahan iklim sekaligus menjaga kesehatan dan keamanan masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan yang berwawasan lingkungan.

## REVOLUSI INDUSTRI 5.0 YANG MERUBAH POLA BUDAYA MASYARAKAT

Perkembangan teknologi digital dalam era Revolusi Industri 5.0 telah membawa perubahan signifikan terhadap pola konsumsi masyarakat, termasuk dalam peredaran Obat dan Makanan melalui platform daring. Di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram, kondisi ini menimbulkan risiko strategis dan operasional berupa maraknya peredaran produk Obat dan Makanan ilegal, palsu, dan tanpa izin edar yang diperdagangkan secara online. Peredaran produk ilegal tersebut berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat serta menurunkan tingkat perlindungan konsumen di daerah.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM di daerah, BBPOM di Mataram memiliki peran strategis dalam memastikan pengawasan Obat dan Makanan tetap efektif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Model perdagangan digital yang memanfaatkan sistem *user generated content* (UGC) memperluas ruang distribusi produk Obat dan Makanan, sehingga menuntut BBPOM di Mataram untuk memperkuat strategi pengawasan berbasis digital guna menjawab tantangan Revolusi Industri 5.0.

Dalam rangka pengendalian risiko tersebut, BBPOM di Mataram mengembangkan pengawasan berbasis teknologi informasi melalui pelaksanaan patroli siber untuk memantau dan menindak peredaran Obat dan Makanan ilegal di ruang digital, khususnya yang menjangkau masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Barat. Selain itu, BBPOM di Mataram juga melaksanakan inovasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) berbasis digital dengan memanfaatkan media sosial dan platform daring sebagai sarana peningkatan literasi masyarakat terkait keamanan, mutu, dan legalitas produk Obat dan Makanan.

Pengendalian risiko juga diperkuat melalui peningkatan kerja sama dengan perusahaan jasa pengiriman di wilayah kerja BBPOM di Mataram, sebagai upaya memutus mata rantai distribusi produk Obat dan Makanan ilegal. Kolaborasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa proses pengiriman produk Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan dan tidak membahayakan konsumen.

Di sisi lain, upaya pengawasan Obat dan Makanan berbasis digital yang dilaksanakan oleh BBPOM di Mataram membuka peluang strategis, antara lain mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang sehat dan berkelanjutan, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui perlindungan dari risiko produk Obat dan Makanan ilegal. Dengan pengawasan yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis teknologi, BBPOM di Mataram berkomitmen untuk mewujudkan perlindungan masyarakat yang optimal di tengah dinamika Revolusi Industri 5.0.

## PROGRAM PRIORITAS MAKAN BERGIZI GRATIS

Program Prioritas Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan status gizi dan kesehatan masyarakat, khususnya kelompok sasaran. Dalam pelaksanaannya, aspek keamanan pangan menjadi faktor krusial yang harus dijamin agar program berjalan efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keterlibatan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan program tersebut.

Dalam perspektif manajemen risiko, Program Makan Bergizi Gratis memiliki risiko reputasi, yaitu potensi terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) atau keracunan pangan yang dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap program dan pemerintah. Risiko ini dapat muncul apabila penerapan higiene dan sanitasi pangan, pengolahan makanan, serta distribusi tidak memenuhi standar keamanan pangan.

Sebagai upaya pengendalian risiko, BBPOM di Mataram melakukan koordinasi dan sinergi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) serta pemangku kepentingan terkait dalam rangka pengawasan keamanan pangan pada seluruh tahapan pelaksanaan program. Selain itu, BBPOM di Mataram secara aktif melaksanakan sosialisasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) keamanan pangan kepada pengelola dapur, penyedia pangan, serta pihak terkait lainnya untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap prinsip higiene dan sanitasi pangan.

Di sisi lain, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis juga membuka peluang strategis berupa meningkatnya dukungan dan keterlibatan stakeholder dalam kegiatan pengawasan serta KIE keamanan pangan. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan pangan, mencegah terjadinya KLB atau keracunan pangan, serta menjaga reputasi dan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis. Dengan peran aktif BBPOM di Mataram, program ini diharapkan dapat berjalan aman, bermutu, dan memberikan manfaat optimal bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

## PENYERAHAN ANTIBIOTIK TANPA RESEP DOKTER MASIH TINGGI YANG BERDAMPAK ANTIMICROBIAL RESISTANCE (AMR)

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram memiliki peran strategis dalam memastikan keamanan, mutu, dan khasiat obat yang beredar di masyarakat. Salah satu isu krusial yang dihadapi saat ini adalah masih tingginya praktik penyerahan antibiotik tanpa resep dokter, yang berdampak pada meningkatnya risiko Antimicrobial Resistance (AMR). Kondisi ini merupakan risiko kinerja yang serius karena berpotensi menurunkan efektivitas pengobatan dan mengancam kesehatan masyarakat secara luas.

Penyerahan antibiotik tanpa resep dokter berisiko menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain meningkatnya angka kematian akibat infeksi yang semakin sulit diobati, meningkatnya biaya kesehatan karena kebutuhan perawatan yang lebih lama dan lebih mahal, serta memberikan tekanan terhadap sistem kesehatan secara keseluruhan. Apabila tidak dikendalikan secara optimal, kondisi ini dapat menghambat upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan keberlanjutan sistem kesehatan di daerah.

Fenomena tingginya penggunaan antibiotik tanpa resep dokter disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai penggunaan antibiotik yang tepat dan rasional, di mana antibiotik sering dianggap sebagai obat yang dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Kedua, kemudahan akses terhadap antibiotik, baik melalui apotek, toko obat, maupun penjualan secara daring melalui berbagai platform e-commerce, yang tidak sepenuhnya diimbangi dengan pengawasan yang memadai. Ketiga, rendahnya kepatuhan sarana sebagai hambatan utama pencapaian kinerja dan budaya melakukan swamedikasi khususnya penggunaan antibiotik. Selain itu, pengendalian AMR belum sepenuhnya dilaksanakan secara terintegrasi antara pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, tenaga kesehatan, pelaku usaha, dan masyarakat, sehingga upaya pengendalian belum berjalan secara komprehensif.

Dalam rangka pengendalian risiko tersebut, BBPOM di Mataram terus memperkuat strategi pengendalian AMR melalui pendekatan kolaboratif dan penegakan regulasi. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah penggalangan komitmen bersama para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta organisasi profesi kesehatan, seperti Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), dan GP Farmasi. Forum ini bertujuan untuk menyusun langkah-langkah konkret dalam mendorong penggunaan antibiotik yang rasional dan bertanggung jawab.

Selain itu, BBPOM di Mataram melakukan penguatan kebijakan melalui penerbitan Surat Edaran kepada sarana kefarmasian yang menegaskan larangan penyerahan antibiotik tanpa resep dokter. Pengawasan dan penindakan juga diperketat dengan pemberian sanksi tegas kepada apotek, klinik, rumah sakit, dan puskesmas yang terbukti melanggar ketentuan. Sebagai upaya penguatan di tingkat daerah, BBPOM di Mataram turut menginisiasi penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah/Gubernur guna memperkuat komitmen dan kepatuhan seluruh pemangku kepentingan dalam pengendalian AMR.

Di sisi lain, BBPOM di Mataram juga memperkuat upaya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat melalui berbagai kanal media untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya AMR dan pentingnya penggunaan antibiotik yang tepat. Melalui sinergi lintas sektor dan pengendalian yang berkelanjutan, upaya ini membuka peluang strategis berupa peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, terjaganya efektivitas pengobatan di masa depan, serta penguatan sistem kesehatan yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

### MASIH TINGGINYA PENYALAHGUNAAN BAHAN BERBAHAYA BORAKS DALAM KERUPUK DAN MI BASAH

Masih tingginya penyalahgunaan bahan berbahaya berupa boraks dalam produk pangan, khususnya kerupuk dan mi basah, merupakan isu eksternal yang berdampak langsung terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan. Kondisi ini menimbulkan risiko kinerja bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram, seiring dengan meningkatnya tuntutan efektivitas pengawasan, penindakan, serta perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana tercermin dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Penyalahgunaan boraks dalam pangan berimplikasi pada meningkatnya risiko kesehatan masyarakat, potensi rusaknya citra dan reputasi institusi pengawas, serta bertambahnya beban biaya pengobatan akibat dampak kesehatan yang ditimbulkan. Hal ini secara langsung memengaruhi capaian IKU BBPOM di Mataram, khususnya indikator yang berkaitan dengan persentase pemenuhan standar keamanan pangan, efektivitas pengawasan sarana produksi dan distribusi pangan, serta tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mitigasi risiko dan mendukung pencapaian IKU, BBPOM di Mataram melaksanakan berbagai langkah pengendalian secara terintegrasi. Upaya tersebut meliputi pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya penggunaan boraks dalam pangan, serta advokasi lintas sektor guna memperkuat sinergi pengawasan dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Selain itu, intensifikasi pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi pangan dilakukan secara berbasis risiko, disertai dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku peredaran pangan mengandung boraks, sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kepatuhan dan efek jera.

Di sisi lain, pengendalian isu ini juga membuka peluang strategis bagi BBPOM di Mataram dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pengawasan. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha diharapkan dapat berkontribusi pada perbaikan capaian IKU secara berkelanjutan, sekaligus mendorong penguatan regulasi dan pengendalian pada rantai pasok bahan berbahaya pangan. Dengan demikian, penanganan isu eksternal ini tidak hanya berorientasi pada penurunan risiko, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam peningkatan kinerja organisasi dan perlindungan kesehatan masyarakat.

## 1.5. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

### INTERNAL

**1. Anggaran**

Anggaran kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi NTB sesuai DIPA awal tahun 2025 sebesar Rp.20.815.994.000,-. Telah dilakukan revisi DIPA dengan DIPA akhir sebesar Rp. 20.670.330.000,00 bersumber dari APBN sesuai DIPA Tahun 2025 SP DIPA-063.01.2.432960/2025

**2. Sumber Daya Manusia**

**Tabel 1.1.** Kebutuhan SDM BBPOM di Mataram Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) Tahun 2025

| No. | Jabatan Fungsional/Struktural | Existing | ABK 2025 | GAP |
|---|---|---|---|---|
| **1** | Jabatan Struktural | 2 | 2 | 0 |
| **2** | Jabatan Fungsional Ketata Usahaan | 16 | 30 | 14 |
| **3** | Jabatan Fungsional PFM | 59 | 70 | 11 |
| | **Total** | **77** | **102** | **25** |



Per Desember 2025, BBPOM di Mataram memiliki sumber daya manusia (SDM) sebanyak 77 orang yang bertugas melaksanakan fungsi pengawasan Obat dan Makanan. Komposisi SDM tersebut terdiri atas 62,34% perempuan dan 37,67% laki-laki, dengan status kepegawaian meliputi 64 orang Pegawai Negeri

Sipil (PNS) dan 13 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jumlah SDM yang tersedia saat ini baru memenuhi 75,49% dari kebutuhan ideal, sehingga belum sepenuhnya mampu mendukung pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara optimal.

Berdasarkan hasil analisis beban kerja, untuk memperkuat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, BBPOM di Mataram membutuhkan total 102 orang SDM, sehingga masih diperlukan penambahan sebanyak 25 orang. Selain pemenuhan jumlah, aspek kompetensi SDM juga memegang peranan penting dalam mendukung kinerja pengawasan. Saat ini, mayoritas pegawai BBPOM di Mataram memiliki latar belakang pendidikan Sarjana (S1) dan profesi Apoteker. Sebagai organisasi yang berbasis ilmu pengetahuan (*scientific-based organization*), diperlukan peningkatan proporsi SDM dengan kualifikasi pendidikan Magister (S2) dan Doktor (S3).

Seiring dengan dinamika lingkungan strategis dan meningkatnya kompleksitas tantangan pengawasan, BBPOM di Mataram perlu terus melakukan pengembangan kompetensi SDM serta perencanaan kebutuhan SDM secara proaktif. Peningkatan kompetensi tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas pengawasan dalam menghadapi perkembangan serta semakin beragamnya modus pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

**3. Sarana Prasarana**

BBPOM di Mataram menempati gedung kantor dengan luas bangunan 3.514 m² yang berdiri di atas lahan seluas 3.922 m², serta didukung oleh fasilitas laboratorium dan peralatan yang memadai sesuai dengan standar Laboratorium Badan POM. Fasilitas laboratorium yang dimiliki meliputi laboratorium pengujian kimia dan laboratorium pengujian mikrobiologi yang telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2017.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi, BBPOM di Mataram juga telah menerapkan sistem manajemen mutu yang mengacu pada standar ISO 9001:2015, dan telah memperoleh sertifikasi untuk seluruh proses bisnis yang dijalankan. Selain itu, BBPOM di Mataram memiliki rumah dinas dengan luas bangunan 200 m² yang berdiri di atas lahan seluas 250 m².




Sebagai bentuk komitmen dalam menjamin kesehatan dan keselamatan kerja pegawai, BBPOM di Mataram telah tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) ISO 45001:2018 sejak tahun 2022. Selanjutnya, dalam mendukung penerapan integritas dan pencegahan praktik penyuapan, Balai Besar POM di Mataram juga telah memperoleh sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada 28 Desember 2023 dari PT Sucofindo International Certification Services.

**4. Sarana Komunikasi**

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, BBPOM di Mataram menyediakan berbagai kanal komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat, antara lain melalui telepon, surat elektronik (e-mail), dan media sosial. Penyediaan kanal tersebut bertujuan untuk memastikan setiap pengaduan maupun permintaan informasi dari masyarakat dapat ditindaklanjuti secara cepat, transparan, dan akuntabel.

Sebagai bentuk inovasi sarana komunikasi pelayanan, BBPOM di Mataram menghadirkan aplikasi Berugak Virtual, yaitu ruang layanan berbasis digital yang memungkinkan masyarakat berinteraksi secara langsung dengan petugas. Melalui platform ini, masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan, pengaduan, maupun permintaan informasi terkait Obat dan Makanan dalam suasana yang terbuka, komunikatif, dan humanis. Kehadiran inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas komunikasi serta mendorong peningkatan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan BBPOM di Mataram.






**5. Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengujian BBPOM di Mataram**

Sebagai tulang punggung sistem pengawasan yang diselenggarakan oleh BPOM, laboratorium pengujian memiliki peran yang sangat strategis, khususnya dalam mendeteksi, memverifikasi, dan memvalidasi mutu serta keamanan produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat. Ketersediaan hasil pengujian yang cepat dan andal menjadi krusial agar terhadap produk yang tidak memenuhi ketentuan dapat segera dilakukan penarikan, pemusnahan, atau tindakan pengawasan lanjutan, sehingga masyarakat terlindungi dari produk yang tidak memenuhi syarat maupun produk palsu.



Untuk mendukung peran strategis tersebut, diperlukan penguatan kapasitas laboratorium secara berkelanjutan, meliputi pemenuhan standar peralatan laboratorium yang andal dan efisien, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta perluasan Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian. Dalam menjawab tuntutan tersebut, BBPOM di Mataram telah didukung oleh instrumen pengujian berteknologi tinggi, antara lain LC-MS/MS, GC-MS, ICP-MS, dan PCR, yang memungkinkan pelaksanaan pengujian secara lebih komprehensif dan presisi. Namun demikian, pengoperasian dan pemeliharaan instrumen berteknologi canggih tersebut memerlukan biaya operasional yang relatif tinggi serta tenaga penguji dengan kompetensi khusus.

Adapun keunggulan laboratorium BBPOM di Mataram, antara lain:

- Memiliki tingkat pemenuhan standar Laboratorium sesuai Good Laboratory Practice (GLP) dengan nilai tertinggi dibandingkan BB/BPOM lainnya;
- Berperan sebagai laboratorium rujukan utama di Provinsi NTB dalam pengujian sampel barang bukti narkotika dan psikotropika;
- Memiliki laboratorium spesifik pengujian komoditas pangan, khususnya untuk parameter Okratoksin dan residu pestisida.

**EKSTERNAL**

1. **Kondisi Geografis dan Demografis**

Secara geografis, Provinsi NTB terletak antara 115°46' - 119°5' Bujur Timur dan 8°10' - 9°5' Lintang Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa dan Laut Flores
- Sebelah Selatan : Samudra Hindia
- Sebelah Barat : Selat Lombok dan Provinsi Bali
- Sebelah Timur : Selat Sape dan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Provinsi NTB terdiri atas 2 pulau besar yaitu Lombok dan Sumbawa dan dikelilingi oleh 280 pulau-pulau kecil. Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 49.312,19 Km2 terdiri dari daratan seluas 20.153,15 Km2 (40,87%) dan perairan laut seluas 29.159,04 Km2 (59,13%) dengan panjang garis pantai 2.333 km. Luas Pulau Sumbawa mencapai 15.414,5 km2 (76,49 %) dan luas Pulau Lombok seluas 4.738,70 Km2 (23,51%).




**Gambar 1.3** Peta Wilayah Kerja UPT BPOM di Provinsi NTB

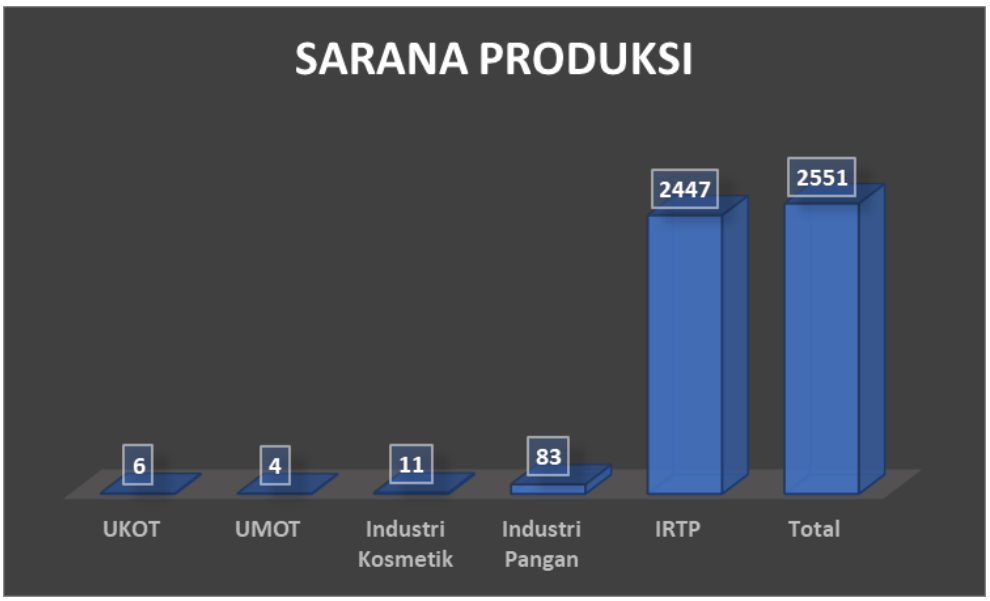
Sesuai dengan data Statistik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Volume 15 tahun 2025 jumlah penduduk NTB sebanyak 5,64 juta jiwa, dengan perbandingan 50,11% jenis kelamin laki-laki dan 49,89% jenis kelamin perempuan.

2. **Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi**

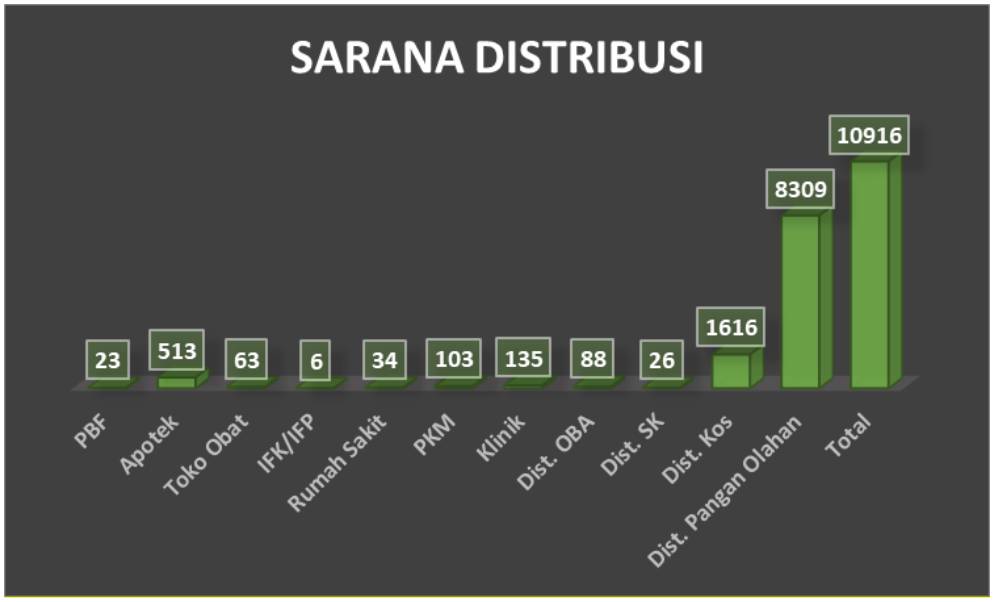
Sarana produksi Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah kerja BBPOM di Mataram meliputi industri kosmetik, usaha kecil obat tradisional (UKOT), usaha mikro obat tradisional

(UMOT), industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Instalasi Farmasi Pemerintah, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan.

Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah kerja BBPOM di Mataram sebagaimana pada gambar 1.4 dan gambar 1.5.




**Gambar 1.4** Grafik Sarana Produksi di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram Tahun 2025




**Gambar 1.5** Grafik Sarana Distribusi di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram Tahun 2025

Total terdapat 2551 sarana produksi dan 10916 sarana distribusi di wilayah Kerja BBPOM di Mataram. Sebaran sarana masih terkonsentrasi di Kota Mataram. Dalam pelaksanaan pengawasan, BBPOM di Mataram hanya menggunakan sarana transportasi darat.

*Halaman ini sengaja dikosongkan*



Inges Solah!

Informatif - Gesit - Solutif - Ramah

# BAB II
# PERENCANAAN KINERJA

# BAB II PERENCANAAN KINERJA

## 2.1. Uraian Singkat Renstra

Sebagai pedoman pelaksanaan pencapaian indikator program kerja, BBPOM di Mataram telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029. Rencana Strategis 2025-2029 memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan serta program dan kegiatan yang mengacu kepada Renstra BPOM Tahun 2025-2029 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025.

Dalam menentukan indikator program dan kegiatan, BBPOM di Mataram telah mempertimbangkan permasalahan internal dan eksternal, potensi, peluang serta kendala yang ada di wilayah kerja BBPOM di Mataram yang mungkin akan terjadi dalam kurun waktu tersebut.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM, maka visi dan misi serta tujuan strategis di BBPOM di Mataram sejalan dengan visi dan misi serta tujuan strategis BPOM.

### VISI

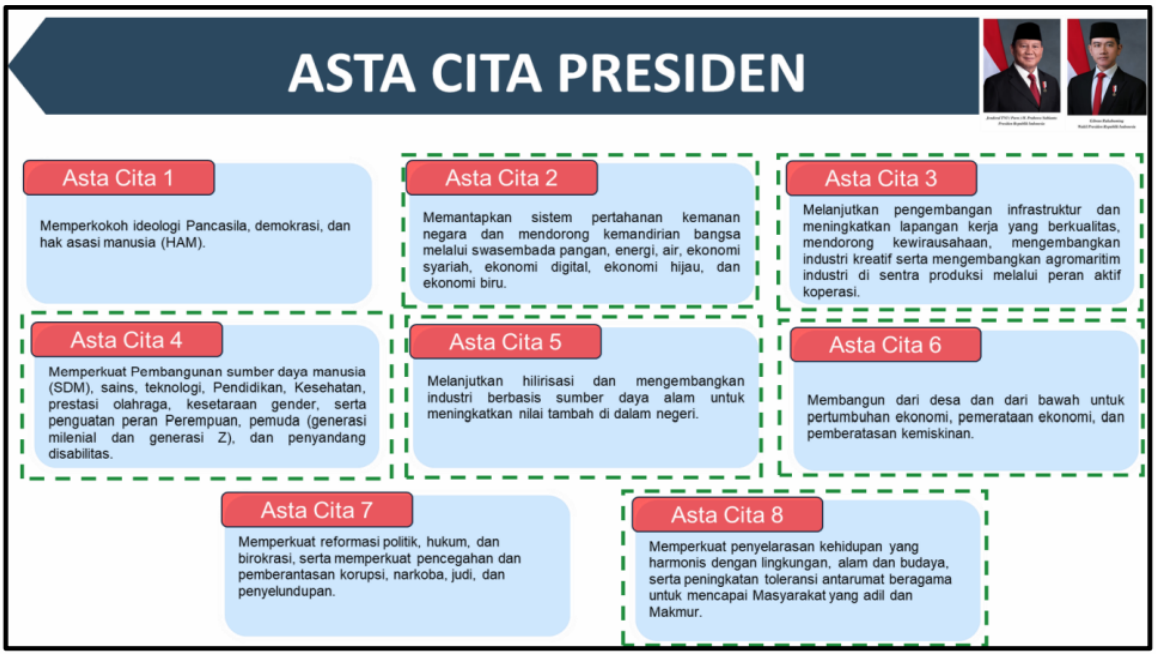
Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025- 2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

> ***"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045."***

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

## MISI

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:




**Gambar 2.1** Misi Presiden (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada **Asta Cita 4 yaitu "Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas"**, namun demikian BPOM juga mendukung pada **Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3 dan 5** sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.**

   Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih

efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. **Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.**

   BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. **Meningkatkan kapasitas masyarakat dibidang sediaan farmasi dan pangan olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.**

   Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan**

   Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

## TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BBPOM di Mataram sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM yang berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan obat dan makanan di daerah serta tugas terkait dengan penguatan

manajemen internal yang perlu dilaksanakan dalam upaya mendukung Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM.

Berikut adalah tujuan yang ditetapkan untuk periode 2025 – 2029 mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1) **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram**. Tujuan ini menegaskan komitmen BBPOM di Mataram dalam memastikan bahwa semua produk Obat dan Makanan yang beredar di pasaran di Provinsi Nusa Tenggara Barat memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2) **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram**. Melalui tujuan ini, BBPOM di Mataram bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi Obat dan Makanan.
3) **Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan aman serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM**. Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor Obat dan Makanan. BBPOM di Mataram berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4) **Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**. Tujuan ini menekankan peran BBPOM di Mataram dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan Obat dan Makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5) **Terwujudnya organisasi yang profesional, adaptif, efektif dan efisien serta layanan publik yang prima**. Melalui tujuan ini, BBPOM di Mataram berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BBPOM di Mataram dalam memberikan layanan publik yang prima.

## SASARAN KEGIATAN

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh BBPOM di Mataram, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global, telah dirumuskan sejumlah sasaran kegiatan untuk periode 2025 – 2029. Sasaran kegiatan ini disusun untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan BBPOM di Mataram, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di Bidang Obat dan Makanan.

Berikut adalah sasaran kegiatan BBPOM di Mataram 2025 - 2029 yang mencakup berbagai aspek kunci dari pengawasan hingga edukasi publik, dalam upaya mencapai keamanan, kualitas, dan kemandirian di sektor Obat dan Makanan:

1. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja BBPOM Mataram
2. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi
3. Meningkatnya Efektivitas KIE di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram
4. Meningkatnya Pendampingan UMKM Dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu
5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram
6. Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram
7. Layanan Publik BBPOM Mataram yang Prima
8. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan terdapat total 28 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) di Tahun 2025.

Penyusunan rencana kinerja BBPOM di Mataram tahun 2025 tidak sekadar pemenuhan target administratif, melainkan merupakan manifestasi nyata dukungan terhadap **Transformasi Sosial** dalam mewujudkan visi **Indonesia Emas 2045**. Kontribusi ini dijabarkan melalui keterkaitan output IKSK terhadap pilar-pilar pembangunan nasional sebagai berikut:

1. **Penguatan Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkualitas** Melalui IKU yang berfokus pada *Indeks Kesadaran Masyarakat* dan *Persentase Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang Memenuhi Syarat*, BBPOM di Mataram berkontribusi langsung pada upaya penurunan angka *stunting* dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Keamanan pangan yang terjamin merupakan pondasi utama dalam mencetak generasi emas yang sehat, cerdas, dan produktif.

2. **Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Kemandirian Bangsa** Output IKSK terkait *Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi* dan *Efektivitas Pendampingan Sertifikasi* bertujuan untuk mendorong hilirisasi komoditas lokal Obat dan Makanan di wilayah NTB. Dengan memfasilitasi UMKM lokal agar naik kelas dan menembus pasar global, BBPOM di Mataram berperan dalam memperkuat struktur ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
3. **Transformasi Tata Kelola dan Perlindungan Masyarakat** IKSK yang mengukur *Indeks Pengawasan Obat dan Makanan* serta *Efektivitas Penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan* memastikan adanya kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Hal ini selaras dengan arah kebijakan Indonesia Emas 2045 dalam membangun institusi yang kuat, transparan, dan akuntabel, guna menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan aman bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan sinergi antara pengawasan yang ketat dan pendampingan yang humanis, BBPOM di Mataram memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikelola memberikan dampak *multiplier* (efek berganda) bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di Nusa Tenggara Barat, menuju peradaban Indonesia yang maju dan berdaulat pada tahun 2045.

## 2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Sebagai dasar penyusunan Anggaran Tahun Anggaran 2025 disusunlah Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2025 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala BBPOM di Mataram Nomor HK.02.02.14A.09.24.191 tanggal 20 September 2024 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Tahun 2025. Fungsi RKT ini antara lain untuk mewujudkan keselarasan antara RENSTRA 2025-2029 dengan anggaran yang disusun untuk Tahun Anggaran 2025.

**Tabel 2.1** Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BBPOM di Mataram Tahun 2025

| NO | SASARAN | INDIKATOR | TARGET |
|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar* | 100 |
| | | Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM* | 26 |
| | | Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar* | 100 |

| NO | SASARAN | INDIKATOR | TARGET |
|---|---|---|---|
| | | Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar* | 100 |
| | | Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar* | 100 |
| 2 | Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor | Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu | 100 |
| 3 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan* | 100 |
| | | Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan* | 100 |
| | | Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan* | 100 |
| | | Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan* | 100 |
| | | Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan* | 100 |
| 4 | Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi | Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan* | 100 |
| 5 | Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 81,7 |
| 6 | Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 97,90 |

| NO | SASARAN | INDIKATOR | TARGET |
|---|---|---|---|
| | | Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman | 13 |
| | | Jumlah desa pangan aman | 4 |
| | | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | 1 |
| 7 | Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan | 94 |
| 8 | Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | 100 |
| 9 | Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif | Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT* | 14 |
| 10 | Layanan Publik UPT yang prima | Indeks Pelayanan Publik UPT | 4,7 |
| 11 | Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal | Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM | 88,10 |
| | | Nilai AKIP UPT BPOM | 83,9 |
| | | Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM | 89 |
| | | Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM* | 3,2 |

*Catatan: Penetapan target indikator kinerja baru dihitung berdasarkan proyeksi kemampuan pengawasan dan ketersediaan sumber daya disebabkan karena belum memiliki baseline data sebelumnya

### 2.3. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel yang berorientasi hasil, Kepala BBPOM di Mataram menandatangani Perjanjian Kinerja tahun 2025. Dokumen perjanjian kinerja tahun 2025 dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kinerja BBPOM di Mataram tahun 2025 yang mengacu kepada rencana strategis BBPOM di Mataram tahun 2025-2029.

Perjanjian Kinerja BBPOM di Mataram Tahun 2025 memuat penugasan pencapaian target kinerja pada tahun berjalan dari Kepala BPOM RI kepada Kepala BBPOM di Mataram, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.2** Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Awal)

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 86.5 |
| | | 2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO | 26 |
| | | 3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 85 |
| | | 4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar | 100 |
| | | 5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 85 |
| | | 6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 98.8 |
| | | 7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 91 |
| | | 8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 85 |
| | | 9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 96 |
| | | 10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 75 |
| | | 11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | 84.2 |
| 2. | Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi | 1. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 63 |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| 3. | Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 1. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 81.7 |
| 4. | Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT | 1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 88.57 |
| | | 2. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | 13 |
| | | 3. Jumlah desa pangan aman | 4 |
| | | 4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | 1 |
| 5. | Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu | 1. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | 87.3 |
| 6. | Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | 1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | 92 |
| 7. | Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | 1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | 90 |
| 8. | Layanan Publik UPT yang prima | 1. Indeks Pelayanan Publik UPT | 4.7 |
| 9. | Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | 1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM | 90 |
| | | 2. Nilai AKIP UPT BPOM | 83.9 |
| | | 3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM | 5 |
| | | 4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | 3.05 |

Pada tahun 2025 BBPOM di Mataram memperoleh anggaran sesuai DIPA awal sebesar Rp.20.815.994.000, bersumber dari APBN sesuai DIPA Tahun 2025 SP DIPA-063.01.2.432960/2025 tanggal 02 Desember 2024. Sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden RI dalam Sidang Kabinet pada 23 Oktober dan 6 November 2024, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu telah melaksanakan pemblokiran anggaran secara sistem melalui aplikasi

SAKTI. Langkah ini diambil dalam rangka penguatan efisiensi pada pos belanja perjalanan dinas serta kegiatan *Non Quick Win* untuk tahun anggaran 2025.

Untuk mengawal arahan Presiden serta dalam rangka mendukung efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran DIPA Kementerian/Lembaga TA 2025, langkah strategis yang dilakukan BBPOM di Mataram dalam menghadapi dinamika kebijakan pemerintah disepanjang Triwulan 1 Tahun 2025 adalah dengan menindaklanjuti surat dari Sekretaris Utama BPOM RI Nomor : B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 04 Februari 2025 hal Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025, selanjutnya BBPOM di Mataram melakukan revisi pemblokiran mandiri sehingga total anggaran yang dapat dimanfaatkan sebesar Rp 14.236.747.000,00 (68,39%) dengan rincian belanja pegawai Rp 5.987.925.000,00 (100%), belanja barang Rp 4.529.822.000,00 (41,72%) serta belanja modal Rp 3.719.000.000,00 (93,69%).

Selanjutnya sehubungan dengan usulan relaksasi (buka blokir) anggaran BPOM sesuai dengan surat Kepala Badan nomor B-PR.05.03.1.2.03.25.84 Tanggal 21 Maret 2025 Hal Permohonan Relaksasi Pemanfaatan Efisiensi Anggaran TA 2025, BBPOM di Mataram menyampaikan usulan revisi pemanfaatan kembali blokir anggaran pada Rincian Output (RO) sebesar Rp 2.984.534.000,00 (seluruhnya belanja barang) sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan pada masing-masing Rincian Output (RO) tanpa mengubah peruntukan anggaran yang sudah tertera di DIPA (revisi yang dilakukan hanya menghapus tanda (*) blokir anggaran) sehingga dana yang dapat dimanfaatkan bertambah menjadi Rp17.221.281.000 (82,73%).

Pada Triwulan 3 Tahun 2025 menindaklanjuti surat Sekretaris Utama Nomor TKU.02.03.2.04.25.238 tentang Pencadangan Anggaran Untuk Pemenuhan Belanja Pegawai TA 2025 dan berdasarkan hasil penyerapan realisasi anggaran Semester I, dilakukan Revisi Optimalisasi Anggaran antar satker sehingga total Pagu BBPOM di Mataram menjadi sebesar Rp. 20.670.330.000,00 dengan dana efektif sebesar Rp17.075.617.000,00.

Pada Triwulan IV Tahun 2025, telah dilakukan revisi berupa pembukaan seluruh blokir anggaran pada Rincian Output (RO) BAH.001 terkait Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT. Melalui revisi ini, alokasi anggaran yang dapat dimanfaatkan semula sebesar Rp24.030.000,00 meningkat menjadi Rp126.033.000,00 sesuai dengan pagu yang ditetapkan, sehingga total anggaran final yang dapat digunakan pada tahun 2025 menjadi Rp17.177.620.000.

**Strategi Pencapaian Target Kinerja dalam Kerangka Efisiensi Anggaran.**

Meskipun terdapat penyesuaian anggaran yang dapat dimanfaatkan sebesar 68,39% dari pagu awal sebesar Rp.20.815.994.000, BBPOM di Mataram tetap berkomitmen untuk mencapai target kinerja secara maksimal melalui langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. **Optimalisasi Prioritas :** Melakukan pemetaan ulang terhadap kegiatan pengawasan Obat dan Makanan dengan memprioritaskan lokus yang memiliki tingkat risiko tinggi (*high-risk profile*). Dengan demikian, meskipun frekuensi kegiatan berkurang, *output* pengawasan tetap memberikan dampak (*outcome*) perlindungan masyarakat yang signifikan.
2. **Transformasi Digital dan Penguatan Sistem Informasi:** Mengurangi ketergantungan pada koordinasi tatap muka dan pengawasan manual dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi media daring serta Integrasi data secara elektronik memungkinkan pemantauan kinerja real-time tanpa memerlukan biaya perjalanan dinas yang besar.
3. **Penguatan Jejaring Kemitraan :** Meningkatkan efisiensi biaya operasional melalui kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor di wilayah Nusa Tenggara Barat. Strategi pengawasan bersama (*joint supervision*) dan pemanfaatan dana DAK Non-Fisik pengawasan OBat dan Makanan oleh pemerintah daerah yang menjadi kunci dalam menjaga jangkauan pengawasan tetap luas di tengah keterbatasan anggaran.
4. **Manajemen Efisiensi Internal:** Melakukan efisiensi pada biaya pendukung operasional kantor (belanja barang non-operasional) untuk dialihkan guna mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang berdampak langsung pada masyarakat.

Sehubungan dengan Proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 yang mengakibatkan adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran maka berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM sehingga dilakukan revisi terhadap dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang merujuk pada Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor : PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus 2025 hal Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025, sehingga seluruh unit kerja melakukan revisi dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) untuk mengakomodir perubahan informasi kinerja pada Rancangan Renstra BPOM 2025- 2029 sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil monev BBPOM di Mataram triwulan 2 tahun 2025 diperoleh capaian kinerja indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 86.50% telah mencapai 110,46% (>110%, dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan) dan hal ini diestimasikan akan terjadi hingga akhir tahun 2025. Dikarenakan indikator kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator baru pada periode Renstra 2025-2029

dimana dalam perencanaan target yang telah ditetapkan belum terdapat baseline data yang dijadikan sebagai rujukan dalam analisa. Sebagai tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi kinerja pada periode sebelumnya dimana capaian kinerja Tidak Dapat Disimpulkan, BBPOM di Mataram melakukan perubahan target indikator sesuai hasil desk kesepakatan dengan Unit Pengampu dan Biro Perencanaan dan Keuangan dengan target sebesar 89%.

2. Berdasarkan hasil monev BBPOM di Mataram triwulan 2 tahun 2025 diperoleh capaian kinerja indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 85% telah mencapai 114,21% (>110%, Tidak Dapat Disimpulkan) dan diestimasikan akan terjadi hingga akhir tahun 2025. Kondisi ini disebabkan karena indikator kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator baru pada periode Renstra 2025-2029 dimana dalam perencanaan target yang telah ditetapkan belum terdapat baseline data yang dijadikan sebagai rujukan dalam analisa perencanaan. Sebagai tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi kinerja pada periode sebelumnya dimana capaian kinerja Tidak Dapat Disimpulkan BBPOM di Mataram melakukan perubahan target indikator sesuai hasil desk kesepakatan dengan Unit Pengampu dan Biro Perencanaan dan Keuangan dengan target sebesar 92%
3. Berdasarkan hasil monev BBPOM di Mataram triwulan 2 tahun 2025 diperoleh capaian kinerja indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 75% telah mencapai 130,57% (>110%, Tidak Dapat Disimpulkan) dan diestimasikan akan terjadi hingga akhir tahun 2025. Kondisi ini disebabkan karena indikator kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator baru pada periode Renstra 2025-2029 dimana dalam perencanaan target yang telah ditetapkan belum terdapat baseline data yang dijadikan sebagai rujukan dalam analisa perencanaan. Sebagai tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi kinerja pada periode sebelumnya dimana capaian kinerja Tidak Dapat Disimpulkan BBPOM di Mataram melakukan perubahan target indikator sesuai hasil desk kesepakatan dengan Unit Pengampu dan Biro Perencanaan dan Keuangan dengan target sebesar 91%.
4. Berdasarkan hasil monev BBPOM di Mataram hingga triwulan 2 tahun 2025 diperoleh capaian kinerja indikator Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 84,20% telah mencapai 121,47% (>110%, Tidak Dapat Disimpulkan). Sebagai tindak lanjut atas capaian yang telah melampaui target dilakukan usulan kenaikan target kepada Biro Perencanaan dan Keuangan dan Unit Pengampu pada kegiatan Bimtek Renstra saat desk usulan reviu dan pemutakhiran terhadap target indikator kinerja, berdasarkan hal tersebut maka telah dilakukan perubahan target pada

triwulan 3 sesuai dengan hasil kesepakatan dengan Unit Pengampu dan Biro Perencanaan dan Keuangan dengan target sebesar 89,6%.

5. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan mengalami perubahan manual Indikator kinerja pada cara perhitungannya yang dilatarbelakangi karena tidak semua UPT mempunyai komoditi UMKM sehingga dilakukan perubahan target PK 2025 semula 87,30% menjadi 14,04%.
6. Terdapat penambahan 3 indikator baru yang ditetapkan pada Triwulan 3 Tahun 2025 yaitu Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar dengan target sebesar 92%, indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah BBPOM di Mataram dengan target sebesar 100% dan indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman dengan target sebesar 20%.
7. Terdapat perubahan cascading pada indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Mataram sesuai Standar Kemampuan Laboratorium yang semula tercascading pada Sasaran Kegiatan Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram menjadi tercascading pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Mataram.

**Tabel 2.3** Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Revisi)

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 89 |
| | | 2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO | 26 |
| | | 3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 92 |
| | | 4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar | 100 |
| | | 5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 85 |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| | | 6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 98.8 |
| | | 7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 91 |
| | | 8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 85 |
| | | 9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 96 |
| | | 10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 91 |
| | | 11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | 89.6 |
| | | 12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar | 92 |
| | | 13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | 100 |
| | | 14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 81.7 |
| | | 15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman | 20 |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| 2. | Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi | 1. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 63 |
| 3. | Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT | 1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 88.57 |
| | | 2. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | 13 |
| | | 3. Jumlah desa pangan aman | 4 |
| | | 4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | 1 |
| 4. | Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu | 1. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | 14.04 |
| 5. | Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | 1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | 92 |
| 6. | Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | 1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | 90 |
| 7. | Layanan Publik UPT yang prima | 1. Indeks Pelayanan Publik UPT | 4.7 |
| 8. | Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | 1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM | 90 |
| | | 2. Nilai AKIP UPT BPOM | 83.9 |
| | | 3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM | 5 |
| | | 4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | 3.05 |

Selain indikator kinerja yang terdapat dalam perjanjian kinerja, terdapat juga direktif penugasan yang hanya tertuang pada SKP Kepala Balai Besar POM di Mataram sebagai berikut:

**Tabel 2.4** Tabel Direktif Penugasan Kepala Balai Besar Pom di Mataram Tahun 2025

| No. | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|
| 1. | Nilai Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 100 |
| 2. | Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) | 82,75 |
| 3. | Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota | 95 |
| 4. | Nilai Pengelolaan Kearsipan | 60-80 |
| 5. | Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri | 77 |

Terdapat 2 Indikator Kinerja pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 yang berbeda signifikan yaitu:

| No | Indikator Kinerja pada PK | Target | Indikator Kinerja pada RKT | Target |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 98,8% | Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu | 100% |
| 2. | Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | 90,0% | Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT | 14 |

Adanya perbedaan tersebut disebabkan karena saat penyusunan RKT Tahun 2025 masih mengacu kepada Renstra periode sebelumnya (2020-2024) dan penyusunan Indikator Kinerja belum final, sedangkan penyusunan PK Tahun 2025 telah mengacu kepada draft Renstra 2025-2029 dan penyusunan Indikator Kinerja telah final.

Selain perbedaan Indikator kinerja, terdapat 14 indikator yang targetnya berbeda antara PK dan RKT Tahun 2025. Hal ini juga disebabkan karena saat penyusunan RKT Tahun 2025 masih mengacu kepada Renstra periode sebelumnya (2020-2024) dan penyusunan indikator maupun

target Indikator Kinerja belum final, sedangkan penyusunan PK Tahun 2025 telah mengacu kepada draft Renstra 2025-2029 dan penyusunan Indikator maupun target Kinerja telah final.

### 2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Perjanjian Kinerja berfungsi sebagai instrumen fundamental dalam pemantauan, pengendalian, serta pelaporan capaian organisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban di akhir tahun anggaran. Guna menjamin pencapaian target dan memitigasi risiko kegagalan, dilakukan monitoring secara kontinyu yang berpedoman pada Rencana Aksi. Dokumen Rencana Aksi ini menjadi basis evaluasi kinerja berkala di setiap bulan untuk memastikan efektivitas operasional organisasi.

Secara rinci, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Manado digambarkan dalam tabel 2.5.

**Tabel 2.5** Tabel Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Awal

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 |
| 1. | Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 2. | Persentase fasilitas pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO | | | | | | | | | | | | 26 |
| 3. | Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 4. | Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti | | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 |
| | sesuai ketentuan | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | | 7 | 10 | 20 | 25 | 35 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 98,8 |
| 7. | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 8. | Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 9. | Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 |
| | ditindaklanjuti sesuai ketentuan | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 11. | Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 |
| 12. | Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | | | | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 13. | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai | | | 81 | 81 | 81 | 81,25 | 81,25 | 81,25 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,7 |

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 |
| | Standar Kemampuan Laboratorium | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | | | 88,57 | 88,57 | 88,57 | 88,57 | 88,57 | 88,57 | 88,57 | 88,57 | 88,57 | 88,57 |
| 15. | Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | | | 5 | 25 | 45 | 65 | 65 | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 |
| 16. | Jumlah desa pangan aman | | | 5 | 25 | 45 | 75 | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | | | 5 | 20 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 18. | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | | 10 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 100 |

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 |
| 19. | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | | 2,5 | 9,1 | 11,67 | 23,33 | 25,83 | 37,5 | 40 | 49,17 | 65,83 | 80 | 92 |
| 20. | Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | 4,16 | 8,33 | 12,5 | 16,66 | 20,83 | 25 | 29,16 | 33,33 | 37,5 | 41,66 | 45,83 | 90 |
| 21. | Indeks Pelayanan Publik UPT | | | | | | | | | | | | 4,7 |
| 22. | Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM | | | | | | | | | | | | 90 |
| 23. | Nilai AKIP UPT BPOM | | | | | | | | | | | | 83,9 |
| 24. | Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM | | | | | | | | | | | | 5 |
| 25. | Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | | | | | | | | | | | | 3,05 |

Berdasarkan hasil monitoring evaluasi kinerja BBPOM di Mataram serta upaya pengawalan kinerja organisasi dapat terlaksana secara akuntabel dan beradaptasi atas perkembangan dalam pelaksanaan serta memperhatikan atas hasil pembinaan kinerja BBPOM di Mataram bersama Deputi Pembina periode triwulan 1 tahun 2025, telah dilakukan pengajuan usulan perubahan target RAPK sesuai Surat Kepala BBPOM di Mataram Nomor B- B-PR.07.14A.05.25.1153 tanggal 22 Mei 2025 hal Permohonan Revisi Target Indikator Kinerja 2025 bahwa terdapat 7 indikator kinerja yang diajukan usulan perubahan targetnya yaitu Indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman, Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan, Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar, dan Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan.

Secara rinci, Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Mataram digambarkan dalam tabel 2.6

**Tabel 2.6** Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 |
| 1. | Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 2. | Persentase fasilitas pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO | | | | | | | | | | | | 26 |
| 3. | Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang | | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 |
| | ditindaklanjuti sesuai ketentuan | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 6. | Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | | 7 | 10 | 20 | 25 | 35 | 50 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 |
| 7. | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 8. | Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 |
| 9. | Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 10. | Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 11. | Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 89,6 | 89,6 | 89,6 | 89,6 | 89,6 |
| 12. | Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar | | | | | | | | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 13. | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | | | | | | | | | | | | 100 |
| 14. | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan | | | 81 | 81 | 81 | 81,25 | 81,25 | 81,25 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,7 |

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 |
| | olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman | | | | | | | | | | | | 20 |
| 16. | Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | | | | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 17. | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | | | 88,57 | 88,57 | 88,57 | 88,57 | 88,57 | 88,57 | 88,57 | 88,57 | 88,57 | 88,57 |
| 18. | Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | | | 5 | 25 | 49 | 49 | 54 | 54 | 85 | 85 | 100 | 13 |
| 19. | Jumlah desa pangan aman | | | 5 | 25 | 37 | 47 | 57 | 57 | 80 | 80 | 100 | 4 |
| 20. | Jumlah pasar pangan aman | | | 5 | 25 | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 |
| | berbasis komunitas | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | | 10 | 15 | 25 | 45 | 55 | 60 | 65 | 75 | 80 | 90 | 14,04 |
| 22. | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | | 2,5 | 9,1 | 9,17 | 14,17 | 27,50 | 35 | 60,83 | 68,33 | 80 | 85 | 92 |
| 23. | Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | 4,16 | 8,33 | 12,5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 |
| 24. | Indeks Pelayanan Publik UPT | | | | | | | | | | | | 4,7 |
| 25. | Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM | | | | | | | | | | | | 90 |

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 |
| 26. | Nilai AKIP UPT BPOM | | | | | | | | | | | | 83,9 |
| 27. | Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM | | | | | | | | | | | | 5 |
| 28. | Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | | | | | | | | | | | | 3,05 |

Pada Triwulan III dilakukan perubahan target RAPK pada 10 IKSK (tulisan berwarna merah) selain penambahan 3 IKSK baru yang telah diusulkan dan disetujui oleh Biro Perencanaan dan Keuangan, sebagai berikut :

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
2. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
3. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
4. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan;

Perubahan target keempat IKSK diatas karena menyesuaikan dengan target Perjanjian Kinerja.

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder. Perubahan target pada IKSK ini disebabkan target yang sebelumnya bersifat kumulatif menjadi flat sejak bulan Agustus 2025;
2. Persentase cakupan sarana produksi pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan justifikasi sebagai tindak lanjut hasil monev TW 2 2025;
3. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan justifikasi Adanya perubahan KAK program PJAS Aman yang dikarenakan adanya efisiensi anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan batch 2 dimulai TW 3 dilaksanakan secara daring;
4. Desa Pangan Aman dengan justifikasi Adanya perubahan KAK program Desa Pangan Aman yang dikarenakan adanya efisiensi anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan batch 2 dimulai TW 3 dilaksanakan secara daring;
5. Pasar Pangan Aman dengan justifikasi Adanya perubahan KAK program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dikarenakan adanya efisiensi anggaran;

6. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan dengan justifikasi sebagai tindak lanjut hasil monev TW 2 2025;
7. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar (IKSK baru);
8. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT (IKSK baru);
9. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman (IKSK baru).

## 2.5. Metode Pengukuran

Dalam rangka menjamin akuntabilitas dan objektivitas pengukuran kinerja, seluruh indikator kinerja utama telah dilengkapi dengan **Manual Indikator Kinerja**. Manual ini berfungsi sebagai panduan teknis yang mencakup definisi operasional, formula penghitungan, sumber data, serta frekuensi pelaporan untuk masing-masing dari 28 indikator kinerja BBPOM di Mataram.

Keberhasilan suatu Sasaran Kegiatan diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah disepakati pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja mengacu kepada Keputusan Kepala BPOM Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM. Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja.

Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Normalisasi capaian indikator kinerja

   Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian indikator kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

   1) Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan
   2) Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan normalisasi.

b. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

| Kategori | Capaian IKU | Notifikasi Warna |
|---|---|---|
| Tidak Dapat Disimpulkan | >110% | |
| Sangat Baik | 100% < x ≤ 110% | |
| Baik | 90% < x ≤ 100% | |
| Cukup | 60% ≤ x ≤ 90% | |
| Kurang | <60% | |

c. Perhitungan NKO tahunan dilakukan pada aplikasi SIMETRIS menu *e-performance*. Hasil NKO dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut:

| Predikat NKO | Nilai Kinerja Organisasi (NKO) | Notifikasi Warna |
|---|---|---|
| Istimewa | >100% | |
| Baik | 80% < x ≤ 100% | |
| Butuh Perbaikan | 60% < x ≤ 80% | |
| Kurang | 20% < x ≤ 60% | |
| Sangat Kurang | 0% ≤ x ≤ 20% | |

Kriteria keberhasilan suatu sasaran strategis harus disepakati dan ditetapkan dahulu pada saat perencanaan. Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut sebagai indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung **persentase capaian kinerja** untuk masing masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penyajian dapat berupa tabel atau grafik.

Untuk indikator positif/polarisasi *maximize* (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk indikator negatif/polarisasi *minimize* (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 1 + \frac{(1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja meliputi:

1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun sebelumnya.

3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra (target terupdate dari Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra). Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

| Kategori | Penjelasan | Notifikasi Warna |
|---|---|---|
| Tercapai/Melampaui | Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar ≥ 100%. |  |
| Akan Tercapai | Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar 70% - <100% (70 ≤ x < 100). |  |
| Perlu Upaya Keras | Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar <70% (x < 70). |  |

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai.

Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di BBPOM di Mataram adalah sebagai berikut:

1. Adanya penunjukan 1 orang petugas penanggung jawab data di BBPOM di Mataram yang disahkan oleh SK Kepala BPOM
2. Kepala BBPOM di Mataram menunjuk penanggung jawab data di setiap bagian/fungsi dengan menerbitkan SK Kepala BBPOM di Mataram

3. Penanggung jawab data di setiap bagian/fungsi menginput data kinerja pada data pada *google spreadsheet* secara online rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggung jawab data BBPOM di Mataram.
4. Data kinerja yang telah diverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada aplikasi SAKTI, monev Bappenas, link Capaian RHPK BPOM, BPOM *Operational Center* (BOC) dan pada aplikasi SIMETRIS (*e-performance*).
5. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi SIMETRIS pada menu e-performance. Pengukuran inipun diintegrasikan dengan aplikasi SIMAKIN pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level pimpinan eselon 2 hingga level individu secara periodik triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian reward dan punishment atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya.
6. Evaluasi pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

*Halaman ini sengaja dikosongkan*



Inges Solah!

Informatif - Gesit - Solutif - Ramah

# BAB III
# AKUNTABILITAS KINERJA

# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

## 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka pemantauan Nilai Kinerja Organisasi (NKO), BBPOM di Mataram melaksanakan pengukuran kinerja secara berkala yang didasarkan pada tingkat pencapaian indikator kinerja seluruh sasaran kegiatan. Pengukuran tersebut dilakukan melalui perbandingan antara target dan realisasi sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK). NKO periodik dihitung dari akumulasi capaian indikator perjanjian kinerja pada periode tertentu yang telah dinormalisasi, kemudian dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki realisasi pada periode tersebut.

Sementara itu, NKO Tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi. Sejalan dengan ketentuan tersebut, terdapat pedoman pelaksanaan pengukuran dan pelaporan kinerja berkelanjutan bagi unit/satuan kerja melalui Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

NKO Tahunan tersusun atas dua komponen, yaitu capaian Perjanjian Kinerja yang dinormalisasi hingga batas maksimal 110% apabila capaian kinerja melebihi angka tersebut, serta hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Komponen hasil evaluasi AKIP berfungsi sebagai faktor koreksi terhadap hasil normalisasi capaian PK. Baik NKO periodik maupun NKO tahunan selanjutnya dimanfaatkan sebagai dasar penetapan sebaran atau pola distribusi predikat kinerja periodik pegawai.

Dalam implementasinya, metode pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi SIMETRIS yang terintegrasi antara e-Planning dan e-Performance melalui laman https://simetris.pom.go.id/eperformance_new/. Proses perhitungan kinerja mengacu pada manual indikator kinerja yang telah ditetapkan.

BBPOM di Mataram pada Tahun 2025 memperoleh Nilai Kinerja Organisasi sebesar 104,39% dengan kriteria “Istimewa” dengan notifikasi Nilai Kinerja Organisasi (NKO) periodik ini digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai. Nilai NKO ini diperoleh dari rata-rata capaian indikator sasaran kegiatan (IKSK) yang telah dinormalisasi dan dilakukan koreksi normalisasi capaian PK berdasarkan predikat AKIP. Nilai AKIP BBPOM di Mataram sebesar 82.55 dengan kategori Memuaskan (A). Nilai Kinerja Organisasi (NKO) berdasarkan aplikasi SIMETRIS e-performance sebagai berikut:




**Gambar 3.1** Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada Aplikasi e-Performance

**Tabel 3.1** Pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2025

| No | Sasaran Kegiatan | No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian | Normalisasi Capaian PK | Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP | Nilai Akhir Capaian PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | (1) | (2) | (3) {(1)x[(100%-(2)]x100} |
| 1 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 1 | Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 89 | 100 | 112,36% | 110,00% | 0% | 110% |
| | | 2 | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO | 26 | 31,11 | 119,66% | 110,00% | 0% | 110% |
| | | 3 | Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 92 | 99,71 | 108,38% | 108,38% | 0% | 108% |
| | | 4 | Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT | 100 | 100 | 100,00% | 100,00% | 0% | 100% |
| | | 5 | Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 85 | 100 | 117,65% | 110,00% | 0% | 110% |
| | | 6 | Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 98,8 | 99,4 | 100,61% | 100,61% | 0% | 101% |
| | | 7 | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa | 91 | 100 | 109,89% | 109,89% | 0% | 110% |

| No | Sasaran Kegiatan | No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian | Normalisasi Capaian PK | Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP | Nilai Akhir Capaian PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | (1) | (2) | (3) {(1)x[(100%-(2)]x100} |
| | | | dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | | | | | | |
| | | 8 | Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 85 | 92,68 | 109,04% | 109,04% | 0% | 109% |
| | | 9 | Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 96 | 98,57 | 102,68% | 102,68% | 0% | 103% |
| | | 10 | Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 91 | 97,33 | 106,96% | 106,96% | 0% | 107% |
| | | 11 | Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | 89,6 | 99,48 | 111,03% | 110,00% | 0% | 110% |
| | | 12 | Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar | 92 | 94,40 | 102,61% | 102,61% | 0% | 103% |
| | | 13 | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | 100 | 105,69 | 105,69% | 105,69% | 0% | 106% |
| | | 14 | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 81,7 | 89,7 | 109,79% | 109,79% | 0% | 110% |
| | | 15 | Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman | 20 | 20 | 100,00% | 100,00% | 0% | 100% |

| No | Sasaran Kegiatan | No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian | Normalisasi Capaian PK | Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP | Nilai Akhir Capaian PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | (1) | (2) | (3) {(1)x[(100%-(2)]x100} |
| 2 | Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi | 16 | Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 63 | 63 | 100,00% | 100,00% | 0% | 100% |
| 3 | Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT | 17 | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 88,57 | 92,79 | 104,76% | 104,76% | 0% | 105% |
| | | 18 | Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | 13 | 13 | 100,00% | 100,00% | 0% | 100% |
| | | 19 | Jumlah desa pangan aman | 4 | 4 | 100,00% | 100,00% | 0% | 100% |
| | | 20 | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | 0% | 100% |
| 4 | Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu | 21 | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | 14,04 | 15,73 | 112,04% | 110,00% | 0% | 110% |
| 5 | Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | 22 | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | 92 | 93,57 | 101,71% | 101,71% | 0% | 102% |
| 6 | Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan | 23 | Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | 90 | 98 | 108,89% | 108,89% | 0% | 109% |

| No | Sasaran Kegiatan | No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian | Normalisasi Capaian PK | Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP | Nilai Akhir Capaian PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | (1) | (2) | (3) {(1)x[(100%-(2)]x100} |
| | Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | | | | | | | | |
| 7 | Layanan Publik UPT yang prima | 24 | Indeks Pelayanan Publik UPT | 4,7 | 4,94 | 105,11% | 105,11% | 0% | 105% |
| 8 | Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | 25 | Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM | 90 | 90,93 | 101,03% | 101,03% | 0% | 101% |
| | | 26 | Nilai AKIP UPT BPOM | 83,9 | 82,55 | 98,39% | 98,39% | 0% | 98% |
| | | 27 | Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM | 5 | 5 | 100,00% | 100,00% | 0% | 100% |
| | | 28 | Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | 3,05 | 2,97 | 97,38% | 97,38% | 0% | 97% |
| Nilai Kinerja Organisasi | | | | | | | | | 104,39% |
| Predikat NKO | | | | | | | | | Istimewa |

BBPOM di Mataram berhasil meraih predikat "Istimewa" dengan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 104,39. Keberhasilan ini didorong oleh performa 26 dari total 28 indikator kinerja yang berhasil memenuhi, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Meskipun secara akumulatif menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, organisasi tetap berkomitmen untuk melakukan penguatan pada aspek tata kelola internal. Fokus optimalisasi akan diarahkan pada indikator Nilai AKIP (98,39%) dan Indeks Manajemen Risiko (97,38%) yang realisasinya masih berada sedikit di bawah target sasaran.

**Tabel 3.2** Pencapaian Sasaran Kegiatan Tahun 2025

| No | Sasaran Kegiatan | Nilai Sasaran Kegiatan | Kategori |
|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 106,38% | Sangat Baik |
| 2 | Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi | 100,00% | Baik |

| No | Sasaran Kegiatan | Nilai Sasaran Kegiatan | Kategori |
|---|---|---|---|
| 3 | Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT | 101.19% | Sangat Baik |
| 4 | Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu | 110,00% | Sangat Baik |
| 5 | Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | 101,71% | Sangat Baik |
| 6 | Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | 108,89% | Sangat Baik |
| 7 | Layanan Publik UPT yang prima | 105,11% | Sangat Baik |
| 8 | Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | 99.20% | Baik |

Dari 8 (delapan) sasaran kegiatan yang ditetapkan, 6 (enam) sasaran memperoleh kategori “Sangat Baik”, sementara 2 (dua) sasaran lainnya berada pada kategori “Baik.”

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 telah berjalan efektif dan melampaui target pada sebagian besar indikator, mencerminkan komitmen UPT dalam meningkatkan kualitas pengawasan, pelayanan publik, serta tata kelola organisasi.

**ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA**

Analisis capaian kinerja dilakukan secara komprehensif dengan membandingkan target terhadap realisasi kinerja tahun berjalan, serta menyandingkan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya (untuk indikator kinerja yang sama) guna melihat tren perkembangan organisasi. Analisis juga mencakup perbandingan realisasi kinerja hingga tahun berjalan terhadap target jangka menengah dalam dokumen Renstra terkini, serta melakukan perbandingan kinerja dengan unit kerja sejenis berdasarkan hasil evaluasi klasifikasi UPT di lingkungan BPOM (Klaster 5). Selanjutnya, dilakukan analisis mendalam mengenai penyebab keberhasilan atau kegagalan serta peningkatan atau penurunan kinerja untuk merumuskan rekomendasi perbaikan untuk periode selanjutnya, yang dilengkapi dengan analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap program atau kegiatan yang paling menunjang maupun yang kurang mendukung ketercapaian kinerja berdasarkan besaran alokasi anggaran yang telah ditetapkan.

## SASARAN KEGIATAN 1
## MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA UPT

Sasaran Kegiatan pertama mempunyai 15 (lima belas) indikator kinerja yang merupakan tolok ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan pertama.

**Tabel 3.3** Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 1 BBPOM di Mataram Tahun 2025

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | %CAPAIAN | KATEGORI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 89 | 100,00 | 112,36% | Tidak Dapat disimpulkan |
| | | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO | 26 | 31,11 | 119,66% | Tidak Dapat disimpulkan |
| | | Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 92 | 99,71 | 108,38% | Sangat Baik |
| | | Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT | 100 | 100,00 | 100,00% | Baik |
| | | Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 85 | 100,00 | 117,65% | Tidak Dapat disimpulkan |
| | | Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 98,8 | 99,40 | 100,61% | Sangat Baik |
| | | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang | 91 | 100,00 | 109,89% | Sangat Baik |

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | %CAPAIAN | KATEGORI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | | | | |
| | | Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 85 | 92,68 | 109,04% | Sangat Baik |
| | | Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 96 | 98,57 | 102,68% | Sangat Baik |
| | | Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 91 | 97,33 | 106,96% | Sangat Baik |
| | | Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | 89,6 | 99,48 | 111,03% | Tidak Dapat disimpulkan |
| | | Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar | 92,00 | 94,40 | 102,61% | Sangat Baik |
| | | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | 100,00 | 105,69 | 105,69% | Sangat Baik |
| | | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 81,70 | 89,70 | 109,79% | Sangat Baik |

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | %CAPAIAN | KATEGORI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman | 20,00 | 20,00 | 100,00% | Baik |

### 1.1. PERSENTASE SAMPEL SEDIAAN FARMASI BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

**%sampel Sediaan Farmasi berisiko = (A + B + C + D)/ 4**

A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = a+b+c+d+e

a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%),

30% x (Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan/ Total target sampel x 100%),

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Target sampel,
2. Renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring),
3. Renlak Kategori Kelas Terapi,

b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %).

20% x (Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%)

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Renlak periode/waktu sampling,
2. Ketentuan Evaluasi Penandaan

c. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%).

20% x (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan / total jumlah sampel yang diuji x 100%).

Mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter sesuai Pedoman Sampling yang berlaku, termasuk uji secara rapid.

d. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)

20% x (Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%).

Mencakup kesesuaian:

1. Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian
2. Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling (Loka POM sampai dengan pelaporan evaluasi penandaan)

e. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%) 10% x (Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan/ target jumlah laporan Monitoring penarikan x 100%)

B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan = (a1 + a2) /2

Keterangan:

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel) (*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling (**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kadaluarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

= (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji) × 100%

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan **kinerja UPT yang melakukan sampling**

c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

Catatan:

Kesesuaian parameter uji **menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling**

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi **kinerja UPT yang melakukan sampling**

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan = (a1 + a2) /2

Keterangan:

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel) (*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling (**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kadaluarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

= (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan kinerja UPT yang melakukan sampling

c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

Catatan:

Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan

(a1 + a2) /2

Keterangan:

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling (**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kadaluarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kesesuaian pelaksanaan sampling

(Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%).

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Kategori sampling yang telah ditetapkan
2. Pemilihan parameter uji

Catatan:

Kesesuaian pelaksanaan sampling menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan

(Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%

Mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu:

1. SLA Sampling
2. SLA Pengujian
3. SLA Pelaporan

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan

(Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai / Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Ketepatan dalam penentuan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut

(Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktur Pengawasan Kosmetik) × 100%.

Mencakup surat:

1. Edaran pembersihan pasar
2. Edaran pemeriksaan sarana kosmetik

Catatan:

Tanggapan atas surat tindak lanjut menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

Keterangan:

- Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
- Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.
- Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.

### a. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

**Tabel 3.4** Target, realisasi dan % capaian Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (ditambahkan dengan narasi jumlah hasil pengujian produk MS/TMS)

| Sasaran kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi | Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang | 89 | 100 | 112,36 | Tidak dapat disimpulkan |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | ditindaklanjuti sesuai ketentuan | | | | |

Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 telah mencapai target yaitu sebesar 100% dari target 89,00% sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 112,36% dengan kategori “tidak dapat disimpulkan’’.

Pada tahun 2025 telah dilakukan sampling dan pemeriksaan terhadap 995 sampel dari 992 sampel sediaan farmasi yang di targetkan (100.30%), yang terdiri dari 270 sampel obat, 217 Obat bahan Alam (OBA), 435 kosmetik, dan 57 Suplemen Kesehatan (SK) dan 16 Obat Kuasi. Telah dilakukan pengujian terhadap 1255 sampel sediaan farmasi yang terdiri dari 342 sampel obat, 276 OBA, 545 kosmetik dan 73 SK dan 15 Obat kuasi. Seluruh sampel yang disampling, diperiksa dan diuji telah sesuai dengan perencanaan dan pedoman sampling dan telah dilaporkan tepat waktu.

Hasil pengujian terhadap 1255 sampel sediaan farmasi diperoleh data 340 sampel obat MS dan 2 sampel TMS (keseragaman kandungan dan penetapan kadar Salbutamol dan Chlorfeniramin Maleat) untuk kategori sampel saluran pernafasan. Dari 276 sampel OBA yang diuji 169 sampel MS dan 107 sampel TMS. Sebanyak 95 sampel TMK Penandaan, 13 sampel TMS kimia (4 sampel TMS BKO, sildenafil, Siproheptadin, kofein, dan 7 sampel TMS Waktu hancur) dan 17 sampel TMS Mikrobiologi (11 sampel TMS ALT, 2 sampel TMS AKK dan 4 sampel TMS Enterobacteriaceae). Hasil pengujian sampel kosmetik diperoleh 335 sampel MS dan 210 sampel TMS 187 sampel TMS Penandaan, 13 sampel TMS Kimia (5 sampel TMS Logam Hg, 1 sampel TMS Logam As, 2 sampel TMS Hidrokinon, 1 sampel TMS Vitamin D3, 3 sampel TMS Metanol, dan 1 sampel TMS Acid Orange) dan 3 sampel TMS Mikro ( 3 sampel TMS ALT dan 1 sampel TMS AKK). Hasil pengujian sampel Suplemen Kesehatan diperoleh 47 sampel MS dan 10 sampel TMS. Sebanyak 9 sampel TMS Penandaan, 3 sampel TMS Kimia (2 sampel TMS Vitamin D3 dan 1 sampel TMS Vitamin A) dan 1 sampel TMS Mikrobiologi (ALT). Hasil pengujian sampel obat kuasi diperoleh 14 sampel MS dan 5 sampel TMS. Sebanyak 5 sampel TMS Penandaan dan 1 sampel TMS Kimia (waktu hancur).

### b. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN 2024

Realisasi Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator kinerja baru di periode renstra 2025-2029.

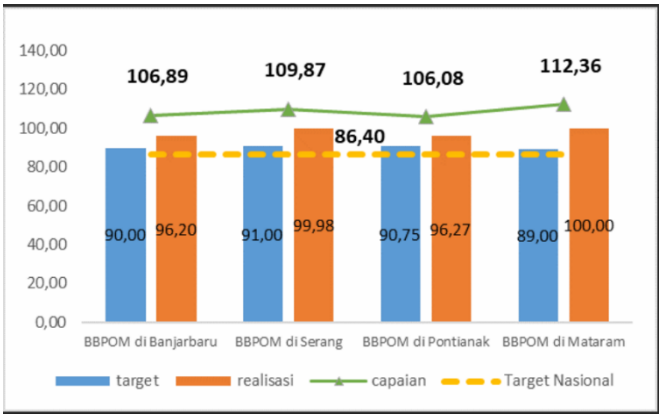
### c. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (2029)

**Tabel 3.5** Perbandingan Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029)

| Indikator | Realisasi 2025 | Target Renstra (2029) | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 100% | 94% | 106.38% ▲ | Melampaui |

Realisasi Indikator Kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir renstra telah tercapai sebesar 106,38%, sehingga kinerja tahun 2025 telah melampaui target akhir yang direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut terhadap sampel sediaan farmasi berisiko telah berjalan optimal dan bahkan melebihi sasaran kegiatan jangka menengah.

### d. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN BALAI BESAR POM KLASTER 5




**Gambar 3.2** Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan Balai Besar POM Klaster 5 menunjukkan bahwa seluruh satuan kerja mampu melampaui target yang telah ditetapkan dengan persentase capaian di atas 100%, serta realisasi masing-masing unit kerja juga berada di atas Target Nasional yang ditunjukkan pada grafik.

BBPOM di Banjarbaru mencatat target sebesar 90,00 dengan realisasi 96,20, sehingga capaian mencapai 106,89%. BBPOM di Serang memiliki target 91,00 dan realisasi 99,98, dengan capaian 109,87%. BBPOM di Pontianak menargetkan 90,75 dan merealisasikan 96,27, sehingga capaian sebesar 106,08%. Sementara itu, BBPOM di Mataram menunjukkan kinerja tertinggi dengan target 89,00, realisasi 100,00, dan capaian 112,36%.

BBPOM di Mataram menjadi unit dengan persentase capaian tertinggi, sedangkan BBPOM di Pontianak memiliki capaian relatif paling rendah, meskipun tetap berada di atas 100%. Hal ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten dalam pencapaian indikator yang ditetapkan.

### e. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Capaian Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan ini merupakan hasil dari perencanaan sampling dan pengujian yang baik sejak awal tahun anggaran dan koordinasi yang solid antara tim inspeksi serta tim pengujian dalam mengimplementasikan Rencana Pelaksanaan (Renlak) sampling dan pengujian. Pelaksanaan di lapangan didukung sepenuhnya oleh petugas yang kompeten yang telah mengikuti pelatihan, antara lain Bimtek Sampling, Pengawasan Iklan dan Penandaan, serta *in-house training* pengujian, sehingga seluruh tahapan mulai dari pengambilan sampel hingga penentuan kesimpulan akhir (gabungan penandaan dan pengujian) terlaksana sesuai dengan standar juknis yang berlaku.

Secara teknis, efisiensi operasional didorong oleh ketersediaan reagen, media, dan alat laboratorium yang optimal untuk memastikan pengujian parameter kritis atau wajib dapat diselesaikan tepat waktu. Implementasi digitalisasi pelaporan melalui sistem SIPT serta inovasi SiOpa Lagi JJ (Sistem Pengopersian Alat Lab Jarak Jauh) memungkinkan monitoring penyelesaian uji secara *real-time*, yang secara signifikan mencegah kendala teknis dan memastikan pemenuhan *Service Level Agreement* (SLA) pengujian serta pelaporan. Keberhasilan ini juga diperkuat oleh mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) rutin secara bulanan serta koordinasi intensif melalui berbagai kanal komunikasi, yang memastikan setiap tindak lanjut terhadap sampel berisiko—termasuk respons terhadap surat instruksi dari pusat berjalan konsisten dan akurat sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam pedoman evaluasi.

Meskipun realisasi kinerja berhasil melampaui target dengan capaian sebesar 112,36%, namun karena melebihi 110% sehingga tidak dapat disimpulkan. Kondisi ini mengindikasikan adanya proyeksi target yang terlalu rendah (*underestimated*). Hal tersebut terjadi karena merupakan indikator baru pada tahun 2025, sehingga penyusunan target belum didukung oleh data *baseline* maupun analisis tren capaian dari tahun-tahun sebelumnya.

### f. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

**Tabel 3.6** Matriks Rekomendasi Indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025

| Indikator Kinerja | Kendala/Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Masih terdapat keterbatasan jumlah dan kompetensi petugas, khususnya dalam hal pelaksanaan sampling yang sesuai dengan podoman sampling | Melakukan peningkatan kompetensi teknis maupun manajerial bagi petugas sampling, penguji, dan inspektur melalui pelatihan berkelanjutan, baik secara luring maupun daring dan melakukan pengajuan tambahan SDM terkait dengan petugas sampling dan pengujian | Tahun 2026 akan memaksimalkan pembelajaran oleh petugas secara daring melalui aplikasi IDEAS dan melakukan monev terhadap pelatihan yang diikuti secara daring, akan mengajukan penambahan SDM BBPOM di Mataram melalui SIREN SDM | TW 1 Tahun 2026 | T | – | – |
| | Keterbatasan jumlah dan jenis sampel yang tersedia diperedaran | Melakukan revisi kategori sampel dengan menyesuaikan ketersediaan sampel di lapangan | Mengajukan perubahan proporsi sampel pada saat Desk Penetapan Target Sampling tiap Komoditi | TW 1 Tahun 2026 | T | – | – |

### g. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini BBPOM di Mataram melaksanakan beberapa kegiatan yaitu:

1. Pelaksanaan evaluasi secara rutin terkait Ketepatan waktu dalam penyelesaian uji sampel, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu dan kelengkapan laporan pengujian melalui SIPT serta ketepatan dalam pengambilan Kesimpulan setiap bulannya
2. Pelaksanaan evaluasi secara rutin antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan sampling sesuai kategori, ketepatan waktu pelaksanaan sampling, ketepatan dalam pengambilan kesimpulan terkait penandaan, ketepatan waktu pelaporan sampling melalui SIPT serta melaksanakan tanggapan surat tindak lanjut untuk komoditi PIRT tepat waktu
3. Penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan ISO 17025:2017 secara konsisten dalam pelaksanaan pengujian laboratorium di BBPOM di Mataram,
4. Identifikasi terhadap kebutuhan pelatihan di Laboratorium BBPOM di Mataram baik pelatihan dalam bentuk Bimtek Internal maupun supervisi (*transfer of knowledge*) oleh penyelia ataupun penguji senior,
5. Proses pengadaan sarana penunjang pengujian (reagensia, media mikrobiologi, baku pembanding, suku cadang, bahan habis pakai, kebutuhan ruangan dan listrik, dan lain-lain),
6. Proses pengadaan alat laboratorium tahun anggaran 2025 sesuai dengan persetujuan dari PPPOMN untuk memenuhi peralatan laboratorium,
7. Pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai dengan pedoman sampling Tahun 2025,
8. Monitoring terhadap timeline waktu sampling, waktu pengujian dan waktu pelaporan serta kesesuaian pengujian dengan parameter uji kritis setiap bulannya,
9. Pelaksanan rapat koordinasi internal terkait rencana pelaksanaan sampling pada awal tahun 2025,
10. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan dilakukan secara berkala dan dilaporkan hasil tindak lanjut kepada direktorat terkait,
11. Pelaksanaan uji banding antar laboratorium maupun uji profisiensi untuk komoditi Obat, Obat Tradisional – Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Mikrobiologi sebagai bentuk peningkatan jaminan mutu hasil pengujian di laboratorium,
12. Koordinasi terkait hasil uji untuk sampel yang diuji lintas balai anggota Region Surabaya baik melalui whatsapp group, link bit.ly pelaporan sampling dan pengujian Region Surabaya maupun melalui SIPT,
13. Pelaksanaan pelaporan hasil sampling dan uji melalui SIPT,
14. Pelaksanaan perawatan/perbaikan peralatan untuk menunjang kelancaran proses pengujian,
15. Pelaksanaan revisi anggaran untuk memenuhi kebutuhan pengujian dan memperlancar proses pengujian,
16. Perencanaan rekalibrasi dan verifikasi peralatan laboratorium guna menjamin validitas hasil pengujian,

17. Desk revisi target PK RAPK 2025 dan melakukan penyesuaian target capaian indikator sesuai dengan hasil desk dengan Rorenkeu dan unit pengampu pada kegiatan Bimtek Renstra 2025-2029.

### h. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**Tabel 3.7** Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025

| Indikator | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T | R | % | T | R | % | | | |
| Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 89,00 | 100.00 | 112,36 | 659.927.000 | 659.825.700 | **99,98** | **1,12** | **0,12** | **100 % (Efisien)** |

Berdasarkan tabel diatas bahwa penggunaan sumber daya/anggaran adalah efisien dengan capaian efisiensi sebesar 100%. Hal ini mencerminkan bahwa Anggaran yang tersedia telah digunakan secara optimal dalam melaksanakan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator, seperti adanya regionalisasi laboratorium yang dapat melakukan pengujian sampel obat secara seri sehingga penggunaan reagensia dan lain lain menjadi lebih efisien, adanya inovasi I-CONIC (Instrument Consultation Clinic) yang menekan pengeluaran anggaran perawatan alat laboratorium dan pelaksanaan peningkatan kompetensi sebagian besar secara daring/*online*.

## 1.2. PERSENTASE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG TELAH MELAPORKAN KTD/ESO

Dalam rangka menjamin keamanan penggunaan obat di masyarakat, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran strategis dalam melaksanakan pengawasan obat melalui pendekatan farmakovigilans. Farmakovigilans merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mendeteksi dini, menilai, memahami, dan mencegah risiko atau dampak merugikan yang timbul akibat penggunaan obat, sehingga dapat mendukung keselamatan pasien dan kesehatan masyarakat secara luas.

Penguatan pelaksanaan farmakovigilans di Indonesia telah diatur melalui Peraturan BPOM Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans, yang menegaskan peran BPOM sebagai Pusat Farmakovigilans/MESO Nasional. Dalam implementasinya, keberhasilan sistem farmakovigilans sangat bergantung pada keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, khususnya tenaga kesehatan/tenaga medis di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) sebagai pihak yang melakukan monitoring efek samping obat (MESO) dan pelaporan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD)/Efek Samping Obat (ESO).

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, penguatan farmakovigilans menjadi bagian dari upaya mendukung transformasi sistem kesehatan, khususnya dalam mewujudkan sasaran “Kesehatan untuk Semua”. Oleh karena itu, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di daerah, termasuk BBPOM di Mataram, memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas dan partisipasi fasyankes melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) farmakovigilans.

Sebagai bentuk pengukuran kinerja, ditetapkan indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM, yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah fasyankes yang telah melakukan pelaporan dengan jumlah fasyankes yang telah diberikan KIE farmakovigilans pada tahun berjalan. Indikator ini tidak hanya mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan KIE, tetapi juga menggambarkan peningkatan awareness, pemahaman, serta komitmen tenaga kesehatan dalam pelaporan KTD/ESO sebagai bagian dari sistem pengawasan keamanan obat.

Dengan demikian, capaian indikator ini menjadi penting untuk menilai efektivitas intervensi yang dilakukan oleh BBPOM di Mataram dalam mendorong partisipasi aktif fasyankes, sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan strategi peningkatan kinerja farmakovigilans pada tahun berikutnya.

### a. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

**Tabel 3.8** Target, realisasi dan %capaian Persentase fasilitas pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

| Sasaran kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Persentase fasilitas pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO | 26 | 31,11 | 119,65 | Tidak Dapat disimpulkan |

Pada tahun 2025, indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ditetapkan dengan target sebesar 26%. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan farmakovigilans, capaian realisasi mencapai 31,11%, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan partisipasi fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelaporan KTD/ESO melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) farmakovigilans yang dilaksanakan oleh BBPOM di Mataram berjalan secara efektif. Peningkatan ini juga mengindikasikan adanya perbaikan dalam pemahaman dan kesadaran tenaga kesehatan

terhadap pentingnya pelaporan KTD/ESO sebagai bagian dari sistem pengawasan keamanan obat.

Dengan demikian, kinerja pada indikator ini dapat dikategorikan sangat baik, karena tidak hanya memenuhi target, tetapi juga melampauinya secara signifikan. Hal ini menjadi dasar yang positif untuk terus memperkuat strategi pembinaan dan pendampingan kepada fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun berikutnya.

### b. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN 2024

Realisasi Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator kinerja baru di periode renstra 2025-2029.

### c. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (2029)

**Tabel 3.9** Perbandingan Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029)

| Indikator | Realisasi 2025 | Target Renstra (2029) | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO | 31.11 | 30 | 103.70% ▲ | Melampaui |

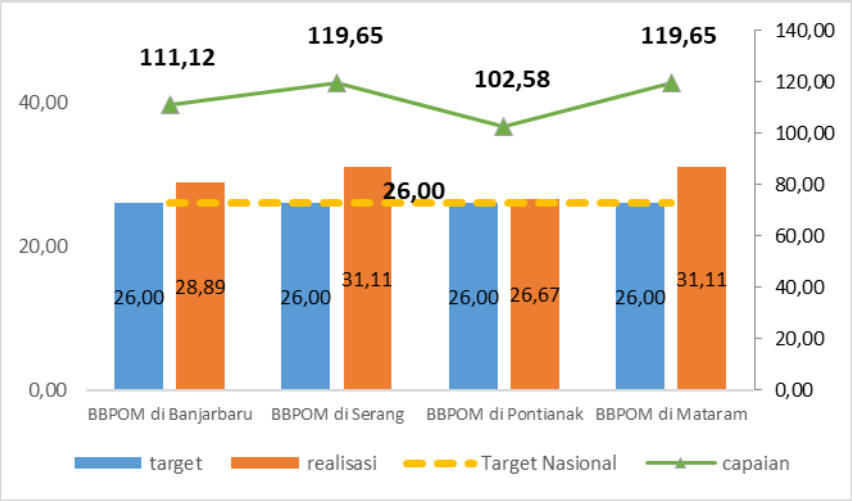
Realisasi capaian tahun 2025 sebesar 31,11**%** tidak hanya melampaui target tahunan (26%), tetapi juga telah melampaui target akhir periode Renstra tahun 2029 yang ditetapkan sebesar 30%.

Capaian ini menunjukkan bahwa pada tahun pertama implementasi indikator, kinerja telah melampaui *trajectory* yang direncanakan dalam Renstra. Dengan demikian, secara persentase, capaian tahun 2025 telah mencapai lebih dari 100% terhadap target akhir periode.

Namun demikian, capaian ini perlu dianalisis secara proporsional. Indikator dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE pada tahun berjalan, sehingga peningkatan capaian sangat dipengaruhi oleh efektivitas intervensi pada kelompok sasaran. Oleh karena itu, meskipun secara angka telah melampaui target akhir Renstra, keberlanjutan dan konsistensi pelaporan dari fasilitas pelayanan kesehatan tetap menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas capaian hingga tahun 2029.

Ke depan, diperlukan penyesuaian strategi dan kemungkinan reviu target Renstra secara bertahap agar tetap mencerminkan prinsip peningkatan kinerja yang berkelanjutan (*continuous improvement*), serta mempertimbangkan perluasan cakupan intervensi agar indikator ini semakin representatif terhadap kondisi keseluruhan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja.

### d. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN BALAI BESAR POM KLASTER 5




**Gambar 3.3** Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster

Pada tahun 2025, target indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO pada seluruh BBPOM dalam satu klaster ditetapkan sama, yaitu sebesar 26%.

Berdasarkan capaian kinerja, BBPOM di Mataram dan BBPOM di Serang memperoleh realisasi yang sama yaitu sebesar 31,11%, dan merupakan capaian tertinggi dalam klaster 5. Adapun capaian BBPOM lainnya adalah:

- BBPOM di Banjarbaru mencapai 28,89%
- BBPOM di Pontianak mencapai 26,67%

Seluruh balai dalam klaster 5 menunjukkan kinerja yang baik karena berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Namun demikian, BBPOM di Mataram bersama BBPOM di Serang berada pada posisi capaian tertinggi, yang menunjukkan efektivitas pelaksanaan KIE farmakovigilans serta keberhasilan dalam mendorong partisipasi aktif fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelaporan KTD/ESO.

Capaian ini mencerminkan bahwa strategi pembinaan, koordinasi, dan pendampingan yang dilakukan telah berjalan optimal, serta berpotensi menjadi praktik baik (best practice) yang dapat direplikasi pada balai lain dalam klaster.

### e. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Capaian indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO pada tahun 2025 yang melampaui target menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci.

Pertama, pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Farmakovigilans yang dilakukan secara terarah kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang belum atau belum konsisten melaporkan KTD/ESO. Pendekatan ini efektif karena langsung menyasar kelompok prioritas sesuai kriteria dalam petunjuk pelaksanaan, sehingga intervensi yang diberikan lebih tepat sasaran.

Kedua, peningkatan pemahaman dan kompetensi tenaga kesehatan/tenaga medis melalui kegiatan bimbingan teknis yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dilengkapi dengan diskusi interaktif dan simulasi pelaporan pada aplikasi e-MESO. Pendekatan ini mampu meningkatkan pemahaman praktis serta kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pelaporan secara mandiri.

Ketiga, penguatan strategi komunikasi dan pendampingan melalui pembentukan grup komunikasi berbasis aplikasi pesan instan (WhatsApp Group) yang melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan peserta KIE. Media ini dimanfaatkan sebagai sarana koordinasi, pengingat pelaporan, konsultasi teknis, serta berbagi informasi secara cepat dan responsif. Keberadaan grup ini terbukti efektif dalam menjaga engagement dan memastikan keberlanjutan pelaporan KTD/ESO.

Keempat, penerapan mekanisme apresiasi kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang aktif dan konsisten dalam melaporkan KTD/ESO. Pemberian apresiasi ini menjadi bentuk penguatan motivasi dan pengakuan atas komitmen tenaga kesehatan, sehingga mendorong fasilitas pelayanan kesehatan lainnya untuk turut berpartisipasi aktif dalam pelaporan.

Kelima, peran aktif focal point farmakovigilans di BBPOM di Mataram dalam melakukan monitoring dan pendampingan secara berkelanjutan. Pendampingan ini mencakup fasilitasi penyelesaian kendala teknis, pengingat berkala, serta tindak lanjut terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang belum melakukan pelaporan.

Keenam, pemanfaatan data monitoring melalui aplikasi e-MESO yang memungkinkan identifikasi fasilitas pelayanan kesehatan yang telah dan belum melaporkan KTD/ESO, sehingga intervensi lanjutan dapat dilakukan secara lebih terarah dan berbasis data.

Namun demikian, peningkatan kinerja ini masih terbatas pada fasilitas pelayanan kesehatan yang telah mendapatkan intervensi, sehingga diperlukan upaya perluasan cakupan untuk mencapai dampak yang lebih luas.

Meskipun realisasi kinerja berhasil melampaui target dengan capaian sebesar 119,65%, namun karena melebihi 110% sehingga tidak dapat disimpulkan. Kondisi ini mengindikasikan adanya proyeksi target yang terlalu rendah (underestimated). Hal tersebut terjadi karena merupakan indikator baru pada tahun 2025, sehingga penyusunan target belum didukung oleh data baseline maupun analisis tren capaian dari tahun-tahun sebelumnya.

### f. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

**Tabel 3.10** Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO Tahun 2025

| Indikator Kinerja | Kendala/Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO | Tenaga kesehatan di Fasyankes (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik) seringkali memiliki beban kerja pelayanan pasien yang sangat tinggi, sehingga pelaporan farmakovigilans (KTD/ESO) dianggap sebagai beban administratif tambahan dan bukan prioritas utama. | Melakukan penyegaran (refreshment) KIE secara daring secara rutin untuk menjangkau tenaga medis baru tanpa harus menunggu jadwal Bimtek tatap muka yang terbatas anggaran | Melakukan bimtek kepatuhan pelaporan farmakofigilens terhadap tenaga medis dan sarana pelayanan kesehatan melaui daring maupun luring. | TW 1 Tahun 2026 | T | - | - |
| | Kurangnya kepekaan atau kemampuan deteksi tenaga kesehatan dalam mengidentifikasi kejadian medis sebagai akibat dari penggunaan obat (khususnya untuk efek samping yang bersifat ringan atau jangka panjang) | | | | T | - | - |

### g. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan program KIE Farmakovigilans yang terstruktur dan berbasis kebutuhan. Kegiatan bimbingan teknis yang dilaksanakan tidak hanya bersifat penyampaian materi, tetapi juga dilengkapi dengan diskusi interaktif dan simulasi pelaporan, sehingga meningkatkan efektivitas transfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta.

Program ini juga didukung oleh kegiatan monitoring dan evaluasi yang memanfaatkan data pelaporan pada aplikasi e-MESO, sehingga memungkinkan BBPOM di Mataram untuk melakukan identifikasi dan tindak lanjut secara cepat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang belum melaksanakan pelaporan.

Selain itu, adanya dukungan kebijakan melalui regulasi farmakovigilans serta peran aktif UPT BPOM dalam mengawal implementasinya turut menjadi faktor pendukung keberhasilan program.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa kendala yang berpotensi mempengaruhi pencapaian kinerja, antara lain belum meratanya pemahaman tenaga kesehatan terkait pentingnya pelaporan KTD/ESO, keterbatasan waktu dan beban kerja tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, serta kendala teknis dalam penggunaan aplikasi pelaporan.

Secara keseluruhan, program dan kegiatan yang dilaksanakan telah mampu mendorong peningkatan capaian kinerja, meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek perluasan cakupan dan keberlanjutan pelaporan.

### h. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**Tabel 3.11** Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO Tahun 2025

| Indikator | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T | R | % | T | R | % | | | |
| Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO | 26,00 | 31.11 | 119,65 | 4.450.000 | 4.448.000 | **99,96** | **1,20** | **0,20** | **100 % (Efisien)** |

Berdasarkan tabel diatas, bahwa penggunaan sumber daya/anggaran adalah efisien dengan capaian efisiensi sebesar 100%. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO pada tahun 2025

menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya yang sangat baik. Hal ini tercermin dengan input anggaran sebesar 99,96% menghasilkan output sebesar 119,65%.

Efisiensi tersebut didukung oleh perencanaan kegiatan yang tepat sasaran, khususnya dalam pelaksanaan KIE Farmakovigilans yang difokuskan pada fasilitas pelayanan kesehatan prioritas. Selain itu, metode pelaksanaan kegiatan yang mengedepankan efektivitas, seperti pemanfaatan narasumber internal (focal point farmakovigilans) serta penggunaan media komunikasi digital untuk pendampingan lanjutan, turut berkontribusi dalam menekan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas output kegiatan.

Penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia secara optimal, serta integrasi kegiatan monitoring melalui platform e-MESO dan komunikasi berbasis grup WhatsApp, juga menjadi faktor pendukung efisiensi. Dengan pendekatan ini, kebutuhan untuk kegiatan tatap muka lanjutan dapat diminimalkan, sehingga biaya dapat dialokasikan secara lebih efektif.

Meskipun penggunaan anggaran mendekati pagu yang direncanakan, capaian kinerja yang dihasilkan mampu melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya tidak hanya efisien dari sisi anggaran, tetapi juga efektif dalam menghasilkan output dan outcome yang optimal.

Secara keseluruhan, efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang baik, terencana, dan akuntabel, serta mendukung pencapaian kinerja yang optimal pada indikator farmakovigilans.

### 1.3. PERSENTASE SAMPEL PANGAN OLAHAN BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling yang meliputi kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel, ketepatan pengambilan kesimpulan, ketepatan pelaporan sampling dan pengujian dan ditindaklanjuti sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya.

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung berdasarkan rumus :

= 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan : $(\frac{A1 + A2}{2})$

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling (**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kadaluarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan:

$$\left(\frac{\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling}}{\text{Jumlah sampel yang diuji}}\right) \times 100\%$$

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan:

$$\left(\frac{\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling}}{\text{Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}}\right) \times 100\%$$

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kadaluarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu. Ketepatan pengambilan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan:

$$\left(\frac{\text{Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak}}{\text{Jumlah sampel yang diperiksa}}\right) \times 100\%$$

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan:

$$\left(\frac{\text{Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling}}{\text{Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}}\right) \times 100\%$$

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah sampel yang ditindaklanjuti}}{\text{(Total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)}} \times 100\%$$

### a. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

**Tabel 3.12** Target, realisasi dan %capaian Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

| Sasaran kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 92 | 99.71 | 108,38 | Sangat baik |

Realisasi persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 dengan realisasi sebesar 99.71 dari target 92 sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 108,38% dengan kategori sangat baik.

**Tabel 3.13** Hasil Perhitungan Persentase Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Balai Besar POM di Mataram

| No | Bulan | Target Sampel Pangan Olahan | Target Indikator (%) | Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%) | Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%) | Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%) | Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%) | Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%) | Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot 20%) | Realisasi (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Februari | 16 | 85,00 | 73,08 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 94,62 |
| 2 | Maret | 23 | 85,00 | 94,02 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,80 |
| 3 | April | 61 | 85,00 | 75,17 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 95,03 |
| 4 | Mei | 108 | 85,00 | 80,65 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 96,13 |
| 5 | Juni | 161 | 85,00 | 85,38 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 97,08 |
| 6 | Juli | 216 | 85,00 | 83,20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 93,81 | 100,00 | 96,02 |
| 7 | Agustus | 270 | 92,00 | 89,38 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 95,68 | 100,00 | 97,44 |
| 8 | September | 327 | 92,00 | 91,16 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,13 | 100,00 | 98,05 |
| 9 | Oktober | 374 | 92,00 | 89,36 | 99,02 | 100,00 | 100,00 | 99,08 | 100,00 | 97,58 |
| 10 | November | 400 | 92,00 | 93,74 | 99,18 | 100,00 | 100,00 | 98,90 | 100,00 | 98,47 |
| 11 | Desember | 410 | 92,00 | 99,43 | 99,29 | 100,00 | 100,00 | 99,68 | 100,00 | 99,71 |

Berdasarkan tabel diatas, persentase realisasi persentase Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Balai Besar POM di Mataram menunjukkan trend yang sangat baik walaupun pada realisasi awal pelaksanaan kegiatan yaitu pada Februari masih mencapai 20,0%. Capaian terus meningkat signifikan dan stabil di atas 95% hingga akhir tahun dan mencapai 99,71% pada Desember. Pencapaian ini ditunjang oleh kesesuaian target sampel dan parameter uji, ketepatan pengambilan kesimpulan, ketepatan waktu pengambilan sampel dan pelaporan, serta tindak lanjut hasil pengawasan yang hampir seluruhnya mencapai 100%. Hal ini mencerminkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan pangan olahan sepanjang tahun 2025.

Berdasarkan tabel diatas, secara umum persentase realisasi mengalami kenaikan maupun penurunan, namun persentase realisasi dari awal tahun mulai dengan bulan Februari sampai dengan Desember melebihi 94 %. Nilai ini dipengaruhi oleh kesesuaian target sampel, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel, ketepatan pengambilan kesimpulan, ketepatan pelaporan sampling dan pengujian dan tindak lanjut hasil pengujian yang ditindaklanjuti sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya.

**Tabel 3.14** Data Pengujian Sampel Pangan Olahan Tahun 2025

| No | Asal Sampel | Target TH 2025 | Realisasi Tahun 2025 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jumlah | | Hasil Uji | |
| | | | Masuk Lab | Selesai Uji | MS | TMS |
| 1 | DIPA BBPOM di Mataram | 379 | 380 | 380 | 317 | 63 |
| | Lain2 (Kasus, PS, dll) | 31 | 40 | 40 | 27 | 13 |
| 2 | Balai Bima | 140 | 140 | 140 | 119 | 21 |
| | Lain2 (Kasus, PS, dll) | 12 | 10 | 10 | 8 | 2 |
| 3 | Lab. Regional | 39 | 48 | 48 | 46 | 2 |
| **Total** | | 601 | 618 | 618 | 517 | 101 |

Pada tahun 2025 telah dilakukan pengujian sampel pangan olahan sebanyak 618 sampel dengan hasil pengujian 517 sampel Memenuhi Syarat (MS) dan 101 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Berdasarkan hasil pengujian laboratorium, parameter uji yang tidak memenuhi syarat

(TMS) mencakup uji kimia dan mikrobiologi. Untuk uji kimia sampel TMS terdiri dari 8 sampel TMS Bromat, 6 sampel TMS siklamat, 5 sampel TMS KIO3, 4 sampel TMS Logam Cd, 3 sampel TMS 3 MCPD, 3 sampel TMS aflatoksin, 3 sampel TMS BHA, 1 sampel TMS Benzoat, 3 sampel TMS kadar air, 2 sampel TMS Logam As, 1 sampel TMS Logam Pb, 1 sampel TMS Sakarin, dan 1 sampel TMS Ratio BTP Pemanis. Untuk uji mikrobiologi sampel TMS terdiri dari 41 sampel TMS Angka Lempeng Total, 16 sampel TMS Angka Koliform, 13 sampel TMS Angka Kapang Khamir, 5 sampel TMS angka Pseudomonas aeruginosa, 5 sampel TMS angka Enterobacteriaceae, 2 sampel TMS angka Bacillus cereus, dan 2 sampel TMS DNA porcine. Seluruh sampel yang disampling, diperiksa dan diuji telah sesuai dengan pedoman sampling dan telah dilaporkan tepat waktu.

Dari 101 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS), diketahui bahwa 77 sampel pangan olahan produksi dalam negeri (MD), dimana 23 sampel adalah produk yang di produksi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan rincian 18 sampel AMDK, 4 sampel Garam, dan 1 sampel Tepung Tapioka. Sampel TMS lainnya yakni pangan olahan produksi luar negeri (ML) sebanyak 10 sampel terdiri dari 1 sampel Jeli siap konsumsi, 2 sampel manisan buah kering, 1 sampel minyak wijen, 2 sampel permen lunak/marshmallow, 1 sampel biji - bijian kering, 1 sampel permen karet, dan 1 sampel bumbu siap pakai.

Berdasarkan hasil pengujian laboratorium, sampel dengan hasil uji Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berasal dari berbagai jenis komoditi pangan, TMS Bromat pada produk AMDK, TMS Pemanis Siklamat pada produk jeli, manisan buah kering, saus cabai, minuman nata de coco dan serbuk minuman, TMS Pemanis Sakarin pada produk makanan ringan ekstrudat, TMS Logam Cd dan As pada produk sayuran dan biji - bijian kering, TMS Logam Pb pada produk manisan buah kering, TMS Pengawet Benzoat pada produk saus cabai, TMS Ratio BTP Pemanis pada produk serbuk minuman berperisa, TMS Kadar air dan KIO3 pada produk Garam, TMS BHA pada sampel minyak, TMS Aflatoksin pada sampel MPASI, cabai bubuk, pangan medis khusus, TMS 3 MCPD pada produk kecap, TMS ALT pada produk AMDK, makanan ringan ekstrudat, daging dan ikan olahan, teh kering dalam kemasan, minuman serbuk berperisa, bumbu siap pakai, saus cabai, cokelat imitasi dan kembang gula keras, TMS Koliform dan Pseudomonas aeruginosa pada produk AMDK, TMS AKK pada produk teh kering dalam kemasan, serbuk minuman berperisa, makanan ringan kacang, dan sayuran kering, TMS angka enterobacteriaceae pada produk daging olahan, makanan ringan non ekstrudat, dan minuman mengandung susu, TMS Angka Bacillus cereus pada produk tepung selain tepung terigu dan TMS DNA porcine pada produk kembang gula lunak/marshmallow.

### b. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN 2024

Realisasi Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator kinerja baru di periode renstra 2025-2029.

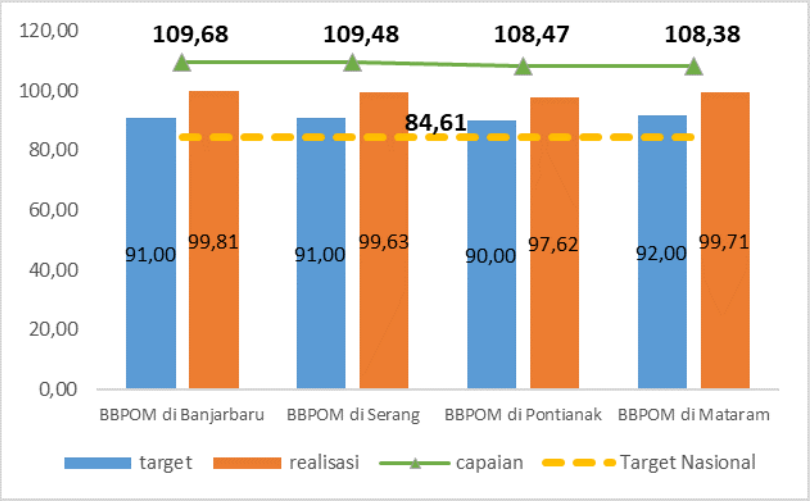
### c. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (2029)

**Tabel 3.15** Perbandingan Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029)

| Indikator | Realisasi 2025 | Target Renstra (2029) | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 99.71 | 96.00 | 103.87% ▲ | Melampaui |

Realisasi kinerja pada tahun 2025 sebesar 99,71 %, dengan persentase capaian sebesar 108,38 %, jika dibandingkan dengan target akhir renstra pada indikator kinerja persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan target sebesar 96 % maka realisasi tahun 2025 telah melampaui target tersebut, sehingga organisasi perlu mempertimbangkan langkah strategis lebih lanjut dengan melakukan reviu Renstra guna melakukan penyesuaian target jangka panjang.

### d. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN BALAI BESAR POM KLASTER 5




**Gambar 3.4** Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster

Berdasarkan grafik, seluruh satker berhasil melampaui target yang ditetapkan serta berada di atas Target Nasional (84,61%).

BBPOM di Banjarbaru mencatat capaian tertinggi sebesar 109,68% dengan realisasi 99,81 dari target 91. Disusul BBPOM di Serang dengan capaian 109,48% (realisasi 99,63 dari target 91). BBPOM di Pontianak mencapai 108,47% (realisasi 97,62 dari target 90), sedangkan BBPOM di Mataram memperoleh capaian 108,38% (realisasi 99,71 dari target 92).

Secara komparatif, perbedaan capaian antar satker relatif kecil dan menunjukkan kinerja yang merata. Meskipun BBPOM di Mataram bukan yang tertinggi, capaian yang diraih tetap sangat baik karena melampaui target internal maupun target nasional.

### e. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Keberhasilan pencapaian target 100% merupakan indikator bahwa sistem pengawasan Pangan Olahan berisiko telah berjalan secara efektif, terkoordinasi, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Capaian ini tidak hanya menunjukkan pemenuhan target kinerja administratif, tetapi juga menggambarkan optimalnya fungsi perlindungan masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Hal ini dikarenakan personil memiliki kompetensi untuk melakukan Identifikasi dan pemetaan Pangan Olahan berisiko yang dilakukan secara akurat sehingga seluruh sampel prioritas dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu adanya koordinasi yang baik antara tim inspeksi dan tim pengujian dalam implementasi renlak sampling, peningkatan kompetensi personil dengan mengikuti Bimtek sampling, Iklan dan Penandaan dan *in house training* pengujian. Petugas juga melaksanakan sampling dan pengujian sesuai pedoman / juknis yang berlaku. Laboratorium BBPOM di Mataram juga telah menerapkan Digitalisasi Pelaporan dan mengimplementasikan Inovasi SiOpa Lagi JJ (Sistem Pengopersian Alat Lab Jarak Jauh) yang mampu memonitor penyelesaian uji sampel secara *realtime* sehingga tidak terjadi pengulangan pengujian akibat adanya kendala teknis saat pengoperasian alat lab. Hal tersebut berdampak signifikan dalam capaian *timeline* uji tepat waktu. Adanya monev sampling dan pengujian secara rutin, capaian ini didukung juga oleh meningkatnya kesadaran dan kepatuhan pelaku UMKM dalam menerapkan regulasi yang berlaku, seperti penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), kepatuhan ini berkontribusi pada menurunnya tingkat pelanggaran yang bersifat berulang serta mempermudah proses tindak lanjut terhadap temuan. Responsivitas pelaku usaha terhadap pembinaan dan pengawasan dari BPOM, yang ditindak lanjuti dengan melakukan perbaikan pada sarana produksi, menghentikan distribusi produk yang tidak memenuhi ketentuan dan melaksanakan tindakan korektif dalam batas waktu yang ditetapkan. Selain itu faktor lain yang menjadi keberhasilan capaian IKSK ini adalah efektivitas program pembinaan UMKM dengan melakukan edukasi yang berkelanjutan sehingga meningkatkan pemahaman UMKM mengenai pentingnya menjaga mutu dan keamanan produk.

### f. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

**Tabel 3.16** Matriks Rekomendasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025

| Indikator Kinerja | Kendala/Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Tantangan dalam memenuhi timeline yang ditetapkan dalam Pedoman Sampling, terutama jika sampel pangan olahan memerlukan pengujian parameter yang kompleks atau harus dirujuk ke laboratorium regional lain (Regionalisasi Laboratorium) | Mempercepat tindak lanjut hasil uji melalui integrasi jadwal sampling dengan inspeksi sarana serta penguatan koordinasi laboratorium regional agar seluruh proses selesai tepat waktu sesuai ketentuan | Melakukan evaluasi rutin setiap bulan terhadap status sampel pangan olahan, mulai dari pengambilan, pengujian, hingga status tindak lanjutnya dalam sistem untuk memastikan tidak ada yang melampaui batas waktu serta memastikan setiap sampel pangan olahan berisiko diuji berdasarkan parameter kritis yang sesuai dengan potensi bahaya dan risiko yang sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian | TW 1 Tahun 2026 | T | - | - |

### g. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah :

1. Pelaksanaan evaluasi secara rutin terkait Ketepatan waktu dalam penyelesaian uji sampel, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu dan kelengkapan laporan pengujian melalui SIPT serta ketepatan dalam pengambilan Kesimpulan setiap bulannya

2. Melakukan evaluasi secara rutin antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan sampling sesuai kategori, ketepatan waktu pelaksanaan sampling, ketepatan dalam pengambilan kesimpulan terkait penandaan, ketepatan waktu pelaporan sampling melalui SIPT serta melaksanakan tanggapan surat tindak lanjut untuk komoditi PIRT tepat waktu
3. Penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan ISO 17025:2017 secara konsisten dalam pelaksanaan pengujian laboratorium di BBPOM di Mataram,
4. Identifikasi terhadap kebutuhan pelatihan di Laboratorium BBPOM di Mataram baik pelatihan dalam bentuk Bimtek Internal maupun supervisi (transfer of knowledge) oleh penyelia ataupun penguji senior,
5. Proses pengadaan sarana penunjang pengujian (reagensia, media mikrobiologi, baku pembanding, suku cadang, bahan habis pakai, kebutuhan ruangan dan listrik, dan lain-lain),
6. Proses pengadaan alat laboratorium tahun anggaran 2025 sesuai dengan persetujuan dari PPPOMN untuk memenuhi peralatan laboratorium,
7. Pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai dengan pedoman sampling Tahun 2025,
8. Monitoring terhadap timeline waktu sampling, waktu pengujian dan waktu pelaporan serta kesesuaian pengujian dengan parameter uji kritis setiap bulannya,
9. Pelaksanan rapat koordinasi internal terkait rencana pelaksanaan sampling pada awal tahun 2025,
10. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan dilakukan secara berkala dan dilaporkan hasil tindak lanjut kepada direktorat terkait,
11. Pelaksanaan uji banding antar laboratorium maupun uji profisiensi untuk komoditi Pangan dan Mikrobiologi sebagai bentuk peningkatan jaminan mutu hasil pengujian di laboratorium,
12. Peningkatan kapasitas laboratorium melalui peningkatan kompetensi personil Laboratorium secara daring maupun luring.
13. Koordinasi terkait hasil uji untuk sampel yang diuji lintas balai anggota Region Surabaya baik melalui whatsapp group, link bit.ly pelaporan sampling dan pengujian Region Surabaya maupun melalui SIPT,
14. Pelaksanaan pelaporan hasil sampling dan uji melalui SIPT,
15. Pelaksanaan perawatan/perbaikan peralatan untuk menunjang kelancaran proses pengujian,
16. Pelaksanaan revisi anggaran untuk memenuhi kebutuhan pengujian dan memperlancar proses pengujian,
17. Perencanaan rekalibrasi dan verifikasi peralatan laboratorium guna menjamin validitas hasil pengujian,
18. Desk revisi target PK RAPK 2025 dan melakukan penyesuaian target capaian indikator sesuai dengan hasil desk dengan Rorenkeu dan unit pengampu pada kegiatan Bimtek Renstra 2025-2029.

19. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Kewajiban Produsen Pangan Olahan Memiliki Izin Penerapan CPPOB bagi 18 UMK di Lombok Barat pada tanggal 30 Januari 2025;
20. Melaksanakan kegiatan Bimtek CPPOB bagi UMK Pangan Olahan tanggal 26-28 Mei 2025;

### h. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**Tabel 3.17** Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025

| Indikator | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T | R | % | T | R | % | | | |
| Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 92,00 | 99.71 | 108,38 | 212.130.375 | 212.128.104 | **100,00** | **1,08** | **0,08** | **100 % (Efisien)** |

Berdasarkan tabel diatas, bahwa penggunaan sumber daya/anggaran adalah efisien dengan capaian efisiensi sebesar 100%.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya yang sangat baik. Hal ini tercermin dengan input anggaran sebesar 100,0% menghasilkan output sebesar 108,38%. Efisiensi sumber daya seperti efisiensi anggaran antara lain dihasilkan melalui optimalisasi penggunaan media, reagen, dan baku pembanding serta optimalisasi pemanfaatan alat laboratorium melalui pengaturan jadwal penggunaan, maintenance alat, dan inovasi i-Conic.

## 1.4. PERSENTASE SAMPEL KLB KERACUNAN PANGAN YANG DIUJI SESUAI STANDAR OLEH UPT

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan

uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Cara Perhitungan dan Formula Persentase sampel KLB Keracunan pangan yang diuji sesuai standar :

$$= \frac{\Sigma\ (30\% \times A_1, A_2, \ldots\ldots\ldots, A_n) + (35\% \times B_1, B_2, \ldots\ldots\ldots, B_n) + (35\% \times C_1, C_2, \ldots\ldots\ldots, C_n)}{n}$$

A = Jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

n = total sampel

### a. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

**Tabel 3.18** Target, realisasi dan %capaian Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

| Sasaran kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT | 100 | 100 | 100,00% | Baik |

Realisasi persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT pada tahun 2025 dengan realisasi sebesar 100 dari target 100 sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 100 % dengan kategori Baik.

**Tabel 3.19** Jumlah dan Asal Sampel KLB KP

| Bulan | Jumlah Sampel | | Asal Sampel |
|---|---|---|---|
| | KLB | KLB MBG | |
| Februari | 4 | 0 | Lombok Tengah |
| Mei | 0 | 5 | Lombok Tengah |
| Juli | 3 | 8 | Sumbawa, Kupang |
| Agustus | 4 | 0 | Lombok Utara, Lombok Barat |
| September | 3 | 24 | Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa |
| Oktober | 0 | 17 | Bima, Lombok Utara, Lombok Timur |
| November | 3 | 9 | Sumbawa Barat, Kota Mataram, Lombok Timur |
| **Total** | **17** | **63** | |

Pada tahun 2025, jumlah sampel Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP) yang di uji di Laboratorium sebanyak 80 sampel yang berasal dari sampel KLB (non MBG) 17 sampel dan KLB KP MBG 63 sampel. Seluruh sampel telah diuji sesuai dengan laporan KLB KP dengan penyimpulan agen penyebab KLB KP yang tepat.

Sebanyak 72 sampel berasal dari beberapa kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan 8 sampel merupakan sampel kasus KLB yg dikirim oleh Balai Besar POM di Kupang. Sampel KLB dari Pulau Sumbawa berasal dari Kabupaten Sumbawa sebanyak 16 sampel, Sumbawa Barat 5 sampel, dan Bima sebanyak 3 sampel. Dari Pulau Lombok berasal dari Kabupaten Lombok Barat sebanyak 14 sampel, Lombok Tengah sebanyak 12 sampel, Lombok Timur sebanyak 10 sampel, Lombok Utara sebanyak 9 sampel, dan Kota Mataram sebanyak 3 sampel.

Penentuan parameter uji merujuk pada laporan penyelidikan epidemiologi yang mengarah pada agen penyebab terjadinya KLB KP. Penentuan agen penyebab KLB merujuk pada tabel referensi kriteria laboratorium untuk konfirmasi penyebab penyakit, sehingga pengujian sampel KLB KP mencakup uji kimia dan mikrobiologi. Parameter uji kimia yang telah diuji seperti uji Histamin, pH, identifikasi Arsen, Timbal, Sianida, Nitrit, Kadar Air, Boraks, Formalin, Rhodamin B, Methanil Yellow dan uji mikrobiologi seperti uji Angka E.coli, *Bacillus cereus*, *Staphylococcus aureus*, Salmonella, dan *Listeria monocytogenes*. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium, jenis pangan yang diuji merupakan pangan siap saji seperti nasi, olahan daging, olahan ikan, buah dan sayur, serta olahan tepung, ditemukan beberapa sampel yang tidak memenuhi persyaratan seperti, angka *Bacillus cereus* sebanyak 4 sampel, *Staphylococcus aureus* sebanyak 5 sampel, *E. coli* sebanyak 18 sampel, Nitrit sebanyak 2 sampel, dan Histamin sebanyak 8 sampel.

Cemaran *Escherichia coli (E.coli)* merupakan temuan yang paling banyak ditemukan. Bakteri ini merupakan indikator pencemaran fekal dan menunjukkan kondisi sanitasi yang buruk. Keberadaannya dalam makanan dapat disebabkan oleh penggunaan air pencuci bahan pangan yang tercemar, tidak diterapkannya higiene oleh penjamah makanan (misalnya tidak mencuci

tangan sebelum menjamah makanan), terjadinya kontaminasi silang antara bahan baku mentah dan pangan siap saji, serta fasilitas sanitasi yang tidak memadai.

Cemaran *Staphylococcus aureus* yang merupakan flora normal pada kulit manusia menunjukkan adanya higiene personal penjamah makanan yang tidak diterapkan dengan baik. Hal ini dapat terjadi karena penjamah makanan tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) seperti sarung tangan, masker, dan penutup kepala; terdapat luka terbuka pada permukaan kulit yang tidak ditutup saat mengolah makanan; makanan dibiarkan pada suhu ruang terlalu lama (>2 jam); serta tidak menggunakan peralatan saat menjamah pangan siap saji.

Cemaran *Bacillus cereus* umumnya ditemukan pada produk yang mengandung pati, seperti nasi dan olahan tepung. Keberadaan bakteri ini mengindikasikan bahwa makanan didiamkan pada suhu ruang terlalu lama, proses pendinginan tidak dilakukan dengan tepat, serta pemanasan ulang tidak mencapai suhu minimal >74°C, sehingga memungkinkan pertumbuhan bakteri.

Selain cemaran mikrobiologi, ditemukan pula cemaran kimia berupa histamin pada sampel ikan. Kadar histamin yang melebihi persyaratan umumnya disebabkan oleh penyimpanan dan distribusi yang tidak terkendali suhunya atau ikan tidak disimpan pada suhu yang sesuai, sehingga mendukung pembentukan histamin.

Sementara itu, cemaran nitrit dalam makanan dapat berasal dari kandungan alami pada beberapa bahan pangan. Namun, apabila kadarnya melebihi batas yang ditetapkan, hal tersebut dapat mengindikasikan penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

### a. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN 2024

Realisasi Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator kinerja baru di periode renstra 2025-2029.

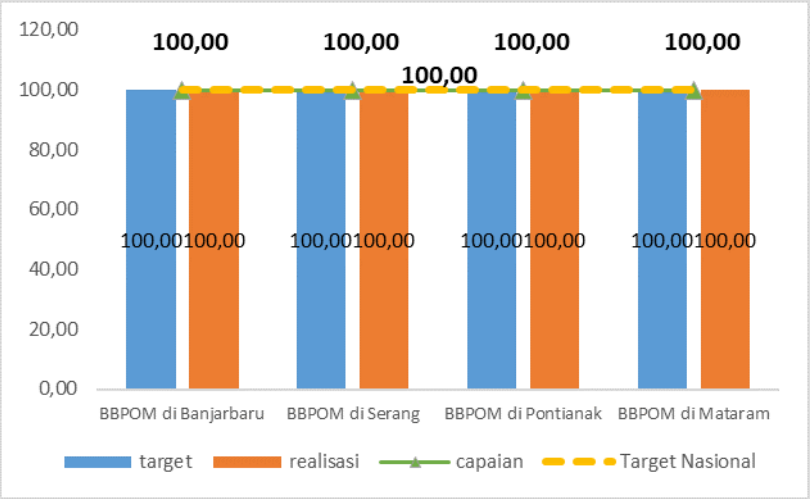
### b. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (2029)

**Tabel 3.20** Perbandingan Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029)

| Indikator | Realisasi 2025 | Target Renstra (2029) | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT | 100.00 | 100.00 | 100.00% ▲ | Tercapai |

Realisasi kinerja pada tahun 2025 sebesar 100 %, dengan persentase capaian sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target akhir renstra pada indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT dengan target sebesar 100 %, maka realisasi tahun 2025 telah mencapai target tersebut, sehingga organisasi perlu mempertimbangkan langkah strategis lebih lanjut dengan melakukan reviu Renstra guna melakukan penyesuaian target jangka panjang.

### d. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN BALAI BESAR POM KLASTER 5




**Gambar 3.5** Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster

Berdasarkan grafik, seluruh satker dalam satu klaster (BBPOM di Banjarbaru, BBPOM di Serang, BBPOM di Pontianak dan BBPOM di Mataram) berhasil mencapai target yang ditetapkan, dan mencapai target nasional sebesar 100 %. Seluruh satker memiliki target, realisasi dan persentase capaian yang sama sebesar 100%, hal ini menunjukan komitmen dan pengawasan yang efektif pada seluruh satker dalam penanganan KLB di wilayah kerja masing - masing UPT.

### c. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Pada tahun 2025, capaian Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator ini merupakan salah satu indikator kinerja baru pada tahun 2025 yang berfokus pada penguatan respons cepat dan akuntabel dalam penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan di wilayah kerja UPT. Pengukuran indikator dilakukan berdasarkan jumlah kejadian kasus KLB keracunan pangan di wilayah kerja yang telah dilakukan pengambilan sampel dan pengujian laboratorium sesuai standar metodologi

yang berlaku. Dengan tercapainya target 100%, hal ini menunjukkan bahwa seluruh kasus KLB yang terlapor telah ditindaklanjuti melalui pengujian laboratorium secara tepat, terstandar, dan terdokumentasi.

Keberhasilan capaian ini didukung oleh beberapa faktor yakni, respons cepat tim pemeriksaan dan laboratorium, peningkatan koordinasi lintas sektor khususnya dengan Dinas Kesehatan sehingga pelaporan kejadian KLB dapat diterima secara cepat dan lengkap, ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium yang memadai seperti media, reagen, test kit dan alat laboratorium. Kesiapsiagaan dalam menangani kasus KLB karena adanya penguatan sistem manajemen mutu laboratorium sehingga seluruh proses pengujian dilakukan sesuai SOP dan terdokumentasi dengan baik, kemudian adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kasus KLB sehingga tidak terdapat kasus yang tidak tertangani atau terlambat diuji. Pengujian sampel KLB keracunan pangan menjadi salah satu prioritas pengujian dalam rangka memastikan respons cepat dan tepat terhadap kejadian yang berpotensi menimbulkan dampak kesehatan masyarakat secara luas. Melalui pengujian laboratorium yang dilakukan sesuai standar, UPT dapat segera mengidentifikasi agen penyebab, baik mikrobiologi maupun kimia, sehingga rekomendasi tindak lanjut seperti pengecekan hygiene sanitasi, penghentian produksi, maupun tindakan korektif lainnya dapat dilakukan secara terarah. Prioritas ini juga mendukung fungsi pengawasan berbasis risiko oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam meminimalkan risiko lanjutan, mencegah kasus serupa, serta memberikan kepastian perlindungan kepada masyarakat. Sebagai indikator baru, pencapaian ini menunjukkan komitmen BBPOM di Mataram dalam memperkuat fungsi pengawasan berbasis risiko dan respons terhadap kejadian darurat pangan.

### d. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

**Tabel 3.21** Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT Tahun 2025

| Indikator Kinerja | Kendala/Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT | Data epidemiologi dari lapangan (oleh Dinkes/Puskesmas) seringkali tidak lengkap, seperti ketidakjelasan gejala klinis dominan atau masa inkubasi. Hal ini menyulitkan | Memastikan lampiran form investigasi epidemiologi yang lengkap pada setiap pengiriman sampel agar penentuan parameter uji oleh personil | Menyelenggarakan pertemuan koordinasi dengan Dinas Kesehatan se-Provinsi NTB untuk menyepakati mekanisme komunikasi cepat dan kelengkapan data dukungan pengujian KLB | TW 4 2025 | T | - | - |

| Indikator Kinerja | Kendala/Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | laboratorium dalam menentukan parameter uji yang "sesuai standar" (menghubungkan gejala dengan agen penyebab) | laboratorium tepat sasaran (sesuai gejala dan masa inkubasi) | secara daring atau luring | | | | |
| | Sampel yang diterima seringkali tidak memenuhi syarat teknis (volume kurang, tidak ada sampel sisa pangan, atau rantai dingin/cold chain tidak terjaga selama perjalanan dari lokasi jauh seperti Sumbawa/Bima), sehingga validitas pengujian mikroba tidak terjamin. | Memastikan Dinkes Kabupaten/Kota memiliki kit pengambilan sampel yang standar (wadah steril, cool box, termometer) untuk menjaga integritas sampel. | Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota agar sampel yang dikirim ke BBPOM di Mataram dilakukan sesuai dengan cara pengambilan sampel yang benar sehingga sampel yang diterima dapat menggambarkan sebagai penyebab kejadian keracunan. | TW 1 Tahun 2026 | T | - | - |

### e. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT adalah :

1. Penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan ISO 17025:2017 secara konsisten dalam pelaksanaan pengujian laboratorium di BBPOM di Mataram;
2. Identifikasi terhadap kebutuhan pelatihan di Laboratorium BBPOM di Mataram baik pelatihan dalam bentuk Bimtek Internal maupun supervisi (transfer of *knowledge*) oleh penyelia ataupun penguji senior;
3. Proses pengadaan sarana penunjang pengujian (reagensia, media mikrobiologi, baku pembanding, suku cadang, bahan habis pakai, kebutuhan ruangan dan listrik, dan lain-lain);
4. Proses pengadaan alat laboratorium tahun anggaran 2025 sesuai dengan persetujuan dari PPPOMN untuk memenuhi peralatan laboratorium;
5. Pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai dengan pedoman referensi Penentuan Sumber dan Etiologi KLB KP;

6. Monitoring terhadap timeline waktu sampling, waktu pengujian dan waktu pelaporan serta kesesuaian pengujian dengan parameter uji setiap kasus KLB;
7. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan dilakukan secara berkala dan dilaporkan hasil tindak lanjut kepada direktorat terkait;
8. Pelaksanaan pelaporan hasi uji melalui SIPT;
9. Pelaksanaan perawatan/perbaikan peralatan untuk menunjang kelancaran proses pengujian;
10. Pelaksanaan revisi anggaran dan alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan media dan reagen uji cepat untuk pengujian KLB;
11. Perencanaan rekalibrasi dan verifikasi peralatan laboratorium guna menjamin validitas hasil pengujian;
12. Desk revisi target PK RAPK 2025 dan melakukan penyesuaian target capaian indikator sesuai dengan hasil desk dengan Rorenkeu dan unit pengampu pada kegiatan Bimtek Renstra 2025-2029;
13. Koordinasi Lintas Sektor khususnya dengan Dinas Kesehatan serta pemangku kepentingan lainnya dalam mempercepat alur pelaporan dan pertukaran informasi kasus KLB. Koordinasi ini memastikan setiap kejadian KLB yang dilaporkan langsung ditindaklanjuti dengan pengambilan dan pengujian sampel;
14. Mengikuti Pertemuan Evaluasi Kekarantinaan Kesehatan & KLB Tingkat Provinsi NTB Tahun 2025 tanggal 17 November 2025 yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTB;
15. Pembinaan dan edukasi terhadap pelaku usaha pangan dalam meningkatkan penerapan higiene dan sanitasi;
16. Pemantauan/monev berkala terkait kejadian KLB KP bersama Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM;
17. Penguatan Sistem Respons Cepat dalam penanganan kasus KLB dengan membentuk Tim Investigasi KLB KP di UPT.

### f. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**Tabel 3.22** Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

| Indikator | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T | R | % | T | R | % | | | |
| Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT | 100,00 | 100.00 | 100,00 | 141.420.250 | 141.418.736 | **100,00** | **1,00** | **0,00** | **100 % (Efisien)** |

Berdasarkan tabel diatas, bahwa penggunaan sumber daya/anggaran adalah efisien dengan capaian efisiensi sebesar 100%.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT pada tahun 2025 menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya yang baik. Hal ini tercermin dengan input anggaran sebesar 100,0% menghasilkan output kinerja sebesar 100,0% juga.

Efisiensi anggaran pada pelaksanaan pengujian sampel KLB keracunan pangan tahun 2025 tercermin dari optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi mutu dan ketepatan hasil pengujian. Meskipun indikator ini merupakan indikator baru, capaian target dapat diraih dengan pengelolaan anggaran yang terencana, terukur, dan berbasis kebutuhan riil kasus di lapangan. Beberapa aspek efisiensi yang mendukung keberhasilan tersebut yakni adanya alokasi pembiayaan difokuskan pada pengujian kasus KLB yang bersifat emergensi dan berdampak luas, sehingga penggunaan anggaran lebih tepat sasaran, optimalisasi penggunaan dan bahan laboratorium termasuk pemanfaatan metode uji cepat *(rapid test*) sebagai skrining awal, efisiensi biaya operasional sampling dan pemeriksaan sarana, dan kerja sama dengan instansi terkait dalam investigasi KLB dengan dukungan sumber daya dan informasi, sehingga proses penanganan menjadi lebih efisien.

### 1.5. PERSENTASE SAMPEL PIRT BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko, diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling berdasarkan kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan). Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Cara Perhitungan dan Formula Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan :

= 20% A + 20% B + 20% C + 10% D + 10% E + 20% F

A. Kesesuaian target sampel PIRT

Cara Perhitungan : $\frac{A1 + A2}{2}$

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling (**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kadaluarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan: $(\frac{Jumlah\ sampel\ sesuai}{Total\ Sampel\ PIRT})\ x\ 100\%$

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan: $(\frac{Jumlah\ sampel\ yang\ diambil\ kesimpulan\ sesuai\ pedoman\ sampling}{Jumlah\ sampel\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji})\ x\ 100\%$

D. Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan: $(\frac{Jumlah\ sampel\ diambil\ di\ TW\ 2}{Total\ Sampel\ PIRT})\ x\ 100\%$

E. Ketepatan waktu pelaporan

Cara Perhitungan: $(\frac{Jumlah\ sampel\ tepat\ waktu}{Total\ Sampel\ PIRT})\ x\ 100\%$

F. Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan: $(\frac{Jumlah\ Sampel\ PIRT\ yang\ ditindaklanjuti}{Total\ jumlah\ sampel\ yang\ TMS})\ x\ 100\%$

### a. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

**Tabel 3.23** Target, realisasi dan %capaian Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

| Sasaran kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 85 | 100,00 | 117,65% | Tidak dapat disimpulkan |

Realisasi persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 dengan realisasi sebesar 100%, dari target yang telah ditetapkan sebesar 85%, dengan persentase capaian sebesar 117,65% dengan kategori tidak dapat disimpulkan.

**Tabel 3.24** Data Pengujian Sampel PIRT

| No | Asal Sampel | Target TH 2025 | Realisasi Tahun 2025 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jumlah | | Hasil Uji | |
| | | | Masuk Lab | Selesai Uji | MS | TMS |
| 1 | DIPA BBPOM Mataram | 36 | 36 | 36 | 28 | 8 |
| 2 | Balai Bima | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 |
| | **Total** | 49 | 49 | 49 | 41 | 8 |

Pada tahun 2025 telah dilakukan telah dilakukan sampling dan pemeriksaan 36 sampel PIRT dari 36 sampel yang direncanakan (100,0%). Telah dilakukan pengujian sampel PIRT sebanyak total 49 sampel yang masuk ke laboratorium dengan hasil pengujian 41 sampel memenuhi syarat (MS) dan 8 sampel Tidak memenuhi syarat (TMS). Berdasarkan hasil pengujian laboratorium, parameter uji yang tidak memenuhi syarat (TMS) mencakup uji kimia dan mikrobiologi. Untuk uji kimia sampel TMS terdiri dari 1 sampel TMS Siklamat, 1 sampel TMS sulfit dan 1 sampel TMS logam Pb. Untuk uji mikrobiologi sampel TMS terdiri dari, 3 sampel TMS angka kapang khamir dan 2 sampel TMS Angka Lempeng Total. Dari 8 sampel TMS, diketahui bahwa 6 sampel merupakan produk pangan PIRT yang diproduksi di wilayah Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium, sampel dengan hasil uji Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berasal dari berbagai jenis komoditi pangan, yakni TMS Siklamat pada produk makanan ringan simulasi, TMS Sulfit pada produk gula aren, TMS Logam Pb pada produk kembang gula keras, TMS Angka kapang khamir pada produk dodol buah dan minuman serbuk dan botanikal dan TMS Angka lempeng total pada produk minuman serbuk dan botanikal.

Seluruh sampel yang disampling, diperiksa dan diuji telah sesuai dengan perencanaan dan pedoman sampling serta telah dilaporkan tepat waktu.

### b. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN 2024

Realisasi Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator kinerja baru di periode renstra 2025-2029.

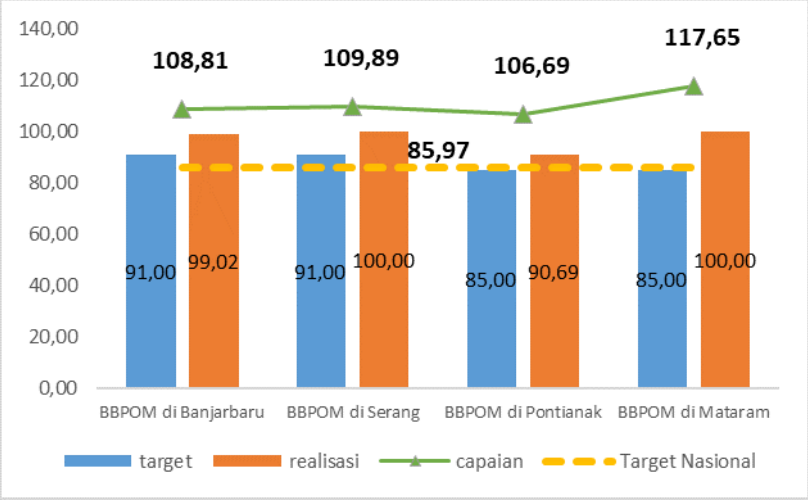
### c. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (2029)

**Tabel 3.25** Perbandingan Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029)

| Indikator | Realisasi 2025 | Target Renstra (2029) | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 100.00 | 95.00 | 105.26% ▲ | Melampaui |

Realisasi kinerja indikator kinerja persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 sebesar 100 %, jika dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 95,0% maka realisasi tahun 2025 telah tercapai sebesar 105,26%, sehingga organisasi perlu mempertimbangkan langkah strategis lebih lanjut dengan melakukan reviu Renstra guna melakukan penyesuaian target jangka panjang.

### d. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN BALAI BESAR POM KLASTER 5




**Gambar 3.6** Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster

Pada tahun 2025 target indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada BBPOM di Banjarbaru dan BBPOM di Serang ditetapkan sebesar 91% sedangkan BBPOM di Pontianak dan BBPOM di Mataram dengan target sebesar 85%. Berdasarkan capaian

kinerja BBPOM di Serang dan BBPOM di Mataram memperoleh realisasi yang sama sebesar 100%, BBPOM di Banjarbaru sebesar 99,02% dan BBPOM di Pontianak sebesar 90,69%. Meskipun target dan realisasi BBPOM dalam satu klaster berbeda, BBPOM di Mataram memperoleh persentase capaian tertinggi sebesar 117,65% diikuti oleh BBPOM di Serang (109,89%), BBPOM di Banjarbaru (108,81%) dan BBPOM Pontianak (106,69%), berdasarkan hal tersebut realisasi seluruh satker melampaui target internal dan target nasional yang ditetapkan sebesar 85,97%, hal ini menunjukan komitmen dan pengawasan yang efektif pada seluruh satker.

### e. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Keberhasilan pencapaian target merupakan indikator bahwa sistem pengawasan PIRT berisiko telah berjalan secara efektif, terkoordinasi, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya koordinasi yang baik antara tim inspeksi dan tim pengujian dalam implementasi renlak sampling. Kompetensi personil dengan mengikuti Bimtek sampling, Iklan dan Penandaan dan in house training pengujian. Petugas juga melaksanakan sampling dan pengujian sesuai pedoman / juknis yang berlaku. Laboratorium BBPOM di Mataram juga telah menerapkan Digitalisasi Pelaporan dan mengimplementasikan Inovasi SiOpa Lagi JJ (Sistem Pengopersian Alat Lab Jarak Jauh) yang mampu memonitor penyelesaian uji sampel secara realtime sehingga tidak terjadi pengulangan pengujian akibat adanya kendala teknis saat pengoperasian alat lab. Hal tersebut berdampak signifikan dalam capaian time line uji tepat waktu. Monev sampling dan pengujian secara rutin, capaian ini didukung juga oleh meningkatnya kesadaran dan kepatuhan pelaku UMKM dalam menerapkan regulasi yang berlaku, seperti penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), kepatuhan ini berkontribusi pada menurunnya tingkat pelanggaran yang bersifat berulang serta mempermudah proses tindak lanjut terhadap temuan. Responsivitas pelaku usaha terhadap pembinaan dan pengawasan dari BPOM, yang ditindak lanjuti dengan melakukan perbaikan pada sarana produksi, menghentikan distribusi produk yang tidak memenuhi ketentuan dan melaksanakan tindakan korektif dalam batas waktu yang ditetapkan. Selain itu faktor lain yang menjadi keberhasilan capaian IKSK ini adakah efektivitas program pembinaan UMKM dengan melakukan edukasi yang berkelanjutan sehingga meningkatkan pemahaman UMKM mengenai pentingnya menjaga mutu dan keamanan produk.

Meskipun realisasi kinerja berhasil melampaui target dengan capaian sebesar 117,65%, namun karena melebihi 110% sehingga tidak dapat disimpulkan. Kondisi ini mengindikasikan adanya proyeksi target yang terlalu rendah (*underestimated*). Hal tersebut terjadi karena merupakan indikator baru pada tahun 2025, sehingga penyusunan target belum didukung oleh data *baseline* maupun analisis tren capaian dari tahun-tahun sebelumnya

### f. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

**Tabel 3.26** Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025

| Indikator Kinerja | Kendala/ Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Balai Besar POM di Mataram hanya memberikan rekomendasi, sementara eksekusi tindak lanjut (seperti pencabutan SPP-IRT) berada di tangan Pemerintah Daerah (Dinkes/DPMPTSP). Respon daerah seringkali tidak seragam dan memakan waktu lama. | Mensinergikan rencana pengawasan sarana produksi PIRT dengan riwayat produk TMS | Menyusun target pengawasan untuk sarana PIRT berdasarkan kajian risiko dengan mempertimbangkan riwayat hasil uji. | TW 1 Tahun 2026 | T | - | - |

### g. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan evaluasi secara rutin terkait Ketepatan waktu dalam penyelesaian uji sampel, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu dan kelengkapan laporan pengujian melalui SIPT serta ketepatan dalam pengambilan Kesimpulan setiap bulannya
2. Melakukan evaluasi secara rutin antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan sampling sesuai kategori, ketepatan waktu pelaksanaan sampling, ketepatan dalam pengambilan kesimpulan terkait penandaan, ketepatan waktu pelaporan sampling melalui SIPT serta melaksanakan tanggapan surat tindak lanjut untuk komoditi PIRT tepat waktu
3. Penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan ISO 17025:2017 secara konsisten dalam pelaksanaan pengujian laboratorium di BBPOM di Mataram,
4. Identifikasi terhadap kebutuhan pelatihan di Laboratorium BBPOM di Mataram baik pelatihan dalam bentuk Bimtek Internal maupun supervisi (transfer of knowledge) oleh penyelia ataupun penguji senior,
5. Proses pengadaan sarana penunjang pengujian (reagensia, media mikrobiologi, baku pembanding, suku cadang, bahan habis pakai, kebutuhan ruangan dan listrik, dan lain-lain),

6. Proses pengadaan alat laboratorium tahun anggaran 2025 sesuai dengan persetujuan dari PPPOMN untuk memenuhi peralatan laboratorium,
7. Pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai dengan pedoman sampling Tahun 2025,
8. Pelaksanan rapat koordinasi internal terkait rencana pelaksanaan sampling pada awal tahun 2025,
9. Pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan dilakukan secara berkala dan dilaporkan hasil tindak lanjut kepada direktorat terkait,
10. Pelaksanaan uji banding antar laboratorium maupun uji profisiensi untuk komoditi Pangan dan Mikrobiologi sebagai bentuk peningkatan jaminan mutu hasil pengujian di laboratorium,
11. Peningkatan kapasitas laboratorium melalui peningkatan kompetensi personil Laboratorium secara daring maupun luring.
12. Koordinasi terkait hasil uji untuk sampel yang diuji lintas balai anggota Region Surabaya baik melalui whatsapp group, link bit.ly pelaporan sampling dan pengujian Region Surabaya maupun melalui SIPT,
13. Pelaksanaan pelaporan hasil sampling dan uji melalui SIPT,
14. Pelaksanaan perawatan/perbaikan peralatan untuk menunjang kelancaran proses pengujian,
15. Pelaksanaan revisi anggaran untuk memenuhi kebutuhan pengujian dan memperlancar proses pengujian,
16. Perencanaan rekalibrasi dan verifikasi peralatan laboratorium guna menjamin validitas hasil pengujian,
17. Desk revisi target PK RAPK 2025 dan melakukan penyesuaian target capaian indikator sesuai dengan hasil desk dengan Rorenkeu dan unit pengampu pada kegiatan Bimtek Renstra 2025-2029.
18. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Kewajiban Produsen Pangan Olahan Memiliki Izin Penerapan CPPOB bagi 18 UMK di Lombok Barat pada tanggal 30 Januari 2025;
19. Pelaksanaan kegiatan Bimtek CPPOB bagi UMK Pangan Olahan tanggal 26-28 Mei 2025.

### h. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**Tabel 3.27** Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

| Indikator | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T | R | % | T | R | % | | | |
| Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 85,00 | 100.00 | 117,65 | 141.420.250 | 141.418.736 | **100,00** | **1,18** | **0,18** | **100 % (Efisien)** |

Berdasarkan tabel diatas, bahwa penggunaan sumber daya/anggaran adalah efisien dengan capaian efisiensi sebesar 100%.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya yang baik. Hal ini tercermin dengan input anggaran sebesar 100,0% menghasilkan output kinerja sebesar 100,0% juga.

Pada Tahun 2025, target sampling dan pengujian sampel PIRT berisiko telah tercapai sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tidak hanya efektif dari sisi hasil, tetapi juga dapat dianalisis dari aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya seperti efisiensi anggaran dilakukan dengan mekanisme optimalisasi penggunaan media, reagen, dan baku pembanding. Optimalisasi pemanfaatan alat laboratorium melalui pengaturan jadwal penggunaan, maintenance alat, dan inovasi i-Conic.

## 1.6. PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DITINDAKLANJUTI OLEH STAKEHOLDER

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan yaitu

- Pelaku usaha : Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan ;
- Lintas sektor: (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Mataram diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = (A+B)/2

Keterangan :

A : (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%

B : (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%

### a. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

**Tabel 3.28** Target, realisasi dan %capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

| Sasaran kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 98.8 | 99.40 | 100.61% | Sangat Baik |

Realisasi persentase Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada Tahun 2025 telah mencapai target yaitu sebesar 99.40% dari target 98.8% sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 100,61% dengan Kategori “Sangat Baik”.

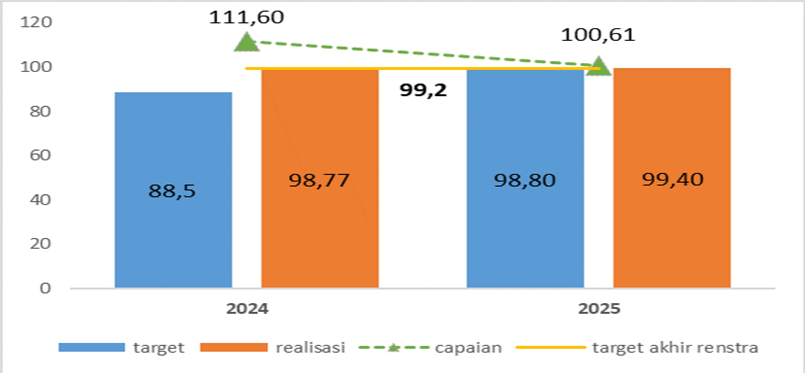
**Tabel 3.29** Target, Realisasi dan % Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

| No | Jenis Keputusan/Rekomendasi kepada Stakeholder | Jumlah Keputusan /Rekomendasi | Jumlah Tindak lanjut |
|---|---|---|---|
| 1 | Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha | 84 | 83<br>98.81% |
| 2 | Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor | 30 | 30 |

| No | Jenis Keputusan/Rekomendasi kepada Stakeholder | Jumlah Keputusan /Rekomendasi | Jumlah Tindak lanjut |
|---|---|---|---|
| | | | 100,00% |
| **TOTAL** | | **114** | **113** |
| | | | **99,40%** |

Seluruh rekomendasi yang diterbitkan oleh BBPOM di Mataram kepada stakeholder telah ditindaklanjuti (100%), sedangkan untuk keputusan tindak lanjut hasil pengawasan yang ditujukan kepada pelaku usaha telah ditindaklanjuti sebesar 98.81% dimana terdapat 1 (satu) Keputusan yang belum ditindaklanjuti oleh pelaku usaha karena masih dalam timeline CAPA. Hal ini menunjukkan bahwa BBPOM di Mataram semakin responsif dalam melakukan tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan serta intens mengkoordinasikan hasil pengawasan yang perlu ditindaklanjuti kepada lintas sektor.

### b. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN 2024




**Gambar 3.7** Perbandingan Target, Realisasi dan % Capaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder tahun 2024 dengan tahun 2025

Grafik menunjukkan bahwa pada Tahun 2025 target kinerja ditetapkan sebesar 98.80% dengan realisasi 99,40%, sehingga persentase capaian terhadap target sebesar 100.61%. Realisasi Tahun 2025 bila dibandingkan dengan Tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar 0.63%, dengan target yang meningkat sebesar 10.30% di Tahun 2025. Kenaikan tersebut merupakan kontribusi dari komitmen BBPOM di Mataram dalam menindaklanjuti setiap keputusan hasil inspeksi baik yang dilaksanakan oleh Balai, rekomendasi dari Pusat maupun UPT lainnya dan Pemerintah Daerah.

Realisasi tersebut tidak hanya melampaui target tahunan, tetapi juga melebihi target akhir Renstra yang ditetapkan sebesar 99.2%, dimana untuk realisasi tahun 2025 telah mencapai 99.40%, Ini menunjukkan bahwa indikator telah berada pada level sangat baik di awal periode 2025–2029.

### c. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (2029)

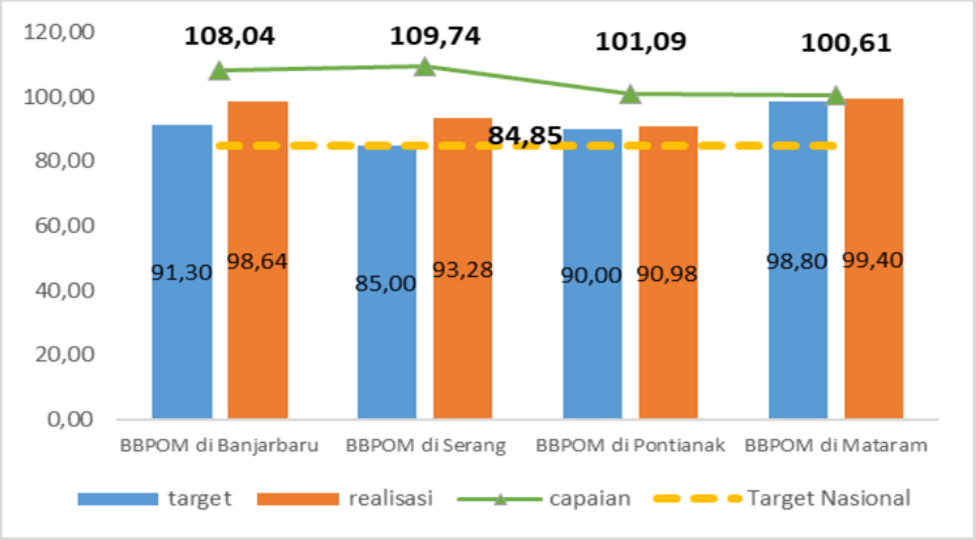
**Tabel 3.30** Perbandingan Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029)

| Indikator | Realisasi 2025 | Target Renstra (2029) | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 99.40 | 99.20 | 100.21% ▲ | Melampaui |

Realisasi kinerja indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada tahun 2025 sebesar 99,40%, jika dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 99,200% maka realisasi tahun 2025 telah tercapai sebesar 100,21% dengan kategori “Melampaui’.

Mengingat tingginya capaian tersebut, organisasi perlu mempertimbangkan langkah strategis lebih lanjut dengan melakukan reviu Renstra guna melakukan penyesuaian target jangka panjang.

### d. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN BALAI BESAR POM KLASTER 5




**Gambar 3.8** Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster

Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Tahun 2025 pada BBPOM di Mataram, BBPOM di Banjarbaru, BBPOM di Serang dan BBPOM di Pontianak seluruhnya telah mencapai target yang ditetapkan dan telah melampaui target nasional 84.85%. Target dan realisasi tertinggi berada di BBPOM Mataram, sedangkan persentase capaian realisasi tertinggi dicapai oleh BBPOM di Serang.

### e. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Pada Tahun 2025 indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dengan persentase capaian 100,61% atau dengan kategori “Sangat Baik” dan telah melampaui target renstra 2025 - 2029. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya komitmen dan kesadaran pelaku usaha dalam memberikan respon tindak lanjut/CAPA hasil pemeriksaan sarana oleh BBPOM di Mataram sampai status temuan dinyatakan selesai (*closed*). Selain itu adanya layanan konsultasi CAPA melalui nomor WhatsApp khusus semakin memudahkan petugas dan pelaku usaha dalam mengkomunikasikan serta monev CAPA secara *online* serta makin meningkatnya pola koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam mengkomunikasikan rekomendasi hasil pengawasan. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan FGD Monev Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Tingkat Provinsi NTB dan juga di Kabupaten Lombok Barat serta di Kabupaten Lombok Timur. Dalam pertemuan tersebut juga disampaikan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh

Balai Besar POM di Mataram serta rekomendasi hasil pengawasan yang perlu ditindaklanjuti oleh lintas sektor terkait.

### f. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

**Tabel 3.31** Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Tahun 2025

| Indikator KInerja | Kendala/ Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | Respons dari instansi terkait (Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, dll.) dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi tidak sama | Koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif kepada lintas sektor terkait serta menembuskan surat rekomendasi tindak lanjut tersebut ke kepala daerah bupati/walikota | Koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif kepada lintas sektor terkait serta menembuskan surat rekomendasi tindak lanjut tersebut ke kepala daerah bupati/walikota | TW 1 Tahun 2026 | Y | S-16 | Hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh BBPOM di Mataram yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor masih rendah |
| | Walaupun feedback berupa CAPA terkait keputusan tindak lanjut yang diberikan kepada Pelaku Usaha telah mencapai target di tahun 2025 namun masih melebihi timeline yang telah ditetapkan | Mempercepat waktu penyelesaian tindak lanjut dan menambahkan kalimat tambahan pada surat tindak lanjut, konsekuensi apa yang diperoleh bila tidak membuat CAPA | Mempercepat waktu penyelesaian tindak lanjut dan menambahkan kalimat tambahan pada surat tindak lanjut, konsekuensi apa yang diperoleh bila tidak membuat CAPA | TW 1 Tahun 2026 | Y | S-17 | Pelaku usaha belum seluruhnya mengirimkan Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan (CAPA) terkait surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi/distribusi. |

### g. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

1. Implementasi Instruksi Gubernur Nomor 440/321/KUM Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi NTB sebagai implementasi Inpres Nomor 3 Tahun 2017;
2. Implementasi Keputusan Gubernur NTB Nomor 442-29 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi NTB, diikuti dengan pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten/Kota antara lain:
    a. Surat Keputusan Walikota Mataram No. 587/III/2025 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Mataram Tahun 2025;
    b. Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/287/KES/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Lombok Timur;
    c. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat No. 188.45/823/DIKES/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Lombok Barat;
    d. Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 331 Tahun 2023 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Lombok Tengah;
    e. Surat Keputusan Bupati Lombok Utara No.12/001.11/DIKES/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Lombok Utara;
3. *Focus Group Disscussion* (FGD) Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Tingkat Provinsi NTB pada tanggal 04 Juni 2025 ;
4. *Focus Group Disscussion* (FGD) Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 10 Juni 2025
5. *Focus Group Disscussion* (FGD) Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 24 Juni 2025
6. Monev DAK NF POM TA 2025 secara berkala baik secara daring maupun luring di 5 Kabupaten/Kota pada wilayah kerja BBPOM di Mataram untuk memastikan anggaran dan output kegiatan tercapai secara optimal;
7. Pendampingan desk CAPA terhadap pelaku usaha obat dan makanan sehingga seluruh temuan hasil pemeriksaan dinyatakan *closed*.

### h. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**Tabel 3.32** Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

| Indikator | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T | R | % | T | R | % | | | |
| Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 98.8 | 99.40 | 100,61 | 16.207.500 | 16.206.815 | **100,00** | **1,01** | **0,01** | **100 % (Efisien)** |

Berdasarkan tabel diatas, bahwa penggunaan sumber daya/anggaran adalah efisien dengan capaian efisiensi sebesar 100%.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada tahun 2025 menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya yang sangat baik. Hal ini tercermin dengan input anggaran sebesar 100,0% menghasilkan output kinerja sebesar 100,61%.

Efisiensi sumber daya diperoleh antara lain dari optimalisasi layanan konsultasi CAPA melalui nomor WhatsApp khusus serta monev CAPA secara *online.*

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tidak hanya efektif dari sisi hasil, tetapi juga dapat dianalisis dari aspek efisiensi penggunaan sumber daya.

## 1.7. PERSENTASE SARANA PRODUKSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:

- Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
- sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
- fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B

Sedangkan sarana produksi yang berada di wilayah kerja Balai Besar POM Mataram yaitu Industri Kosmetik Golongan A dan B, Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).

Pemeriksaan terhadap sarana produksi meliputi beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Tindak lanjut pengawasan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Cara Perhitungan dan Formula:

Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

**% Sarprod Obat = Rata-rata (A+B+C)**

A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan
   = (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target renlak) X 100%
B. Jumlah pelaksanaan inspeksi
   = (Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan dalam kurun waktu setahun/ jumlah target tahunan) X 100%
C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut
   = rata-rata persentase sub aspek 1-6
   1) Ketepatan penetapan tindak lanjut
   2) Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut
   3) Kesesuaian format laporan inspeksi
   4) Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT
   5) Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi
   6) Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

**% Sarprod OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)**

A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi
   = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%
B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi
= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana
= (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

**% Sarprod Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)**

A. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target sesuai renlak) X 100%

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjuthasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

### a. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

**Tabel 3.33** Target, realisasi dan % capaian Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

| Sasaran kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 91 | 100 | 109,89 | Sangat baik |

Realisasi Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 telah mencapai target yaitu sebesar 100% dari target 91,0% sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 109,89% dengan kategori “sangat baik”.

**Tabel 3.34** Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025

| Jenis Sarana | Target | Total Realisasi | Total | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MK | % | TMK | % |
| UMOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKOT | 2 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 |
| IKOS-A | 2 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 |
| IKOS-B | 3 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 |
| **TOTAL** | **7** | **7** | **3** | **42,8** | **4** | **57,2** |

Pada tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan sarana terhadap 7 sarana produksi sediaan farmasi, yang terdiri dari 2 sarana produksi Obat Bahan Alam (OBA) dan 5 sarana produksi kosmetik dengan hasil 3 sarana MK dan 4 sarana TMK (1 sarana produksi OBA dan 3 sarana kosmetik). Realisasi pemeriksaan dan tindak lanjut sarana produksi mencapai 100% dari target 91%. Namun demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 57,2% sarana masih berstatus Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan pembinaan dan pengawasan berbasis risiko, khususnya pada sarana UKOT dan IKOS-B yang menunjukkan tingkat ketidakpatuhan lebih tinggi.

Pada sarana OBA–UKOT yang TMK disebabkan oleh telah berakhirnya masa berlaku Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB Tahap I UKOT dan Nomor Izin Edar seluruh produk, serta tidak adanya tindak lanjut atas pengajuan perpanjangan yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui akun e-sertifikasi.

Sedangkan pada 3 sarana kosmetik yang dinyatakan TMK, dimana 2 diantaranya merupakan sarana Kosmetika Golongan B. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kompleksitas proses produksi masih belum diimbangi dengan penerapan sistem CPKB yang memadai, terutama pada aspek dokumentasi produksi, dan pengawasan mutu. Sehingga diperlukan penguatan pembinaan berbasis risiko guna meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.

Seluruh sarana produksi yang diperiksa telah sesuai perencanaan, ditindaklanjuti dan dilaporkan melalui SIPT tepat waktu.

### b. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN 2024

Realisasi Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator kinerja baru di periode renstra 2025-2029.

### c. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (2029)

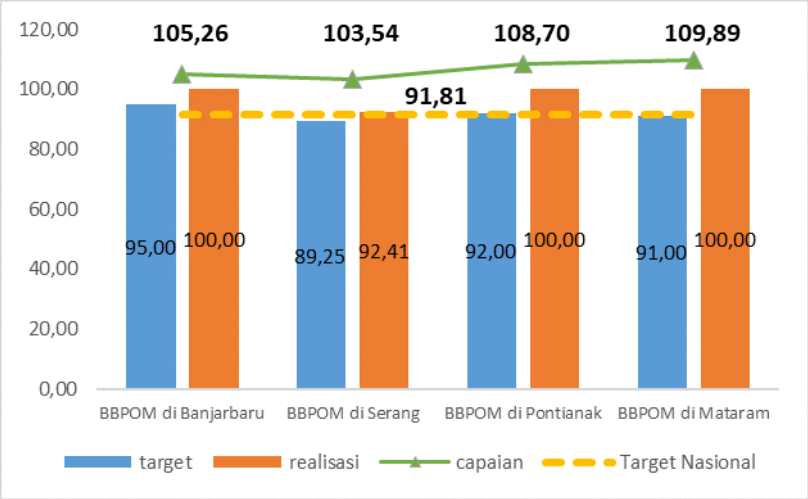
**Tabel 3.35** Perbandingan Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029)

| Indikator | Realisasi 2025 | Target Renstra (2029) | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 100.00 | 98.00 | 102.04% ▲ | Melampaui |

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra yang ditetapkan sebesar 98%, capaian tahun 2025 juga telah melampaui target sebesar 2 poin. Secara manajerial, capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan, optimalisasi sumber daya, serta kemungkinan adanya penguatan sistem pengendalian dan monitoring yang berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja.

Secara keseluruhan, kinerja tahun 2025 menunjukkan tren yang sangat positif, dengan realisasi tidak hanya memenuhi target tetapi melampaui target tahunan maupun target akhir Renstra, sehingga memberikan dasar yang kuat untuk penguatan perencanaan dan peningkatan kualitas pencapaian indikator Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada tahun periode Renstra selanjutnya.

### d. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN BALAI BESAR POM KLASTER 5




**Gambar 3.9** Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster

Secara umum, keempat BBPOM dalam satu klaster berhasil melampaui target yang ditetapkan. Target masing-masing berada pada kisaran 89,25% hingga 95%, sedangkan realisasi seluruhnya mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh target sarana produksi sediaan farmasi yang direncanakan dalam indikator tersebut telah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

BBPOM di Banjarbaru memiliki target 95% dengan realisasi 100%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 105,26%. BBPOM di Serang menetapkan target paling rendah, yaitu 89,25%, dengan realisasi 92,41%, sehingga capaian mencapai 103,54%. BBPOM di Pontianak memiliki target 92% dan realisasi 100%, dengan capaian 108,70%. Sementara itu, BBPOM di Mataram mencapai target 91% dan realisasi 100%, menghasilkan capaian tertinggi sebesar 109,89%. Sehingga dari sisi perbandingan, BBPOM di Mataram menunjukkan tingkat capaian paling tinggi, diikuti Pontianak, Banjarbaru, dan Serang.

### e. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Keberhasilan pencapaian indikator persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti telah tercapai 100% dari target yang ditetapkan menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pengawasan berjalan secara efektif. Penetapan target yang realistis serta penyusunan jadwal pemeriksaan yang terstruktur sejak awal tahun berkontribusi terhadap optimalnya pelaksanaan kegiatan.

Pencapaian tersebut juga mencerminkan adanya penguatan fungsi monitoring dan pengendalian internal. Evaluasi berkala terhadap progres pemeriksaan dan tindak lanjut memungkinkan setiap kendala teknis maupun administratif dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan. Dengan demikian, seluruh sarana yang menjadi objek pengawasan tidak hanya diperiksa, tetapi juga ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam waktu yang ditetapkan.

Kompetensi petugas pengawas/inspektur merupakan salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap tercapainya indikator kinerja secara optimal. Kemampuan teknis dalam memahami regulasi dan standar CPOTB/CPKB, memungkinkan petugas melakukan pemeriksaan secara tepat sasaran dan efisien. Inspektur yang kompeten mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian secara cepat, mengklasifikasikan tingkat risiko temuan dengan tepat, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang aplikatif kepada pelaku usaha.

Secara singkat, realisasi IKSK ini melebihi target disebabkan antara lain karena kompetensi petugas yang memadai (telah mengikuti berbagai pelatihan yang mendukung pengawasan, antara lain: Inspektur OT, Inspektur Kosmetik dan Inspektur CDOB) sehingga pelaksanaan pemeriksaan sarana dan penetapan tindak lanjut senantiasa dilaksanakan sesuai target *risk based inspection*, pedoman dan ketentuan yang berlaku serta komitmen petugas dalam melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan dan tepat waktu. Selain itu Monev secara rutin dan koordinasi yang baik dan intens antara Kepala Balai, Ketua Tim dan Tim Kerja juga menjadi faktor keberhasilan tercapainya IKSK ini.

## f. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

**Tabel 3.36** Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025

| Indikator | Kendala/ Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Terdapat sarana produksi OBA (UMKM) yang sudah habis masa berlaku sertifikat CPOTBnya namun masih ditemukan peredaran produknya baik secara offline maupun online | Melakukan penelusuran ke sarana produksi untuk mengetahui tempat produksi dan bila perlu selanjutnya koordinasi dengan Tim intelijen/penindakan untuk | Melakukan penelusuran ke sarana produksi untuk mengetahui tempat produksi dan bila perlu selanjutnya koordinasi dengan Tim intelijen/penindakan untuk | TW1 2026 | T | - | - |

| Indikator | Kendala/ Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | penelusuran lebih lanjut | penelusuran lebih lanjut | | | | |
| | Terdapat Perbedaan atas Kesimpulan/Keputusan hasil pemeriksaan antara Petugas UPT dan PIC pusat | Melakukan refreshment pedoman pengawasan sarana bagi petugas Balai di NTB dan melakukan koordinasi intensif dengan PIC Pusat untuk menyamakan perseps | Melakukan refreshment pedoman pengawasan sarana bagi petugas Balai di NTB dan melakukan koordinasi intensif dengan PIC Pusat untuk menyamakan perseps | TW1 2026 | T | - | - |
| | Terdapat keterlambatan dalam memonitor CAPA dan rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam mengirim CAPA | Memperketat monitoring CAPA dan proaktif mengingatkan sarana untuk mengirim CAPA baik secara formal maupun informal | Memperketat monitoring CAPA dan proaktif mengingatkan sarana untuk mengirim CAPA baik secara formal maupun informal | TW4 2026 | T | - | - |

## g. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator tersebut, BBPOM di Mataram melaksanakan beberapa program/kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan pengawasan berbasis risiko
   Penetapan prioritas pemeriksaan dilakukan berdasarkan tingkat risiko sarana, riwayat pelanggaran, dan profil kepatuhan, sehingga sumber daya difokuskan pada sarana dengan potensi risiko tertinggi.
2. Pelaksanaan inspeksi rutin dan khusus
   Dilakukan pemeriksaan berkala maupun inspeksi khusus (investigatif, respon pengaduan atau pembersihan pasar) untuk memastikan penerapan CPOTB/CPKB dan ketentuan peraturan perundang-undangan berjalan konsisten.
3. Penguatan tindak lanjut hasil pemeriksaan

Setiap temuan ditindaklanjuti melalui mekanisme pembinaan sampai dengan pemberian sanksi administratif sesuai ketentuan (Surat Peringatan/Peringatan Keras), dan permintaan tindakan perbaikan/CAPA kepada pelaku usaha dengan pemantauan hingga status temuan dinyatakan selesai/*closed*.

4. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala

   Dilaksanakan rapat monitoring internal untuk memastikan progres pemeriksaan dan tindak lanjut sesuai target serta mencegah adanya temuan yang belum terselesaikan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain: Monev dan Supervisi UPT dalam Pengawasan Fasilitas Produksi dan Distribusi OT dan SK (Triwulanan), Rapat Monev Rutin Hasil Pengawasan Kosmetik dengan UPT BPOM mengenai hasil pengawasan mutu, keamanan produk dan sertifikasi CPKB (Triwulanan)

5. Peningkatan kompetensi SDM pengawas/inspektur

   Dengan adanya pelatihan teknis antara lain pelatihan Inspektur CPOTB Junior bulan Maret 2025. Pelatihan Inspektur Kosmetik Junior bulan September 2025, serta dilaksanakannya Forum Komunikasi Inspektur Kosmetika bulan Juni 2025, dan juga Pertemuan Perkuatan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Fungsi MESOT/Farmakovigilans di Bidang Obat Bahan Alam, pada bulan April 2025 sebagai upaya harmonisasi pemahaman antar inspektur guna menjaga kualitas dan konsistensi hasil pemeriksaan.

6. Pemanfaatan sistem informasi pengawasan

   Penggunaan aplikasi pelaporan dan monitoring hasil pemeriksaan sarana produksi, melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) yang dilaporkan secara tepat waktu.

## h. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**Tabel 3.37** Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025

| Indikator | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T | R | % | T | R | % | | | |
| Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 91,00 | 100.00 | 109,89 | 16.207.500 | 16.206.815 | **100,00** | **1,10** | **0,10** | **100 % (Efisien)** |

Berdasarkan tabel diatas, bahwa penggunaan sumber daya/anggaran adalah efisien dengan capaian efisiensi sebesar 100%.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya yang sangat baik. Hal ini tercermin dengan input anggaran sebesar 100,0% menghasilkan output kinerja sebesar 109,89%.

Efisiensi sumber daya diperoleh antara lain dari optimalisasi kegiatan inspeksi sarana dan layanan konsultasi CAPA melalui nomor WhatsApp khusus serta monev CAPA secara *online.*

## 1.8. PERSENTASE SARANA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain. Sedangkan sarana produksi pangan olahan yang ada di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram terdiri dari sarana pangan olahan dengan izin edar MD dan izin edar IRTP.

Pengawasan sarana produksi pangan olahan berdasarkan risiko dengan mempertimbangkan ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi: Ketepatan waktu tindak lanjut dan kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan.

Cara Perhitungan dan Formula:

Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan =

$$\frac{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa}} \times 100\%$$

Keterangan:

* Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

* Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek (a+b+c/3) yaitu:
  a. ketepatan waktu: pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan, yaitu pada tanggal 05 pada bulan berikutnya;
  b. kesesuaian tindak lanjut: kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.
  c. kesesuaian grading: kesesuaian grading akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian grading, dimana jika hasil:
     i. pemeriksaan A dan B atau pemeriksaan level I dan level II maka grading sebagai A (MK)
     ii. pemeriksaan C atau pemeriksaan level III maka grading sebagai B (TMK)
     iii. pemeriksaan D atau pemeriksaan level IV maka grading sebagai C (TMK)
  d. kesesuaian koordinasi (jika diperlukan): kesesuaian koordinasi dihitung dari penyelesaian tindak lanjut dalam bentuk koordinasi dengan lintas sektor terkait. Kordinasi bisa dalam bentuk: surat dinas, rapat/FGD, advokasi.

### a. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

**Tabel 3.38** Target, realisasi dan %capaian Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

| Sasaran kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 85 | 92,68 | 109,04 | Sangat baik |

Realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 telah mencapai target yaitu sebesar 92,68% dari target 85,0% sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 109,04% dengan kategori “sangat baik”.

**Tabel 3.39** Sarana Produksi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025

| Jenis Sarana | Target | Total Realisasi | Total | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MK | % | TMK | % |
| MD Risiko Rendah | 16 | 16 | 5 | 31,25 | 11 | 68,75 |
| MD Risiko Menengah | 5 | 5 | 1 | 20,00 | 4 | 80,00 |

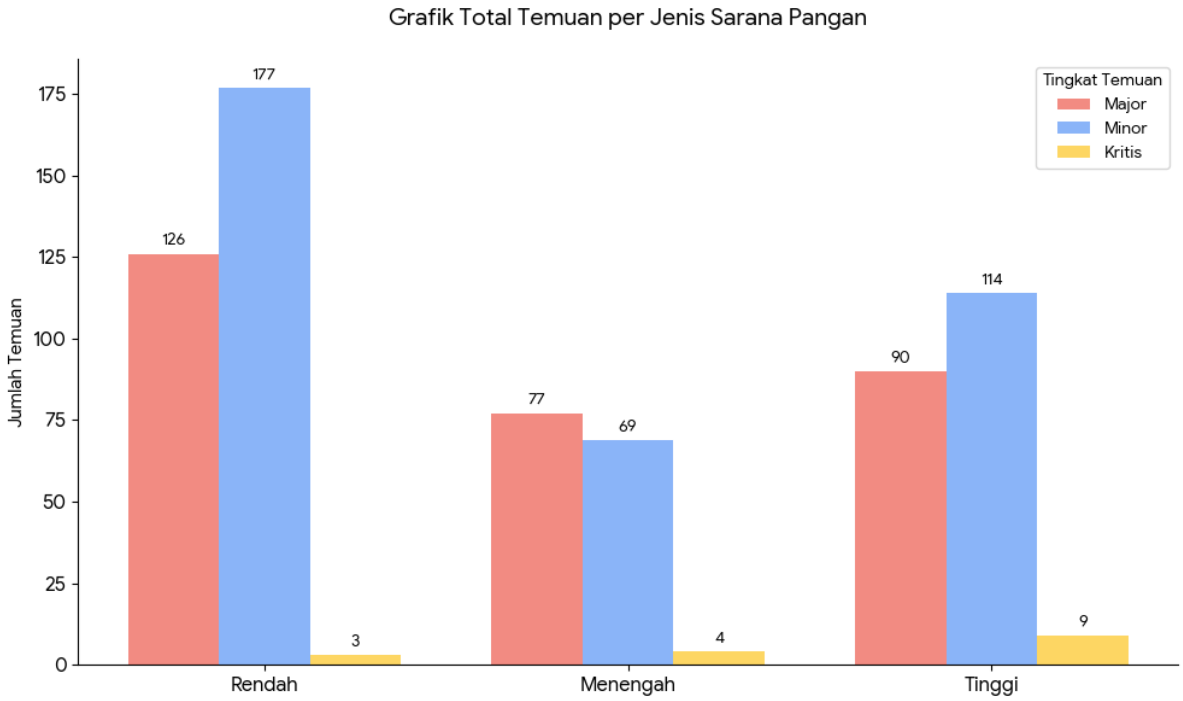
| Jenis Sarana | Target | Total Realisasi | Total | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MK | % | TMK | % |
| MD Risiko Tinggi | 9 | 9 | 2 | 22,22 | 7 | 77,78 |
| PIRT | 9 | 11 | 10 | 90,90 | 1 | 9,09 |
| **TOTAL** | **39** | **41** | **18** | **43,90** | **23** | **56,10** |

Pada tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan dengan total 41 sarana dari target 39 sarana, atau realisasi pemeriksaan sarana melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan pelaksanaan pengawasan berjalan optimal dari sisi kuantitas.

Berdasarkan klasifikasi jenis sarana, pada jenis sarana MD Risiko Rendah dilakukan pemeriksaan terhadap 16 sarana sesuai target, dengan hasil 5 sarana (31,25%) memenuhi ketentuan (MK) dan 11 sarana (68,75%) tidak memenuhi ketentuan (TMK). Pada MD Risiko Menengah, dari target 5 sarana yang diperiksa, terdapat 1 sarana (20,00%) MK dan 4 sarana (80,00%) TMK. Sementara itu, pada MD Risiko Tinggi, dari 9 sarana yang diperiksa sesuai target, terdapat 2 sarana (22,22%) MK dan 7 sarana (77,78%) TMK.

Untuk kategori PIRT, realisasi pemeriksaan mencapai 11 sarana dari target 9 sarana. Dari jumlah tersebut, 10 sarana (90,90%) dinyatakan memenuhi ketentuan dan 1 sarana (9,09%) tidak memenuhi ketentuan.

Secara total dari 41 sarana yang diperiksa, sebanyak 18 sarana (43,90%) memenuhi ketentuan dan 23 sarana (56,10%) tidak memenuhi ketentuan. Data ini menunjukkan bahwa tingkat ketidakpatuhan masih relatif tinggi, khususnya pada sarana MD baik risiko rendah, menengah, maupun tinggi. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan pembinaan, peningkatan pengawasan berbasis risiko, serta tindak lanjut yang lebih intensif untuk mendorong peningkatan kepatuhan sarana produksi pangan olahan.




**Gambar 3.10** Grafik Total Temuan per Jenis Sarana Pangan

Berdasarkan data SIPT dari 30 sarana produksi MD yang terdiri dari 16 sarana risiko rendah, 5 sarana risiko menengah, dan 9 sarana risiko tinggi, diperoleh gambaran tingkat kepatuhan terhadap pemenuhan aspek CPPOB yang bervariasi sesuai dengan karakter risiko masing-masing.

Pada kelompok sarana pangan Risiko Rendah (16 sarana) memiliki total temuan terbanyak secara kuantitas, terutama didominasi oleh temuan Minor (177 temuan) yang berkaitan dengan aspek prasyarat dasar Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), seperti kondisi bangunan, kebersihan lingkungan, serta kelengkapan dokumentasi. Pada sarana pangan Risiko Menengah (5 sarana), menunjukkan jumlah temuan yang lebih seimbang antara Mayor (77 temuan) dan Minor (69 temuan) yang menunjukkan masih adanya kelemahan dalam pengendalian proses dan dokumentasi sistem keamanan pangan. Sedangkan pada sarana pangan Risiko Tinggi (9 sarana), meskipun jumlah temuan totalnya tidak sebanyak pada sarana pangan risiko Rendah, kategori ini memiliki jumlah temuan Kritis tertinggi yaitu 9 temuan. Ketidaksesuaian ini berkaitan dengan aspek pengendalian proses, pencegahan kontaminasi silang, serta penerapan sistem keamanan pangan. Walaupun jumlah sarananya lebih sedikit, kontribusinya terhadap tingkat ketidakpatuhan keseluruhan cukup signifikan.

Secara umum, pola temuan menunjukkan bahwa pendekatan pengawasan berbasis risiko telah mampu mengidentifikasi titik rawan ketidaksesuaian secara proporsional. Namun demikian, peningkatan efektivitas pengawasan perlu difokuskan pada sarana risiko tinggi melalui penguatan

pembinaan, verifikasi tindakan perbaikan, dan monitoring implementasi sistem keamanan pangan secara berkelanjutan.

### b. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN 2024

Realisasi Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator kinerja baru di periode renstra 2025-2029.

### c. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (2029)

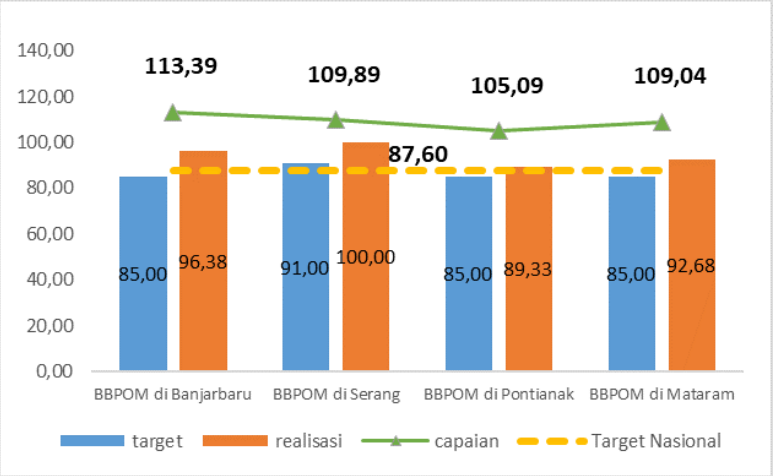
**Tabel 3.40** Perbandingan Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029)

| Indikator | Realisasi 2025 | Target Renstra (2029) | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 92.68 | 95.00 | 97.56% | Akan Tercapai |

Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pengawasan sarana produksi pangan olahan telah berada sangat dekat dengan target akhir Renstra. Selisih sebesar 2,32% dari target 95,00% mengindikasikan bahwa secara tren dan kapasitas pelaksanaan, indikator ini berada pada jalur yang tepat (*on track*) untuk memenuhi sasaran strategis pada akhir periode perencanaan.

Secara substantif, kondisi tersebut mencerminkan konsistensi pelaksanaan pemeriksaan sarana, ketepatan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai ketentuan, serta efektivitas perencanaan berbasis risiko. Dengan mempertahankan pola pelaksanaan yang ada dan melakukan penguatan pada sarana yang belum optimal ditindaklanjuti, target 95,00% pada tahun 2029 dinilai realistis dan sangat memungkinkan untuk dicapai.

### d. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN BALAI BESAR POM KLASTER 5




**Gambar 3.11** Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster

Grafik tersebut menggambarkan capaian kinerja pengawasan sarana produksi pangan olahan pada empat UPT BBPOM, dengan perbandingan antara target, realisasi, dan persentase capaian.

Secara umum, keempat BBPOM berhasil melampaui target yang ditetapkan baik target internal maupun target nasional (87,60%). Target internal masing-masing UPT berada pada kisaran 85–91%, sedangkan realisasi seluruhnya berada di atas target, sehingga capaian kinerja masing-masing unit melebihi 100%.

BBPOM di Banjarbaru menunjukkan capaian tertinggi (113,39%) dengan realisasi 96,38% dari target 85%. BBPOM di Serang juga menunjukkan kinerja sangat baik dengan realisasi 100% dari target 91% (capaian 109,89%). BBPOM di Mataram mencatat capaian 109,04% dengan realisasi 92,68% dari target 85%. Sementara itu, BBPOM di Pontianak memiliki capaian terendah (105,09%), namun tetap melampaui target dengan realisasi 89,33% dari target 85%.

### e. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Keberhasilan capaian kinerja pada indikator sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 109,04% merupakan hasil dari kedisiplinan administratif (aspek a) dan akurasi teknis (aspek b & c) (pada tools penilaian mandiri) antara lain: kepatuhan dan kedisiplinan petugas dalam melaporkan hasil pemeriksaan melalui SIPT yang konsisten dilakukan sebelum atau tepat pada tanggal 05 setiap bulannya, ketepatan penetapan tindak lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan berupa Pembinaan teknis, Tindak lanjut hasil pemeriksaan berupa Peringatan maupun Peringatan Keras sesuai pedoman tindak lanjut, serta ketepatan objektivitas penilaian dalam menetapkan grading sarana produksi pangan

olahan (status MK (Memenuhi Ketentuan) untuk rating A/B dan TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) untuk rating C/D)

### f. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

**Tabel 3.41** Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025

| Indikator | Kendala/ Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha sarana produksi MD dalam menerapkan CPPOB | - Sarana MD menjadi focus utama pengawasan dengan meningkatkan proporsi jumlah pengawasan sarana produksi pangan MD<br>- Metode pengawasan berfokus pada penyelesaian akar masalah dari ketidaksesuaian hasil pengawasan sebelumnya | Menetapkan target pengawasan sarana produksi pangan tahun 2026 sesuai dengan kajian risiko | TW 1 Tahun 2026 | T | - | - |
| | Laporan Tindak lanjut (CAPA) dari pelaku usaha belum menjawab akar masalah ketidaksesuaian, sehingga berpotensi menyebabkan temuan berulang | - Metode pengawasan berfokus pada penyelesaian akar masalah dari ketidaksesuaian hasil pengawasan sebelumnya.<br>- Monitoring CAPA dilakukan secara lebih ketat.<br>- Melakukan evaluasi CAPA secara lebih mendalam dan memastikan tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam melakukan analisa CAPA | - Menetapkan target pengawasan sarana produksi pangan tahun 2026 sesuai dengan kajian risiko<br>- Melakukan pendampingan CAPA sekaligus saat pemeriksaan sarana | TW 1 Tahun 2026 | T | - | - |

## g. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, BBPOM di Mataram melaksanakan beberapa program/kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan pengawasan berbasis risiko
   Penetapan prioritas pemeriksaan dilakukan berdasarkan tingkat risiko sarana, riwayat pelanggaran, dan profil kepatuhan, sehingga sumber daya difokuskan pada sarana dengan potensi risiko tertinggi.
2. Pelaksanaan inspeksi rutin dan khusus
   Dilakukan pemeriksaan berkala maupun inspeksi khusus (intensifikasi pengawasan, pemeriksaan investigatif terhadap 41 sarana produksi pangan olahan di Tahun 2025, respon pengaduan masyarakat dan/atau *emerging issues*) untuk memastikan penerapan CPPOB dan ketentuan peraturan perundang-undangan berjalan konsisten.
3. Penguatan tindak lanjut hasil pemeriksaan
   Setiap temuan ditindaklanjuti melalui mekanisme pembinaan sampai dengan pemberian sanksi administratif sesuai ketentuan (Surat Peringatan/Peringatan Keras), dan permintaan tindakan perbaikan/CAPA kepada pelaku usaha dengan pemantauan hingga status temuan dinyatakan selesai/*closed*.
4. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala
   Dilaksanakan rapat monitoring internal untuk memastikan progres pemeriksaan dan tindak lanjut sesuai target serta mencegah adanya temuan yang belum terselesaikan.
5. Peningkatan kompetensi SDM pengawas/inspektur
   Dengan dilaksanakannya pelatihan teknis antara lain pelatihan Inspektur Pangan tingkat Dasar bulan Agustus 2025, Pelatihan Inspektur Pangan tingkat Muda bulan Mei 2025 untuk mempertahankan kompetensi inspektur guna menjaga kualitas dan konsistensi hasil pemeriksaan.
6. Pemanfaatan sistem informasi pengawasan
   Penggunaan aplikasi pelaporan dan monitoring hasil pemeriksaan sarana produksi, melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) yang dilaporkan secara tepat waktu.
7. Koordinasi Internal dan Eksternal
   Sinergi di unit internal antara fungsi Pemeriksaan, fungsi Pengujian dan fungsi Infokom, serta secara eksternal dengan pemangku kepentingan di daerah guna mempercepat implementasi tindak lanjut khususnya untuk sarana produksi P-IRT, dan juga pada kasus yang membutuhkan pengawasan lanjutan, maupun sinergi dengan pelaku usaha antara lain dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi Kewajiban Produsen Pangan Olahan Memiliki Izin Penerapan CPPOB bagi 18 UMK di Lombok Barat pada bulan Januari 2025, dan kegiatan Bimtek CPPOB bagi UMK

Pangan Olahan pada bulan Mei 2025 sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam penerapan CPPOB.

### h. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**Tabel 3.42** Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025

| Indikator | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T | R | % | T | R | % | | | |
| Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 85,00 | 92.68 | 109,04 | 16.207.500 | 16.206.815 | **100,00** | **1,09** | **0,09** | **100 % (Efisien)** |

Berdasarkan tabel diatas, bahwa penggunaan sumber daya/anggaran adalah efisien dengan capaian efisiensi sebesar 100%.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya yang sangat baik. Hal ini tercermin dengan input anggaran sebesar 100,0% menghasilkan output kinerja sebesar 109,04%.

Efisiensi sumber daya diperoleh antara lain dari optimalisasi kegiatan inspeksi sarana dan layanan konsultasi CAPA melalui nomor WhatsApp khusus serta monev CAPA secara *online*

## 1.9. PERSENTASE FASILITAS DISTRIBUSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Cara Perhitungan dan Formula:

**Persentase fasilitas** distribusi **Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = (A+B+C)/3**

A. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
= rata-rata dari Pemenuhan Target Pemeriksaan (a) dan Kesesuaian tindak lanjut(b)

a. Pemenuhan Target Pemeriksaan

Komponen penilaian ini ditunjukkan untuk menilai pemenuhan kuantitas pelaksanaan pemeriksaan oleh UPT = (A/B)

A. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan ditambah dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan x 100%

B. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan ditambah dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan

b. Kesesuaian Tindaklanjut

Komponen penilaian ini ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian antara tindak lanjut yang telah diberikan oleh UPT dibandingkan dengan standar yang berlaku, yaitu Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan, dan SOP Makro Pengawasan.

Persentase dari Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa dan ditindaklanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan / dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa X 100%

c. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung rata-rata dari Persentase pemenuhan target pemeriksaan dan Persentase kesesuaian tindaklanjut.

B. Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%

b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjuthasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

C. Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

a. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target pengawasan sesuai renlak) X 100%.
b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%.
c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%.
d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjuthasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%.

Keterangan:

1. Perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
2. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

## a. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

**Tabel 3.43** Target, realisasi dan %capaian Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

| Sasaran kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 96 | 98,57 | 102,68% | Sangat Baik |

Realisasi Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 telah mencapai target yaitu sebesar 98,57% dari target 96,0% sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 102,68% dengan kategori “sangat baik”.

Tabel **3.44** Hasil Pemeriksaan Fasilitas Sarana distribusi Sediaan Farmasi tahun 2025

| Jenis Sarana | Total Realisasi | Total | | |
|---|---|---|---|---|
| | | MK | TMK | Tutup |
| **Sarana Distribusi Obat** | | | | |
| PBF | 8 | 6 | 2 | 0 |
| IFP | 6 | 4 | 2 | 0 |

| Jenis Sarana | Total Realisasi | Total | | |
|---|---|---|---|---|
| | | MK | TMK | Tutup |
| Rumah Sakit | 17 | 11 | 6 | 0 |
| Apotek | 52 | 29 | 23 | 0 |
| Puskesmas | 23 | 21 | 2 | 0 |
| Klinik | 24 | 13 | 11 | 0 |
| Fasilitas Lain | 13 | 9 | 2 | 2 |
| **Sub Total** | **143** | **93** | **48** | **2** |
| **Sarana Distribusi Kosmetik** | | | | |
| DK Penotifikasi | 3 | 3 | 0 | 0 |
| DK Non-Notifikasi | 81 | 44 | 37 | 0 |
| **Sub Total** | **84** | **47** | **37** | **0** |
| **Sarana Distribusi Obat Bahan Alam** | **16** | **4** | **12** | **0** |
| **Saran Distribusi Suplemen Kesehatan** | **5** | **5** | **0** | **0** |
| **Total** | **248** | **149** | **97** | **2** |

Di tahun 2025 sesuai dengan perencanaan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 248 sarana distribusi sediaan farmasi yang terdiri dari 143 sarana distribusi obat dengan hasil 93 MK, 48 TMK dan 2 tutup; 16 sarana distribusi obat bahan alam dengan hasil 4 MK dan 12 TMK; 5 sarana distribusi suplemen kesehatan dengan hasil 4 MK; dan 84 sarana distribusi kosmetik dengan hasil 47 MK dan 37 TMK.

### b. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN 2024

Realisasi Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator kinerja baru di periode renstra 2025-2029.

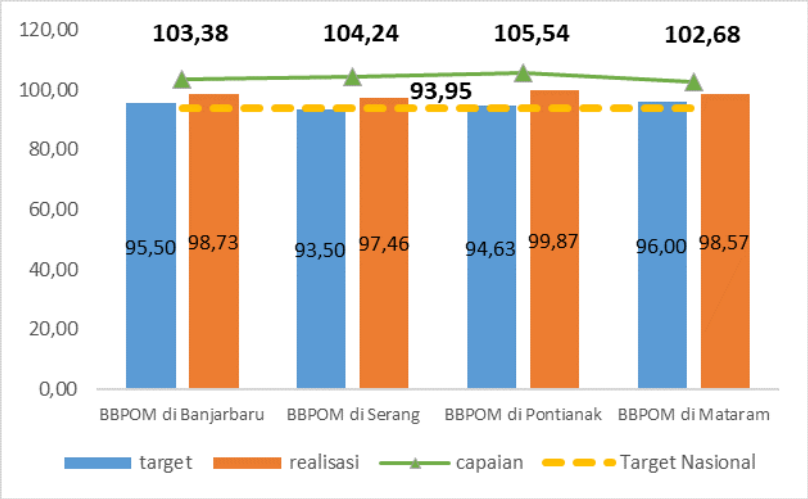
### c. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (2029)

**Tabel 3.45** Perbandingan Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029)

| Indikator | Realisasi 2025 | Target Renstra (2029) | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 98.57 | 99.50 | 99.06% | Akan Tercapai |

Jika disandingkan dengan Target Akhir Renstra (2029) sebesar 99,5, realisasi tahun pertama di angka 98,57 menunjukkan bahwa organisasi sudah sangat dekat dengan sasaran jangka panjangnya. Dengan selisih hanya sebesar 0,93 poin, indikator ini diproyeksikan akan mencapai target akhir periode jauh lebih cepat dari jadwal yang ditentukan. Sehingga organisasi perlu mempertimbangkan langkah strategis lebih lanjut seperti melakukan reviu Renstra guna melakukan penyesuaian target jangka panjang.

### d. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN BALAI BESAR POM KLASTER 5




**Gambar 3.12** Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster

Berdasarkan grafik perbandingan kinerja tahun 2025, seluruh unit kerja dalam Klaster 5 yang terdiri dari BBPOM di Banjarbaru, Serang, Pontianak, dan Mataram menunjukkan realisasi yang seluruhnya melampaui target tahunan masing-masing dan target nasional. BBPOM di Pontianak mencatatkan realisasi tertinggi sebesar 99,87 dengan tingkat efektivitas capaian mencapai 105,54%, disusul oleh BBPOM di Banjarbaru dengan realisasi 98,73 (capaian 103,38%). Sementara itu, BBPOM di Mataram mencatatkan realisasi sebesar 98,57 (capaian 102,68%) dan BBPOM di Serang dengan realisasi 97,46 namun memiliki efektivitas capaian yang cukup tinggi sebesar 104,24%.

### e. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Capaian indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di tahun 2025 telah mencapai target. Realisasi melebihi target disebabkan karena kompetensi petugas yang memadai (telah mengikuti berbagai pelatihan yang mendukung pengawasan, antara lain: Inspektur OT, Inspektur Kosmetik dan Inspektur CDOB) sehingga

pelaksanaan pemeriksaan sarana dan penetapan tindak lanjut senantiasa dilaksanakan sesuai target *risk based inspection*, pedoman dan ketentuan yang berlaku serta komitmen petugas dalam melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan dan tepat waktu. Selain itu Monev secara rutin dan koordinasi yang baik dan intens antara Kepala Balai, Ketua Tim dan Tim Kerja juga menjadi faktor keberhasilan tercapainya IKSK ini.

### f. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

**Tabel 3.46** Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025

| Indikator | Kendala/ Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | masih tingginya praktik Apotek distributor terutama penyerahan obat keras diluar ketentuan ke praktik mandiri tenaga kesehatan | perlu dilakukan koordinasi dengan linsek terkait untuk membahas tindak lanjut terhadap apotek distributor/dispensing dan penertiban nakes praktik mandiri | akan dilakukan rapat pembahasan baik internal maupun dengan linsek terkait (Dinas Kesehatan dan DPMPTSP) | TW 1 2026 atau TW 2 2026 | T | - | - |
| | terdapat ketidaksesuaian tindak lanjut untuk saryanfar dimana beberapa sarana Apotek dan Klinik diberikan rekomendasi sanksi PSK oleh evaluator pusat sedangkan UPT memberikan sanksi Peringatan Keras | perlu dilakukan pembahasan internal terkait pemberian sanksi saryanfar | | | T | - | - |
| | sarana Toko Obat banyak yang sudah tidak operasional saat dikunjungi | perlu dilakukan updating sarana yang menjadi target pengawasan | akan bersurat ke DPMPTSP dan Dinas Kesehatan untuk meminta | | T | - | - |

| Indikator | Kendala/ Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | data sarana terupdate | | | | |
| | semakin marak kontrak kuasa merek dan sulitnya telusur data pemilik kuasa merek, (pusat sendiri tdk punya data) | Melakukan pendataan mandiri terhadap distributor lokal di pulau Lombok yang menyalurkan produk kontrak kuasa merek dan berkoordinasi dengan pusat untuk validasi data kepemilikan. | Melakukan pendataan mandiri terhadap distributor lokal di pulau Lombok yang menyalurkan produk kontrak kuasa merek dan berkoordinasi dengan pusat untuk validasi data kepemilikan. | TW 2 Tahun 2026 | T | - | - |

## g. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini BBPOM di Mataram melaksanakan kegiatan yaitu:

1. Perencanaan pengawasan berbasis risiko

   Penetapan prioritas pemeriksaan dilakukan berdasarkan tingkat risiko sarana, riwayat pelanggaran, dan profil kepatuhan, sehingga sumber daya difokuskan pada sarana dengan potensi risiko tertinggi. Tahun 2025 ditetapkan target pengawasan sarana sejumlah 232 sarana distribusi;
2. Pelaksanaan inspeksi rutin dan khusus

   Dilakukan pemeriksaan berkala maupun inspeksi khusus (intensifikasi pengawasan, pemeriksaan investigatif, respon pengaduan masyarakat dan/atau *emerging issues*) terhadap 248 sarana distribusi sediaan farmasi di Tahun 2025 untuk memastikan penerapan CPPOB dan ketentuan peraturan perundang-undangan berjalan konsisten;
3. Penguatan tindak lanjut hasil pemeriksaan

Setiap temuan ditindaklanjuti melalui mekanisme pembinaan sampai dengan pemberian sanksi administratif sesuai ketentuan (Surat Peringatan/Peringatan Keras), dan permintaan tindakan perbaikan/CAPA kepada pelaku usaha dengan pemantauan hingga status temuan dinyatakan selesai/*closed*.

4. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala
   Dilaksanakan rapat monitoring internal untuk memastikan progres pemeriksaan dan tindak lanjut sesuai target serta mencegah adanya temuan yang belum terselesaikan setiap bulan
5. Peningkatan kompetensi SDM pengawas/inspektur
   Dengan dilaksanakannya pelatihan teknis antara lain Pelatihan Inspektur Kosmetik, Inspektur CPOTB dan inspektur CDOB di Tahun 2025 untuk mempertahankan kompetensi inspektur guna menjaga kualitas dan konsistensi hasil pemeriksaan.
6. Pemanfaatan sistem informasi pengawasan
   Penggunaan aplikasi pelaporan dan monitoring hasil pemeriksaan sarana produksi, melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) yang dilaporkan secara tepat waktu.
7. Koordinasi Internal dan Eksternal
   Sinergi di unit internal antara fungsi Pemeriksaan, fungsi Pengujian dan fungsi Infokom, serta secara eksternal dengan pemangku kepentingan di daerah guna mempercepat implementasi tindak lanjut dan juga pada kasus yang membutuhkan pengawasan lanjutan, maupun sinergi dengan pelaku usaha.

## h. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**Tabel 3.47** Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025

| Indikator | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T | R | % | T | R | % | | | |
| Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 96,00 | 98.57 | 102,68 | 291.005.500 | 290.999.267 | **100,00** | **1,03** | **0,03** | **100 % (Efisien)** |

Berdasarkan tabel diatas, bahwa penggunaan sumber daya/anggaran adalah efisien dengan capaian efisiensi sebesar 100%.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 menunjukkan

efisiensi penggunaan sumber daya yang sangat baik. Hal ini tercermin dengan input anggaran sebesar 100,0% menghasilkan output kinerja sebesar 102,68%.

Efisiensi sumber daya diperoleh antara lain dari optimalisasi pengawasan sarana distribusi dengan realisasi 242 sarana dari 232 sarana yang ditargetkan. Selain itu mengoptimalkan layanan konsultasi CAPA melalui nomor WhatsApp khusus serta monev CAPA secara *online*.

## 1.10. PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI PANGAN OLAHAN YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Cara Perhitungan dan Formula:

**Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 70%B + 10%C**

A : pemenuhan target sarana distribusi yang diperiksa = 20% X ((jumlah sarana yang diperiksa/ target jumlah sarana yang diperiksa) X 100%)

B : Ketepatan tindak lanjut = 70% X ((jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan / jumlah sarana yang diperiksa) X 100%)

C : Kesesuaian waktu pelaporan = 10% X ((jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu / jumlah sarana yang diperiksa) X 100%)

Keterangan:

a. Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
b. Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:
    1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
    2. Ketepatan waktu pelaporan
    3. Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

### a. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

**Tabel 3.48** Target, realisasi dan %capaian Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

| Sasaran kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan | Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan | 91 | 97,33 | 106,96% | Sangat Baik |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Olahan di wilayah kerja UPT | ditindaklanjuti sesuai ketentuan | | | | |

Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 telah mencapai target yaitu sebesar 97,33% dari target 91,0% sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 106,96% dengan kategori “sangat baik”.

**Tabel 3.49** Sarana Distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025

| Jenis Sarana | Total Realisasi | Total | | |
|---|---|---|---|---|
| | | MK | TMK | Tutup |
| Distributor Pangan | 21 | 10 | 11 | 0 |
| Ritel Pangan Modern | 41 | 37 | 4 | 0 |
| Ritel Pangan Tradisional | 69 | 68 | 1 | 0 |
| **Total** | **131** | **115** | **16** | **0** |

Pelaksanaan di tahun 2025 sesuai dengan perencanaan, dimana telah dilakukan pemeriksaan terhadap 131 sarana distribusi pangan olahan yang terdiri dari 21 sarana distributor pangan dengan hasil 10 MK dan 11 TMK; 41 sarana ritel pangan modern dengan hasil 37 MK dan 4 TMK; serta 69 sarana ritel pangan tradisional dengan hasil 68 MK dan 1 TMK.

### b. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN 2024

Realisasi Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator kinerja baru di periode renstra 2025-2029.

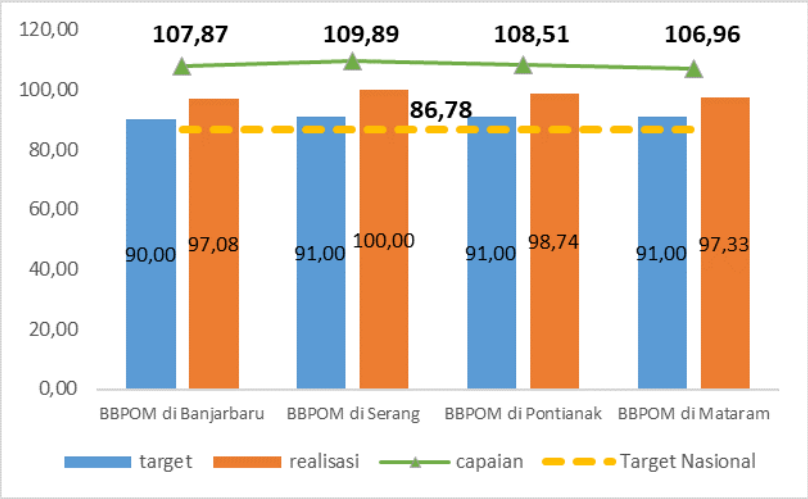
### c. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (2029)

**Tabel 3.50** Perbandingan Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029)

| Indikator | Realisasi 2025 | Target Renstra (2029) | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 97.33 | 95.00 | 102.45% ▲ | Melampaui |

Realisasi tahun 2025 sebesar 97,33 secara mengejutkan telah melampaui Target Akhir Renstra (2029) yang ditetapkan pada angka 95. Hal ini berarti target yang direncanakan untuk dicapai dalam lima tahun telah berhasil dituntaskan dan dilampaui sejak tahun pertama pelaksanaan indikator tersebut. Mengingat kondisi kinerja yang sudah mencapai target terhadap Renstra, sangat direkomendasikan untuk segera melakukan reviu Renstra guna menetapkan standar target baru yang lebih tinggi dan kompetitif agar organisasi tetap memiliki ruang improvisasi hingga akhir periode 2029.

### d. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN BALAI BESAR POM KLASTER 5




**Gambar 3.13** Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster

Seluruh unit kerja dalam Klaster 5 menunjukkan performa yang sangat solid pada tahun 2025 dengan realisasi kinerja yang secara konsisten melampaui target yang telah ditetapkan. BBPOM di Serang mencatatkan hasil sempurna dengan realisasi 100,00 (capaian 109,89%), yang merupakan angka tertinggi dibandingkan unit lainnya seperti BBPOM di Pontianak (98,74), BBPOM di Mataram (97,33), dan BBPOM di Banjarbaru (97,08).

Capaian kolektif yang tinggi pada tahun pertama implementasi indikator-indikator baru ini menunjukkan efektivitas program di seluruh wilayah Klaster 5, namun sekaligus memberikan sinyal urgensi untuk melakukan reviu Renstra. Mengingat realisasi di hampir seluruh Balai sudah menyentuh atau bahkan melampaui target akhir periode 2029. Penyesuaian target ke tingkat yang lebih menantang menjadi krusial untuk menjaga momentum peningkatan kinerja hingga akhir periode Renstra.

### e. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Capaian Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di tahun 2025 telah mencapai target. Realisasi melebihi target karena kompetensi petugas yang memadai (telah mengikuti pelatihan yang mendukung pengawasan, antara lain: Inspektur Pangan) sehingga pelaksanaan pemeriksaan sarana dan penetapan tindak lanjut senantiasa dilaksanakan sesuai target *risk based inspection*, pedoman dan ketentuan yang berlaku serta komitmen petugas dalam melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan dan tepat waktu. Selain itu Monev secara rutin dan koordinasi yang baik dan intens antara Kepala Balai, Ketua Tim dan Tim Kerja juga menjadi faktor keberhasilan tercapainya IKSK ini.

### f. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

**Tabel 3.51** Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025

| Indikator | Kendala/ Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Banyaknya sarana distribusi pangan skala kecil (kios/toko kelontong) yang belum memahami standar penyimpanan pangan yang baik, sehingga temuan produk rusak atau kedaluwarsa sering berulang. | Memperkuat pembinaan mandiri melalui pengelola pasar atau asosiasi ritel untuk meningkatkan kesadaran terkait pemisahan produk yang tidak memenuhi ketentuan. | Mengundang pelaku usaha yang belum menindaklanjuti hasil pemeriksaan untuk menyelesaikan kewajibannya secara serentak (metode desk) guna mempercepat persentase penyelesaian TL. | TW 1 Tahun 2026 | T | - | - |
| | Pelaku usaha di tingkat pengecer seringkali lambat dalam memberikan respon terhadap surat peringatan atau instruksi | Untuk mempercepat Kesesuaian Tindak Lanjut, pelaku usaha dapat didorong mengirimkan | Menyediakan kanal khusus bagi pelaku usaha ritel untuk berkonsultasi mengenai cara pengelolaan | TW 1 Tahun 2026 | T | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | pemusnahan produk (TL pertama), yang menghambat pencapaian target ketepatan waktu tindak lanjut. | bukti foto/video pemusnahan atau retur produk secara daring sebagai respon cepat terhadap TL pertama | produk yang mendekati masa kedaluwarsa agar tidak menjadi temuan saat pemeriksaan. | | | | |

### g. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini BBPOM di Mataram melaksanakan kegiatan yaitu:

a. Pemeriksaan 91 sarana distribusi pangan olahan dengan hasil 82 MK dan 9 TMK.
b. Monitoring dan evaluasi pengawasan sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara lain meliputi kesesuaian jumlah sarana yang diperiksa, pemenuhan target sarana, ketepatan waktu pelaporan dan ketepatan tindak lanjut.

### h. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**Tabel 3.52** Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025

| Indikator | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T | R | % | T | R | % | | | |
| Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 91,00 | 97.33 | 106,96 | 218.254.125 | 218.249.450 | **100,00** | **1,07** | **0,07** | **100 % (Efisien)** |

Nilai IE > 1 menunjukkan bahwa kinerja yang dihasilkan lebih besar dibandingkan sumber daya yang digunakan, sehingga kegiatan dinilai efisien.

Tingkat efisiensi (TE) dihitung berdasarkan selisih antara Indeks Efisiensi (IE) dan angka dasar efisiensi (1). Dengan nilai IE sebesar 1,07 maka TE diperoleh dari 1,07 dikurangi 1, sehingga menghasilkan nilai 0,07. Nilai TE yang positif ini menunjukkan bahwa kegiatan dilaksanakan secara efisien, dengan tingkat efisiensi sebesar 7%. Artinya, dengan anggaran yang digunakan, kinerja

yang dihasilkan mampu melampaui target yang telah ditetapkan, sehingga penggunaan sumber daya dapat dinilai optimal dan memberikan hasil yang lebih tinggi dari perencanaan awal.

## 1.11. PERSENTASE IKLAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DIAWASI SESUAI KETENTUAN

Indikator pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan merupakan ukuran kinerja yang menggambarkan pelaksanaan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan penanganan iklan Obat, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Iklan Pangan olahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan iklan bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan melalui kepada masyarakat bersifat objektif, tidak menyesatkan, tidak berlebihan, serta sesuai dengan izin edar dan karakteristik produk yang telah disetujui.

Pengawasan dilaksanakan terhadap berbagai media, baik media konvensional maupun media digital. Media konvensional meliputi televisi, radio, media cetak, dan media luar ruang, sedangkan media digital mencakup website, marketplace, serta berbagai platform media sosial. Perkembangan media digital menjadi perhatian penting dalam pengawasan karena memiliki jangkauan luas dan penyebaran informasi yang cepat.

Proses pengawasan dilakukan secara sistematis melalui tahapan identifikasi dan pemantauan iklan yang beredar, evaluasi kesesuaian materi iklan terhadap ketentuan yang berlaku, penetapan status hasil pengawasan, serta pelaksanaan tindak lanjut apabila ditemukan pelanggaran. Evaluasi mencakup penilaian terhadap kesesuaian klaim, kebenaran informasi, pencantuman informasi wajib, serta larangan tertentu sesuai pedoman periklanan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetik merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat. Metodologi penilaian dilakukan secara *composite* dengan menggabungkan aspek pemenuhan jumlah target pengawasan iklan terhadap rencana pelaksanaan (Renlak), ketepatan waktu pelaporan, dan akurasi teknis penilaian yaitu ketepatan pengambilan keputusan hasil pengawasan (objektivitas penilaian) dan kesesuaian proporsi media iklan yang diawasi (cetak, online, penyiaran, luar ruang).

Cara Perhitungan dan Formula:

**Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (A+B+C+D+E)/5**

**A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan =** (a+b)/2

**a. Pemenuhan jumlah target pengawasan**

**=** Jumlah iklan yang selesai diawasi Jumlah/ target iklan yang diawasi sesuai renlak **x 100%**

**b. Ketepatan waktu pelaporan**

**=** Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/Jumlah target iklan yang diawasi **x 100%**

**B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)**

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%

b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%

c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

**C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)**

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%

b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%

c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

**D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b) / 2**

a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4)

- Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%

b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2

- Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%
- Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

**E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)**

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/ jumlah target iklan sesuai renlak) X 40%

b. Kesesuaian proporsi media iklan yang di sampling = Rata-rata dari perhitungan ((jumlah iklan yang diawasi per media iklan/jumlah iklan yang diawasi) / proporsi target media) X 20%

c. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi) X 40%

Keterangan:

a. Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
b. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.
c. Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat.
d. Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media
e. Tepat waktu adalah sesuai pedoman.

### a. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

**Tabel 3.53** Target, realisasi dan %capaian Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

| Sasaran kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | 89,6 | 99,48 | 111,03% | Tidak Dapat disimpulkan |

Pada tahun 2025 indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan ditetapkan dengan target sebesar 89,6%. Sampai akhir periode pelaporan, realisasi capaian mencapai 99,48%, sehingga persentase capaian kinerja sebesar 111,03% dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”.

**Tabel 3.54** Target dan realisasi Iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan tahun 2025

| Jenis Iklan | TARGET | REALISASI |
|---|---|---|
| Obat | 120 | 130 |
| Kosmetika | 330 | 330 |
| OBA | 100 | 100 |
| SK | 35 | 36 |
| Pangan | 272 | 272 |
| **Total** | **857** | **868** |

Pada tahun 2025 jumlah iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi tercapai sejumlah 868 iklan yang terdiri dari 130 iklan obat, 330 iklan produk Kosmetika, 100 iklan Obat Bahan Alam (OBA), 36 iklan produk Suplemen Kesehatan, dan 272 iklan produk Pangan olahan. Realisasi ini melebihi target yang ditetapkan yaitu 857 iklan, dimana realisasi yang melebihi target berasal dari iklan sediaan Obat sebanyak 10 iklan dan iklan produk Suplemen Kesehatan sejumlah 1 iklan.

Realisasi indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan sebesar 99,48% dari target yang ditetapkan sebesar 89,6%, sehingga capaian kinerja mencapai 111,03%. Capaian ini menunjukkan bahwa jumlah iklan yang diawasi dan dilaporkan tepat waktu sesuai ketentuan telah melebihi target. Namun dalam perspektif evaluasi SAKIP, capaian yang jauh melebihi target dapat dikategorikan sebagai “tidak dapat disimpulkan” apabila belum dapat dipastikan bahwa indikator tersebut benar-benar merefleksikan peningkatan *outcome* atau efektivitas yang bersifat substantif.

**Tabel 3.55** Persentase capaian Iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan tahun 2025

| Target | % Iklan Obat | % Iklan Kos | % Iklan OBA | % Iklan SK | % Iklan PO | % Iklan SF dan PO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.6 | 100.00 | 100.00 | 99.67 | 99.07 | 98.68 | 99.48 |

Jika ditinjau dari capaian tiap komoditi, realisasi iklan seluruh komoditi jauh melebihi target dengan realisasi pada rentang 98,68% sampai dengan 100%. Untuk memperbaiki status ini, pada periode berikutnya diperlukan peninjauan kembali terhadap *baseline* dan formula penetapan target agar

lebih realistis, proporsional dan tetap menantang, serta mempertimbangkan parameter kualitas substantif pada metodologi penilaian mandiri.

### b. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN 2024

Realisasi Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator kinerja baru di periode renstra 2025-2029.

### c. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (2029)

**Tabel 3.56** Perbandingan Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029)

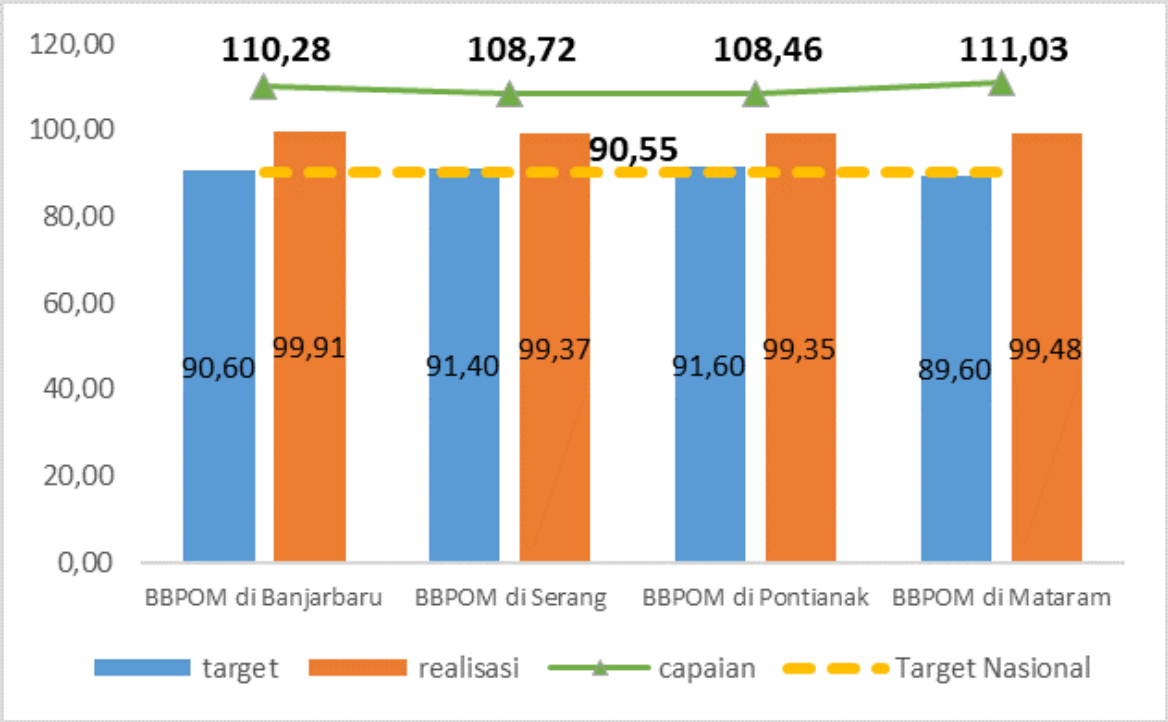
| Indikator | Realisasi 2025 | Target Renstra (2029) | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | 99.48 | 95.20 | 104.50%  | Melampaui |

Realisasi indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada tahun sebesar 99,48%, sedangkan target Renstra tahun 2029 ditetapkan sebesar 95,20%. Dengan demikian, persentase capaian terhadap target Renstra telah mencapai 104,50%, yang berarti kinerja telah melampaui sasaran strategis jangka menengah.

Capaian ini menunjukkan bahwa pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan telah berada di atas target, bahkan sebelum periode Renstra berakhir di tahun 2029. Secara substansial, kondisi tersebut mencerminkan optimalisasi pelaksanaan monitoring, ketepatan identifikasi kesesuaian iklan terhadap ketentuan, serta tertibnya pelaporan hasil pengawasan.

Meskipun capaian telah melampaui target Renstra, evaluasi tetap diperlukan untuk memastikan bahwa keberhasilan tersebut mencerminkan peningkatan kualitas pengawasan, bukan semata akibat faktor administratif atau teknis dalam pengukuran indikator.

### d. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN BALAI BESAR POM KLASTER 5




**Gambar 3.14** Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster

Berdasarkan grafik perbandingan capaian indikator persentase pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan di empat UPT dalam satu klaster, seluruh Balai Besar POM menunjukkan realisasi melampaui target yang telah ditetapkan.

BBPOM di Banjarbaru memiliki target sebesar 90,60% dengan realisasi mencapai 100,00%, sehingga persentase capaian sebesar 110,38%. BBPOM di Serang menetapkan target 91,40% dengan realisasi 99,37% atau capaian 108,72%. BBPOM di Pontianak memiliki target 91,60% dan realisasi 99,35%, dengan capaian 108,46%. Sementara itu, BBPOM di Mataram menetapkan target 89,60% dan mencapai realisasi 99,48%, sehingga capaian sebesar 111,03%.

Secara umum, seluruh UPT berhasil mencapai realisasi mendekati 100%, yang menunjukkan bahwa hampir seluruh objek iklan yang menjadi target pengawasan telah ditangani sesuai ketentuan. Persentase capaian yang berada pada kisaran 108–111% menunjukkan konsistensi kinerja yang sangat baik serta pelaksanaan pengawasan yang optimal di masing-masing wilayah kerja.

Namun demikian, capaian yang relatif seragam dan melampaui 100% pada seluruh UPT juga mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan berada pada rentang yang cukup konservatif

(sekitar 89–92%), sehingga realisasi yang mendekati batas maksimal (100%) secara otomatis menghasilkan persentase capaian di atas 108%. Dalam konteks evaluasi kinerja, kondisi ini perlu dianalisis lebih lanjut untuk memastikan bahwa indikator tidak hanya mencerminkan kepatuhan administratif, tetapi juga peningkatan efektivitas pengawasan secara substantif.

### e. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Pencapaian realisasi sebesar 99,48% dari target 89,6% (Capaian 111,03%) menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan berjalan efektif baik dari sisi administratif maupun teknis. Keberhasilan ini tidak terlepas dari pemenuhan parameter penilaian indikator yang telah ditetapkan dalam definisi operasionalnya yaitu:

1. Jumlah target iklan yang diawasi dilaksanakan sesuai rencana kerja (Renlak), bahkan pada kategori iklan Obat dan Suplemen Kesehatan realisasi melebihi target sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan persentase capaian. Hal ini mencerminkan perencanaan kegiatan yang realistis serta kemampuan pelaksanaan yang optimal di lapangan.
2. Pelaksanaan pengawasan didukung oleh kedisiplinan petugas dalam melaporkan hasil pengawasan melalui SIPT secara tepat waktu. Pelaporan yang konsisten memastikan seluruh realisasi kegiatan tercatat dan terakumulasi dalam perhitungan indikator kinerja, sehingga capaian dapat terukur secara utuh.
3. Pengawasan iklan telah dilaksanakan secara seimbang pada berbagai media sesuai ketentuan, baik media konvensional maupun media digital. Kesesuaian proporsi ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak terfokus pada satu jenis media saja, tetapi telah mempertimbangkan perkembangan pola promosi produk yang semakin dominan di media digital.
4. Kemampuan dan kompetensi yang sangat baik dari evaluator iklan dalam menilai dan menetapkan kesimpulan/keputusan terhadap iklan yang diawasi. TIngginya akurasi kesesuaian pengambilan keputusan antara evaluator Balai dan Pusat menunjukkan pemahaman yang sangat baik terhadap regulasi iklan, sehingga capaian dalam parameter ini juga memberikan kontribusi yang besar terhadap capaian indikator.

Meskipun realisasi kinerja berhasil melampaui target dengan capaian sebesar 111,03%, namun karena melebihi 110% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan. Kondisi ini mengindikasikan adanya proyeksi target yang terlalu rendah (*underestimated*). Hal tersebut terjadi karena merupakan indikator baru pada tahun 2025, sehingga penyusunan target belum didukung oleh data *baseline* maupun analisis tren capaian dari tahun-tahun sebelumnya.

### f. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

**Tabel 3.57** Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Tahun 2025

| Indikator | Kendala/ Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | Keterbatasan anggaran sampling penandaan produk tembakau dan rokok elektronik, karena di perencanaan awal hanya untuk pembelian produk tembakau | - Meningkatkan intensitas secara daring dengan fokus pada kata kunci (keywords) klaim kesehatan yang dilarang (misal: "menyembuhkan kanker", "langsing dalam 3 hari"). - Memberdayakan masyarakat sebagai pengawas mandiri melalui edukasi mengenai ciri-ciri iklan yang menyesatkan, sehingga masyarakat dapat melaporkan iklan overclaim secara aktif. | Menyelenggarakan bimbingan teknis bagi pelaku usaha (terutama UMKM Pangan dan Kosmetik) dan Masyarakat mengenai cara menyusun materi iklan yang kreatif namun tetap sesuai regulasi (bila tersedia anggaran) serta melakukan bimbingan/pendampingan kepada pelaku usaha sekaligus saat pemeriksaan sarana | TW III Tahun 2026 | T | - | - |

### g. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Capaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, metode pelaksanaan pengawasan, serta dukungan kegiatan peningkatan kapasitas. Pengawasan iklan memiliki

karakteristik berbeda karena bersifat dinamis, berbasis media, dan sangat dipengaruhi perkembangan teknologi informasi. Beberapa kegiatan yang menunjang capaian kinerja indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan pada tahun 2025 antara lain:

1. Pelaksanaan monitoring iklan secara rutin dan terjadwal, mencakup media cetak, media elektronik, media sosial, marketplace, dan website, sesuai rencana kerja tahunan, yang dilakukan secara internal maupun bersama dengan Pusat, antara lain melalui kegiatan Monev Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan (Pangan Olahan) antara UPT dan Direktorat Pengampu setiap triwulan, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan (triwulanan).
2. Implementasi pengawasan berbasis risiko media, dengan memprioritaskan media digital dan platform dengan potensi pelanggaran lebih tinggi.
3. Pelaporan hasil pengawasan secara tertib dan tepat waktu melalui SIPT, sehingga seluruh kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan dapat dihitung dalam realisasi indikator.
4. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi petugas, antara lain:
    - Workshop Cerdas Memahami Label dan Iklan Pangan dengan Tema: Mengurai Perbedaan Persepsi dalam Pengawasan Iklan, bulan November 2025

## h. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**Tabel 3.58** Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025

| Indikator | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T | R | % | T | R | % | | | |
| Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | 89.6 | 99.48 | 111,03 | 16.207.500 | 16.206.815 | **100,00** | **1,11** | **0,11** | **100 % (Efisien)** |

Berdasarkan tabel diatas, penggunaan anggaran tahun 2025 dinilai sangat efisien dengan tingkat capaian 100%. Efisiensi ini terlihat dari output kinerja yang mencapai 111,03% meskipun input anggaran berada di angka 100,0%. Keberhasilan tersebut antara lain didorong oleh optimalisasi pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan, di mana realisasi mencapai 868 iklan dari target awal sebanyak 857 iklan.

## 1.12. PERSENTASE LABEL PRODUK TEMBAKAU DAN/ATAU ROKOK ELEKTRONIK YANG DIAWASI SESUAI STANDAR

Cara Perhitungan dan Formula:

% label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar =(A+B)/2

Keterangan:

A: Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label :

(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

B: Persentase ketepatan waktu pelaporan label:

(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang seesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

Keterangan:

a. Jumlah label yang selesai diawasi adalah jumlah label yang telah selesai diinput melalui SIPT dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat.
b. Jumlah target label yang diawasi adalah jumlah target yang ditetapkan untuk masing-masing UPT yang telah ditetapkan BPOM pusat setiap tahunnya dan disampaikan melalui surat edaran.
c. Jumlah label yang dilaporkan tepat waktu adalah jumlah label yang selesai diawasi, dilaporkan dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat melalui SIPT secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.
d. Sumber data baik jumlah label maupun ketepatan waktu pelaporan berasal dari data tarikan laporan pengawasan penandaan pada aplikasi SIPT

### a. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

**Tabel 3.59** Target, realisasi dan %capaian Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

| Sasaran kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar | 92 | 94.40 | 102.61% | Sangat Baik |

Realisasi Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar di tahun 2025 telah mencapai target yaitu sebesar 94,40% dari target 92,00% sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 102,61% dengan kategori “sangat baik”.

### b. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN 2024

Realisasi Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator kinerja baru di periode renstra 2025-2029.

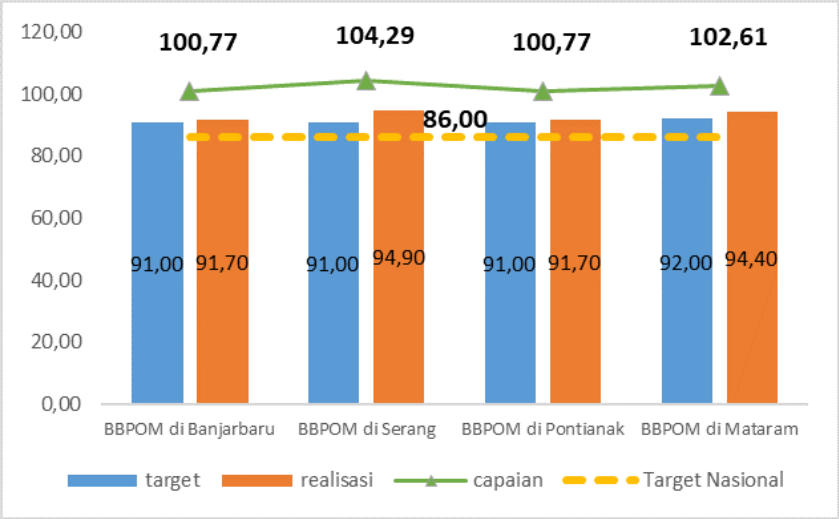
### c. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (2029)

**Tabel 3.60** Perbandingan Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029)

| Indikator | Realisasi 2025 | Target Renstra (2029) | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar | 94.40 | 96.00 | 98.33% | Akan Tercapai |

Berdasarkan data capaian yang ada, realisasi kinerja pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan target jangka panjang organisasi. Meskipun tahun 2025 merupakan tahun pertama indikator ini diukur, realisasi yang dicapai sebesar 94,40 akan mencapai Target Akhir Renstra yang ditetapkan pada angka 96. Hal ini mengindikasikan bahwa target strategis yang semula direncanakan untuk dicapai pada akhir periode (2029) telah berhasil dipenuhi secara prematur dengan surplus sebesar 4 poin di atas ambang batas sasaran. Pencapaian yang melampaui target akhir ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program yang sangat tinggi, sekaligus memberikan ruang bagi organisasi untuk melakukan eskalasi atau penyesuaian target yang lebih menantang pada sisa periode perencanaan berikutnya.

### d. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN BALAI BESAR POM KLASTER 5




**Gambar 3.15** Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster

Berdasarkan data capaian kinerja pada Klaster 5, seluruh Balai Besar POM menunjukkan kinerja yang baik dengan realisasi yang melampaui target internal masing-masing dan melampaui Target Nasional sebesar 86,00. BBPOM di Serang mencatatkan capaian tertinggi sebesar 104,29%, hasil dari realisasi angka 94,90 terhadap target unit 91,00. Posisi berikutnya ditempati oleh BBPOM di Mataram yang meraih capaian 102,61%, meskipun memiliki target unit tertinggi sebesar 92,00, BBPOM di Mataram mampu menghasilkan realisasi tertinggi yaitu sebesar 94,40. Sementara itu, BBPOM di Banjarbaru dan BBPOM di Pontianak menunjukkan konsistensi kinerja yang identik dengan angka capaian masing-masing sebesar 100,77, yang berasal dari realisasi 91,70 atas target unit 91,00. Secara kolektif, rentang capaian di Klaster 5 yang berada pada angka 100,77 hingga 104,29 mengindikasikan adanya efektivitas pengawasan yang merata dan melampaui ekspektasi di seluruh wilayah tersebut.

### e. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Capaian Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar di tahun 2025 telah mencapai target. Realisasi yang melampaui target ini, didukung kmpetensi petugas yang memadai, komitmen petugas dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dilakukan sesuai target/perencanaan dan pelaporan hasil pengawasan iklan melalui SIPT tepat

waktu. Selain itu, monev secara rutin dan koordinasi intens antara Kepala Balai, Ketua Tim dan Tim Kerja juga menjadi faktor keberhasilan capaian IKSK ini.

### f. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

**Tabel 3.61** Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar Tahun 2025

| Indikator | Kendala/Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar | - Pesatnya pertumbuhan gerai vape store yang menjual cairan rokok elektronik (liquid) hasil home industri atau impor yang seringkali belum mencantumkan Peringatan Kesehatan Bergambar (PHW) sesuai standar regulasi terbaru (PP No. 28 Tahun 2024).<br>- Sulitnya melakukan penilaian label pada produk tembakau ilegal (tanpa pita cukai atau pita cukai palsu) karena seringkali menggunakan desain kemasan yang meniru merek terkenal namun dengan standar visual PHW yang buruk/kabur.<br>- Pengawasan label di tingkat | - Melakukan edukasi khusus mengenai kewajiban pencantuman PHW dan informasi kesehatan lainnya pada kemasan rokok elektronik sesuai regulasi terbaru.<br>- Memperkuat kerja sama lintas instansi dalam operasi pasar bersama untuk menyasar produk tembakau ilegal, sekaligus melakukan evaluasi label secara terpadu.<br>- Mengoptimalkan penggunaan aplikasi pengawasan untuk mempercepat pengiriman data visual label dari lapangan ke sistem pusat guna verifikasi ketepatan standar. | - Melakukan pengambilan sampel label produk tembakau dan rokok elektronik secara berkala di pusat perbelanjaan dan distributor utama di Pulau Lombok.<br>- Melakukan penilaian teknis terhadap kesesuaian gambar, tulisan, dan kombinasi keduanya pada PHW sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengawasan Produk Tembakau.<br>- Memberikan rekomendasi sanksi administratif atau peringatan kepada produsen/distributor yang | TW 1 Tahun 2026 | T | - | - |

| Indikator | Kendala/Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | pengecer/toko kelontong di daerah terpencil seringkali terkendala oleh stok produk yang cepat berganti (turnover tinggi), sehingga sampling seringkali tidak mencakup seluruh varian merek yang beredar.<br>- Bentuk kemasan rokok elektronik yang sangat beragam (bulat, pipih, kecil) menyulitkan verifikasi persentase luas pencantuman peringatan kesehatan agar tetap presisi sesuai aturan | - Kampanye mengenai cara mengenali label produk tembakau yang legal dan memenuhi standar kesehatan sebagai bagian dari perlindungan konsumen. | ditemukan menjual produk dengan label yang tidak sesuai standar (misal: gambar PHW tertutup pita cukai). | | | | |

### g. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target meliputi:

- Pelaksanaan pengawasan label produk tembakau sejumlah 208 label selama Tahun 2025 sesuai dengan perencanaan/target;
- Monitoring dan evaluasi kegiatan dan capaian secara berkala;
- Pelaporan hasil pengawasan label melalui SIPT;
- Peningkatan kompetensi petugas terkait standar pengawasan label produk tembakau terbaru;

Capaian efisiensi ini diharapkan dapat menjadi dasar penguatan strategi penganggaran berbasis kinerja pada periode berikutnya. Fokus utama akan diarahkan pada ketepatan sasaran dan

keberlanjutan hasil pengawasan, khususnya dalam mendukung indikator Persentase Label Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar.

Sebagai indikator yang baru diterapkan pada Agustus 2025 berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.08.02.21.09.25.308, pelaksanaan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik saat ini masih dalam tahap adaptasi mekanisme pengukuran serta pelaporan.

Guna mengoptimalkan kinerja ke depan, diperlukan beberapa langkah penyempurnaan sebagai berikut:

- Kesesuaian Standar: Memastikan pelaksanaan pengawasan label dilakukan secara ketat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketepatan Waktu: Meningkatkan kedisiplinan pelaporan hasil pengawasan melalui SIPT paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.
- Monitoring Internal: Melakukan pengawasan rutin terhadap jadwal input laporan serta memperkuat koordinasi antar petugas untuk memitigasi kendala teknis sistem.

### h. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**Tabel 3.62** Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar Tahun 2025

| Indikator | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T | R | % | T | R | % | | | |
| Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar | 92.00 | 94.40 | 102.61 | 34,733,000 | 34,727,668 | **99.98** | **1.03** | **0.03** | **100 % (Efisien)** |

Berdasarkan tabel 3.62 , penggunaan anggaran tahun 2025 dinilai sangat efisien dengan tingkat capaian efisiensi 100%. Efisiensi ini terlihat dari output kinerja yang mencapai 102,61% meskipun input anggaran berada di angka 99,98%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2025 telah efektif menunjang pencapaian indikator.

## 1.13. PERSENTASE PEMENUHAN TARGET PENGENDALIAN AMR DI WILAYAH UPT

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu:

Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan cara:

1) 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A).

(A) dihitung berdasarkan jumlah penggunaan tools antibiotik terhadap jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan dalam tools antibiotik.

2) 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (B).

(B) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan bimbingan teknis kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT

3) 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (C).

(C) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan advokasi dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT.

4) 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (D).

(D) dihitung berdasarkan Jumlah publikasi hasil pengawasan
apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter

Formula:

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
= 25% A + 25% B + 25% C + 25% D

### a. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

**Tabel 3.**63 Target, realisasi dan %capaian Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

| Sasaran kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | 100 | 105.69 | 105.69% | Sangat Baik |

Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT merupakan indikator baru yang ditetapkan di Tahun 2025 yang realisasinya diukur pada akhir tahun. Realisasi Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT di tahun 2025 telah mencapai target yaitu sebesar 105,69% dari target 100,00% sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 105,69% dengan kategori “Sangat Baik”.

### b. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN 2024

Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT merupakan indikator baru yang ditetapkan di Tahun 2025 yang realisasinya diukur pada akhir tahun, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2024.

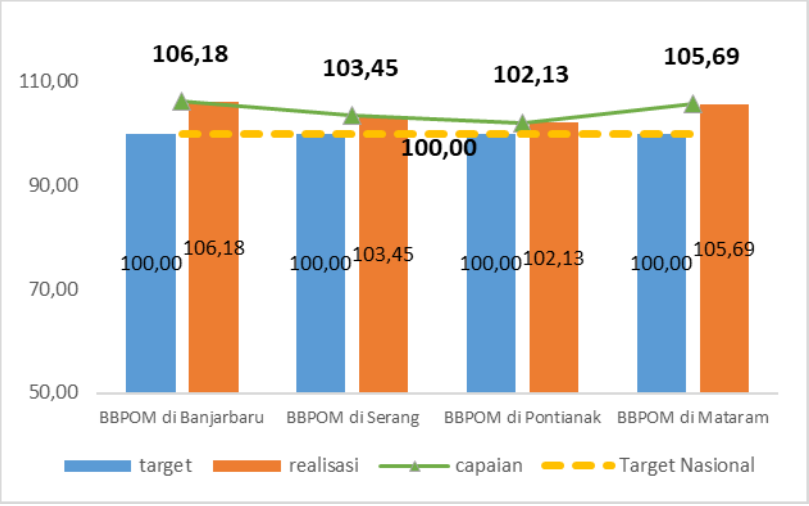
### c. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (2029)

**Tabel 3.64** Perbandingan Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029)

| Indikator | Realisasi 2025 | Target Renstra (2029) | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | 105.69 | 100.00 | 105.69% ▲ | Melampaui |

Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT merupakan indikator baru yang ditetapkan di Tahun 2025 yang merupakan tahun pertama Renstra 2025-2029. Target IKSK ini selama periode Renstra adalah flat sepanjang tahun yaitu 100%, dan di tahun 2025 ini telah melampaui target Renstra dengan %capaian sebesar 105,69%

### d. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN BALAI BESAR POM KLASTER 5




**Gambar 3.16** Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster

Berdasarkan grafik diatas target indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT pada seluruh UPT adalah sama yaitu 100% dan seluruhnya telah mencapai target internal masing-masing serta melampaui target nasional dengan urutan dari tertinggi ke terendah yaitu BBPOM di Banjarbaru, BBPOM di Mataram, BBPOM di Serang dan BBPOM di Pontianak.

## e. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Realisasi indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT di Tahun 2025 ini telah tercapai bahkan melampaui target Renstra Tahun 2025-2029 dan di tahun 2025 BBPOM di Mataram memperoleh penghargaan sebagai UPT dengan Kinerja Keseluruhan Pengendalian AMR Terbaik Kategori Balai Besar POM. Keberhasilan pencapaian indikator ini menunjukkan bahwa BBPOM di Mataram telah memahami dan melaksanakan setiap komponen yang menjadi tools penilaian dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan.

Pencapaian ini telah mencerminkan adanya komunikasi yang baik dari ketua tim kepada anggota tim serta kompetensi tim dalam melakukan pengisian tools antibiotik pada setiap pertanyaan dalam pemeriksaan Apotek di tahun 2025 terkait jumlah penggunaan dan ketepatan antibiotik dengan benar.

Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala yang dilakukan secara berjenjang dari kepala UPT dan ketua tim serta koordinasi aktif tentang pelaksanaan kegiatan dengan Direktorat Pengawasan Distribusi ONPP BPOM.
Selain itu juga diperkuat dengan adanya koordinasi aktif dengan Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam mengkomunikasikan rencana aksi pengendalian AMR sehingga diterbitkan 3 (tiga) surat edaran Bupati/Walikota tentang Pengendalian dan Rasionalisasi Penggunaan Antibiotika di Fasilitas Pelayanan Kesehatan maupun di Masyarakat. Dengan terbitnya surat edaran tersebut saat ini masyarakat cukup sulit untuk membeli antibiotik tanpa resep dokter di apotek.

## f. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

**Tabel 3.65** Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT Tahun 2025

| Indikator | Kendala/Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Masih ditemukan | Melakukan audit | Melaksanakan | TW 1 tahun | T | - | - |

| Indikator | Kendala/Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | praktik penjualan antibiotik tanpa resep dokter di sarana pelayanan kefarmasian (Apotek/Toko Obat) yang tidak berizin, yang memicu penggunaan antibiotik secara tidak rasional di masyarakat. | komprehensif pada distributor dan sarana pelayanan yang memiliki riwayat pengelolaan obat-obat tertentu (termasuk antibiotik) yang buruk | inspeksi khusus pada sarana distribusi dan pelayanan terkait penyerahan antibiotik sesuai ketentuan CDOB/pelayanan kefarmasian | 2026 | | | |
| | kebutuhan akan metode pengujian yang lebih spesifik dan sensitif untuk mendeteksi degradasi atau kontaminasi antibiotik di laboratorium BBPOM Mataram guna mendukung data surveilans mutu antibiotik di peredaran | Meningkatkan jumlah sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk antibiotik yang paling banyak diresepkan di NTB untuk memastikan efikasi produk di pasaran | Melaksanakan sampling dan pengujian parameter kadar antibiotik terpilih (prioritas AMR) di laboratorium kimia dan mikrobiologi. | TW 1 tahun 2026 | T | - | - |
| | Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya resistensi antimikroba dan kebiasaan menghentikan konsumsi antibiotik sebelum waktunya, yang mempercepat mutasi bakteri | Menggunakan pendekatan komunikasi yang menyasar perilaku konsumen dalam penggunaan antibiotik yang bijak (Gema Cermat). | Menyelenggarakan sosialisasi penggunaan antibiotik yang bijak kepada komunitas (seperti kader kesehatan dan pelajar) di wilayah NTB.<br>- Melakukan evaluasi berkala terhadap pemenuhan indikator teknis pengendalian | TW 1 tahun 2026 | T | - | - |

| Indikator | Kendala/Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AMR yang ditetapkan dalam Rencana Aksi BPOM Pusat. | | | | |

## g. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Realisasi indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT di Tahun 2025 ini tercapai bahkan melampaui target karena BBPOM di Mataram telah memahami dan melaksanakan setiap tahapan yang dilaksanakan antara lain :

a. Petugas telah melakukan pengisian tools antibiotik pada setiap pertanyaaan dalam pemeriksaan Apotek di tahun 2025 terkait jumlah penggunaan dan ketepatan antibiotik dengan benar.
b. Pada tanggal 24 Juli 2025 BBPOM di Mataram telah melaksanakan kegiatan Seminar dan Workshop Pengelolaan Obat dan Pengendalian Resistensi Antimikroba di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang yang bertujuan untuk
    1. Meningkatkan kompetensi dan pengetahuan petugas pelayanan kefarmasian dalam melakukan pengelolaan ONPP yang baik sesuai peraturan terkini.
    2. Meningkatkan awareness dan pemahaman bagi para pelaku usaha dan petugas pelayanan kefarmasian di Apotek tentang pentingnya pengendalian Resistensi Antimikroba dan bagaimana cara pengelolaan antibiotik yang benar.
    3. Penggalangan komitmen bersama organisasi profesi dan penanggungjawab sarana pelayanan kefarmasian dalam program Pengendalian Resistensi Antimikroba

c. Selama tahun 2025 BBPOM di Mataram secara intensif melaksanakan kegiatan Advokasi ke 5 (lima) kabupaten/kota di Pulau Lombok dengan topik diantaranya tentang pengendalian resistensi antimikroba yaitu penggunaan antibiotik yang berlebihan dan tidak tepat. Hal ini antara lain mencakup praktik swamedikasi (pengobatan sendiri), peresepan berlebih, kesalahan dalam peresepan, penggunaan antibiotik spektrum luas secara luas, serta pemberian antibiotik sebagai tindakan profilaksis (pencegahan). Penggunaan antibiotik yang tidak rasional ini juga diperparah oleh peredarannya yang masih bebas di masyarakat, baik karena faktor aksesibilitas (kemudahan memperoleh antibiotik) maupun faktor bisnis (tingginya

kontribusi penjualan antibiotik tanpa resep terhadap omzet sarana pelayanan kefarmasian). Sebagai hasil dari kegiatan advokasi tersebut pada tahun 2025 telah terbit Surat Edaran dari 3 (tiga) kabupaten/kota yaitu :

h. Surat Edaran Walikota Mataram No.400.7.18/5376/SETDA/VIII/2025 tanggal 29 Agustus 2025 tentang Pengendalian dan Rasionalisasi Penggunaan Antibiotika di Fasilitas Pelayanan Kesehatan maupun di Masyarakat
i. Surat Edaran Bupati Lombok Barat No. 440.1543/DIKES/2025 tentang Pengendalian dan Rasionalisasi Penggunaan Antibitika di Fasilitas Pelayanan Kesehatan maupun di Masyarakat
j. Surat Edaran Bupati Lombok Timur No.100.3.4.2/2138/KES/2025 tanggal 25 Agustus 2025 tentang Pengendalian dan Rasionalisasi Penggunaan Antibitika di Fasilitas Pelayanan Kesehatan maupun di Masyarakat.

d. Melaksanakan publikasi hasil pengawasan hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram pada akun media sosial BBPOM di Mataram

### k. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**Tabel 3.66** Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT Tahun 2025

| Indikator | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T | R | % | T | R | % | | | |
| Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | 100.00 | 105.69 | 105.69 | 72,751,375 | 72,749,817 | **100.00** | **1.06** | **0.06** | **100 % (Efisien)** |

Berdasarkan tabel diatas, penggunaan anggaran tahun 2025 dinilai sangat efisien dengan tingkat capaian efisiensi 100%. Efisiensi ini terlihat dari output kinerja yang mencapai 105,69% meskipun input anggaran berada di angka 100,0%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2025 telah efektif menunjang pencapaian indikator.

## 1.14. NILAI PEMENUHAN LAB PENGUJIAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN UPT SESUAI STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM.

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1. Laboratorium BBPOM di Mataram termasuk laboratorium Tingkat 3 bersama dengan 26 BB/BPOM lainnya.

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT yang berada pada Tingkat 3 terdiri beberapa komponen yaitu pemenuhan terhadap:

1. Standar Ruang Lingkup;
2. Standar Peralatan;
3. Standar Kompetensi Laboratorium;
4. Standar Metode yang terverifikasi.

### a. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

**Tabel 3.67** Target, realisasi dan %capaian Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

| Sasaran kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 81,70 | 89,70 | 109,79% | Sangat Baik |

Berdasarkan Tabel 3 mengenai target, realisasi, dan persentase capaian indikator Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, dapat disampaikan bahwa kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik.

Pada sasaran kegiatan Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, ditetapkan target sebesar 81,70. Realisasi yang dicapai sebesar 89,70, sehingga persentase capaian mencapai 109,79%. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja telah melampaui target yang telah ditetapkan.

Capaian di atas 100% tersebut mencerminkan optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan laboratorium, baik dari sisi pemenuhan standar kemampuan laboratorium, kualitas pengujian, maupun efektivitas pengelolaan sumber daya. Dengan hasil tersebut, kategori kinerja ditetapkan sebagai “Sangat Baik”, yang menggambarkan keberhasilan unit kerja dalam meningkatkan mutu pengawasan dan pelayanan laboratorium secara konsisten.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta pencapaian standar mutu laboratorium sesuai ketentuan yang berlaku.

### b. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN 2024

Realisasi Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena adanya perubahan manual indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK)

### c. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (2029)

**Tabel 3.68** Perbandingan Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029)

| Indikator | Realisasi 2025 | Target Renstra (2029) | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 89.70 | 92.60 | 96.87% | Akan Tercapai |

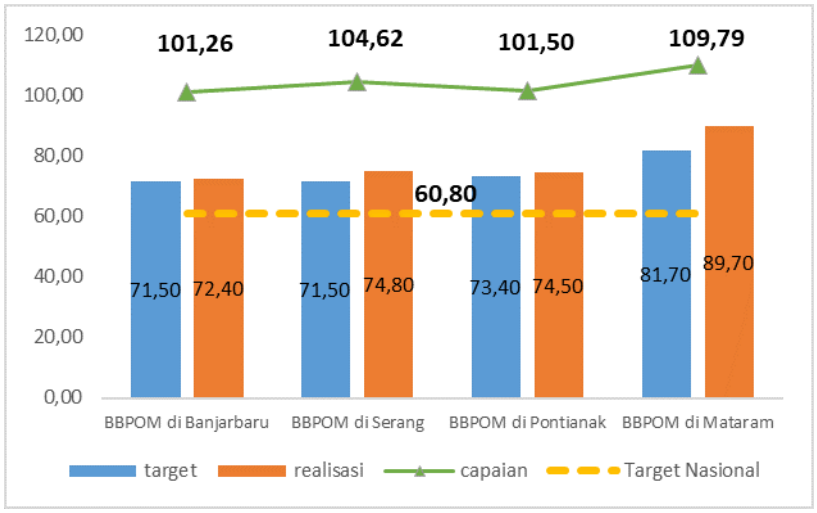
Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir periode Renstra tahun 2029, indikator Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium menunjukkan capaian yang progresif dan optimis akan tercapai pada akhir periode renstra

Realisasi kinerja tahun 2025 tercatat sebesar 89,70, sementara target akhir Renstra tahun 2029 ditetapkan sebesar 92,60. Dengan demikian, persentase capaian terhadap target akhir Renstra telah mencapai 96,87%. Angka ini menunjukkan bahwa hingga tahun 2025, indikator tersebut telah mendekati target yang direncanakan untuk akhir periode perencanaan strategis.

Kategori “Akan Tercapai” mencerminkan bahwa dengan tren kinerja yang ada serta konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan, target Renstra tahun 2029 sangat berpotensi untuk dicapai bahkan dilampaui. Hal ini menunjukkan efektivitas strategi, pengelolaan sumber daya, serta komitmen unit kerja dalam menjaga dan meningkatkan mutu laboratorium sesuai standar kemampuan yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, capaian ini memberikan gambaran positif terhadap arah pencapaian sasaran kegiatan dan memperkuat keyakinan bahwa target akhir periode Renstra dapat direalisasikan secara optimal.

### d. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN BALAI BESAR POM KLASTER 5




**Gambar 3.17** Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan Balai Besar POM Klaster 5, terlihat bahwa seluruh satuan kerja menunjukkan capaian kinerja di atas target yang telah ditetapkan.

BBPOM di Banjarmasin menetapkan target sebesar 71,50 dengan realisasi 72,40 sehingga mencapai capaian 101,26%. BBPOM di Serang memiliki target 71,50 dan realisasi 74,80 dengan capaian 104,62%. BBPOM di Pontianak mencatat target 73,40 dan realisasi 74,50 dengan capaian 101,50%. Sementara itu, BBPOM di Mataram menunjukkan kinerja paling tinggi dengan target 81,70 dan realisasi 89,70 sehingga mencapai capaian sebesar 109,79%.

Dari data tersebut terlihat bahwa seluruh balai dalam Klaster 5 mampu melampaui target masing-masing, dengan capaian di atas 100%. BBPOM di Mataram menunjukkan persentase capaian tertinggi dibandingkan balai lainnya, yang menggambarkan performa kinerja yang sangat optimal baik dari sisi pencapaian output maupun efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Secara keseluruhan, perbandingan ini menunjukkan bahwa kinerja BBPOM Klaster 5 pada tahun 2025 berada dalam kondisi sangat baik, dengan tren capaian yang konsisten melampaui target nasional. Hal ini mencerminkan komitmen bersama dalam meningkatkan mutu pengawasan obat dan makanan serta pencapaian standar kinerja yang telah ditetapkan.

### e. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Capaian Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium tahun 2025 telah mencapai target. Nilai SKL BBPOM di Mataram berdasarkan monev P3OMN pada tahun 2025 tertinggi secara Nasional. Realisasi melebihi target karena tingginya komitmen Tim Kerja dalam melaksanakan rencana pemenuhan target SKL yang telah ditetapkan, meliputi: SRL, Kompetensi, Peralatan dan Verifikasi Metode Analisa pada setiap laboratorium. Pengadaan reagen / media berdasarkan urgensi/ frekuensi penggunaan (skala prioritas), verifikasi MA dilakukan bersamaan dengan pengujian sampel rutin, peningkatan kompetensi melalui pelatihan secara daring atau diseminasi hasil pelatihan, serta menetapkan penyusunan timeline verifikasi metode juga turut mendukung keberhasilan capaian.

Implementasi Inovasi I-CONIC (I*nstrument Consultation Clinic*) di Laboratorium Pengujian juga mampu menjaga kinerja peralatan laboratorium senantiasa dalam kondisi yang optimal. Monev secara rutin dan koordinasi intens antara Ka Balai, Ketua Tim, Penyelia dan Tim Kerja juga menjadi faktor keberhasilan capaian IKSK ini.

### f. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

**Tabel 3.69** Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Tahun 2025

| Indikator | Kendala/Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | Nilai pemenuhan komponen SKL berupa standar verifikasi metoda analisa yang terverifikasi masih rendah karena keterbatasan SDM lebih fokus untuk menyelesaikan pengujian sampel rutin | Berkoordinasi dengan bagian Tata Usaha/ Infokom untuk menerima mahasiswa magang atau PKL di laboratorium Balai Besar POM di Mataram | Memberdayakan mahasiswa PKL untuk membantu preparasi pengujian verifikasi metoda analisa sehingga capaian pemenuhan komponen SKL berupa | TW 1 tahun 206 | T | - | - |

| Indikator | Kendala/Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | untuk membantu preparasi verifikasi metoda analisa. | verifikasi metoda analaisa yang terverifikasi meningkat | | | | |

### g. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini BBPOM di Mataram melaksanakan beberapa kegiatan yaitu:

1. Monitoring dan evaluasi terhadap capaian Standar Ruang Lingkup (SRL), Standar Kompetensi Laboratorium, Standar Peralatan, dan Standar Metode Terverifikasi;
2. Monitoring pengisian tools SKL serta data dukungnya telah sesuai dengan ketentuan;
3. Pemenuhan Standar Ruang Lingkup dan Standar Metode Terverifikasi dengan melaksanakan verifikasi metode dan pengujian sampel sesuai perencanaan;
4. Pemenuhan Standar Kompetensi Personel dengan melaksanakan pengembangan kompetensi baik melalui pelatihan secara luring maupun daring, baik yang diselenggarakan oleh pihak eksternal maupun dari P3OMN;
5. Pemenuhan Standar Peralatan dilakukan dengan pengadaan alat laboratorium berupa HPLC detektor UV-PDA-RF, Automatic destilasi, mikroskop, inkubator dan lain-lain.

### h. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**Tabel 3.70** Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Tahun 2025

| Indikator | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T | R | % | T | R | % | | | |
| Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 81.7 | 89.70 | 109.79 | 4,977,660,000 | 4,976,634,981 | **100.00** | **1.10** | **0.10** | **100 % (Efisien)** |

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, indikator Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan dalam UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Target output ditetapkan sebesar 81,7 dengan realisasi mencapai 89,70 atau sebesar 109,79%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang dicapai melampaui target yang telah ditetapkan.

Dari sisi penggunaan anggaran (input), target dan realisasi anggaran tercatat hampir sama, dengan tingkat penyerapan sebesar 100,00%. Artinya, seluruh anggaran yang dialokasikan telah dimanfaatkan secara optimal sesuai perencanaan.

Hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,10 dan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0,10 menunjukkan bahwa pencapaian output yang melebihi target diperoleh tanpa adanya pemborosan anggaran. Dengan kata lain, unit kerja mampu menghasilkan kinerja di atas target dengan penggunaan sumber daya yang tepat dan terkendali.

Secara keseluruhan, capaian efisiensi sebesar **100% (Efisien)**, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan.

### 1.15. PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG DIDAMPINGI DALAM PENCAPAIAN KABUPATEN/KOTA PANGAN AMAN

Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman merupakan indikator baru yang ditetapkan pada bulan Juli 2025. Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan. Pendampingan yang dilakukan meliputi:

a. advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah
b. mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota
c. mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM

Cara Perhitungan dan Formulasi:

a) Dihitung dari Kab/Kota yang berhasil didampingi sesuai pedoman
b) Merupakan Kab/ Kota di lingkup wilayah kerja UPT
c) Jumlah target dihitung secara kumulatif
d) Formula Perhitungan

$$\frac{\textit{Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman}}{\textit{Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT}} \times 100\ \%$$

### a. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

**Tabel 3.71** Target, realisasi dan %capaian Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

| Sasaran kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman | 20.00 | 20.00 | 100.00% | Baik |

Realisasi persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 20.00% dari target 20.00% sehingga nilai pencapaian indikator sebesar 100% dengan Kategori ''Baik''. Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerja BBPOM di Mataram yaitu sebanyak 5 (lima), dan pada tahun 2025 ini ditetapkan Kabupaten Lombok Timur yang didampingi untuk mengisi tools penilaian mandiri meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi dengan nilai minimal 60.

### b. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN 2024

Realisasi Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator kinerja baru di periode renstra 2025-2029.

### c. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (2029)

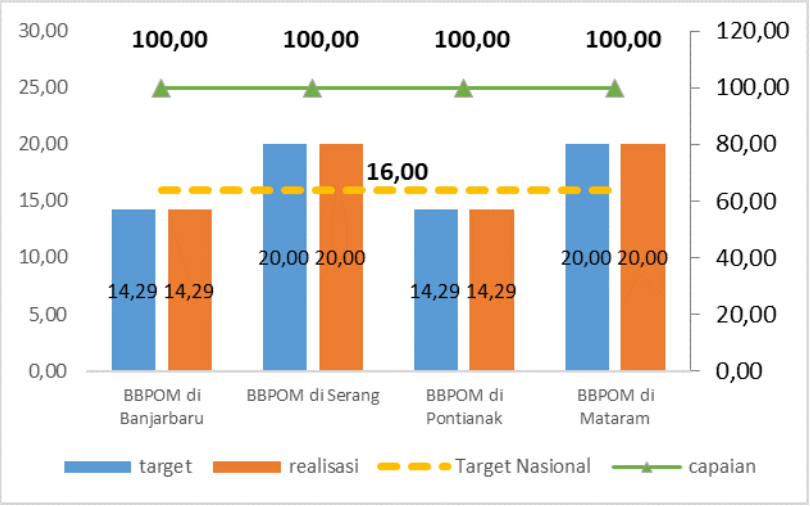
**Tabel 3.72** Perbandingan Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029)

| Indikator | Realisasi 2025 | Target Renstra (2029) | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman | 20.00 | 100.00 | 20.00% | Perlu Upaya Keras |

Realisasi capaian indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/kota Pangan Aman Tahun 2025 adalah sebesar 20.00% dari target Renstra 100.00%, sehingga perlu upaya keras agar target akhir Renstra dapat tercapai.

Target pendampingan per tahun adalah sebanyak 1 (satu) kabupaten/kota sehingga diakhir periode Renstra tahun 2025-2029, diharapkan seluruh kabupaten/kota di pulau Lombok telah dilakukan pendampingan Kabupaten/Kota Pangan Aman

### d. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN BALAI BESAR POM KLASTER 5




**Gambar 3.18** Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster

Sesuai dengan formula perhitungan Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman adalah Jumlah Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi sesuai pedoman dibagi dengan Jumlah Kabupaten/Kota di Wilayah Kerja UPT dimana target indikator untuk setiap UPT bisa berbeda-beda tergantung dengan jumlah kabupaten/kota di wilayah kerja UPT tersebut. Untuk BBPOM Mataram dan BBPOM Serang memiliki target dan realisasi yang sama yaitu 20% sedangkan untuk BBPOM di Banjarbaru dan BBPOM di Pontianak memiliki target dan realisasi sebesar 14.29%. Seluruh UPT telah mencapai target yang telah ditetapkan. Realisasi BBPOM di Mataram dan BBPOM di Serang telah diatas target nasional sedangkan realisasi BBPOM di Banjarbaru dan BBPOM di Pontianak masih berada di bawah target nasional.

### e. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman merupakan indikator baru yang ditetapkan pada bulan Juli 2025 dan telah mencapai target. Pada tahun 2025 BBPOM di Mataram menetapkan Kabupaten Lombok Timur sebagai kabupaten yang akan didampingi dalam mengisi tools penilaian mandiri dengan pertimbangan :

- Selama 3 (tiga) tahun berturut-turut realisasi DAK Non Fisik POM tertinggi di wilayah Pulau Lombok;
- Telah memiliki SK Bupati Lombok Timur tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan sejak tahun 2023;
- Telah menerbitkan Surat Edaran Bupati Lombok Timur No. 100.3.4.2/2137/KES/2025 tanggal 25 Agustus 2025 tentang Larangan Penggunaan Bahan Berbahaya Boraks pada Pangan dan Kewajiban Izin Edar Pangan Industri Rumah Tangga pada Pangan Olahan Kemasan di Kabupaten Lombok Timur.
- Dari 254 desa/kelurahan di Lombok Timur, sebanyak 55 desa telah menjadi Desa Pangan Aman, persentase capaian sebesar 21,65%
- Sebanyak 4 dari 70 pasar di Kabupaten Lombok Timur kini telah menjadi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, Ini merepresentasikan 6% dari total pasar yang ada
- Dari 1785 sekolah, 150 sekolah telah menerapkan PJAS (Pangan Jajanan Anak Sekolah) Aman, capaian sebesar 8%

### f. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

**Tabel 3.73** Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2025

| Indikator | Kendala/Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman | Belum semua Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota berfungsi secara optimal atau aktif melakukan pertemuan rutin dan pelaporan. | Melakukan advokasi kepada Kepala Daerah (Bupati/Walikota) atau OPD terkait untuk memastikan pembentukan dan aktivasi TKPPOM di masing-masing kabupaten | Melaksanakan kegiatan advokasi kepada pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah NTB untuk menggalang komitmen politik dan dukungan anggaran terkait keamanan pangan. | TW 1 Tahun 2026 | T | - | - |

| Indikator | Kendala/Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | kota. | | | | | |
| | Adanya kesulitan teknis bagi petugas di daerah dalam memahami poin-poin penilaian dan mengumpulkan bukti dukung untuk mengisi tools penilaian mandiri (komitmen, perencanaan, hingga inovasi) | Mengadakan pertemuan baik daring maupun luring untuk mendampingi petugas daerah dalam pengisian tools penilaian mandiri agar mencapai nilai minimal 60. | Memastikan setiap Kabupaten/Kota memiliki SK TKPPOM yang mutakhir. | TW 1 Tahun 2026 | T | - | - |

## g. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

- Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/287/KES/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Lombok Timur
- *Focus Group Discussion* (FGD) Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 24 Juni 2026 yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kab Lombok Timur, Drs. H. Muhammad Juaini Taufik., MAP dan diikuti oleh perwakilan instansi/OPD yang tercantum sesuai Keputusan Bupati Lombok Timur No. 188.45/287/KES/2023 tanggal 11 Agustus 2023
- Pendampingan pengisian tools Kabupaten/Kota Pangan Aman secara langsung oleh BBPOM di Mataram kepada lintas sektor yang terkait pada tanggal 26 Agustus 2025 dan 18 September 2025 serta melalui *WhatsApp* Grup.

### h. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**Tabel 3.74** Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2025

| Indikator | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T | R | % | T | R | % | | | |
| Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 70,710,125 | 70,709,368 | **99.97** | **1.00** | **0.00** | **100 % (Efisien)** |

Berdasarkan tabel tersebut target output sebesar 20,00% telah direalisasikan sebesar 20,00%, sehingga tingkat capaian output mencapai 100,00%. Dari sisi input, alokasi anggaran sebesar Rp 70,710,125 terealisasi sebesar Rp 70,709,368 atau 99,97% dari pagu yang ditetapkan.

Dengan capaian output yang optimal dan realisasi anggaran yang sedikit lebih rendah dari pagu, nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,00 menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah sebanding dengan hasil yang diperoleh. Sementara itu, nilai Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0,00 mengindikasikan tidak terdapat pemborosan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan. Secara keseluruhan, capaian efisiensi dinilai 100% (Efisien)

## SASARAN KEGIATAN 2
## MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGAWASAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI

### 2.1. PERSENTASE CAKUPAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan bertujuan mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku.

Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.

Sarana Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan).

Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025.

Cara Perhitungan dan Formula:

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT X 100%.

Keterangan:

* Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
* Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar.

### a. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

**Tabel 3.75** Target, realisasi dan %capaian Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

| Sasaran kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisas | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi | Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 63,00 | 63,00 | 100,00% | Baik |

Realisasi *Persentase* cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 telah mencapai target yaitu sebesar 63,00% dari target 63,00% sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 100,00% dengan kategori “Baik”.

Penetapan target *progress* indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan bersifat kumulatif sebesar 63,00% dan target tahun 2025 telah tercapai sebesar 100,00% di Triwulan III.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap sarana produksi pangan fortifikasi telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Seluruh sarana yang menjadi target dalam rencana pengawasan telah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini mencerminkan konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, ketepatan pelaksanaan rencana kerja, serta kepatuhan terhadap prosedur dan pedoman teknis yang berlaku.

**Tabel 3.76** Jumlah sarana produksi fortifikasi yang diawasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram pada tahun 2025

| Jenis Sarana Fortifikasi | Target | Realisasi | Total | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MK | % | TMK | % |
| Produsen Garam konsumsi Beryodium | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100,00 |
| Produsen Minyak Goreng Sawit | 2 | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 |
| **TOTAL** | **5** | **5** | **1** | **20,00** | **4** | **80,00** |

Jumlah sarana produksi fortifikasi yang diawasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram pada tahun 2025 sebanyak 5 sarana, terdiri dari 3 sarana produksi Garam beryodium dan 2 sarana produksi Minyak Goreng Sawit, dari total cakupan 8 sarana produksi fortifikasi.

Secara kumulatif, target pengawasan terhadap sarana produksi pangan fortifikasi telah tercapai sebesar 100% (5 dari 5 sarana) yang menunjukkan konsistensi pelaksanaan rencana pengawasan (Renlak) serta ketepatan eksekusi kegiatan sesuai perencanaan sehingga seluruh sarana produksi pangan fortifikasi yang menjadi target pemeriksaan telah diawasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari 3 sarana produksi Garam beryodium yang diperiksa, seluruhnya (100%) dinyatakan TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan). Hal ini menunjukkan masih terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan persyaratan CPPOB, seperti higiene dan sanitasi, dokumentasi, pengendalian proses, pemeliharaan fasilitas, dan penerapan sistem jaminan mutu internal.

Pada produsen minyak goreng sawit, dari 2 sarana yang diperiksa, 1 sarana (50%) dinyatakan MK dan 1 sarana (50%) berstatus TMK. Kondisi ini menggambarkan bahwa sebagian pelaku usaha telah menerapkan CPPOB dengan baik, namun masih terdapat sarana yang belum konsisten dalam pemenuhan persyaratan.

Meskipun indikator cakupan pemeriksaan telah tercapai 100%, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sebagian besar sarana belum memenuhi ketentuan CPPOB. Dengan demikian diperlukan penguatan pembinaan dan pengawasan sistem produksi, agar peningkatan kinerja tidak hanya tercermin pada jumlah sarana yang diperiksa, tetapi juga pada kualitas penerapan standar produksi yang baik di industri pangan fortifikasi.

### b. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN 2024

Realisasi Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator kinerja baru di periode renstra 2025-2029.

### c. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (2029)

**Tabel 3.77** Perbandingan Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029)

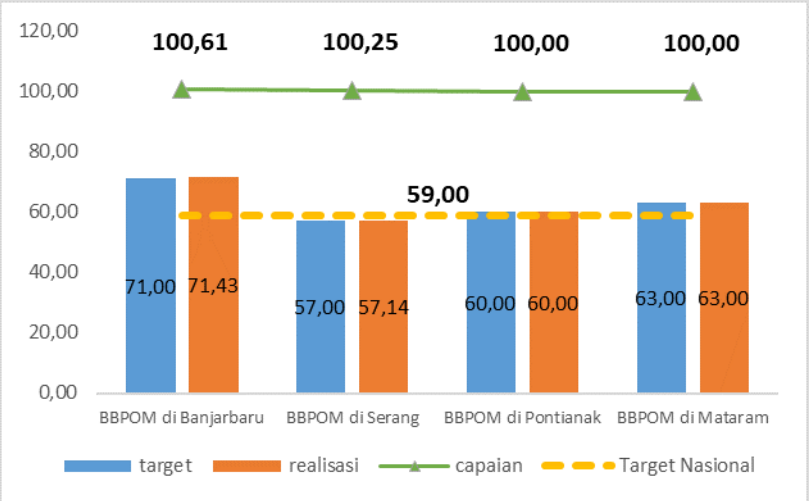
| Indikator | Realisasi 2025 | Target Renstra (2029) | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase cakupan sarana | 63.00 | 75.00 | 84.00% | Akan Tercapai |

| Indikator | Realisasi 2025 | Target Renstra (2029) | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | | | | |

Realisasi tahun 2025 sebesar 63,00%, merepresentasikan cakupan pemeriksaan 5 dari 8 sarana telah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Dengan demikian, capaian saat ini telah memenuhi 84,00% dari target jangka menengah, dan dikategorikan “Akan Tercapai.”

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 75% atau sejumlah 6 sarana dari total 8 sarana produksi fortifikasi, kesenjangan menuju target akhir relatif kecil (12%), sehingga secara operasional sangat memungkinkan untuk dicapai dalam periode perencanaan yang tersisa.

### d. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN BALAI BESAR POM KLASTER 5




**Gambar 3.19** Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster

Berdasarkan grafik perbandingan antar UPT, seluruh satuan kerja menunjukkan capaian yang sangat baik dan berada di atas 100% terhadap target masing-masing.

BBPOM di Banjarbaru menetapkan target sebesar 71,00% dengan realisasi 71,43%, sehingga capaian mencapai 100,61%. BBPOM di Serang dengan target 57,00% merealisasikan 57,14%

atau sebesar 100,25%. BBPOM di Pontianak mencapai realisasi 60,00% sesuai dengan target 60,00% atau 100,00%. Demikian pula BBPOM di Mataram merealisasikan 63,00% sesuai target 63,00% atau sebesar 100,00%.

Apabila dibandingkan dengan target nasional sebesar 100%, seluruh UPT telah memenuhi bahkan sedikit melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut sarana produksi pangan fortifikasi di masing-masing wilayah kerja telah berjalan sesuai rencana.

Secara umum, capaian ini mencerminkan konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pengawasan di tingkat UPT. Meskipun terdapat variasi angka target antar wilayah yang disesuaikan dengan jumlah populasi sarana masing-masing, seluruh UPT mampu merealisasikan target secara optimal. Kondisi ini menunjukkan kinerja yang stabil dan mendukung pencapaian sasaran nasional secara agregat.

### e. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Realisasi indikator sebesar 63% (5 dari 8 sarana) dengan tingkat capaian 100% terhadap target yang ditetapkan, menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan telah berjalan sesuai perencanaan kinerja. Keberhasilan ini tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung antara lain:

- Perencanaan pengawasan yang terstruktur dan berbasis prioritas risiko, dimana penetapan target telah mempertimbangkan jumlah populasi sarana, kapasitas sumber daya, serta urgensi pengawasan sehingga penentuan 5 sarana sebagai target memungkinkan pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut dilakukan secara optimal.
- Pelaksanaan pemeriksaan yang konsisten sesuai jadwal/target yang telah ditetapkan, didukung dengan pemantauan dan evaluasi berkala (bulanan/triwulanan) untuk memastikan tidak terjadi deviasi antara rencana dan realisasi.
- Penetapan tindak lanjut senantiasa dilaksanakan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku
- Pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT secara tepat waktu, sehingga seluruh sarana yang telah diperiksa terdokumentasi dalam sistem pelaporan dan dapat diverifikasi oleh Pusat.
- Koordinasi antar fungsi internal berjalan dengan baik dan efektif. Sinergi antara tim inspeksi (pengawasan) dengan fungsi sertifikasi (pembinaan) memungkinkan proses evaluasi aspek CPPOB dilakukan secara komprehensif. Selain itu adanya koordinasi yang selaras antara fungsi Inspeksi dan fungsi Pengujian dimana pemeriksaan di sarana produksi fortifikasi tidak hanya menilai aspek CPPOB, tetapi juga disertai kegiatan pengambilan sampel produk untuk dilakukan pengujian laboratorium. Keterlibatan fungsi pengujian memperkuat kualitas pengawasan karena hasil pemeriksaan lapangan didukung verifikasi ilmiah melalui uji

laboratorium. Sinergi antara fungsi pemeriksaan dan fungsi pengujian ini meningkatkan kredibilitas serta akurasi hasil pengawasan.

- Pelaksanaan pengawasan juga dilakukan dengan instansi teknis di daerah (Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan) apabila diperlukan khususnya dalam aspek pembinaan dan penyampaian informasi regulasi. Penguatan kerja sama lintas sektor tersebut menciptakan pendekatan pengawasan yang lebih komprehensif, tidak hanya bersifat inspeksi, tetapi juga edukatif dan preventif.

### f. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

**Tabel 3.78** Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025

| Indikator | Kendala/Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 1. Masih ditemukan produsen pangan fortifikasi (khususnya garam konsumsi) skala IKM yang kesulitan menjaga konsistensi kadar fortifikan (misal: kalium iodat pada garam) sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib. | 1. Melakukan pendampingan langsung ke sarana produksi pangan fortifikasi untuk memberikan edukasi mengenai teknik fortifikasi yang benar dan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). | 1. Melaksanakan ke sarana produksi pangan fortifikasi sesuai Pedoman Sampling dan pengujian. | TW 1 Tahun 2026 | T | - | - |
| | 2. Mengingat pangan fortifikasi berkaitan dengan regulasi SNI Wajib, sinkronisasi antara BBPOM dengan Dinas Perindustrian dalam hal pembinaan teknis dan memerlukan | 2. Memastikan pengujian sampel pangan fortifikasi diprioritaskan agar hasil uji dapat segera keluar dan tindak lanjut (seperti peringatan atau penarikan produk) dapat dilakukan lebih | 2. Melakukan monitoring terhadap Corrective Action Preventive Action (CAPA) yang disusun oleh pelaku usaha atas temuan ketidaksesuai | TW 1 Tahun 2026 | T | - | - |

| Indikator | Kendala/Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | waktu koordinasi yang intensif. | cepat. | an saat pemeriksaan. | | | | |
| | 3. Pelaku usaha garam beryodium tidak dapat melakukan perpanjangan NIE karena kendala dalam perpanjangan SNI (4 dari 5 pelaku usaha NIE telah habis masa berlaku) yang disebabkan keterbatasan biaya dari pelaku usaha | perlu adanya dukungan/intervensi dari pihak terkait dalam pengurusan sertifikasi SNI oleh pelaku usaha | Melakukan pembahasan bersama lintas sektor terkait untuk membahas peluang adanya dukungan/bantuan dalam proses sertifikasi SNI pelaku usaha garam beryodium | TW 1 Tahun 2026 | T | - | - |

## g. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan yang terencana serta terintegrasi, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian hasil pengawasan.

1. Penyusunan rencana kerja pengawasan berbasis risiko, dengan mempertimbangkan jumlah populasi sarana fortifikasi, riwayat hasil pemeriksaan sebelumnya, serta tingkat potensi ketidaksesuaian. Perencanaan yang selektif ini memastikan bahwa sarana prioritas tercakup dalam target pemeriksaan tahunan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan terintegrasi dengan kegiatan sampling sesuai Pedoman Sampling Tahun 2025, dimana selain evaluasi aspek CPPOB, dilakukan pula pengambilan sampel produk untuk pengujian laboratorium. Integrasi fungsi pemeriksaan dan pengujian memperkuat efektivitas pengawasan serta meningkatkan kualitas tindak lanjut.
3. Monitoring dan pengendalian capaian secara berkala, melalui evaluasi realisasi triwulanan dan koordinasi di fungsi internal maupun dengan Direktorat Pengampu. Mekanisme ini memungkinkan percepatan pelaksanaan apabila terdapat deviasi dari rencana. Kegiatan yang dilakukan antara lain : Focus Group Discussion Monitoring dan Sinergi Pengawasan Pangan Fortifikasi sebagai forum untuk menyampaikan hasil pengawasan BPOM serta rencana

kolaborasi antar K/L/D untuk pengembangan intervensi maupun kebijakan, pada bulan Desember 2025.

4. Penguatan kapasitas SDM pengawas, melalui bimbingan teknis, penyamaan persepsi terhadap ketentuan fortifikasi dan CPPOB, serta pembaruan pemahaman regulasi. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan pelatihan dan/atau bimtek untuk peningkatan kompetensi petugas, antara lain: Bimbingan Teknis Nasional Pengawasan Pangan Fortifikasi pada bulan Februari 2025.
5. Koordinasi dan sinergi yang baik dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk komunikasi dengan pelaku usaha untuk memastikan kesiapan pemeriksaan serta tindak lanjut administratif berjalan sesuai ketentuan. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2025 antara lain: Pemeriksaan bersama dengan lintas sektor terkait (Dinas Perindustrian, Dinas Kelautan dan Perikanan) ke sarana produksi Garam Beryodium di Kab. Lombok Timur pada bulan Desember 2025, *Coaching Clinic* Pelaku Usaha Pangan Fortifikasi Minyak Goreng Sawit pada bulan Maret 2025.

### h. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**Tabel 3.79** Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025

| Indikator | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T | R | % | T | R | % | | | |
| Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 63.00 | 63.00 | 100.00 | 7,651,000 | 7,648,400 | **99.97** | **1.00** | **0.00** | **100 % (Efisien)** |

Berdasarkan tabel tersebut target output sebesar 63,00% telah direalisasikan sebesar 63,00%, sehingga tingkat capaian output mencapai 100,00%. Dari sisi input, alokasi anggaran sebesar Rp 7,651,000 terealisasi sebesar Rp 7,648,400 atau 99,97% dari pagu yang ditetapkan.

Dengan capaian output yang optimal dan realisasi anggaran yang sedikit lebih rendah dari pagu, nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,00 menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah sebanding dengan hasil yang diperoleh. Sementara itu, nilai Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0,00 mengindikasikan tidak terdapat pemborosan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan. Secara keseluruhan, capaian efisiensi dinilai 100% (Efisien).

Capaian efisiensi ini didukung oleh optimalisasi sisa anggaran untuk pelaksanaan monev CAPA terhadap hasil pemeriksaan sarana yang sebelumnya.

Kondisi ini menggambarkan bahwa pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi telah dilakukan secara tepat sasaran dan proporsional, dimana target output tercapai sepenuhnya tanpa melebihi alokasi anggaran yang tersedia. Hal tersebut mencerminkan perencanaan anggaran yang akurat, pengendalian belanja yang baik, serta efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Dengan demikian, indikator ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan dari sisi pencapaian kinerja, tetapi juga mencerminkan tata kelola anggaran yang akuntabel dan efisien dalam pengelolaan keuangan negara.

## SASARAN KEGIATAN 3
## MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KIE DI MASING-MASING WILAYAH KERJA UPT

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 4 indikator kinerja yang merupakan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan keempat ini. Capaian keempat indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan 3 di Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.80** Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 3 BBPOM di Mataram Tahun 2025

| NO SS | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2025 | REALISASI | %CAPAIAN | KATEGORI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 88.57 | 92.79 | 104.76% | Sangat Baik |
| | | Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | 13.00 | 13.00 | 100.00% | Baik |
| | | Jumlah desa pangan aman | 4.00 | 4.00 | 100.00% | Baik |
| | | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Baik |

Pengukuran capaian serta analisis capaian masing – masing indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan 3 pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

## 4.1. TINGKAT EFEKTIVITAS KIE SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA UPT

Sasaran kegiatan Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) merupakan bagian penting dari upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dalam mendukung terwujudnya masyarakat yang cerdas memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Sasaran ini selaras dengan arah kebijakan BPOM yang menekankan peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan melalui pelaksanaan KIE yang efektif.




**Gambar 3.20** Jumlah Total Responden dan Indeks Rata - rata efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

**Tabel 3.81** Indeks Survei Tatap Muka dan Media Kegiatan Efektivitas KIE Tahun 2025

| Indeks Survei TATAP MUKA ( total responden : 545 ) | | |
|---|---|---|
| **Average Values of** | **Skala 4** | **Skala 100** |
| Narasumber/Petugas | 3.74 | 93.59 |
| Konten/Informasi | 3.66 | 91.57 |
| Pemahaman Audiens | 3.46 | 86.56 |
| Manfaat | 3.69 | 92.34 |
| **Indeks Tatap Muka** | **91.02** | |

| Indeks Survei MEDIA ( total responden : 193 ) | | |
|---|---|---|
| **Average Values of** | **Skala 4** | **Skala 100** |
| Sumber Informasi | 3.9 | 97.6 |
| Konten/Informasi | 3.86 | 96.55 |
| Pemahaman Audiens | 3.63 | 90.87 |
| Manfaat | 3.73 | 93.26 |
| **Indeks Media** | **94.57** | |

Pelaksanaan KIE oleh BBPOM di Mataram pada tahun 2025 dilakukan secara terintegrasi melalui kombinasi **KIE tatap muka** dan **KIE media**, baik secara langsung maupun daring, dengan menyesuaikan karakteristik masyarakat di wilayah kerja Pulau Lombok.

### a. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

**Tabel 3.82** Target, realisasi dan %capaian Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

| Sasaran kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 88,57 | 92,79 | 104,76 | Sangat Baik |

Pada tahun 2025, BBPOM di Mataram menetapkan target Tingkat Efektivitas KIE sebesar 88,57. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi yang dicapai sebesar 92,79. Dengan demikian, persentase capaian kinerja mencapai 104,76%, atau melampaui target yang telah ditetapkan.

### b. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN 2024

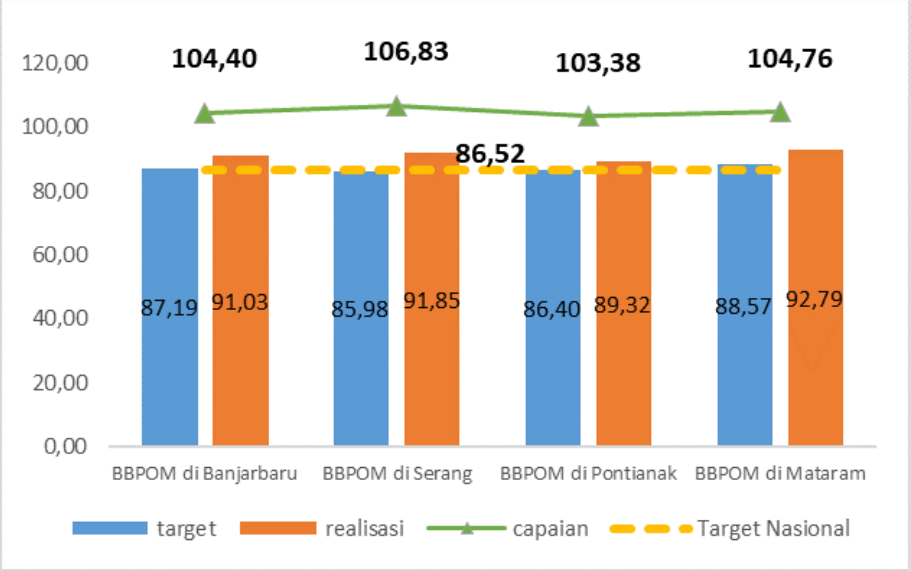
Realisasi Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator kinerja baru di periode renstra 2025-2029.

### c. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (2029)

**Tabel 3.83** Perbandingan Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029)

| Indikator | Realisasi 2025 | Target Renstra (2029) | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 92.79 | 92.11 | 100.74% | Melampaui |

### d. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN BALAI BESAR POM KLASTER 5




**Gambar 3.21** Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster

Untuk menilai kinerja secara komparatif, capaian Tingkat Efektivitas KIE BBPOM di Mataram dibandingkan dengan BBPOM lain dalam satu klaster, yaitu BBPOM di Banjarbaru, BBPOM di Serang, dan BBPOM di Pontianak.

Berdasarkan hasil tersebut, capaian kinerja BBPOM di Mataram berada di atas target nasional dan sejajar dengan BBPOM lain dalam klaster yang sama, meskipun belum menjadi capaian tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan KIE di BBPOM di Mataram telah berada pada level yang kompetitif dan konsisten dengan kinerja UPT sejenis.

### e. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Pencapaian kinerja Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Mataram pada tahun 2025 yang mencapai 92,79 dengan persentase capaian 104,76% terhadap target 88,57 didukung oleh sejumlah faktor keberhasilan yang dapat dijelaskan secara kuantitatif berdasarkan hasil pengukuran Indeks Efektivitas KIE.

Nilai tersebut menunjukkan bahwa kualitas penyampaian KIE tatap muka berada pada kategori efektif, khususnya pada aspek kompetensi petugas dan manfaat yang dirasakan oleh peserta. Meskipun nilai pemahaman audiens relatif lebih rendah dibandingkan komponen lain, secara keseluruhan KIE tatap muka tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian indeks KIE total.

Dari sisi kuantitas, jumlah responden KIE tatap muka sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 545 responden, yang menunjukkan cakupan kegiatan KIE langsung yang cukup luas dan berkesinambungan.

Nilai tinggi pada aspek sumber informasi dan konten menunjukkan bahwa media yang digunakan oleh BBPOM di Mataram dinilai kredibel, relevan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini memperkuat efektivitas penyampaian pesan KIE secara tidak langsung.

Jumlah responden KIE media pada tahun 2025 tercatat sebanyak 193 responden, yang turut memperkuat basis data pengukuran efektivitas KIE media.

Indeks Efektivitas KIE BBPOM di Mataram tahun 2025 sebesar 92,79 merupakan hasil rata-rata tertimbang dari KIE tatap muka dan KIE media. Capaian ini menunjukkan bahwa kombinasi kedua metode KIE memberikan dampak yang lebih optimal dibandingkan jika hanya mengandalkan salah satu metode.

Secara statistik, KIE media memiliki nilai indeks yang lebih tinggi, namun KIE tatap muka tetap berperan penting dalam membangun pemahaman yang lebih mendalam melalui interaksi langsung. Sinergi kedua pendekatan ini menjadi faktor utama yang mendorong capaian kinerja melampaui target.

Data pengukuran bulanan menunjukkan bahwa nilai Indeks Efektivitas KIE BBPOM di Mataram relatif stabil sepanjang tahun 2025, dengan persentase capaian bulanan terhadap target berkisar antara 103,81% hingga 107,20%. Stabilitas ini mencerminkan bahwa pelaksanaan KIE tidak bersifat insidental, tetapi dilakukan secara berkelanjutan dan terencana. Konsistensi capaian ini menjadi indikator bahwa sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi KIE telah berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis statistik Indeks Efektivitas KIE tahun 2025, peningkatan dan keberhasilan kinerja BBPOM di Mataram dipengaruhi oleh Nilai Indeks KIE Tatap Muka yang

efektif (91,02) dengan cakupan responden yang luas. Nilai Indeks KIE Media yang sangat efektif (94,57), khususnya pada aspek kredibilitas sumber dan kualitas konten. Sinergi antara KIE tatap muka dan KIE media yang menghasilkan Indeks KIE total sebesar 92,79. Stabilitas capaian kinerja sepanjang tahun, yang menunjukkan konsistensi pelaksanaan KIE.

Faktor-faktor tersebut secara langsung berkontribusi terhadap capaian kinerja sebesar 104,76%, sehingga BBPOM di Mataram berhasil melampaui target Tingkat Efektivitas KIE pada tahun 2025.

### f. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

**Tabel 3.84** Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Tahun 2025

| Indikator | Kendala/Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 1. Di beberapa wilayah, penyampaian materi KIE yang terlalu teknis seringkali sulit dipahami oleh masyarakat lokal jika tidak menggunakan pendekatan bahasa daerah atau kearifan lokal. | 1. Melibatkan tokoh masyarakat sebagai narasumber pendamping untuk meningkatkan kepercayaan dan kedekatan emosional dengan audiens. | 1. Integrasi KIE bersama Tomas/lintas sektor/ormas/ organisasi profesi/perguruan tinggi/selolah untuk meningkatkan frekuensi KIE tatap muka | TW 1 Tahun 2026 | T | - | - |
| | 2. Keterbatasan SDM dan anggaran untuk kegiatan sosialisasi, penyuluhan, | 2. Memberdayakan mahasiswa sebagai agen | 2. Memberi pembekalan materi KIE kepada mahasisw | TW 1 Tahun 2026 | T | - | - |

| Indikator | Kendala/Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | atau media kampanye. | informasi Obat dan Makanan | a PKL/magang yang dijadikan kader KIE inovasi Gaspaman untuk memberikan KIE di lingkungan kampus atau lingkungan rumah masing-masing | | | | |

### g. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan program dan kegiatan KIE BBPOM di Mataram tahun 2025 secara signifikan menunjang keberhasilan pencapaian indikator Meningkatnya Efektivitas KIE. Sepanjang tahun 2025, BBPOM di Mataram telah melaksanakan 88 kali kegiatan KIE langsung yang menjangkau 8.586 peserta di seluruh wilayah kerja Pulau Lombok. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui berbagai metode, antara lain ceramah dan diskusi, KIE door to door, pameran, pemanfaatan mobil laboratorium keliling, serta praktik langsung penggunaan aplikasi BPOM Mobile. Tingginya frekuensi kegiatan dan besarnya jumlah peserta mencerminkan intensitas diseminasi informasi yang konsisten serta jangkauan KIE yang luas kepada masyarakat.

Dari sisi sasaran, kegiatan KIE tahun 2025 didominasi oleh kelompok pelajar dan mahasiswa, yang mencakup siswa PAUD hingga SMA/MA, mahasiswa perguruan tinggi, serta anggota pramuka, dengan proporsi peserta pelajar dan mahasiswa mencapai lebih dari separuh total peserta. Selain itu, KIE juga menyasar masyarakat umum, pelaku UMKM pangan, pedagang asongan, guru, tokoh masyarakat, dan kader PKK. Penyebaran sasaran yang merata ini memperkuat efektivitas KIE karena pesan pengawasan Obat dan Makanan disampaikan sejak usia dini sekaligus menyasar

pihak yang berperan langsung dalam produksi, distribusi, dan konsumsi Obat dan Makanan di masyarakat.

Keberhasilan peningkatan kinerja KIE juga ditopang oleh relevansi tema yang disampaikan. Berdasarkan data kegiatan, tema KIE paling banyak berfokus pada keamanan pangan, khususnya Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), diikuti oleh tema Obat dan Makanan Aman, pencegahan stunting, serta pengawasan kosmetik dan obat bahan alam. Dominasi tema keamanan pangan dan PJAS selaras dengan karakteristik wilayah kerja BBPOM di Mataram yang memiliki banyak satuan pendidikan dan aktivitas pangan siap saji. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan KIE telah mempertimbangkan isu risiko dan kebutuhan riil masyarakat, sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami dan diterapkan.

Dari sisi wilayah, pelaksanaan KIE tersebar merata di seluruh kabupaten/kota di Pulau Lombok, dengan konsentrasi kegiatan tertinggi di Kota Mataram, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur, dan Lombok Utara. Pemerataan lokasi kegiatan ini berkontribusi terhadap peningkatan capaian kinerja karena memastikan bahwa manfaat KIE tidak terpusat pada wilayah tertentu saja, tetapi menjangkau masyarakat secara luas dan berkeadilan. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, TP PKK, serta mitra lintas sektor lainnya, turut memperkuat efektivitas penyampaian pesan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang diberikan oleh BBPOM di Mataram.

Meskipun demikian, hasil evaluasi internal menunjukkan bahwa kegiatan KIE dengan jumlah peserta yang sangat besar cenderung bersifat satu arah dan berpotensi mengurangi kedalaman pemahaman individu. Namun kondisi tersebut tidak berdampak signifikan terhadap capaian kinerja secara keseluruhan, karena diimbangi dengan banyaknya kegiatan KIE skala kecil dan menengah yang bersifat lebih interaktif. Secara umum, kombinasi antara tingginya frekuensi kegiatan, luasnya jangkauan peserta, relevansi tema, serta sinergi lintas sektor menjadi faktor utama keberhasilan dan peningkatan kinerja efektivitas KIE BBPOM di Mataram pada tahun 2025. Pelaksanaan KIE melalui media sosial, khususnya Instagram @bpom.mataram, menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan efektivitas KIE BBPOM di Mataram tahun 2025. Sepanjang Januari hingga Desember 2025, BBPOM di Mataram secara konsisten memproduksi dan mendiseminasikan konten edukasi Obat dan Makanan dengan cakupan isu yang luas, relevan, dan responsif terhadap dinamika permasalahan di masyarakat. Jumlah pengikut akun Instagram BBPOM di Mataram menunjukkan tren peningkatan, dari 4.135 pengikut pada Januari 2025 menjadi 5.186 pengikut pada pendampingan Desember 2025, atau meningkat sekitar 25 persen dalam satu tahun. Peningkatan ini mencerminkan bertambahnya jangkauan audiens sekaligus meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kanal komunikasi resmi BBPOM di Mataram.

Dari sisi substansi, konten KIE media sosial didominasi oleh tema keamanan pangan, kosmetik, obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, stunting, serta publikasi kinerja dan pelayanan publik. Tema pangan dan kosmetik menjadi konten yang paling intensif dipublikasikan, sejalan dengan tingginya risiko peredaran pangan olahan dan kosmetik ilegal di masyarakat serta tingginya minat publik terhadap isu tersebut. Selain itu, konten stunting disajikan secara berkelanjutan sepanjang tahun sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional percepatan penurunan stunting, dengan pesan edukatif yang menyasar keluarga, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Kinerja KIE media sosial juga ditunjukkan melalui keberagaman format dan pendekatan komunikasi, mulai dari edukasi regulasi (izin edar, label, klaim, dan kemasan), peringatan publik (produk ilegal dan berbahaya), tips praktis (CEK KLIK, cara menggunakan obat, memilih kosmetik aman), hingga publikasi hasil pengawasan dan capaian kinerja BBPOM di Mataram. Strategi ini membuat konten tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga persuasif dan aplikatif, sehingga mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam memilih dan menggunakan Obat dan Makanan secara aman.

Selain itu, integrasi KIE media sosial dengan kegiatan pengawasan dan pelayanan publik turut meningkatkan efektivitas pesan yang disampaikan. Publikasi hasil patroli siber, penindakan produk ilegal, pendampingan UMKM, serta inovasi pelayanan seperti SAPA UMK, HaloBPOM 1500533, dan publikasi hasil survei kepuasan masyarakat memperkuat citra BBPOM di Mataram sebagai instansi yang transparan, responsif, dan hadir di tengah masyarakat. Hal ini berdampak pada meningkatnya interaksi publik dan memperluas jangkauan KIE tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang besar.

Secara keseluruhan, optimalisasi KIE melalui Instagram @bpom.mataram pada tahun 2025 berkontribusi signifikan terhadap peningkatan efektivitas KIE BBPOM di Mataram. Peningkatan jumlah pengikut, konsistensi publikasi konten sepanjang tahun, relevansi tema dengan isu aktual, serta sinergi dengan kegiatan pengawasan dan pelayanan publik menjadi faktor kunci keberhasilan KIE media dalam mendukung pencapaian indikator kinerja BBPOM di Mataram.

Selain KIE langsung dan media sosial, BBPOM di Mataram pada tahun 2025 juga mengoptimalkan KIE melalui media cetak, media elektronik, media digital berbasis web, serta media luar ruang sebagai upaya memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat. Sepanjang tahun 2025, KIE melalui media non-medsos dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan leaflet, berita online, website, siaran televisi, baliho, dan billboard, yang difokuskan pada isu-isu strategis pengawasan Obat dan Makanan.

KIE melalui media cetak dilaksanakan dalam bentuk penyebaran leaflet dengan tema utama keamanan pangan, kosmetik, dan edukasi umum seperti CEK KLIK. Materi leaflet antara lain mengangkat isu Waspada Pangan Mengandung Bahan Berbahaya, 5 Kunci Keamanan Pangan

untuk Anak Sekolah, serta Tips Memilih Kosmetik yang Aman. Media cetak ini dimanfaatkan terutama pada kegiatan tatap muka, kunjungan edukatif, dan kegiatan pelayanan publik, sehingga informasi yang disampaikan dapat langsung diterima dan dipahami oleh masyarakat sebagai pegangan praktis.

Pemanfaatan media elektronik dan media digital berbasis web dilakukan melalui publikasi berita online dan website dengan fokus pada isu aktual dan berisiko tinggi, seperti klarifikasi informasi terkait teh celup mengandung mikroplastik, publikasi daftar kosmetik ilegal, advokasi Program Prioritas Nasional keamanan pangan, serta sinergi BBPOM di Mataram dengan TP PKK NTB dalam program percepatan penurunan stunting. Publikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi, tetapi juga sebagai bentuk transparansi kinerja dan penguatan kepercayaan publik terhadap peran BBPOM di Mataram.

Selain itu, media elektronik televisi dimanfaatkan sebagai sarana KIE dengan jangkauan yang lebih luas melalui program talkshow, antara lain NTB Bicara: Bijak Konsumsi Obat serta edukasi CEK KLIK dan BPOM Mobile. Penyampaian pesan melalui televisi dinilai efektif untuk menjangkau masyarakat umum lintas usia dan latar belakang, terutama dalam menyampaikan pesan-pesan kunci yang bersifat preventif dan perlindungan konsumen.

KIE melalui media luar ruang, seperti baliho dan billboard, juga dimanfaatkan untuk memperkuat pesan edukasi secara visual dan berulang, khususnya terkait peringatan Waspada Pangan Mengandung Bahan Berbahaya serta ajakan menggunakan kosmetik dengan izin edar. Media luar ruang berfungsi sebagai pengingat (reminder) bagi masyarakat dalam aktivitas sehari-hari, sehingga pesan KIE tidak hanya diterima secara sesaat tetapi terus melekat dalam ingatan publik.

Secara keseluruhan, optimalisasi KIE melalui berbagai kanal media non-medsos pada tahun 2025 berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas diseminasi informasi BBPOM di Mataram. Sinergi antara media cetak, elektronik, digital, dan luar ruang memungkinkan pesan pengawasan Obat dan Makanan disampaikan secara berlapis, konsisten, dan saling menguatkan, sehingga mendukung peningkatan pemahaman masyarakat serta pencapaian indikator Meningkatnya Efektivitas KIE di wilayah kerja BBPOM di Mataram.

### h. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**Tabel 3.85** Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Tahun 2025

| Indikator | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T | R | % | T | R | % | | | |
| Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan | 88.57 | 92.79 | 104.76 | 735,843,000 | 735,834,161 | 100.00 | **1.05** | **0.05** | **100 % (Efisien)** |

| Indikator | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T | R | % | T | R | % | | | |
| Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | | | | | | | | | |

Pencapaian kinerja Meningkatnya Efektivitas KIE BBPOM di Mataram tahun 2025 didukung oleh pengelolaan sumber daya yang efisien dan berorientasi pada hasil. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan KIE pada tahun 2025 sebesar Rp 735,843,000, yang dimanfaatkan untuk menjangkau 2.100 penerima KIE secara langsung. Dengan demikian, biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk setiap penerima KIE langsung relatif rendah apabila dibandingkan dengan luasnya jangkauan informasi yang dihasilkan melalui integrasi berbagai kanal KIE.

Efisiensi anggaran semakin optimal melalui penerapan strategi kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan KIE langsung. BBPOM di Mataram secara aktif bersinergi dengan TP PKK, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, pramuka, perguruan tinggi, serta mitra strategis lainnya. Kolaborasi tersebut memungkinkan pemanfaatan sarana, prasarana, dan sumber daya mitra tanpa penambahan anggaran yang signifikan, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperluas jangkauan sasaran KIE. Dengan pendekatan ini, kegiatan KIE langsung dapat dilaksanakan secara intensif dan merata di seluruh wilayah kerja Pulau Lombok tanpa meningkatkan beban biaya operasional.

Efisiensi sumber daya juga tercermin dalam pelaksanaan KIE melalui media sosial. Produksi dan pengelolaan konten Instagram @bpom.mataram dilakukan dengan melibatkan mahasiswa Praktek Kerja Lapangan (PKL) sebagai bagian dari proses pembelajaran dan transfer pengetahuan. Strategi ini memungkinkan BBPOM di Mataram menghasilkan konten KIE yang konsisten, variatif, dan relevan dengan tren komunikasi digital, tanpa memerlukan tambahan anggaran khusus untuk tenaga kreatif eksternal. Dampak dari strategi ini terlihat dari meningkatnya jumlah pengikut akun Instagram BBPOM di Mataram sepanjang tahun 2025, yang sekaligus memperluas jangkauan KIE dengan biaya yang sangat minimal.

Pada KIE media non-medsos, efisiensi dicapai melalui optimalisasi jejaring media. BBPOM di Mataram memanfaatkan kolaborasi dengan wartawan dan media massa melalui grup komunikasi berbasis WhatsApp untuk diseminasi informasi dan rilis kegiatan. Pendekatan ini terbukti sangat efektif, tercermin dari capaian 666 pemberitaan sepanjang tahun 2025, yang merupakan jumlah pemberitaan terbanyak di antara seluruh UPT BPOM se-Indonesia. Tingginya eksposur media ini dicapai tanpa alokasi anggaran iklan atau publikasi berbayar, sehingga menghasilkan jangkauan informasi yang luas dengan biaya yang sangat efisien.

Secara keseluruhan, penggunaan anggaran dan sumber daya pada pelaksanaan KIE BBPOM di Mataram tahun 2025 telah menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi. Integrasi antara KIE

langsung, media sosial, dan media non-medsos; pemanfaatan kolaborasi lintas sektor; serta optimalisasi jejaring media dan sumber daya internal memungkinkan BBPOM di Mataram mencapai kinerja yang melampaui target dengan pengelolaan anggaran yang efektif dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja tidak hanya didukung oleh besarnya anggaran, tetapi oleh strategi pemanfaatan sumber daya yang tepat, inovatif, dan berkelanjutan.

## 4.2. JUMLAH SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN PEMBUDAYAAN KEAMANAN PANGAN

Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di lingkungan sekolah dalam rangka menanamkan budaya keamanan pangan sejak dini. Dalam konteks BBPOM di Mataram, indikator ini mencerminkan peran aktif UPT dalam melakukan intervensi terstruktur pada satuan pendidikan melalui implementasi Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) sesuai pedoman dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh BPOM. Secara operasional, sekolah yang dinyatakan melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah sekolah yang telah mendapatkan intervensi penuh (full intervensi) maupun perluasan intervensi, yang meliputi tahapan advokasi kepada pihak sekolah dan pemangku kepentingan terkait, sosialisasi keamanan pangan, bimbingan teknis kepada kader keamanan pangan sekolah, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta pengawalan berkelanjutan. Setiap sekolah yang diintervensi diwajibkan memiliki rencana aksi keamanan pangan sebagai bentuk komitmen dan keberlanjutan pelaksanaan program.

Pelaksanaan pembudayaan keamanan pangan di sekolah tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga diarahkan pada perubahan perilaku warga sekolah, termasuk pengelola kantin, pedagang PJAS, guru, dan peserta didik. Oleh karena itu, indikator ini juga memperhitungkan keterlibatan kader keamanan pangan sekolah dan komunitas sekolah sebagai agen perubahan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung konsumsi pangan yang aman, bermutu, dan sehat.

Indikator ini menjadi salah satu instrumen evaluasi penting bagi BBPOM di Mataram untuk menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan pedoman, ketepatan tahapan kegiatan, serta kualitas pengawalan yang dilakukan, sekaligus sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program pembudayaan keamanan pangan di sekolah pada periode berikutnya.

## a. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

**Tabel 3.86** Target, realisasi dan %capaian Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

| Sasaran kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT | Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | 13 | 13 | 100% | Baik |

Pada tahun 2025, BBPOM di Mataram menetapkan target 13 sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sebagai bagian dari pelaksanaan Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS). Berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi kegiatan, realisasi kinerja pada indikator ini berhasil mencapai 13 sekolah, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja tahun berjalan dapat direalisasikan secara optimal.

Sekolah-sekolah yang menjadi sasaran intervensi pembudayaan keamanan pangan tahun 2025 terdiri atas satuan pendidikan jenjang dasar hingga menengah yang tersebar di wilayah kerja BBPOM di Mataram. Sekolah yang mendapatkan intervensi meliputi SDN 7 Mataram, SDN 10 Cakranegara, SD IT Anak Sholeh, SMPNK Kusuma ST, MTsN 1 Mataram, SMAN 1 Mataram, dan MAN 2 Mataram, serta SDN 41 Mataram, SDN 12 Cakranegara, SDN 29 Cakranegara, SMPN 20 Mataram, MTsN 2 Mataram, dan MAN 1 Mataram.

Tercapainya target secara penuh mencerminkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan intervensi, serta pengawalan program pembudayaan keamanan pangan oleh BBPOM di Mataram. Selain itu, capaian ini menunjukkan komitmen dan dukungan yang baik dari pihak sekolah dan pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang mendukung penerapan budaya konsumsi pangan yang aman, bermutu, dan sehat secara berkelanjutan.

## b. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN 2024

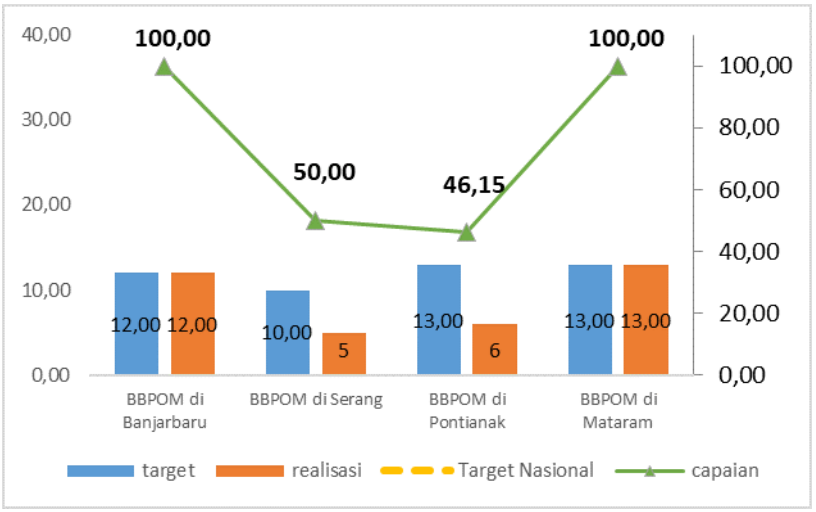
Realisasi Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena adanya perubahan manual indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK).

### c. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (2029)

**Tabel 3.87** Perbandingan Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029)

| Indikator | Realisasi 2025 | Target Renstra (2029) | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | 13.00 | 26.00 | 50.00% | Perlu Upaya Keras |

### d. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN BALAI BESAR POM KLASTER 5




**Gambar 3.22** Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster

Berdasarkan perbandingan capaian indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan pada BBPOM dalam satu klaster tahun 2025, BBPOM di Mataram menetapkan target 13 sekolah dan berhasil merealisasikan seluruh target tersebut, sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen setelah normalisasi dan pembobotan. Capaian ini sejajar dengan BBPOM di Banjarbaru yang juga mencapai 100 persen, sementara BBPOM di Serang dan Pontianak masing-masing hanya mencapai 50 persen dan 46,15 persen dari target yang ditetapkan.

Secara rata-rata, capaian kinerja klaster berada pada angka 74,04 persen, sehingga capaian BBPOM di Mataram berada di atas rata-rata klaster. Hal ini menunjukkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program pembudayaan keamanan pangan di sekolah, serta pengawalan yang

konsisten oleh BBPOM di Mataram dalam memastikan seluruh sekolah sasaran melaksanakan intervensi sesuai ketentuan yang berlaku.

### e. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Keberhasilan pencapaian indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan pada tahun 2025 dipengaruhi oleh pelaksanaan program PJAS yang dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan oleh BBPOM di Mataram. Intervensi dilaksanakan sesuai pedoman, mulai dari advokasi kepada pihak sekolah, sosialisasi keamanan pangan, bimbingan teknis kader keamanan pangan sekolah, hingga monitoring dan evaluasi. Pendekatan ini memastikan bahwa sekolah tidak hanya menjadi sasaran kegiatan, tetapi mampu menginternalisasi prinsip keamanan pangan dalam aktivitas sehari-hari.

Faktor pendukung lainnya adalah tingginya komitmen dan keterlibatan pemangku kepentingan, khususnya pihak sekolah, dinas pendidikan, serta komunitas sekolah. BBPOM di Mataram secara aktif membangun koordinasi dan sinergi dengan pihak terkait sehingga pelaksanaan pembudayaan keamanan pangan dapat berjalan lancar dan mendapat dukungan penuh. Keterlibatan guru, pengelola kantin, dan siswa sebagai kader keamanan pangan sekolah turut memperkuat keberlanjutan program di masing-masing satuan pendidikan.

Selain itu, keberhasilan capaian juga didukung oleh pendekatan edukasi yang komunikatif dan kontekstual, baik melalui kegiatan tatap muka di sekolah maupun publikasi kegiatan dan edukasi keamanan pangan melalui media komunikasi BBPOM di Mataram. Ragam metode penyampaian informasi tersebut meningkatkan pemahaman dan kesadaran warga sekolah terhadap pentingnya pangan jajanan yang aman, sehingga seluruh sekolah sasaran dapat memenuhi kriteria pembudayaan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### f. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

**Tabel 3.88** Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan **pangan** Tahun 2025

| Indikator | Kendala/Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | tidak ada kejelasan pengurangan target dari pengampu terkait target yang harus | menyampaikan ke pengampu jika ada pemotongan | Komunikasi lebih insentif dengan pengampu (PMPUPO) | TW 1 2026 | T | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dilaksanakan oleh UPT dengan adanya pemotongan anggaran | anggran kembali agar dilakukan penyesuaian target yang jelas | | | | | |

### g. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Keberhasilan pencapaian indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan pada tahun 2025 tidak terlepas dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dirancang secara terarah dan saling mendukung. Program utama yang berperan signifikan adalah Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang dilaksanakan melalui tahapan advokasi, sosialisasi keamanan pangan, bimbingan teknis kader keamanan pangan sekolah, serta monitoring dan evaluasi. Rangkaian kegiatan tersebut memastikan sekolah tidak hanya menjadi objek intervensi, tetapi juga mampu membangun komitmen dan kapasitas internal dalam menerapkan budaya keamanan pangan secara berkelanjutan.

Selain itu, kegiatan pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah menjadi faktor kunci dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Pelatihan dan pendampingan kader memungkinkan terjadinya alih pengetahuan dan peran pengawasan di tingkat sekolah, sehingga implementasi pembudayaan keamanan pangan dapat terus berjalan meskipun kegiatan pendampingan langsung oleh BBPOM di Mataram telah selesai. Dukungan publikasi dan edukasi melalui media komunikasi BBPOM di Mataram juga berperan dalam memperkuat pemahaman dan kesadaran warga sekolah terhadap pentingnya pangan jajanan yang aman.

Adapun potensi hambatan atau faktor yang dapat mempengaruhi kegagalan pencapaian kinerja pada indikator ini relatif dapat diminimalkan karena perencanaan kegiatan telah disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan sekolah sasaran. Tantangan yang masih perlu diantisipasi ke depan antara lain adanya pergantian kader atau tenaga pendidik serta keterbatasan waktu sekolah dalam pelaksanaan kegiatan, yang dapat diatasi melalui penguatan sistem pendampingan dan penyediaan materi edukasi yang mudah diakses dan berkelanjutan.

### h. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**Tabel 3.89** Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Tahun 2025

| Indikator | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T | R | % | T | R | % | | | |
| Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan | 13.00 | 13.00 | 100.00 | 27,330,000 | 27,320,000 | 99.96 | **1.00** | **0.00** | **100 % (Efisien)** |

| Indikator | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T | R | % | T | R | % | | | |
| keamanan pangan | | | | | | | | | |

Pelaksanaan pembudayaan keamanan pangan di sekolah pada tahun 2025 menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya yang baik. Dengan anggaran sebesar Rp 27,330,000, BBPOM di Mataram berhasil melakukan intervensi pada 13 sekolah, sehingga biaya per sekolah relatif proporsional terhadap capaian kinerja yang dihasilkan. Efisiensi ini didukung oleh perencanaan kegiatan yang terfokus pada sasaran serta pengendalian biaya operasional tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan program.

Efisiensi anggaran juga ditunjang oleh kondisi wilayah Kota Mataram yang tidak memerlukan biaya transportasi dan akomodasi tinggi. Kegiatan seperti bimbingan teknis kader keamanan pangan sekolah, koordinasi, dan evaluasi dapat dilaksanakan di kantor BBPOM di Mataram atau fasilitas pemerintah setempat, sehingga tidak menimbulkan biaya tambahan seperti sewa tempat dan sarana pendukung lainnya, sekaligus memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan akuntabel.

### 4.3. JUMLAH DESA PANGAN AMAN

Indikator **Jumlah Desa Pangan Aman** merupakan ukuran kinerja yang menggambarkan jumlah desa di wilayah kerja BBPOM di Mataram yang telah melaksanakan upaya pembudayaan keamanan pangan secara terstruktur, berkelanjutan, dan melibatkan peran aktif pemerintah desa serta masyarakat. Desa Pangan Aman dipahami sebagai desa yang memiliki komitmen dan kapasitas dalam menerapkan prinsip keamanan pangan, mulai dari produksi, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi pangan yang aman bagi masyarakat.

Secara operasional, Desa Pangan Aman ditetapkan melalui serangkaian intervensi yang meliputi advokasi kepada pemerintah desa, pembentukan dan pembinaan kader keamanan pangan, pelaksanaan edukasi dan komunikasi informasi dan edukasi (KIE), serta pemantauan dan evaluasi penerapan praktik keamanan pangan di tingkat desa. Penilaian terhadap capaian indikator ini tidak hanya didasarkan pada jumlah desa yang diintervensi, tetapi juga pada keberlangsungan program, keterlibatan lintas sektor, serta tingkat pemahaman dan perubahan perilaku masyarakat dalam menerapkan pangan aman di kehidupan sehari-hari.

### a. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

**Tabel 3.**90 Target, realisasi dan %capaian Jumlah desa pangan aman

| Sasaran kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT | Jumlah desa pangan aman | 4 | 4 | 100% | Baik |

Pada tahun 2025, kinerja BBPOM di Mataram pada indikator Jumlah Desa/Kelurahan Pangan Aman menunjukkan capaian yang optimal. Target yang ditetapkan sebanyak 4 kelurahan berhasil direalisasikan seluruhnya, sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program pembudayaan keamanan pangan yang terencana dan terfokus di wilayah kerja Kota Mataram.

Adapun kelurahan yang menjadi lokasi intervensi Desa/Kelurahan Pangan Aman meliputi Kelurahan Babakan (Kecamatan Sandubaya), Kelurahan Mataram Timur (Kecamatan Mataram), Kelurahan Tanjung Karang Permai (Kecamatan Sekarbela), dan Kelurahan Ampenan Selatan (Kecamatan Ampenan). Seluruh lokasi tersebut berada di wilayah administratif Kota Mataram dan dipilih berdasarkan kesiapan wilayah, dukungan pemerintah setempat, serta potensi keberlanjutan program dalam mendukung terciptanya masyarakat yang sadar dan berdaya dalam menerapkan keamanan pangan.

### b. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN 2024

Realisasi Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena adanya perubahan manual indikator kinerja utama (IKU).

### c. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (2029)

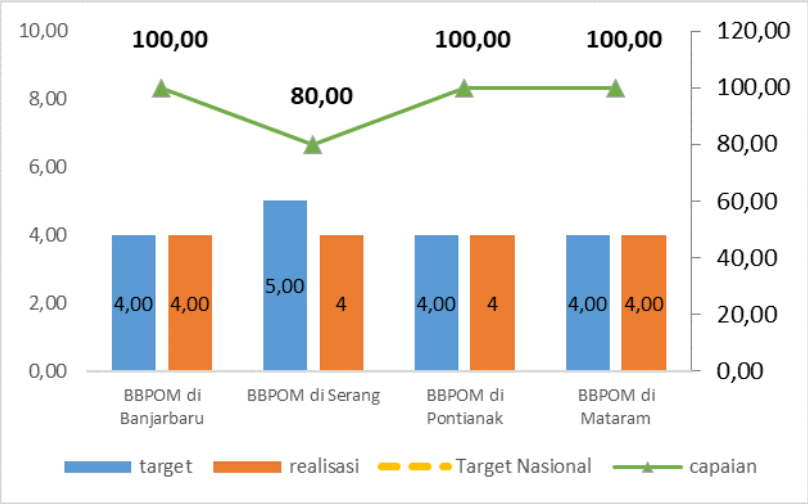
**Tabel 3.91** Perbandingan Jumlah desa pangan aman Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029)

| Indikator | Realisasi 2025 | Target Renstra (2029) | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah desa pangan aman | 4.00 | 7.00 | 57.14% | Perlu Upaya Keras |

Berdasarkan data perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 terhadap target akhir periode Rencana Strategis (Renstra) tahun 2029, indikator **"Jumlah desa pangan aman"** telah mencatatkan realisasi sebanyak **4,00 desa**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa program telah memenuhi **57,14%** dari total target akhir periode yang ditetapkan sebanyak **7,00 desa**. Meskipun

persentase capaian telah melewati angka psikologis 50%, indikator ini masih berada dalam kategori **"Perlu Upaya Keras"**.

### d. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN BALAI BESAR POM KLASTER 5




**Gambar 3.23** Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Jumlah desa pangan aman Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster

Berdasarkan perbandingan kinerja indikator Jumlah Desa Pangan Aman pada BBPOM dalam satu klaster, BBPOM di Mataram menunjukkan capaian kinerja yang optimal. Dengan target sebanyak 4 desa/kelurahan, seluruh target berhasil direalisasikan sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen pada nilai awal maupun hasil normalisasi berbobot. Capaian ini menempatkan BBPOM di Mataram sejajar dengan BBPOM Banjarbaru dan BBPOM Pontianak yang juga mencapai target secara penuh.

Sementara itu, BBPOM Serang menetapkan target lebih tinggi yaitu 5 desa, dengan realisasi 4 desa sehingga capaian kinerjanya sebesar 80 persen. Secara rata-rata klaster, capaian kinerja indikator ini berada pada tingkat yang baik, dengan BBPOM di Mataram berkontribusi positif dalam menjaga nilai rata-rata klaster tetap tinggi. Hal ini menunjukkan konsistensi kinerja BBPOM di Mataram dalam mendukung pencapaian program Desa Pangan Aman secara efektif dan berkelanjutan.

### e. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Keberhasilan BBPOM di Mataram dalam mencapai target Jumlah Desa Pangan Aman tahun 2025 didukung oleh perencanaan intervensi yang terarah dan berbasis kesiapan wilayah. Penetapan lokasi kelurahan sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan komitmen pemerintah kelurahan, dukungan kecamatan, serta potensi keberlanjutan program, sehingga pelaksanaan pembudayaan keamanan pangan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan.

Selain itu, penguatan peran kader keamanan pangan dan optimalisasi kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan capaian kinerja. Kegiatan advokasi, bimbingan teknis, serta pendampingan yang dilakukan secara berkesinambungan mampu meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam menerapkan prinsip keamanan pangan di tingkat rumah tangga dan lingkungan sekitar.

Faktor lain yang turut berkontribusi adalah sinergi lintas sektor dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan setempat, sehingga pelaksanaan program tidak hanya bergantung pada sumber daya BBPOM di Mataram. Kolaborasi tersebut mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan, memperkuat kepemilikan program di tingkat kelurahan, serta memastikan capaian indikator Desa Pangan Aman dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

### f. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

**Tabel 3.92** Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Jumlah desa pangan aman Tahun 2025

| Indikator | Kendala/Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah desa pangan aman | tidak ada kejelasan pengurangan target dari pengampu terkait target yang harus dilaksanakan oleh UPT dengan adanya pemotongan anggaran | menyampaikan ke pengampu jika ada pemotongan anggaran kembali agar dilakukan penyesuaian target yang jelas | Komunikasi lebih insentif dengan pengampu (PMPUPO) | TW 1 2026 | T | - | - |

### g. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Keberhasilan pencapaian indikator Jumlah Desa Pangan Aman tahun 2025 ditunjang oleh pelaksanaan program yang terintegrasi, mulai dari kegiatan advokasi kepada pemerintah kelurahan, pembentukan dan pembinaan kader keamanan pangan, hingga pelaksanaan KIE kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara bertahap dan saling mendukung, sehingga mampu membangun pemahaman bersama serta mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam menerapkan prinsip keamanan pangan di tingkat rumah tangga dan lingkungan.

Selain itu, kegiatan pendampingan yang dilaksanakan melalui bimbingan teknis, koordinasi lintas sektor, serta pemanfaatan fasilitas yang tersedia di wilayah Kota Mataram turut memperkuat efektivitas pelaksanaan program. Tidak terdapat faktor signifikan yang menghambat pencapaian kinerja pada tahun 2025, namun keberlanjutan program tetap memerlukan konsistensi pembinaan dan komitmen pemerintah kelurahan agar status Desa Pangan Aman dapat dipertahankan dan dikembangkan pada tahun-tahun berikutnya.

### h. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**Tabel 3.93** Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Jumlah desa pangan aman Tahun 2025

| Indikator | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T | R | % | T | R | % | | | |
| Jumlah desa pangan aman | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 50,990,000 | 50,982,000 | 99.98 | **1.00** | **0.00** | **100 % (Efisien)** |

Pelaksanaan program Desa Pangan Aman di wilayah kerja BBPOM di Mataram pada tahun 2025 menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya yang baik. Dengan anggaran sebesar Rp 50,982,000 BBPOM di Mataram berhasil melakukan intervensi pada 4 kelurahan, sehingga seluruh target dapat dicapai secara optimal. Efisiensi ini didukung oleh perencanaan kegiatan yang terfokus serta pengendalian biaya operasional tanpa mengurangi kualitas pembinaan dan pendampingan yang dilakukan.

Efisiensi anggaran semakin optimal karena seluruh lokasi intervensi berada di Kota Mataram, sehingga tidak memerlukan biaya transportasi dan akomodasi yang besar. Kegiatan seperti bimbingan teknis kader keamanan pangan, koordinasi, dan pertemuan evaluasi dapat dilaksanakan di kantor BBPOM di Mataram atau fasilitas pemerintah setempat, sehingga tidak menimbulkan biaya tambahan seperti sewa tempat dan sarana pendukung lainnya, sekaligus memastikan penggunaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel.

## 4.4. JUMLAH PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS

Pasar merupakan ujung tombak keamanan pangan dimana masyarakat sebagai konsumen memperoleh makanan sebelum dikonsumsi. Berbagai produk pangan, baik pangan segar maupun pangan olahan dengan mudah kita jumpai di pasar rakyat. Kurangnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan menyebabkan masih banyaknya temuan pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti Boraks, Formalin, Kuning Metanil (Metanil Yellow) dan Rhodamin B di pasar rakyat. Keberadaan pangan yang mengandung bahan berbahaya tersebut tentunya sangat tidak diinginkan karena dapat mengganggu kesehatan konsumen.

Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas adalah bentuk upaya pemerintah untuk menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat, dan menggugah komunitas pasar agar dapat berdaya dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan kepada komunitas pasar, dengan strategi program yaitu advokasi, pelatihan, pengawasan, pemberdayaan komunitas pasar, monitoring dan evaluasi, serta replikasi pasar. Upaya persuasi melalui advokasi dilakukan untuk menggalang komitmen pemerintah daerah, swasta, dan perguruan tinggi di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota tentang pentingnya berbagi tanggung jawab untuk memastikan keamanan pangan pada setiap titik rantai pangan sesuai dengan perannya. Diperlukan kerja sama terpadu terhadap program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas baik dalam bentuk kebijakan dan penganggaran untuk keberlanjutan program, replikasi program PPABK di pasar lain yang belum diintervensi, dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan serta rencana program pengawalan pada Tahun berikutnya, sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Pemangku kepentingan yang diharapkan terlibat secara aktif, antara lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pasar, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Bappeda, asosiasi/organisasi yang menaungi pedagang pasar, dan Lembaga Swadaya Masyarakat/Corporate Social Responsibility (CSR).

Dalam rangka memberdayakan komunitas pasar dalam melaksanakan pengawasan keamanan pangan pasar secara mandiri, dilakukan bimbingan teknis kepada pengelola pasar atau dinas yang membawahi pasar agar peredaran bahan berbahaya di pasar dapat dikendalikan. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dilakukan baik dari sisi *supply*, dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan Yang Baik oleh pedagang pasar, maupun pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand*, berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Kepada pedagang pasar perlu dilakukan penyuluhan tentang keamanan pangan, untuk meningkatkan kepedulian dan pengetahuan mereka agar dapat menjual produk pangan atau bahan tambahan pangan yang aman dari bahan berbahaya, dan diharapkan peredaran bahan berbahaya di pasar tradisional dapat dihilangkan.

### a. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

**Tabel 3.94** Target, realisasi dan %capaian Jumlah pasar pangan **aman** berbasis komunitas

| Sasaran kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | 1 | 1 | 100 | Baik |

Pada Tahun 2025, indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas ditetapkan dengan target sebanyak 1 pasar. Realisasi yang dicapai juga sebanyak 1 pasar, sehingga persentase

capaian mencapai 100% dan masuk dalam kategori “Baik”. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan dalam dokumen kinerja tahunan. Target yang ditetapkan bersifat realistis dan mempertimbangkan kapasitas pembinaan, pendampingan, serta sumber daya yang tersedia di wilayah kerja.

Meskipun secara kuantitatif capaian telah memenuhi target, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah pasar yang diintervensi, tetapi juga dari kualitas implementasi dan keberlanjutan program di pasar tersebut. Intervensi yang dilakukan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada komunitas pasar, sehingga terbentuk kesadaran kolektif dalam menjaga keamanan pangan.

Pencapaian indikator ini juga mencerminkan adanya komitmen pengelola pasar dan dukungan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program. Sinergi lintas sektor menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa intervensi tidak berhenti pada pemenuhan target jumlah, tetapi juga memberikan dampak terhadap peningkatan pemahaman pedagang dan konsumen terkait keamanan pangan.

### b. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN 2024

Realisasi Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena adanya perubahan manual indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK).

### c. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (2029)

**Tabel 3.95** Perbandingan **Jumlah** pasar pangan aman Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029)

| Indikator | Realisasi 2025 | Target Renstra (2029) | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | 1.00 | 1.00 | 100.00% ▲ | Tercapai |

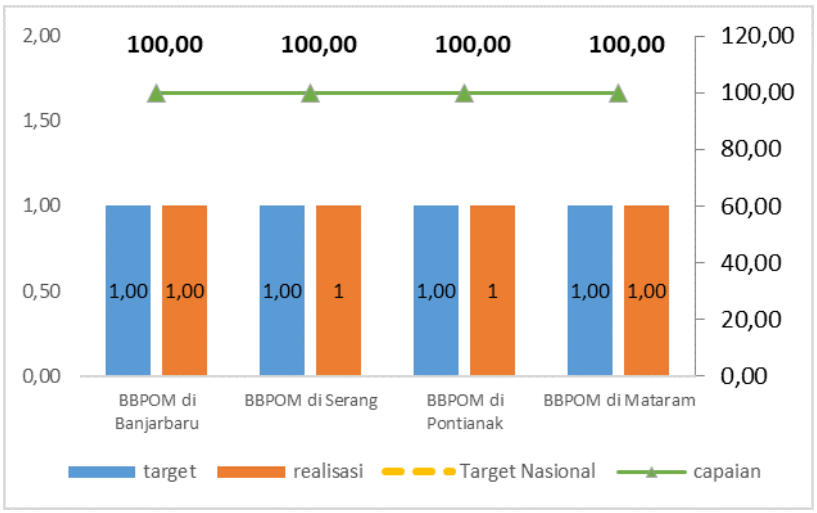
Target indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dalam periode Renstra hingga tahun 2029 ditetapkan secara konsisten sebesar 1 pasar per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa

strategi yang digunakan lebih menekankan pada pendalaman kualitas intervensi dan keberlanjutan program, dibandingkan dengan ekspansi jumlah pasar yang diintervensi.

Pada tahun 2025, realisasi capaian sebesar 1 pasar telah memenuhi target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Dengan demikian, capaian tahun 2025 telah sejalan dengan target tahunan maupun target akhir periode Renstra.

Meskipun target Renstra bersifat konstan, pendekatan ini memberikan ruang bagi peningkatan kualitas implementasi program secara berkelanjutan. Dengan demikian, pencapaian kinerja tidak hanya diukur dari aspek kuantitas, tetapi juga dari peningkatan kualitas, kemandirian komunitas pasar, serta dampak program terhadap keamanan pangan di masyarakat. Strategi ini sejalan dengan tujuan program untuk menciptakan model pasar yang berdaya dan dapat direplikasi di wilayah lain.

### d. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN BALAI BESAR POM KLASTER 5




**Gambar 3.24** Perbandingan Target, Realisasi dan %**Capaian** Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster

Perbandingan capaian indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam satu klaster menunjukkan bahwa secara umum seluruh UPT telah mencapai target yang ditetapkan.

Sebagian besar BBPOM dalam satu klaster memiliki target yang relatif sama, yaitu sebanyak 1 pasar, dan seluruhnya mampu merealisasikan target tersebut dengan capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas telah berjalan secara optimal dan merata di masing-masing wilayah kerja.

BBPOM di Mataram juga berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi 1 pasar (100%), sehingga secara kuantitatif berada pada posisi yang setara dengan BBPOM lain dalam satu klaster. Namun demikian, dari sisi kualitas dan dampak program, BBPOM di Mataram menunjukkan keunggulan yang signifikan.

Hal ini dibuktikan dengan capaian Pasar ACC Ampenan sebagai pasar binaan yang berhasil meraih Juara 1 Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tingkat Nasional Regional Tengah Tahun 2025. Prestasi ini mencerminkan keberhasilan implementasi program tidak hanya dalam memenuhi target kinerja, tetapi juga dalam menghasilkan praktik terbaik (best practice) yang diakui secara nasional.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif untuk memenuhi indikator jumlah, namun telah mampu meningkatkan kualitas pengelolaan pasar, pemberdayaan komunitas, serta keberlanjutan program secara nyata.

Dengan demikian, meskipun secara kuantitatif capaian antar UPT relatif seragam, BBPOM di Mataram memiliki nilai tambah dari sisi kualitas implementasi dan dampak program, sehingga menunjukkan kinerja yang lebih unggul dan kompetitif dibandingkan BBPOM lain dalam satu klaster.

### e. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Keberhasilan pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) Tahun 2025 tidak terlepas dari perencanaan yang sistematis dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara bertahap dan terintegrasi. Program diawali dengan survei pasar untuk mengidentifikasi kondisi awal serta komitmen pengelola pasar, yang kemudian ditindaklanjuti melalui advokasi dan penguatan dukungan dari pemangku kepentingan. Tahapan ini menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa intervensi yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan pasar.

Selanjutnya, peningkatan kinerja didorong melalui pelaksanaan bimbingan teknis kepada pengelola pasar. Melalui kegiatan ini, pengelola tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai keamanan pangan, tetapi juga dibekali keterampilan teknis seperti pelaksanaan pengawasan mandiri, penggunaan rapid test kit, serta mekanisme pelaporan hasil pengawasan. Penguatan kapasitas ini berkontribusi pada tumbuhnya kemandirian pasar dalam menjaga keamanan pangan secara berkelanjutan, sehingga pengawasan tidak sepenuhnya bergantung pada intervensi eksternal.

Di sisi lain, integrasi antara edukasi dan pengawasan menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas program. Penyuluhan dan kampanye keamanan pangan yang diberikan kepada pedagang dilaksanakan secara paralel dengan kegiatan sampling dan pengujian. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga memperkuat kesadaran dan kepatuhan

pedagang karena adanya pembuktian langsung melalui hasil pengujian. Kombinasi edukatif dan preventif tersebut terbukti mendorong perubahan perilaku yang lebih nyata.

Keberhasilan program juga didukung oleh sinergi yang kuat antara UPT dengan pemerintah daerah, pengelola pasar, dan para pedagang. Komitmen bersama dalam mewujudkan pasar yang aman menjadi faktor kunci dalam menjaga konsistensi pelaksanaan program. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala turut memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai rencana serta memberikan ruang untuk perbaikan apabila ditemukan kendala.

Capaian Pasar ACC Ampenan sebagai Juara 1 Nasional Regional Tengah menjadi indikator kualitatif atas peningkatan kinerja tersebut. Prestasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program tidak hanya memenuhi target kuantitatif (1 pasar), tetapi juga memenuhi standar kualitas dan keberlanjutan yang ditetapkan secara nasional. Dengan demikian, peningkatan kinerja Program PPABK Tahun 2025 dipengaruhi oleh perencanaan yang terstruktur, penguatan kapasitas pengelola, integrasi edukasi dan pengawasan, serta kolaborasi lintas sektor yang solid dan berkelanjutan.

### f. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

**Tabel 3.96** Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Tahun 2025

| Indikator | Kendala/Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | Potensi penurunan kualitas pengawasan mandiri jika pendampingan langsung dari UPT berkurang | Membangun sistem pelaporan rutin dan terdokumentasi bagi pengelola pasar | Membuat panduan teknis pelaporan mandiri yang mudah diisi oleh pengelola pasar. | TW 1 Tahun 2026 | T | - | - |

### g. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) Tahun 2025 yang mencapai target 100% serta didukung dengan prestasi Pasar ACC Ampenan sebagai Juara 1 tingkat nasional regional tengah, tidak terlepas dari sinergi berbagai program dan kegiatan yang

dilaksanakan secara terintegrasi. Kegiatan survey awal menjadi fondasi penting dalam menentukan intervensi yang tepat sasaran. Melalui survey, diperoleh gambaran kondisi eksisting pasar, baik dari aspek sarana prasarana, perilaku pedagang, maupun potensi risiko keamanan pangan. Data ini kemudian menjadi dasar dalam penyusunan strategi pembinaan yang lebih terarah dan efektif.

Selanjutnya, kegiatan advokasi kepada pemangku kepentingan daerah terbukti menjadi faktor kunci keberhasilan program. Dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dinas terkait dan pengelola pasar, memberikan kontribusi signifikan dalam hal komitmen, kebijakan, serta fasilitasi pelaksanaan kegiatan di lapangan. Tanpa adanya dukungan ini, pelaksanaan program tidak akan berjalan optimal. Kegiatan bimbingan teknis (bimtek) kepada pengelola pasar juga berperan penting dalam meningkatkan kapasitas dan pemahaman terkait keamanan pangan. Pengelola pasar yang telah dibekali pengetahuan menjadi lebih सक्षम dalam melakukan pembinaan kepada pedagang serta mengawal implementasi program secara mandiri di lingkungan pasar.

Selain itu, kegiatan penyuluhan kepada pedagang pasar menjadi faktor pendukung utama dalam perubahan perilaku. Penyuluhan yang dilakukan secara langsung mampu meningkatkan kesadaran pedagang untuk tidak menggunakan bahan berbahaya serta lebih memperhatikan aspek keamanan pangan dalam aktivitas jual beli. Kegiatan kampanye keamanan pangan kepada pengunjung pasar turut memperkuat sisi demand, sehingga tidak hanya pedagang yang terdorong untuk menyediakan pangan aman, tetapi juga masyarakat sebagai konsumen menjadi lebih cerdas dalam memilih produk. Hal ini menciptakan ekosistem pasar yang saling mendukung dalam penerapan keamanan pangan.

Di sisi pengawasan, kegiatan sampling dan pengujian pangan memberikan dampak nyata dalam pengendalian peredaran bahan berbahaya. Hasil pengujian menjadi evidence-based dalam melakukan pembinaan maupun tindak lanjut terhadap temuan, sehingga program tidak hanya bersifat edukatif tetapi juga berbasis data. Terakhir, kegiatan pengawalan dan monitoring menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan implementasi program. Pendampingan yang dilakukan secara berkala memastikan bahwa seluruh intervensi yang telah diberikan tetap dijalankan secara konsisten oleh komunitas pasar.

Adapun faktor yang berpotensi menjadi kendala dalam pencapaian kinerja antara lain masih adanya keterbatasan sumber daya, baik dari sisi jumlah petugas maupun anggaran, serta dinamika di lapangan seperti pergantian pedagang dan tingkat kepatuhan yang bervariasi. Namun demikian, kendala tersebut dapat diminimalisir melalui pendekatan pemberdayaan komunitas dan kolaborasi lintas sektor yang telah berjalan dengan baik. Secara keseluruhan, keberhasilan pencapaian kinerja PPABK Tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan program yang komprehensif, mulai dari tahap perencanaan hingga pengawalan, serta adanya sinergi yang kuat antara UPT, pemerintah daerah, dan komunitas pasar.

## h. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**Tabel 3.97** Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Tahun 2025

| Indikator | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T | R | % | T | R | % | | | |
| Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 20,115,000 | 20,114,800 | 100.00 | **1.00** | **0.00** | **100 % (Efisien)** |

Pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) Tahun 2025 di wilayah kerja BBPOM di Mataram menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya yang sangat baik. Dengan pagu anggaran sebesar Rp 20,115,000 dan realisasi sebesar Rp 20,114,800, program tetap mampu mencapai target 1 pasar dengan capaian kinerja 100% serta menghasilkan output berkualitas, yang ditunjukkan dengan diraihnya prestasi Pasar ACC Ampenan sebagai Juara 1 Nasional Regional Tengah.

Efisiensi ini didukung oleh perencanaan kegiatan yang terfokus dan berbasis tahapan yang jelas, sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan benar-benar mendukung pencapaian indikator kinerja. Strategi pembinaan dilakukan secara selektif pada pasar yang telah memiliki kesiapan dan komitmen kuat, sehingga intervensi menjadi lebih tepat sasaran dan tidak memerlukan pembiayaan tambahan yang besar.

Optimalisasi sumber daya juga terlihat dari pemanfaatan lokasi kegiatan yang berada dalam wilayah Kota Mataram, sehingga biaya transportasi dan operasional dapat ditekan secara signifikan. Kegiatan seperti advokasi, bimbingan teknis, penyuluhan, dan koordinasi banyak dilaksanakan dengan memanfaatkan fasilitas pasar maupun dukungan pemerintah daerah tanpa memerlukan biaya sewa tempat atau fasilitas tambahan.

Selain itu, pendekatan pemberdayaan komunitas turut berkontribusi pada efisiensi anggaran. Penguatan kapasitas pengelola pasar memungkinkan pelaksanaan pengawasan mandiri secara berkelanjutan tanpa ketergantungan penuh pada pendampingan intensif dari UPT. Hal ini membuat penggunaan anggaran menjadi lebih hemat, namun tetap efektif dalam menghasilkan dampak yang signifikan.

Dengan realisasi anggaran yang jauh lebih rendah dari pagu namun tetap menghasilkan capaian kinerja optimal dan prestasi nasional, pelaksanaan PPABK Tahun 2025 dapat dikategorikan efisien. Hal ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif, tepat guna, serta akuntabel dalam mendukung pencapaian sasaran program.

## SASARAN KEGIATAN 4
## MENINGKATNYA PENDAMPINGAN UMKM DALAM PEMENUHAN STANDAR KEAMANAN MUTU

### 4.1. PERSENTASE UMKM YANG DIDAMPINGI DAN MEMPEROLEH REKOMENDASI SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN OBA, KOS YANG BAIK DAN/ATAU IP CPPOB PANGAN OLAHAN

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 1 indikator kinerja yang merupakan tolok ukur terhadap keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan keempat yaitu **Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.**

UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
- UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

**Kriteria UMKM** yang **didampingi:**

**Untuk UMK Pangan Olahan:**

- UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
- UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi: KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan, Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

**Untuk UMKM OBA:**

1) Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
2) *Start-up* yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);

3) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
4) UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
5) UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
6) UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan Start-up / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut:

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

**Untuk UMKM Kosmetik:**

1) UMKM yang memproduksi kosmetik;
2) UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*);
3) UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
4) UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut:

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.
-

**Cara Perhitungan dan Formula**

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB = (A + B + C)/3

A = Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB : Jumlah UMK Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan x 100%

B = jumlah rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap : Jumlah UMKM OBA yang didampingi pada tahun berjalan x 100%

C = Jumlah rekomendasi SPA CPKB : Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan x 100%

Catatan: Jumlah UMKM yang didampingi minimal sesuai target pada DIPA

### a. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

**Tabel 3.98** Target, realisasi dan %capaian Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

| Sasaran kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | 14.04 | 15.73 | 112.04% | Tidak dapat disimpulkan |

Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Tahun 2025 sebesar 15,73% diatas target yang telah ditetapkan sebesar 14,04 dengan persentase capaian indikator sebesar 112,04% dengan kriteria ‘’Tidak Dapat Disimpulkan”.

Realisasi Persentase tersebut diperoleh dari akumulasi jumlah UMKM memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan sampai dengan tahun n dibagai dengan akumulasi target selama periode renstra. Adapun rincian target jumlah yang memperoleh rekomendasi dibandingkan jumlah UMKM yang didampingi sebagai berikut:

**Tabel 3.99** Target jumlah UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi Tahun 2025

| No | Tahun | UMKM memperoleh rekomendasi | UMKM yang didampingi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 25 | 30 |
| 2 | 2026 | 28 | 36 |
| 3 | 2027 | 31 | 36 |
| 4 | 2028 | 32 | 38 |
| 5 | 2029 | 34 | 38 |
| 5 | | 150 | 178 |

### b. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN 2024

Realisasi Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena terdapat perubahan cara perhitungan capaian dibandingkan periode sebelumnya.

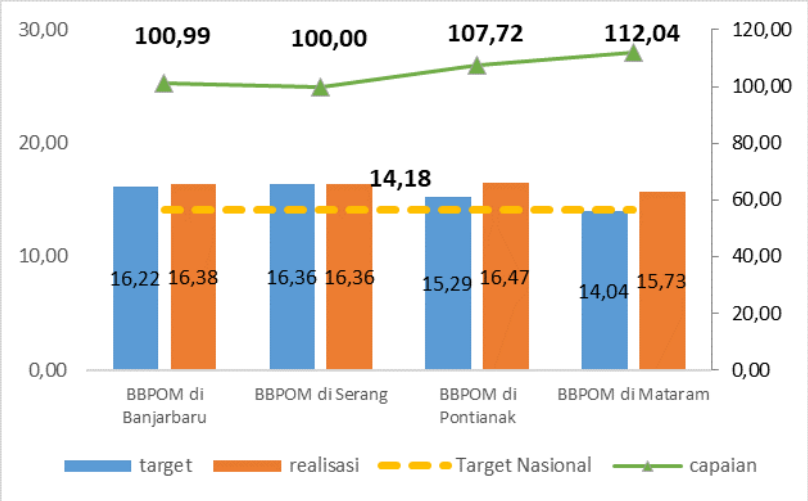
### c. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (2029)

**Tabel 3.100** Perbandingan Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029)

| Indikator | Realisasi 2025 | Target Renstra (2029) | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | 15.73 | 85.39 | 18.42% | Perlu Upaya Keras |

Berdasarkan data perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 terhadap target akhir periode Rencana Strategis (Renstra) tahun 2029, indikator **"**Persentase UMKM yang Didampingi dan memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik yang Baik dan/atau IP CPPOB**"** telah mencatatkan realisasi sebanyak 15,73%. Dibandingkan dengan target akhir renstra maka realisasi tersebut baru memenuhi 18,42%, sehingga indikator ini masih berada dalam kategori "Perlu Upaya Keras".

### d. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN BALAI BESAR POM KLASTER 5




**Gambar 3.25** Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster

Berdasarkan perbandingan kinerja indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB, seluruh satker dalam klaster 5 (BBPOM di Banjarbaru, Serang, Pontianak, dan Mataram) menunjukkan realisasi yang melampaui target masing-masing, dengan persentase capaian di atas 100% serta berada di atas Target Nasional (14,18%).

Capaian tertinggi diraih oleh BBPOM di Mataram (112,04%), diikuti Pontianak (107,72%), Banjarbaru (100,99%), dan Serang (100,00%). Secara keseluruhan, kinerja keempat satker tergolong sangat baik karena seluruhnya berhasil melampaui target yang ditetapkan.

### e. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Capaian tersebut didorong adanya program Inovasi Gerakan Lintas Lembaga Mengawal Produk UMKM (Gemilang Pro-UMKM) dimana BBPOM di Mataram telah menyinergikan proses pendampingan dengan pelaksanaan program yang dimiliki lintas sektor terkait. Pelibatan lintas sektor pada program Gemilang Pro-UMKM disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan pendampingan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terlibat pada tahapan identifikasi dan seleksi calon UMKM target pendampingan, tahapan Bimbingan Teknis sebagai narasumber dan tahapan monev pelaksanaan pendampingan UMKM untuk mendukung penyelesaian kendala perizinan. Adapun Perguruan Tinggi terlibat dalam program melalui magang dan PKL mahasiswa untuk melakukan fasilitasi pendampingan penyusunan dokumen.

Integrasi dengan kegiatan SAPA KAMPUS batch 7 yang dilaksanakan pada semester 1 Tahun 2025 dengan melibatkan 19 mahasiswa telah mendorong percepatan dalam pendampingan UMKM terutama untuk pendampingan UMK Pangan Olahan. Fasilitasi pendampingan yang dilakukan langsung ke pelaku usaha dapat dilakukan lebih intens tanpa membutuhkan anggaran kegiatan yang besar. Selain itu, penyesuaian terhadap target pendampingan yang dilakukan pada triwulan 3 mampu mendorong jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi. Perubahan ini dilakukan untuk menggantikan UMKM yang mengalami kendala perizinan akibat diimplementasikannya PP 28 tahun 2025 ke sistem OSS RBA yang berakibat UMKM diharuskan melakukan perizinan dasar seperti izin lingkungan.

**Tabel 3.101** UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Tahun 2025

| Komoditi | No | Kegiatan | Bobot | Bobot (Kumulatif) | Target Pelaksanaan | Target UMKM Tahun N (pada DIPA) | S.d Bulan ( KUMULATIF ) | | | | | | | | | | | | CAPAIAN INDIKATOR RAPK AKHIR TAHUN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Jumlah UMKM yang MS | Jumlah UMKM yang didampingi pada tahun berjalan | % UMKM yang MS |
| Obat Tradisional | 1 | Penetapan target UMKM | 10% | 10% | Maret | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 100,00 |
| | 2 | Bimbingan Teknis UMKM oleh Fasilitator | 20% | 30% | Mei | | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| | 3 | Pendampingan UMKM oleh Fasilitator | 40% | 70% | Juni - September | | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | |
| | 4 | Sertifikasi | 20% | 90% | Oktober | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | | | |
| | 5 | Monev dan Pelaporan | 10% | 100% | Desember | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | |
| Total Progres | | | | | | | 0 | 0 | 10 | 10 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 90 | 100 | | | |
| Progres Bulanan | | | | | | | 0 | 0 | 10 | 10 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 90 | 100 | | | |
| Kosmetik | 1 | Penetapan target UMKM | 10% | 10% | Maret | 2 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 2 | 100,00 |
| | 2 | Bimbingan Teknis UMKM oleh Fasilitator | 20% | 30% | Mei | | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | |
| | 3 | Pendampingan UMKM oleh Fasilitator | 40% | 70% | Juni - September | | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | | |
| | 4 | Sertifikasi | 20% | 90% | Oktober | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 40 | 40 | | | |
| | 5 | Monev dan Pelaporan | 10% | 100% | Desember | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | | | |
| Total Progres | | | | | | | 0 | 0 | 20 | 20 | 100 | 100 | 100 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | | | |
| Progres Bulanan | | | | | | | 0 | 0 | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | | | |
| Pangan | 1 | Sosialiasi / KIE Keamanan Pangan | 5% | 5% | Januari-Maret | 27 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 25 | 27 | 92,59 |
| | 2 | Penetapan target UMK | 10% | 15% | Maret | | 0 | 0 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | | | |
| | 3 | Bimbngan Teknis CPPOB | 30% | 45% | April | | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 810 | 810 | 810 | | | |
| | 4 | Fasilitasi Pendampingan | 50% | 95% | Juni - Oktober | | 45 | 115 | 115 | 355 | 595 | 740 | 800 | 820 | 885 | 985 | 1230 | 1340 | | | |
| | 5 | Monev dan Pelaporan | 5% | 100% | Desember | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | | | |
| Total Progres | | | | | | | 180 | 250 | 520 | 760 | 1720 | 1865 | 1925 | 1945 | 2010 | 2200 | 2445 | 2690 | | | |
| Progres Bulanan | | | | | | | 6,67 | 9,26 | 19,26 | 28,15 | 63,70 | 69,07 | 71,30 | 72,04 | 74,44 | 2200 | 2445 | 2690 | | | |
| Rata-Rata Progres Seluruh Komoditi | | | | | | 30 | 6,00 | 8,33 | 18,33 | 26,33 | 63,00 | 67,83 | 69,83 | 71,83 | 74,67 | 81,67 | 90,50 | 99,67 | 28 | 30 | 97,53 |

Monev terhadap kemajuan capaian tahapan pendampingan dilakukan rutin sehingga 28 UMKM dari 30 UMKM yang didampingi memperoleh rekomendasi sertifikat terdiri dari 1 UMKM Obat Bahan Alam memperoleh Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik secara Bertahap Tahap Dua, 2 UMKM Kosmetik memperoleh Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik Golongan B dan 25 UMK Pangan Olahan memperoleh Izin Penerapan Cara Pembuatan Pangan Olahan yang Baik.

Meskipun realisasi kinerja berhasil melampaui target dengan capaian sebesar 112,04%, namun karena melebihi 110% sehingga tidak dapat disimpulkan. Kondisi ini mengindikasikan adanya proyeksi target yang terlalu rendah (*underestimated*). Hal tersebut terjadi karena terjadi perubahan manual indikator dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga penyusunan target belum didukung oleh data *baseline* maupun analisis tren capaian dari tahun-tahun sebelumnya.

f. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

**Tabel 3.102** Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Tahun 2025

| Indikator | Kendala / Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | Masih terdapat usaha mikro dan kecil Pangan Olahan yang belum memenuhi ketentuan ketika dilakukan verifikasi IP-CPPOB | Penyusunan materi yang lebih fokus terhadap temuan yang sering ditemukan saat melakukan audit | Menyampaikan materi yang lebih spesifik saat Bimtek CPPOB sesuai peraturan bagi UMK yang telah ditetapkan | TW 2 Tahun 2026 | T | - | - |
| | Ditemukan adanya pelaku usaha yang tidak konsisten dalam menindaklanjuti perbaikan (CAPA) setelah diberikan bimbingan teknis, sehingga proses sertifikasi terhenti di tengah jalan. | Melakukan pendampingan saat penyusunan CAPA | Membuat bahan materi terkait temuan-temuan yang sering muncul pada saat audit verifikasi IP CPPOB, disampaikan pada saat desk pendampingan CAPA | TW 1 Tahun 2026 | T | - | - |
| | Kompleksitas persyaratan administrasi dan teknis untuk mendapatkan Izin Penerapan (IP) CPPOB atau Rekomendasi CPOTB/CPKB seringkali dianggap menyulitkan oleh pelaku usaha pemula. | Saat melakukan pendampingan CPPOB , akan lebih intensif lagi | Menyelenggarakan Bimtek CPPOB sesuai peraturan bagi UMK yang telah ditetapkan. | TW 2 Tahun 2026 | T | - | - |
| | Pelaku usaha yang telah ditetapkan sebagai target pendampingan | Perluasan penjaringan target UMKM dari lintas sektor yang memiliki | Kurasi usulan UMKM dari lintas sektor dan verifikasi awal calon target | TW 1 2026 | T | - | - |

| Indikator | Kendala / Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | yang mengundurkan diri sebelum berakhirnya program. | riwayat komitmen pendampingan | UMKM | | | | |
| | Pelaksanaan bimbingan teknis secara daring belum efektif dalam peningkatan pemahaman pelaku usaha dan penyelesaian dokumen pengajuan | Pelaksanaan bimbingan teknis dengan tatap muka langsung (luring) untuk penyelesaian dokumen pengajuan | Pemanfaatkan anggaran CSR dari orang tua asuh untuk membiayai keikutsertaan pelaku usaha | TW 2 | T | - | - |
| | Pelaku usaha masih bergantung ke petugas dalam penyusunan dokumen permohonan sedangkan jumlah petugas terbatas | Penambahan fasilitator yang berasal dari mahasiswa PKL / magang | Pendampingan penyusunan oleh mahasiswa yang diintegrassikan dengan program Sapa Kampus maupun PKL MBKM | TW 2 – TW 3 | T | - | - |
| | Pelaku usaha lama merespon permintaan perbaikan pada hasil visitasi maupun hasil evaluasi permohonan rekomendasi | Penyelesaian perbaikan dengan pendampingan langsung maupun pelibatan lintas sektor terkait | Pelaksanaan desk bersama lintas sektor untuk penyelesaian masalah secara berkala | TW 3 – TW 4 | T | - | - |

## g. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pendampingan UMKM ini antara lain :

1. Implementasi inovasi Gemilang pro UMKM untuk mendorong percepatan penerbitan rekomendasi terhadap permohonan yang dilakukan oleh UMKM.

2. Pelaksanaan koordinasi dengan OPD terkait untuk pemetaan calon target UMKM yang akan didampingi sehingga mendapatkan gambaran UMKM yang akan didampingi secara utuh baik sarana dan prasarana yang dimiliki maupun komitmen.
3. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha untuk memenuhi tuntutan konsumen terkait mutu dan kualitas produk dengan mendapatkan izin edar bagi produk yang diedarkan.
4. Integrasi program SAPA Kampus dalam pelaksanaan pendampingan UMKM yang dilakukan oleh mahasiswa terutama untuk komoditi pangan olahan dalam menyusun dokumen persyaratan permohonan IP CPPOB.
5. Pelibatan karyawan magang program Maganghub Kemenaker bets 2 pada pelaksanaan perbaikan terhadap hasil evaluasi permohonan yang telah diajukan oleh pelaku usaha.
6. Monitoring terhadap kemajuan tahapan pendampingan yang dilakukan secara rutin untuk memastikan kegiatan terlaksana dan kendala yang ditemui dapat diselesaikan.

Kendala yang dihadapi selama proses pendampingan umumnya bersumber dari ketidaklengkapan perizinan dasar pada sistem Online Single Submission (OSS), antara lain belum terpenuhinya penapisan lingkungan, status KSWP/NPWP yang belum valid, serta ketidaksesuaian data legalitas usaha. Selain itu, ketergantungan pelaku usaha terhadap pendampingan petugas sangat tinggi sehingga pemenuhan persyaratan oleh pelaku usaha tidak dapat dilakukan mandiri. Kondisi tersebut berdampak pada tertundanya proses pengajuan perizinan pangan ke BPOM yang memerlukan sinergi dan dukungan lintas sektor untuk penyelesaiannya. Upaya yang telah dilakukan oleh BBPOM di Mataram adalah yaitu melaksanakan pendampingan dengan melibatkan fasilitator seperti mahasiswa PKL/ magang dan pemanfaatan pendampingan secara daring melalui zoom meeting serta berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk sosialisasi baik kepada petugas maupun ke pelaku usaha dalam penerbitan izin lingkungan.

## h. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**Tabel 3.103** Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Tahun 2025

| Indikator | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T | R | % | T | R | % | | | |
| Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | 14.04 | 15.73 | 112.04 | 21,360,000 | 21,320,000 | 99.81 | **1.12** | **0.12** | **100 % (Efisien)** |

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,12 dengan kriteria efisien sehingga disimpulkan bahwa anggaran 2025 telah sepenuhnya efisien mendukung pencapaian indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB dimana realisasi anggaran selaras dengan pencapaian target kinerja.

Dengan adanya efisiensi anggaran, upaya yang dilakukan untuk mencapai target output dilakukan dengan merubah pelaksanaan tahapan pendampingan secara daring melalui zoom meeting ataupun pemantauan progres melalui WhatsApp Group pada kegiatan Bimbingan Teknis maupun Fasilitasi Penyusunan Dokumen. Selain itu, pemanfaatan sumber daya yang berasal dari luar seperti fasilitator mahasiswa pada program SAPA Kampus dan karyawan magang pada Maganghub Kemenaker yang diarahkan untuk melakukan fasilitasi pendampingan telah membantu pencapaian output dalam pendampingan UMKM. Demikian pula pelibatan Orang Tua Asuh yang menyediakan anggaran bagi UMKM untuk mengikuti bimbingan teknis secara luring sehingga BBPOM di Mataram hanya perlu menyediakan lokasi pelaksanaan dan narasumber pada kegiatan tersebut.

Walaupun realisasi output di atas target yang ditetapkan dan kemajuan tahapan pendampingan telah sesuai perencanaan, dampak dari efisiensi anggaran dirasakan pada faktor waktu yang diperlukan bagi UMKM untuk memperoleh rekomendasi. Capaian output tersebut baru dapat terealisasi pada akhir tahun dengan perkembangan capaian jumlah UMKM berturut-turut dari triwulan 1 ke triwulan 4 sebagai berikut 2 UMKM, 7 UMKM, 13 UMKM dan 28 UMKM. Hal ini mengakibatkan tidak seluruh UMKM yang telah terbit rekomendasi dapat melanjutkan proses pengajuan pendaftaran produk di tahun 2025.

## SASARAN KEGIATAN 5

## TERLAKSANANYA PENINDAKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA UPT

### 5.1. PERSENTASE KEBERHASILAN PENYIDIKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI UPT

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Sasaran Kegiatan kelima hanya satu indikator yaitu Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan
4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%

Cara Perhitungan dan Formula Pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut: ((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah perkara) x 100%))

#### a. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

**Tabel 3.104** Target, realisasi dan %capaian Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

| Sasaran kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | 92 | 93.57 | 101.71% | Sangat Baik |

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2025 adalah sebesar 93,57 % dari target 92% atau tercapai sebesar 101,71% dengan kriteria "sangat Baik".

Rincian pencapaian target dan realiasasi setiap tahap penyelesaian berkas perkara baik BBPOM di Mataram dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.105** Target dan Realisasi Perkara serta Keberhasilan Penindakan Tahun 2025

| UPT | TAHAPAN | Target Perkara | | Realisasi Perkara | | Koefisien | | Bobot | Nilai Realisasi | Total Nilai Realisasi | Capaian perkara | % keberhasilan penindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2025 | Carry Over | Tahun 2025 | Carry Over | Tahun 2025 | Carry Over | | | | | |
| BBPOM dI Mataram | SPDP | 7 | 0 | | | 1,00 | | 0,15 | 15,00 % | 93,57% | 100,00% | 93,57% |
| | Tahap I | | | 1 | | 1,00 | 0,00 | 0,4 | 40,00 % | | | |
| | P21 | | | | | 0,86 | 0,00 | 0,3 | 25.71 % | | | |
| | Tahap II | | | 6 | | 0,86 | 0,00 | 0,15 | 12,86 % | | | |
| | Total | 7 | 0 | 7 | 0 | | | | | | | |

Pada Tahun 2025, jumlah kasus yang ditindaklanjuti secara projustitia oleh PPNS BBPOM di Mataram sebanyak 7 perkara atau 116,67% dari target 6 perkara Tahun 2025. Posisi perkara Tahun 2025 yaitu 6 perkara sudah tahap 2 (penyerahan tersangka dan barang Bukti) dan 1 perkara tahap 1 (penyerahan berkas ke JPU). Rincian 7 perkara yang ditindaklanjuti secara *projustitia* di Tahun 2025 adalah 5 perkara kosmetik 2 perkara obat radisonal, Terdapat 1 perkara yang tersangkanya dilakukan penahanan oleh penyidik di tingkat penyidikan. Tidak terdapat carry over perkara tahun 2025.

Perencanaan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan BBPOM di Mataram dilakukan berdasarkan analisis risiko dan mempertimbangkan sumber daya manusia di fungsi Penindakan serta berpedoman pada target Renstra 2025-2029.

### b. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN 2024

Realisasi Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena adanya perubahan manual indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK).

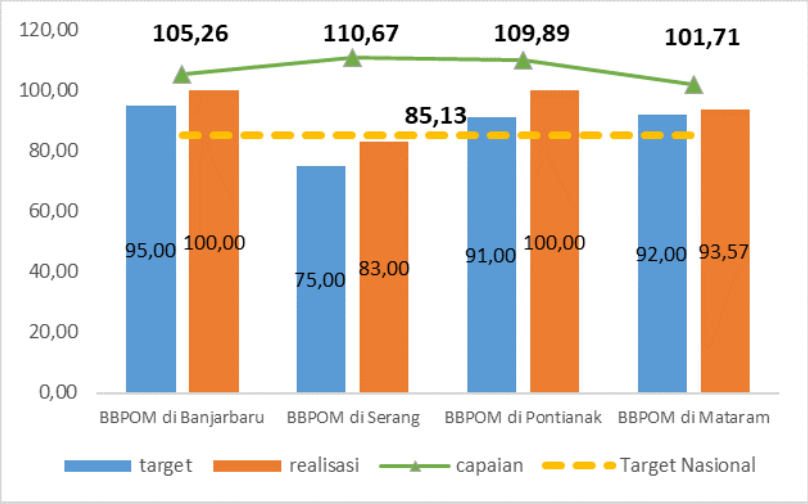
### c. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (2029)

**Tabel 3.106** Perbandingan Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029)

| Indikator | Realisasi 2025 | Target Renstra (2029) | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | 93.57 | 100.00 | 93.57% | Akan Tercapai |

Realisasi persentase keberhasilan penindakan pada tahun 2025 (93,57) jika dibandingkan dengan target di tahun akhir periode renstra (100), sudah tercapai sebesar 93,57%. Target di tahun akhir periode renstra optimis dapat dicapai dengan melakukan perencanaan dan strategi pelaksanaan yang lebih sistematis disesuaikan dengan target perkara

### d. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN BALAI BESAR POM KLASTER 5




**Gambar 3.26** Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster

Berdasarkan grafik, seluruh satker dalam klaster 5 (BBPOM di Banjarbaru, Serang, Pontianak, dan Mataram) menunjukkan realisasi yang melampaui target masing-masing, dengan persentase capaian di atas 100% serta berada di atas Target Nasional (85%).

Capaian tertinggi diraih oleh BBPOM di Serang (110,67%), diikuti Pontianak (109,89%), Banjarbaru (105,26%), dan Mataram (101,71%). Secara keseluruhan, kinerja keempat satker tergolong sangat baik karena seluruhnya berhasil melampaui target yang ditetapkan

### e. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Keberhasilan BBPOM di Mataram mencapai target persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dan peningkatan kinerja disebabkan beberapa faktor pendukung sebagai berikut:

1. Komitmen dan dukungan pimpinan terhadap keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan;
2. Pengelolaan manajemen risiko fungsi penindakan telah dilaksanakan dengan baik
3. Kerja sama dan koordinasi yang baik antar tim internal PPNS BBPOM di Mataram
4. Kompetensi dan profesionalisme intelijen dan PPNS BBPOM di Mataram meningkat, khususnya dalam kegiatan intelijen dan olah TKP. Faktor tersebut berdampak pada ditemukannya alat bukti yang cukup sehingga perkara menjadi terang dan jelas, serta mempermudah penelusuran dan penetapan tersangka;
5. Dukungan lintas sektor terutama kepolisian dalam memberikan bantuan teknis, taktis dan upaya paksa kepada PPNS BBPOM Mataram dan Kejaksaan dalam penyelesaian perkara di bidang Obat dan Makanan yang semakin meningkat;
6. Peran aktif masyarakat untuk memberikan laporan melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar POM di Mataram dan ULPK Badan POM tentang adanya pelanggaran di bidang Obat dan Makanan sehingga dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan intelijen dan penyidikan.

### f. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

**Tabel 3.107** Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Tahun 2025

| Indikator | Kendala/Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Keberhasilan | Adanya keterlambatan dalam | Melakukan koordinasi dengan JPU | Menyelenggarakan koordinasi/konsultasi untuk | TW 1 Tahun 2026 | T | - | - |

| Indikator | Kendala/Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | pemenuhan petunjuk Jaksa Penuntut Umum (P-19) yang berulang, sehingga proses menuju P21 memakan waktu lebih lama dari yang ditargetkan. | sejak tahap awal (sebelum SPDP) untuk menyamakan persepsi pasal dan alat bukti, guna meminimalisir pengembalian berkas (P-19). | menyamakan persepsi pasal dan alat bukti, guna meminimalisir pengembalian berkas secara formal/informal | | | | |
| | | Melakukan verifikasi mingguan terhadap input data penyidikan agar setiap progres (SPDP, Tahap I, P21, Tahap II) tercatat akurat dan meningkatkan nilai bobot kinerja secara sistem. | Melakukan evaluasi mingguan terhadap berkas perkara yang sedang berjalan untuk memastikan tidak ada tahapan yang terhenti tanpa alasan teknis yang jelas. | TW 1 Tahun 2026 | T | - | - |

### g. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini BBPOM di Mataram melaksanakan beberapa kegiatan yaitu:

1. Pengumpulan bahan keterangan dalam rangka penyusunan analisis kejahatan obat dan makanan dilakukan sebanyak 7 kali di wilayah Pulau Lombok dan menghasilkan 1 laporan analisis Kejahatan Obat dan makanan.
2. Verifikasi data hasil patroli siber dan profiling kejahatan obat dan makanan dilaksanakan sebanyak 10 kali dengan output 12 laporan
3. Pelaksanaan Operasi Intelijen Tahun 2025. Kegiatan intelijen/operasi intelijen dilakukan sebanyak 59 kali di seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Lombok dengan output 71 laporan Informasi.

4. Pelaksanaan Operasi/penindakan pemberantasan obat dan makanan ilegal dilakukan sebanyak 17 kali di wilayah kerja BBPOM di Mataram dengan temuan 20 kasus terdiri dari 3 kasus pelanggaran Obat ilegal, 14 kasus Kosmetik Mengandung BB dan tanpa perizinan berusaha, dan 3 kasus obat tradisional tanpa izin edar. Sebanyak 7 kasus ditindaklanjuti secara pro justitia dan 13 kasus ditindaklanjuti secara non justitia. Terhadap kasus yang ditindaklanjuti secara non justitia diberikan sanksi administratif berupa pemusnahan produk yang ditemukan dan pemilik/penguasa barang membuat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya.
5. Dukungan teknis penindakan berupa upaya penggalangan, pembentukan dan pembinaan jaringan dengan pelaku usaha Kosmetik dan stakeholder (TP PKK, Dikes Kesehatan, Dinas Perindustrian, Dinas koperasi dan UMKM, Kepolisian dan Kejaksaan) dengan tema "Kolaborasi Wujudkan Kosmetik Aman, Bermutu, dan Berdaya Saing untuk Generasi Emas Menuju NTB Makmur Mendunia" di seluruh Kabupaten/Kota wilayah kerja BBPOM di Mataram dan sebagai wujud komitmen terhadap pelaksanaan MoU antara Kepala Badan POM RI dengan stakeholder terkait
6. Peningkatan kompetensi penyidik melalui :
   - Forum Komunikasi Cegah Tangkal (2 Orang, 30 Juni 2025)
   - Supervisi Pengelolaan barang Bukti (5 Orang, 24 Juli 2025)
   - Bimbingan Teknis Psikologi Penyidikan di Jakarta (3 orang, 20-22 Agustus 2025)
   - Forum diskusi pemanfaatan pemetaan Kerawanan Kejahatan (2 orang, 26 Agustus 2025)
   - Forum Koordinasi Intelijen Gedung Merah Putih, BPOM RI (2 Orang, 11 - 12 November 2025)
   - Forum Refreshment Operasi Siber, Aula Utama BPOM RI (2 orang, 13 November 2025)

### h. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**Tabel 3.108** Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Tahun 2025

| Indikator | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T | R | % | T | R | % | | | |
| Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | 92.00 | 93.57 | 101.71 | 735,132,000 | 734,995,060 | 99.98 | **1.02** | **0.02** | **100 % (Efisien)** |

Pelaksanaan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Mataram menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya yang sangat baik. Dengan pagu anggaran sebesar Rp 735,132,000 dan realisasi sebesar Rp 734,995,060, program dapat mencapai 7 perkara dari target 6 perkara dengan capaian kinerja 101,71%,Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sepenuhnya efektif dan berdampak untuk pencapaian indikator maupun sasaran

Hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,02 dan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0,02 menunjukkan bahwa pencapaian output yang melebihi target diperoleh tanpa adanya pemborosan anggaran. Dengan kata lain, unit kerja mampu menghasilkan kinerja di atas target dengan penggunaan sumber daya yang tepat dan terkendali.

Secara keseluruhan, capaian kinerja dinilai **100% (Efisien)**, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian sasaran organisasi.

## SASARAN KEGIATAN 6
## TERLAKSANANYA KEGIATAN DETEKSI KEJAHATAN DI BIDANG SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA UPT

### 6.1. PERSENTASE LAPORAN ANALISIS KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DISELESAIKAN SESUAI STANDAR

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Sasaran Kegiatan keenam hanya satu indikator yaitu Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (*Profiling Siber*) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;
2. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari:
    a. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
    b. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

Cara Perhitungan dan Formula Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

1. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
2. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Keterangan:

a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.
b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25).

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT

### a. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

**Tabel 3.109** Target, realisasi dan %capaian Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

| Sasaran kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | 90 | 98.00 | 108.89% | Sangat Baik |

Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar tahun 2025 telah mencapai target yaitu sebesar 98% dari target 90% atau tercapai sebesar 108,89% dengan kategori “Sangat baik”.

### b. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN 2024

Realisasi Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator kinerja baru di periode renstra 2025-2029.

### c. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (2029)

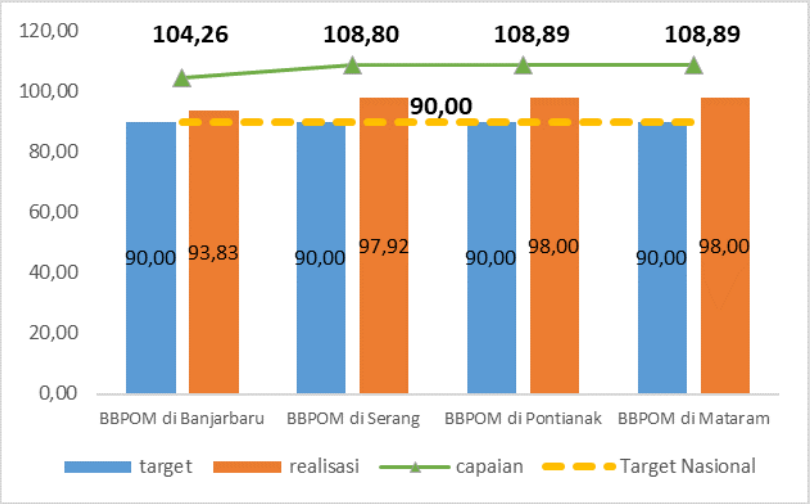
**Tabel 3.110** Perbandingan Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029)

| Indikator | Realisasi 2025 | Target Renstra (2029) | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi | 98.00 | 94.00 | 104.26% | Melampaui |

| Indikator | Realisasi 2025 | Target Renstra (2029) | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | | | | |

Realisasi capaian tahun 2025 sebesar **98,00%** tidak hanya melampaui target tahunan (90%), tetapi juga telah melampaui target akhir periode Renstra tahun 2029 yang ditetapkan sebesar 94%. Dengan demikian, capaian tahun 2025 telah mencapai 104,26% terhadap target akhir periode Renstra dengan kategori melampaui, diperlukan penyesuaian strategi dan reviu target Renstra secara bertahap agar tetap mencerminkan prinsip peningkatan kinerja yang berkelanjutan (*continuous improvement*).

### d. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN BALAI BESAR POM KLASTER 5




**Gambar 3.27** Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 pada Balai Besar POM Klaster 5 menunjukkan bahwa seluruh satuan kerja berhasil melampaui target yang ditetapkan. Setiap unit memiliki target yang sama, yaitu sebesar 90,00, dan seluruhnya mencatat persentase capaian di atas 100%. Selain itu, realisasi masing-masing unit juga berada di atas Target Nasional sebagaimana tergambar pada grafik.

BBPOM di Banjarbaru mencatat realisasi sebesar 93,83 dengan tingkat capaian 104,26%. BBPOM di Serang memperoleh realisasi sebesar 97,92 dengan capaian 108,80%. Sementara itu, BBPOM di Mataram dan BBPOM di Pontianak masing-masing membukukan realisasi sebesar 98,00, sehingga tingkat capaian keduanya mencapai 108,89%.

BBPOM di Mataram dan BBPOM di Pontianak menjadi unit dengan persentase capaian tertinggi di dalam klaster. Adapun BBPOM di Banjarbaru memiliki capaian relatif paling rendah, meskipun tetap melampaui target dengan persentase di atas 100%. Kondisi ini mencerminkan kinerja yang sangat baik dan konsisten dalam pencapaian indikator yang telah ditetapkan.

### e. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Keberhasilan BBPOM di Mataram mencapai target Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar tahun 2025 disebabkan dukungan dan komitmen Ketua Tim dan Tim Kerja Penindakan melaksanakan patroli siber, profiling dan tindak lanjut / verifikasi data hasil patroli siber secara tepat waktu sebelum tanggal 25 pada bulan berjalan, Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan dilaporkan secara tepat waktu meskipun ada efisiensi anggaran pada rincian output (RO) yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini namun kegiatan profiling tetap bisa dilaksanakan dengan menumpang pada kegiatan penyidikan. Selain itu pelaksanaan Monev secara rutin dan koordinasi intens antara Kepala Balai, Ketua Tim kerja dan Tim PPNS juga menjadi faktor keberhasilan capaian IKSK ini.

### f. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

**Tabel 3.111** Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Tahun 2025

| Indikator | Kendala/Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | Perubahan modus operandi penjualan obat dan makanan ilegal di media sosial dan marketplace sangat cepat, sehingga teknik | Mengikuti pelatihan intensif (Bimtek) khusus Open Source Intelligence (OSINT) | Mengadakan FGD dengan Kepolisian, Bea Cukai, dan Dinas Kominfo NTB untuk memperka | TW 1 Tahun 2026 | T | - | - |

| Indikator | Kendala/Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | profiling sering kali tertinggal oleh fitur enkripsi atau penghapusan jejak digital oleh pelaku. | dan manajemen bukti digital bagi petugas | ya bahan analisis dalam laporan kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan. | | | | |
| | Adanya tantangan dalam sinkronisasi standar analisis antara UPT dan Direktorat Siber di Pusat, yang terkadang menyebabkan laporan perlu revisi berulang untuk memenuhi standar Keputusan Kepala BPOM. | Menginteg rasikan data hasil sampling dan pemeriksaan sarana (fungsi pengawasan) ke dalam analisis kerawanan kewilayahan agar laporan cegah tangkal lebih komprehensif. | Melacak secara sistematis tindak lanjut dari setiap rekomendasi cegah tangkal yang telah dibuat untuk dilaporkan dalam Laporan hasil tindak lanjut tahunan. | TW 1 Tahun 2026 | T | - | - |

### g. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini BBPOM di Mataram melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Patrol siber setiap bulan Januari - Desember 2025 terhadap link/tautan yang menjual sediaan farmasi dan pangan olahan TIE di market place dan direkomendasikan untuk dilakukan takedown melalui *inaweb crawler.*

- Pelaporan profiling terhadap link dengan penjualan besar melalui Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP) bulan Januari-Desember 2025.
- Pemutakhiran peta rawan kasus pada Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP) bulan Januari-Desember 2025 dengan mengambil data dari hasil pendalaman informasi/kegiatan penindakan/pengawasan/informasi masyarakat/media/temuan kasus dari kepolisian.
- Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan sesuai rekomendasi dari Direktorat Cegah Tangkal BPOM (9 rekomendasi tahun 2025)
- Menyusun Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah BBPOM di Mataram Dimana pada tahun 2025 ini mengangkat tema "Analisis Kejahatan Kontrak Produksi Kosmetik di Provinsi NTB Tahun 2025.

### h. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**Tabel 3.112** Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Tahun 2025

| Indikator | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T | R | % | T | R | % | | | |
| Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | 90.00 | 98.00 | 108.89 | 43,300,000 | 43,283,500 | 99.96 | **1.09** | **0.09** | 100 % (Efisien) |

Berdasarkan tabel diatas IKU ini memperoleh capaian efisiensi sebesar 100,00%, meskipun sebagian anggaran digunakan untuk mendukung kebijakan automatic adjustment di tahun 2025 namun masih bisa mencapai target 12 laporan. Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sepenuhnya efektif dan berdampak untuk pencapaian indikator maupun sasaran.

## SASARAN KEGIATAN 7
## LAYANAN PUBLIK UPT YANG PRIMA

### 7.1. INDEKS PELAYANAN PUBLIK UPT

Indeks Pelayanan Publik merupakan salah satu indikator kegiatan yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada unit kerja pemerintah. Keberadaan indikator ini tidak hanya menjadi alat ukur administratif, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian mutu layanan serta refleksi komitmen instansi pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pelayanan publik yang berkualitas merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat, sehingga peningkatan kualitas pelayanan menjadi agenda prioritas dalam reformasi birokrasi nasional.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, terukur, dan akuntabel. Dalam konteks pengawasan obat dan makanan, kualitas pelayanan publik memiliki peran yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara konsisten melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu layanan secara berkelanjutan.

Penilaian Indeks Pelayanan Publik dilaksanakan sebagai bentuk evaluasi komprehensif terhadap penyelenggaraan pelayanan di lingkungan BPOM. Proses ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, sebagaimana telah diperbarui melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2024, serta Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen PEKPPP. Regulasi tersebut menjadi landasan dalam memastikan bahwa evaluasi dilakukan secara objektif, terstandar, dan berbasis indikator yang terukur.

Dalam penilaian ini, kinerja pelayanan publik dinilai melalui enam aspek utama yang mencerminkan kualitas layanan secara menyeluruh, yaitu Kebijakan Pelayanan, Profesionalitas SDM, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi. Masing-masing aspek memiliki bobot penilaian yang berbeda sesuai tingkat urgensinya, sehingga menghasilkan gambaran kinerja yang komprehensif dan proporsional.

Pelaksanaan penilaian dilakukan setiap tahun oleh Tim Penilai Kinerja UPP BPOM yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM. Pada level Balai, proses penilaian dilakukan berdasarkan data yang dihimpun dan diolah oleh Biro Hukum dan Organisasi Badan POM. Evaluasi dilaksanakan melalui pengisian kuesioner pada aplikasi evortala.pom.go.id yang telah disesuaikan dengan instrumen PEKPPP, serta dilengkapi dengan proses wawancara dan verifikasi data secara daring guna menjamin keabsahan dokumen dan akurasi penilaian.

Dalam mekanismenya, terdapat tiga jenis formulir yang digunakan, yaitu Formulir F-01 yang diisi oleh unit penyelenggara sebagai data perspektif internal; Formulir F-02 yang diisi oleh evaluator berdasarkan dokumen pendukung dan hasil verifikasi untuk menghasilkan penilaian objektif; serta Formulir F-03 yang diisi oleh minimal sepuluh pengguna layanan untuk menggambarkan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diterima. Nilai akhir Indeks Pelayanan Publik diperoleh melalui pembobotan antara F-02 dan F-03 dengan komposisi 75% untuk penilaian evaluator dan 25% untuk persepsi pengguna layanan.

Melalui mekanisme ini, Indeks Pelayanan Publik tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur capaian kinerja, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mendorong perbaikan berkelanjutan, peningkatan standar layanan, serta penguatan budaya pelayanan prima di lingkungan BPOM.

### a. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

**Tabel 3.113** Target, realisasi dan %capaian Indeks Pelayanan Publik UPT

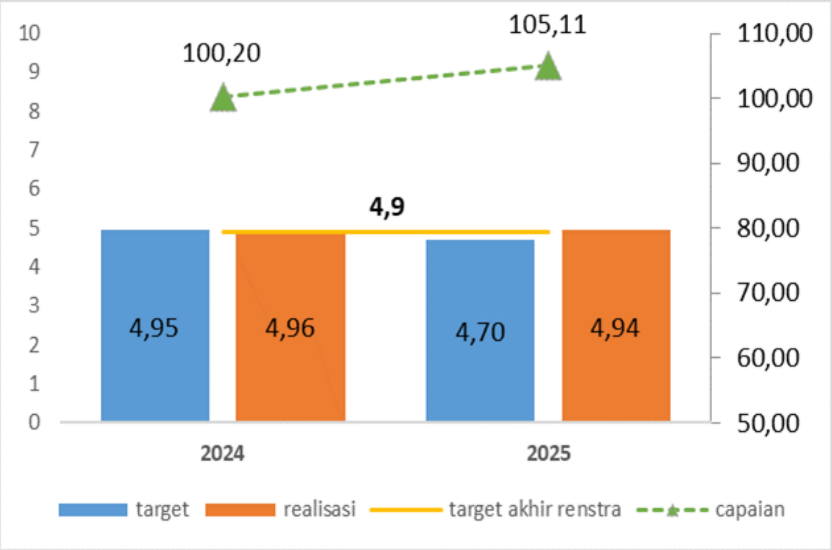
| Sasaran kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Layanan Publik UPT yang prima | Indeks Pelayanan Publik UPT | 4,70 | 4,94 | 105,11 | Sangat Baik |

Pada Tahun 2025, capaian Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Mataram menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari target sebesar 4,70, realisasi yang diperoleh mencapai 4,94 atau sebesar 105,11%. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan telah melampaui target yang ditetapkan dan termasuk dalam kategori pelayanan prima.

**Tabel 3.114** Hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik untuk Masing-Masing Komponen Tahun 2025

| Formulir | Kode | Aspek | Bobot | Indeks Per Aspek |
|---|---|---|---|---|
| F02 | I | Kebijakan Pelayanan | 24% | 4,79 |
| | II | Profesionalisme SDM | 25% | 5 |
| | III | Sarana Prasarana | 18% | 5 |
| | IV | Sistem Informasi Pelayanan Publik | 11% | 4,7 |
| | V | Konsultasi dan Pengaduan | 10% | 5 |
| | VI | Inovasi | 12% | 5 |
| | Indeks Formulir F02 | | 4,92 | |
| | Indeks Formulir F03 | | 5 | |
| Indeks Pelayanan Publik | | | 4,94 | |

## b. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN 2024




**Gambar 3.28** Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Persentase indikator Layanan Publik UPT yang prima Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan Tahun 2024, di mana target yang ditetapkan sebesar 4,95 dengan realisasi 4,96, capaian Tahun 2025 relatif stabil dan tetap berada pada kategori pelayanan prima. Meskipun secara nominal terdapat sedikit penurunan nilai dari 4,96 menjadi 4,94, capaian tersebut masih menunjukkan konsistensi kualitas pelayanan publik pada level yang sangat baik.

Perbedaan target antara Tahun 2024 dan Tahun 2025 juga menunjukkan adanya penyesuaian strategi penetapan target yang lebih realistis, dengan tetap menjaga standar mutu pelayanan. Secara umum, tren capaian Indeks Pelayanan Publik dalam dua tahun terakhir menggambarkan stabilitas kinerja pelayanan BBPOM di Mataram yang tetap terjaga pada level pelayanan prima.

### c. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (2029)

**Tabel 3.115** Perbandingan Indeks Pelayanan Publik UPT Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029)

| Indikator | Realisasi 2025 | Target Renstra (2029) | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Indeks Pelayanan Publik UPT | 4.94 | 4.90 | 100.82% ▲ | Melampaui |

Realisasi Indikator Indeks Pelayanan Publik UPT Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir renstra telah tercapai sebesar 100,82%, sehingga kinerja tahun 2025 telah melampaui target akhir yang direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik telah berjalan optimal dan bahkan melebihi sasaran kegiatan jangka menengah.

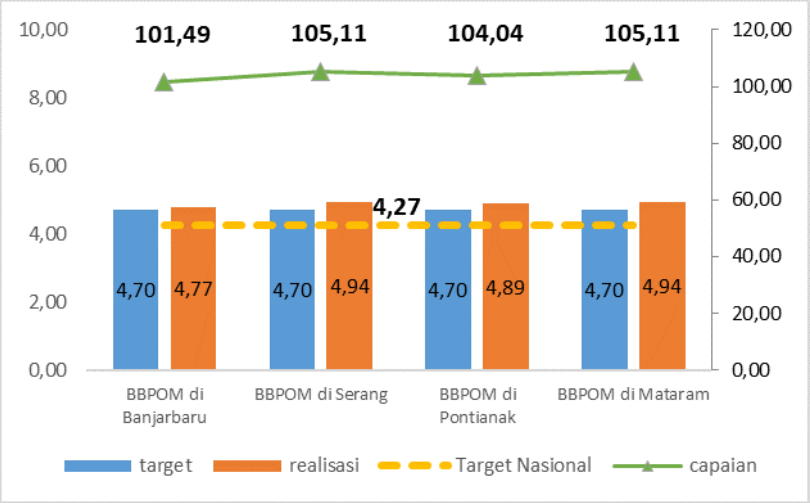
Realisasi capaian tahun 2025 sebesar 4,94 menunjukkan kinerja yang sangat baik, karena tidak hanya melampaui target tahunan (4,70), tetapi juga telah melampaui target akhir periode Renstra tahun 2029 yang ditetapkan sebesar 4,90.

Capaian ini mencerminkan bahwa kualitas pelayanan publik di BBPOM di Mataram telah berada pada level yang sangat optimal sejak awal periode Renstra, dengan kategori pelayanan prima. Keberhasilan ini didukung oleh pemenuhan hampir seluruh aspek penilaian, terutama pada aspek Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi yang telah mencapai nilai maksimal.

Namun demikian, capaian yang telah melampaui target akhir Renstra perlu diiringi dengan upaya menjaga konsistensi dan keberlanjutan kualitas pelayanan. Selain itu, diperlukan strategi penyempurnaan pada aspek yang masih memiliki ruang perbaikan, seperti Kebijakan Pelayanan dan Sistem Informasi Pelayanan Publik, agar capaian kinerja dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, capaian tahun 2025 menunjukkan bahwa BBPOM di Mataram telah berada pada jalur yang sangat baik dalam mendukung pencapaian target Renstra, bahkan melampaui ekspektasi yang telah ditetapkan.

### d. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN BALAI BESAR POM KLASTER 5




**Gambar 3.29** Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Indeks Pelayanan Publik UPT Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster

Pada Tahun 2025, capaian Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Mataram menunjukkan posisi yang sangat kompetitif dibandingkan BBPOM lain dalam satu klaster. Dengan realisasi sebesar 4,94, BBPOM di Mataram berada pada kelompok dengan capaian tertinggi, sejajar dengan BBPOM di Serang yang juga mencapai nilai 4,94.

Di sisi lain, BBPOM di Pontianak memperoleh nilai 4,89, yang menunjukkan kinerja pelayanan publik yang sangat baik namun sedikit berada di bawah capaian tertinggi dalam klaster. Sementara itu, BBPOM di Banjarbaru memperoleh nilai 4,77, yang meskipun masih melampaui target yang ditetapkan (4,70) dan termasuk kategori pelayanan prima, namun relatif lebih rendah dibandingkan UPT lainnya dalam klaster.

Secara keseluruhan, seluruh BBPOM dalam klaster menunjukkan kinerja yang baik dengan capaian di atas target, yang mencerminkan implementasi standar pelayanan publik yang telah berjalan dengan optimal. Posisi BBPOM di Mataram yang berada pada capaian tertinggi menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan telah mampu bersaing dan sejajar dengan UPT lain yang memiliki performa terbaik dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

### e. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Capaian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025 sebesar 4,94 (kategori pelayanan prima) menunjukkan bahwa BBPOM di Mataram tidak hanya berhasil memenuhi indikator teknis pelayanan, tetapi juga mampu mengelola sistem pelayanan publik secara efektif dari sisi tata kelola (governance), manajemen kinerja, dan budaya organisasi.

Keberhasilan ini mencerminkan adanya alignment yang kuat antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan publik. Program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak bersifat parsial, melainkan terintegrasi dalam kerangka peningkatan kualitas layanan yang berkelanjutan.

Dari sisi kepemimpinan dan tata kelola, capaian ini menunjukkan adanya komitmen pimpinan dalam mendorong budaya pelayanan prima, penguatan akuntabilitas kinerja, serta pengendalian internal yang berjalan efektif. Hal ini tercermin dari konsistensi capaian nilai tinggi pada aspek Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi.

Dari sisi manajemen SDM, keberhasilan mempertahankan nilai maksimal pada aspek profesionalisme menunjukkan bahwa organisasi telah mampu membangun kapasitas SDM yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki orientasi pelayanan yang kuat. Hal ini menjadi faktor utama dalam membentuk pengalaman layanan yang positif bagi masyarakat.

Dari sisi manajemen layanan dan operasional, keberhasilan pada aspek sarana prasarana dan pengelolaan pengaduan menunjukkan bahwa sistem layanan telah dirancang dengan baik, mudah diakses, serta responsif terhadap kebutuhan pengguna. Selain itu, inovasi yang dikembangkan menunjukkan adanya kemampuan organisasi dalam beradaptasi dan melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement).

Sementara itu, pada aspek tata kelola kebijakan dan sistem informasi, masih terdapat ruang penguatan, khususnya dalam penyelarasan dokumen kebijakan layanan dan konsistensi pemutakhiran informasi. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan ke depan tidak lagi pada aspek implementasi layanan, melainkan pada penguatan aspek governance dan digitalisasi layanan.

Dari perspektif manajemen kinerja, capaian nilai yang melampaui target serta stabil pada kategori pelayanan prima dalam dua tahun terakhir menunjukkan bahwa sistem yang dibangun telah matang dan berkelanjutan. Selain itu, tingginya nilai persepsi pengguna (F-03 = 5) mengindikasikan bahwa outcome pelayanan telah dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Dengan demikian, keberhasilan kinerja tidak hanya didorong oleh pemenuhan indikator, tetapi juga oleh:

- Kepemimpinan yang kuat dan berorientasi pelayanan,
- Sistem manajemen yang terintegrasi,
- Budaya kerja yang mendukung pelayanan prima,
- Serta kemampuan organisasi dalam melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Ke depan, fokus peningkatan kinerja diarahkan pada penguatan aspek kebijakan dan sistem informasi sebagai bagian dari penyempurnaan tata kelola pelayanan publik yang lebih adaptif, transparan, dan berbasis digital.

### f. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

**Tabel 3.116** Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik UPT Tahun 2025

| Indikator | Kendala/Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeks Pelayanan Publik UPT | Fasilitas untuk kelompok rentan (disabilitas, lansia, ibu menyusui) di gedung kantor masih perlu peningkatan sesuai standar dan fungsionalitas agar sesuai dengan kriteria penilaian terbaru PEKPPP | Melakukan audit internal sarana prasarana berdasarkan checklist kriteria inklusivitas Menpan RB | - Melengkapi sarana prasarana pelayanan publik yang ramah disabilitas<br>- Melaksanakan SKM setiap triwulan untuk mendapatkan masukan langsung dari pengguna layanan sebagai bahan perbaikan pelayanan publik. | TW 1 Tahun 2026 | T | - | - |

### g. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Kegiatan atau hal-hal yang menunjang peningkatan realisasi Indeks Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan dan Pemenuhan sarana pelayanan publik sesuai standar melalui penyediaan kamar mandi dan mushola untuk kelompok rentan dan disabilitas, pemanfaatan mesin antrian elektronik, mesin pembayaran elektronik (EDC), area tunggu pengantar dan ruang tunggu yang nyaman dilengkapi dengan makanan ringan dan kopi/ teh gratis;
2. Penerapan budaya 5S (Senyum, Salam, Sapa dengan Semangat memberikan Solusi), petugas pelayanan dengan berseragam khusus dan peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan pelayanan publik termasuk pelayanan kepada kelompok rentan guna mendukung profesionalisme SDM;
3. Adanya pengembangan inovasi pelayanan publik antara lain Sistem Layanan Pengujian Sampel kepolisian (SILAPOL), One Day Service (ODS), One Hour Service (OHS) dan ODS Weekend, GASPAMAN, Gemilang Pro UMKM, dan Berugak Virtual;

4. *Update* berkala sistem informasi pelayanan publik memanfaatkan berbagai media (media sosial, media elektronik, dan website);
5. Perbaikan dan publikasi standar pelayanan publik ke berbagai lapisan masyarakat melalui berbagai media;
6. Pelaksanaan forum konsultasi publik untuk menjaring masukan dan informasi sebagai langkah perbaikan terhadap pelayanan yang sudah ada.

### h. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**Tabel 3.117** Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Indeks Pelayanan Publik UPT Tahun 2025

| Indikator | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T | R | % | T | R | % | | | |
| Indeks Pelayanan Publik UPT | 4.7 | 4.94 | 105.11 | 126,033,000 | 125,992,008 | 99.97 | **1.05** | **0.05** | 100 % (Efisien) |

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025 di BBPOM di Mataram menunjukkan penggunaan sumber daya yang efisien. Hal ini terlihat dari pagu anggaran sebesar Rp 126,033,000 dengan realisasi sebesar Rp 125,992,008 atau sebesar 99,97%.

Tingkat realisasi anggaran yang mendekati pagu menunjukkan bahwa perencanaan kegiatan telah dilakukan secara tepat dan terukur, sehingga anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa adanya pemborosan. Seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal, yang ditunjukkan dengan capaian Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,94 dengan kategori pelayanan prima.

Efisiensi penggunaan anggaran juga didukung oleh pengelolaan kegiatan yang efektif, termasuk pemanfaatan sarana prasarana yang tersedia, optimalisasi peran SDM internal, serta pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi. Dengan demikian, output yang dihasilkan tetap berkualitas tinggi meskipun penggunaan anggaran dilakukan secara terkendali.

Secara keseluruhan, capaian kinerja yang tinggi dengan tingkat serapan anggaran yang optimal menunjukkan bahwa pelaksanaan program pelayanan publik di BBPOM di Mataram telah berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

## SASARAN KEGIATAN 8
## TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAH UNIT ORGANISASI YANG OPTIMAL

Pada Sasaran Kegiatan kedelapan ini terdapat 4 indikator kinerja yang merupakan tolok ukur terhadap keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan ini yaitu :

**Tabel 3.118** Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 8 BBPOM di Mataram Tahun 2025

| NO SS | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2025 | REALISASI | %CAPAIAN | KATEGORI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM | 90.00 | 90.93 | 101.03% | Sangat Baik |
| | | Nilai AKIP UPT BPOM | 83.90 | 82.55 | 98.39% | Baik |
| | | Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM | 5.00 | 5.00 | 100.00% | Baik |
| | | Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | 3.05 | 2.970 | 97.38% | Baik |

### 8.1. NILAI PEMBANGUNAN ZI UPT BPOM

a. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

b. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

c. Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:

1) memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan
2) menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM

**Cara Perhitungan dan Formula**

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan *self-assessment* dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I

Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu:

**Tabel 3.119** Bobot Penilaian Komponen Pengungkit Nilai Pembangunan ZI

| NO | KOMPONEN PENGUNGKIT | BOBOT |
|---|---|---|
| 1 | Manajemen Perubahan | 8% |
| 2 | Penataan Tatalaksana | 7% |
| 3 | Penataan Sistem Manajemen SDM | 10% |
| 4 | Penguatan Akuntabilitas Kinerja | 10% |
| 5 | Penguatan Pengawasan | 15% |
| 6 | Penguatan Kualitas Pelayanan Publik | 10% |

**Tabel 3.120** Bobot Penilaian Komponen Hasil Nilai Pembangunan ZI

| NO | KOMPONEN HASIL | BOBOT |
|---|---|---|
| 1 | Birokrasi yang bersih dan akuntabel | 22,5 % |
| 2 | Pelayanan Publik yang prima | 17,5 % |

## a. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

**Tabel 3.121** Target, realisasi dan %capaian Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

| Sasaran kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM | 90 | 90,93 | 101,03% | Sangat Baik |

Realisasi Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar POM di Mataram Tahun 2025 sudah mencapai target yaitu sebesar 90,93 dari target 90 sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 101,03%.

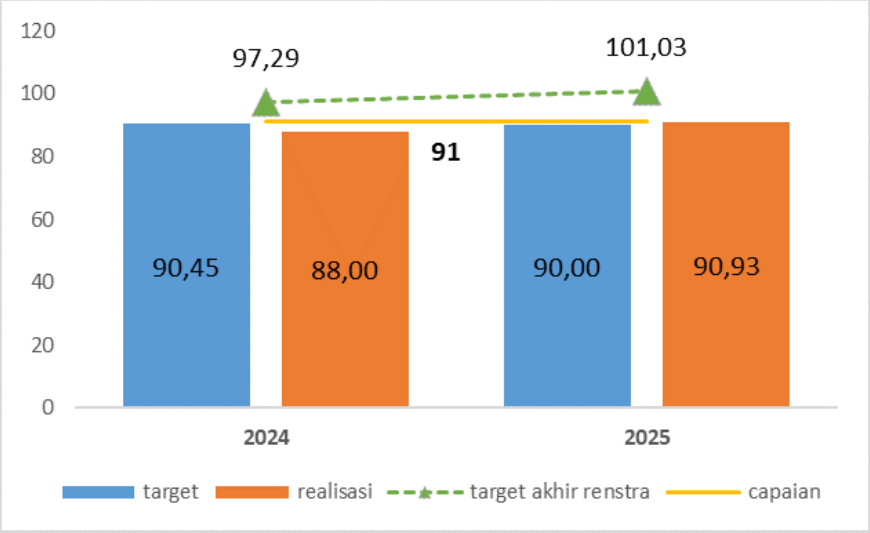
**Tabel 3.122** Penilaian Evaluasi ZI BBPOM di Mataram Tahun 2025 dan 2024

| PENILAIAN | | | Nilai | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Aspek Pemenuhan | | Aspek Reform | | Total | | % | |
| | | | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 |
| A. | KOMPONEN PENGUNGKIT (60) | | | | | | | | | |
| | I. | MANAJEMEN PERUBAHAN (8) | 3 | 3.24 | 4 | 4 | 7 | 7.24 | 87.50 | 90.50 |
| | II. | PENATAAN TATALAKSANA (7) | 2.31 | 2.56 | 2.75 | 2.92 | 5.06 | 5.48 | 72.29 | 78.29 |

| PENILAIAN | | | Nilai | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Aspek Pemenuhan | | Aspek Reform | | Total | | % | |
| | | | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 |
| | III. | PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (10) | 4.27 | 4.43 | 4.25 | 4.25 | 8.52 | 8.68 | 85.20 | 86.80 |
| | IV. | PENGUATAN AKUNTABILITAS (10) | 4.58 | 4.15 | 3.96 | 3.96 | 8.54 | 8.11 | 85.40 | 81.10 |
| | V. | PENGUATAN PENGAWASAN (15) | 6.25 | 5.81 | 6.25 | 7.5 | 12.5 | 13.31 | 83.33 | 88.73 |
| | VI. | PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) | 4.09 | 4.48 | 3.76 | 4 | 7.85 | 8.48 | 78.50 | 84.80 |
| **TOTAL PENGUNGKIT** | | | | | | | **49.47** | **51.28** | **82.45** | **85.47** |
| **B.** | **KOMPONEN HASIL (40)** | | | | | | | | | |
| | I. | BIROKRASI BERSIH DAN AKUNTABEL (22,5) | | | | | **21.16** | **22.41** | **94.04** | **99.60** |
| | | 1. Nilai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) (17,5) | | | | | 17.41 | 17.41 | 99.49 | 99.49 |
| | | 2. Capaian Kinerja Lebih Baik (5) | | | | | 3.75 | 5 | 75.00 | 100.00 |
| | II. | PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA | | | | | **17.37** | **17.24** | **99.26** | **98.51** |
| | | 1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) (17,5) | | | | | 17.37 | 17.24 | 99.26 | 98.51 |

| PENILAIAN | Nilai | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aspek Pemenuhan | | Aspek Reform | | Total | | % | |
| | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 |
| TOTAL HASIL | | | | | 38.53 | 39.65 | 96.33 | 99.13 |
| **NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI** | | | | | **88** | **90.93** | **88** | **90.93** |

## b. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN 2024




**Gambar 3.30** Perbandingan Target, Realisasi, dan %Capaian Nilai Pembangunan ZI UPT BBPOM di Mataram Tahun 2024 hingga Tahun 2025

Realisasi Nilai Pembangunan ZI UPT BBPOM di Mataram Tahun 2025 lebih meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 2.93 poin.

### c. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (2029)

**Tabel 3.123** Perbandingan Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029)

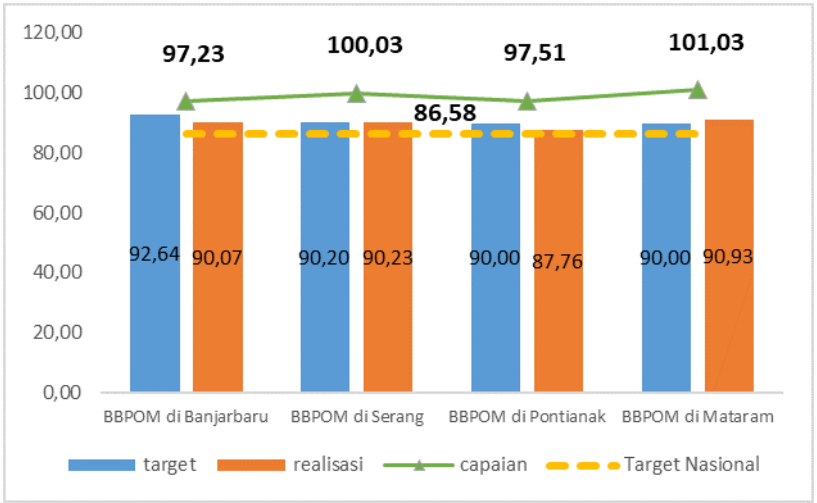
| Indikator | Realisasi 2025 | Target Renstra (2029) | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM | 90.93 | 91.00 | 99.92% | Akan Tercapai |

Berdasarkan realisasi indikator Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM tahun 2025 sebesar 90,93, maka target akhir renstra tercapai sebesar 99,92% dengan kategori akan tercapai.

Secara kuantitatif, efektivitas program pembangunan ZI ini berada pada angka 99,92**%**. Tingginya persentase ini menunjukkan bahwa strategi penguatan tata kelola, pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik telah berjalan sesuai jalur (*on the track*).

Berdasarkan capaian tersebut, kinerja ini masuk ke dalam kategori **"Akan Tercapai"**. Hal ini mengindikasikan optimisme tinggi bahwa target Renstra 2029 bukan hanya sekadar mungkin dicapai, tetapi berpotensi besar untuk dilampaui (*surpass*) jauh sebelum periode Renstra berakhir.

### d. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN BALAI BESAR POM KLASTER




**Gambar 3.31** Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster

Secara keseluruhan, seluruh unit kerja berhasil melampaui Target Nasional yang ditetapkan sebesar 86,58. Hanya BBPOM di Mataram dan BBPOM di Serang yang mencapai target internal. Dari sisi efektivitas pencapaian target internal, BBPOM di Mataram mencatatkan performa tertinggi

dengan persentase capaian mencapai 101,03%, di mana realisasinya sebesar 90,93 berhasil melampaui target 90,00, selanjutnya disusul BBPOM di Serang dengan capaian 100,03%, BBPOM di Pontianak dengan capaian 97,51% dan BBPOM di Banjarbaru dengan capaian 97,23%.

### e. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) tahun 2025, Balai Besar POM di Mataram menunjukkan performa yang sangat baik dengan meraih nilai total PMPZI sebesar 90,93. Capaian ini mencerminkan komitmen kuat pimpinan dan seluruh pegawai dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani, di mana seluruh indikator pada Komponen Pengungkit—mulai dari Manajemen Perubahan hingga Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik—berhasil memenuhi syarat (MS). Keberhasilan ini semakin dipertegas oleh efektivitas penguatan pengawasan yang meraih nilai tertinggi di kelompok pengungkit, serta transformasi penataan SDM dan tata laksana yang berjalan secara konsisten.

Keberhasilan pembangunan ZI ini juga berdampak langsung pada kualitas output dan persepsi masyarakat, yang dibuktikan dengan nilai Komponen Hasil yang sangat memuaskan, yakni 39,65 dari bobot maksimal 40,00. Indikator pelayanan publik menunjukkan kualitas prima dengan nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sebesar 3,97 dan Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK) sebesar 3,98, di mana keduanya melampaui standar minimal yang ditetapkan oleh KemenPANRB. Selain itu, unit kerja berhasil menunjukkan akuntabilitas yang nyata melalui Capaian Kinerja Lebih Baik yang menyentuh angka sempurna 5,00, menandakan bahwa BBPOM di Mataram tidak hanya fokus pada pemenuhan administrasi, tetapi juga pada pemberian nilai tambah bagi masyarakat dan pemangku kepentingan.

### f. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

**Tabel 3.124** Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM Tahun 2025

| Indikator | Kendala/Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM | - Tantangan dalam memastikan nilai-nilai integritas tidak hanya dipahami secara administratif, tetapi benar- | Mengoptimalkan peran Agen Perubahan untuk menjadi motor | Melakukan pengisian dan verifikasi data dukung LKE ZI secara | TW 1, TW 2, TW 3 dan TW 4 Tahun 2026 | T | - | - |

| Indikator | Kendala/Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | benar menjadi budaya kerja harian seluruh pegawai | penggerak inovasi dan internalisasi budaya integritas di setiap fungsi kerja. | rutin setiap bulan untuk memastikan seluruh indikator pemenuhan dan hasil telah tercapai 100%. | | | | |
| | - Banyak inovasi yang diciptakan untuk mempermudah layanan publik, namun sering kali terhambat dalam hal evaluasi dampak secara nyata terhadap efisiensi organisasi atau kepuasan masyarakat. | | | | T | - | - |

## g. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Untuk pencapaian target indikator Nilai Pembangunan ZI tahun 2025, BBPOM di Mataram telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Apel Pembinaan yang rutin dilakukan setiap minggu secara *offline* maupun *online* dalam rangka internalisasi implementasi reformasi birokrasi untuk seluruh pegawai;
- Implementasi Sistem Manajemen Terintegrasi BPOM;
- Kepala BBPOM di Mataram sebagai *Role* Model Duta Anti Gratifikasi;
- Pencantuman Larangan Gratifikasi pada Surat Tugas dan Surat Edaran kepada seluruh *stakeholders;*
- Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja RB dari setiap Pokja Area Perubahan dan implementasi inovasi setiap bulan;
- *Sharing session* implementasi RB dengan UPT lain, baik menerima kunjungan ataupun *benchmarking*;
- Optimalisasi layanan publik dengan penambahan sarana dan prasarana kelompok rentan dan disabilitas;

- Peningkatan kompetensi petugas pelayanan publik dengan dilaksanakan bimtek bahasa isyarat yang bekerja sama dengan SLB 1 Kota Mataram;
- Inovasi-inovasi berkelanjutan yang mendukung implementasi Reformasi Birokrasi berdampak, dan *Core values* ASN BerAkhlak, antara lain:
  a. Inovasi ODS (*One Day Services*) dan OHS (*One Hour Services*);
  b. Keluarga Sadar Pangan Aman (GAS-PAMAN);
  c. GEMILANG Pro-UMKM (Gerakan Lintas Lembaga Mengawal Daya Saing Produk UMKM);
  d. GOBAK SODOR (Gencarkan Obat dan Makanan Aman dengan Sosialisasi *Door to Door*);
  e. Inovasi BBPOM Mataram *on Air*;
  f. I-CONIC (*Instrument Consultation Clinic*);
  g. SiOpa lagi JJ (Sistem Pengoperasian Alat Laboratorium Jarak Jauh);
  h. PERCEPAT (Persediaan Cepat dan Akurat);
  i. SIMPEL BMN (Sistem Pemeliharaan BMN);
  j. Siproval
  k. Kantin Kejujuran;
  l. *B-Care*/BPOM Berbagi;
  m. Siap melayani, dll.

### h. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**Tabel 3.125** Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

| Indikator | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T | R | % | T | R | % | | | |
| Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM | 90.00 | 90.93 | 101.03 | 2,130,143,500 | 2,128,021,339 | 99.90 | **1.01** | **0.01** | 100 % (Efisien) |

Upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) di UPT Balai Besar POM Mataram merupakan bagian dari komitmen reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja menunjukkan bahwa indikator Nilai Pembangunan ZI UPT BBPOM di Mataram berhasil mencapai target dengan tingkat realisasi yang optimal.

Dari tabel evaluasi, nilai target pembangunan ZI sebesar 90,00 dapat direalisasikan menjadi 93,93. Hal ini dicapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp 2,128,021,339, yang terealisasi hampir penuh (Rp 2,130,143,500) dengan tingkat efisiensi input mencapai 99,90%. Rasio efektivitas (TE) sebesar 1,01 menunjukkan bahwa setiap sumber daya yang digunakan mampu menghasilkan output yang lebih tinggi dari target, dengan capaian TE sebesar 0,01. Kesimpulan dari evaluasi ini

adalah efisien, menandakan bahwa penggunaan anggaran dan sumber daya telah tepat sasaran serta mendukung peningkatan kualitas tata kelola organisasi.

Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan efisiensi finansial, tetapi juga efektivitas manajerial dalam mengarahkan program pembangunan ZI. Dengan capaian tersebut, UPT Balai Besar POM Mataram memperlihatkan konsistensi dalam melaksanakan prinsip integritas, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang prima. Analisis ini menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya yang efisien menjadi faktor kunci dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas obat dan makanan.

## 8.2 NILAI AKIP UPT BPOM

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.

Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM, dengan kriteria nilai sebagai berikut:

**Tabel 3.126** Kriteria Nilai AKIP

| Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja | Ketegori | Predikat |
|---|---|---|
| > 90-100 | AA | Sangat Memuaskan |
| > 80 s.d 90 | A | Memuaskan |

| Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja | Ketegori | Predikat |
|---|---|---|
| > 70 s.d 80 | BB | Sangat Baik |
| > 60 s.d 70 | B | Baik |
| > 50 s.d 60 | CC | Cukup (Memadai) |
| > 30 s.d 50 | C | Kurang |
| 0 sd 30 | D | Sangat Kurang |

## a. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

**Tabel 3.127** Target, realisasi dan %capaian Nilai AKIP UPT BPOM

| Sasaran kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | Nilai AKIP UPT BPOM | 83.9 | 82.55 | 98.39% | Baik |

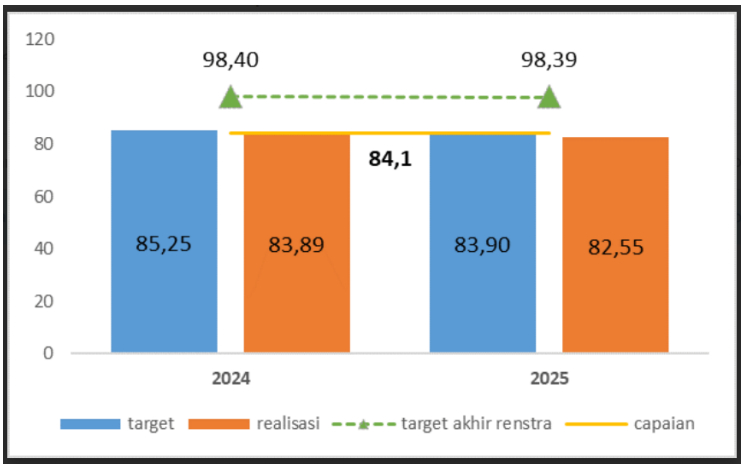
Pada tahun 2025, Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Mataram Tahun 2025 belum mencapai target yaitu sebesar 82,55 dari target 83,90 sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 98,39% dengan kriteria ‘’Baik’’.

Dengan target yang cenderung meningkat setiap tahun pada periode renstra 2025-2029 menjadi tantangan BBPOM di Mataram untuk terus melakukan peningkatan berkelanjutan dan berkomitmen mengimplementasikan SAKIP melalui langkah-langkah nyata.

**Tabel 3.128** Hasil Penilaian AKIP Tahun 2024-2025

| No | Komponen | Bobot | Nilai | | Keterangan (Kenaikan/Penurunan Nilai) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | |
| 1. | Perencanaan Kinerja | 24 | 20,16 | 20,16 | 0,00 |
| 2. | Pengukuran Kinerja | 24 | 20,16 | 20,16 | 0,00 |
| 3. | Pelaporan Kinerja | 12 | 9,72 | 10,08 | +0,36 |
| 4. | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 20 | 16,20 | 16,80 | +0,60 |
| 5. | Capaian Kinerja | 20 | 17,65 | 15,35 | -2,30 |
| **Nilai Hasil Evaluasi** | | **100** | **83,89** | **82,55** | **-1,34** |
| **Predikat** | | | **A** | **A** | **Tetap** |

### b. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN 2024




**Gambar 3.32** Perbandingan Target, Realisasi dan % Capaian indikator Nilai AKIP UPT BPOM tahun 2024 dengan tahun 2025

Berdasarkan grafik perbandingan kinerja, terlihat adanya penyesuaian target dan realisasi pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, target ditetapkan sebesar 85,25 dengan realisasi mencapai 83,89, yang menghasilkan persentase capaian sebesar 98,40%. Memasuki tahun 2025, target tahunan disesuaikan menjadi 83,90 dengan realisasi sebesar 82,55. Meskipun secara angka nominal realisasi mengalami penurunan tipis, efektivitas pencapaian kinerja tetap terjaga secara konsisten di level tinggi, yakni sebesar 98,39%.

Hal ini mencerminkan komitmen berkelanjutan dalam menjaga ritme kerja demi memastikan seluruh target strategis di akhir periode rencana strategis dapat terpenuhi dengan deviasi yang minimal.

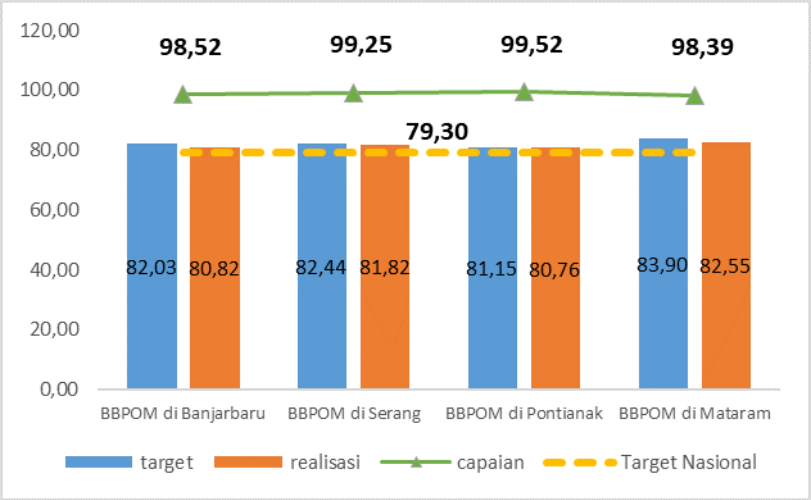
### c. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (2029)

**Tabel 3.129** Perbandingan Nilai AKIP UPT BPOM Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029)

| Indikator | Realisasi 2025 | Target Renstra (2029) | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Nilai AKIP UPT BPOM | 82.55 | 84.10 | 98.16% | Akan Tercapai |

Berdasarkan realisasi indikator Nilai AKIP tahun 2025 sebesar 82,55, maka target akhir renstra tercapai sebesar 98,16% dengan kategori akan tercapai.

### d. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN BALAI BESAR POM KLASTER 5




**Gambar 3.33** Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Nilai AKIP UPT BPOM Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster

Perbandingan target, realisasi, dan persentase capaian nilai AKIP UPT BPOM Tahun 2025 Balai Besar POM pada klaster 5 menunjukkan kinerja yang relatif baik dan melampaui target nasional. BBPOM di Banjarbaru menetapkan target sebesar 82,03 dengan realisasi 80,82 dan capaian kinerja sebesar 98,52%. BBPOM di Serang memiliki target 82,44 dengan realisasi 81,82 dan capaian 99,25%. Sementara itu, BBPOM di Pontianak mencatat target 81,15 dan realisasi 80,76 dengan capaian tertinggi sebesar 99,52%. Adapun BBPOM di Mataram menetapkan target 83,90 dengan realisasi 82,55 dan capaian 98,39%. Secara keseluruhan, keempat BBPOM dalam klaster 5 tidak mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian seluruh UPT berada pada kisaran 98%–99% dan melampaui target nasional sebesar 79,30.

### e. ANALISIS PENYEBAB KEGAGALAN ATAU PENURUNAN KINERJA

Persentase nilai AKIP BBPOM di Mataram belum mencapai target di Tahun 2025 yaitu sebesar 98,39%, antara lain disebabkan karena belum optimalnya hasil penilaian pada komponen penilaian yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal, khususnya komponen penilaian capaian kinerja sebesar 76,75%.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 pada Balai Besar POM di Mataram, kelemahan utama yang teridentifikasi terletak pada ketidakselarasan data dan dokumentasi perencanaan kinerja, di mana terdapat perbedaan target indikator antara kertas kerja penetapan target, Perjanjian Kerja (PK), Rancangan Renstra 2025-2029, dan aplikasi SIMAKIN. Pada aspek pengukuran, ditemukan kesalahan perhitungan capaian kinerja indikator pangan olahan berisiko serta belum adanya rincian petugas penanggung jawab (PIC) yang jelas dalam mekanisme

pelaporan kinerja. Selain itu, sisi pelaporan kinerja menunjukkan adanya ketidaksinambungan rencana aksi antar-triwulan dan perbedaan penyajian data realisasi kinerja antara dokumen fisik dengan aplikasi SIMETRIS. Terakhir, pada komponen capaian kinerja, terjadi penurunan signifikan pada indikator outcome di mana terdapat 17,65% indikator yang tidak mencapai target serta 44,83% indikator dengan capaian yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk selanjutnya BBPOM di Mataram harus terus meningkatkan kinerja agar nilai seluruh komponen indikator kinerja dapat meningkat, sehingga nilai AKIP dapat meningkat di masa yang akan datang.

### f. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

**Tabel 3.130** Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Nilai AKIP UPT BPOM BPOM Tahun 2025

| Indikator | Kendala/Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilai AKIP UPT BPOM | Menurunnya capaian output (RO) dan outcome (IKSK) Tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya | Meningkatkan capaian output (RO) dan outcome (IKSK) Tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya dengan melakukan Monev dengan ketat di 2026 | Meningkatkan capaian output (RO) dan outcome (IKSK) Tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya dengan melakukan Monev dengan ketat di 2026 | TW 4 Tahun 2026 | T | - | - |

### g. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Pencapaian indikator Nilai AKIP BBPOM di Mataram didukung oleh beberapa kegiatan antara lain:

1. Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi serta laporan kinerja telah dilaksanakan tepat waktu antara lain: Laporan Kinerja Tahun 2024, Laporan Tahunan (LAPTAH) Tahun 2024, Laporan Keuangan Semester II Tahun 2024, Laporan Monev Internal dan Laporan Kinerja Interim Triwulan 1 - Triwulan 3 Tahun 2025, Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2025, dan RKAKL/DIPA Tahun Anggaran 2026;
2. Perjanjian kinerja Kepala BBPOM di Mataram telah di *cascading* sampai level individu dan capaian kinerja individu dievaluasi dan dilaporkan secara berkala dan tepat waktu;
3. Pelaksanaan Monev internal setiap bulan yang dilengkapi dengan matriks rencana tindak lanjut (RTL) terhadap seluruh indikator kinerja, utamanya indikator yang capaiannya tidak tercapai;

4. Implementasi SK Kepala BBPOM di Mataram tentang Mekanisme Pelaporan Kinerja dan Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran BBPOM di Mataram Tahun 2025 terlaksana dengan baik;
5. Implementasi Aplikasi Siproval untuk pengumpulan data kinerja terlaksana dengan baik;
6. Implementasi SK Kepala BBPOM di Mataram tentang Penetapan Reward dan Punishment Pencapaian Kinerja BBPOM di Mataram Tahun 2025 terlaksana dengan baik;
7. Peningkatan kualitas SDM unit kerja yang mengelola akuntabilitas Kinerja melalui Bimbingan Teknis/Workshop dan pendampingan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, rencana aksi dan pelaporan kinerja;
8. Pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) dalam penyusunan perencanaan kinerja dan pelaporan realisasi target kinerja secara berkala;
9. Melakukan tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi Inspektorat Utama pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) penilaian SAKIP Tahun 2024.
10. Hasil monitoring dan evaluasi dimanfaatkan untuk perbaikan rencana kinerja dan pelaksanaan kegiatan.

### h. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**Tabel 3.131** Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Nilai AKIP UPT BPOM

| Indikator | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T | R | % | T | R | % | | | |
| Nilai AKIP UPT BPOM | 83.9 | 82.55 | 98.39 | 2,130,143,500 | 2,128,021,339 | 99.90 | **0.98** | **-0.02** | 75 % (Tidak Efisien) |

Berdasarkan hasil analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, indikator Nilai AKIP UPT BPOM menunjukkan capaian yang dikategorikan "Tidak Efisien" dengan tingkat efisiensi hanya sebesar 75%. Hal ini didasarkan pada realisasi output (Nilai AKIP) sebesar 82,55 dari target 83,9 atau setara dengan 98,39%. Di sisi lain, penyerapan input anggaran sangat tinggi, yakni mencapai Rp2.128.021.339 dari total pagu Rp2.130.143.500 atau sebesar 99,90%. Kesenjangan antara penyerapan anggaran yang hampir maksimal dengan capaian output yang belum memenuhi target menghasilkan Indeks Efisiensi (IE) sebesar 0,98 dan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar -0,02. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penggunaan sumber daya finansial belum berkorelasi optimal terhadap peningkatan nilai akuntabilitas kinerja organisasi.

## 8.3 NILAI KINERJA ANGGARAN UPT BPOM

1. Nilai Kinerja Anggaran Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari penggabungan dua komponen:
    - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

- Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) IKPA merupakan ukuran evaluasi yang mencerminkan aspek kualitas perencanaan, kualitas implementasi, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Terdapat 8 (delapan) indikator pembentuk nilai IKPA, yaitu:
   - Revisi DIPA: Bobot 10%
   - Deviasi Halaman III DIPA: Bobot 15%
   - Penyerapan Anggaran: Bobot 20%
   - Belanja Kontraktual: Bobot 10%
   - Penyelesaian Tagihan: Bobot 10%
   - Pengelolaan UP dan TUP: Bobot 10%
   - Capaian Output: Bobot 25%
   - Dispensasi SPM: (Berperan sebagai pengurang nilai IKPA)
3. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) EKA merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang diukur melalui variabel efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuknya adalah:

   Variabel Efektivitas:
   a. Capaian RO (Bobot 75%)

   Variabel Efisiensi:
   a. Penggunaan SBK (Bobot 10%)
   b. Efisiensi SBK (Bobot 15%)

**Cara Perhitungan dan Formula**

Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

**Tabel 3. 132** Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

| Nilai | Kategori | Konversi NIlai |
|---|---|---|
| 0 s.d. 50 | Sangat Kurang | 1 |
| 50,01 s.d. 60 | Kurang | 2 |
| 60,01 s.d. 80 | Cukup | 3 |
| 80,01 s.d. 90 | Baik | 4 |
| 90,01 s.d. 100 | Sangat Baik | 5 |

## a. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

**Tabel 3.133** Target, realisasi dan %capaian Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

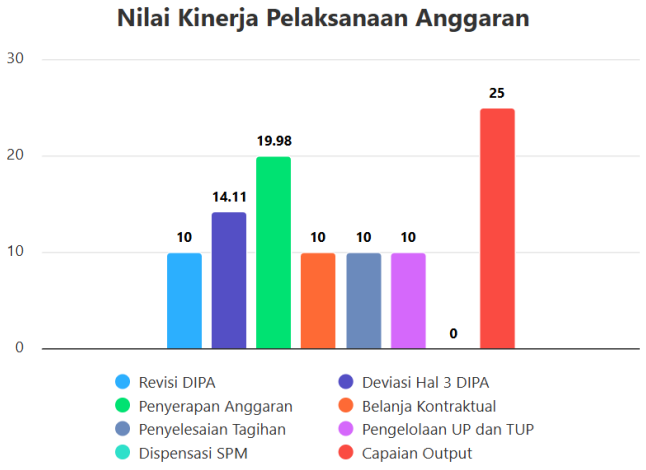
| Sasaran kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM | 5 | 5.00 | 100.00% | Baik |

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM Tahun 2025 telah mencapai target yaitu sebesar 5 dari target 5. Sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 100,00% dengan kriteria "Baik".

Realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) tercapai sebesar **98,48**, yang jika dikonversikan setara dengan **Nilai 5**. Capaian ini merupakan hasil akumulasi dari dua komponen utama dengan bobot seimbang, yakni 50% nilai IKPA sebesar 99,09 (berkontribusi 49,55) dan 50% nilai EKA sebesar 97,86 (berkontribusi 48,93).

**Tabel 3.134** Rincian Nilai IKPA tahun 2025 dari BBPOM di **Mataram**

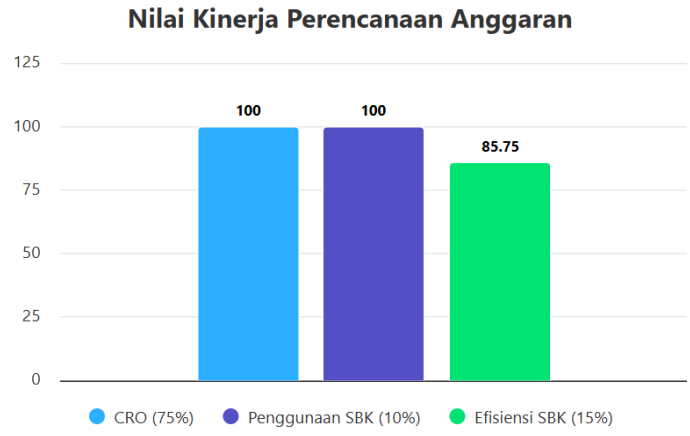
| Uraian Satker | Keterangan | Kualitas Perencanaan Anggaran | | Kualitas Pelaksanaan Anggaran | | | | Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran | Nilai Total | Konversi Bobot | Dispensasi SPM (Pengurang) | Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Revisi DIPA | Deviasi Halaman III DIPA | Penyerapan Anggaran | Belanja Kontraktual | Penyelesaian Tagihan | Pengelolaan UP dan TUP | Capaian Output | | | | |
| BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MATARAM | Nilai | 100.00 | 94.08 | 99.90 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.09 | 100% | 0.00 | 99.09 |
| | Bobot | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 25 | | | | |
| | Nilai Akhir | 10.00 | 14.11 | 19.98 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 25.00 | | | | |
| | Nilai Aspek | 97.04 | | 99.98 | | | | 100.00 | | | | |




**Gambar 3.34** Rincian Nilai IKPA Tahun 2025

**Tabel 3.135** Rincian Nilai EKA tahun 2025 dari BBPOM di Mataram

| Satuan Kerja | NK Perencanaan Anggaran | Efektivitas | Efisiensi | |
|---|---|---|---|---|
| | | Capaian RO | Penggunaan SBK | Efisiensi SBK |
| BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MATARAM | 97,86 | 100,00 | 100,00 | 85,75 |




**Gambar 3.35** Rincian Nilai EKA Tahun 2025

### b. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN 2024

Realisasi Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena adanya perubahan manual indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK)

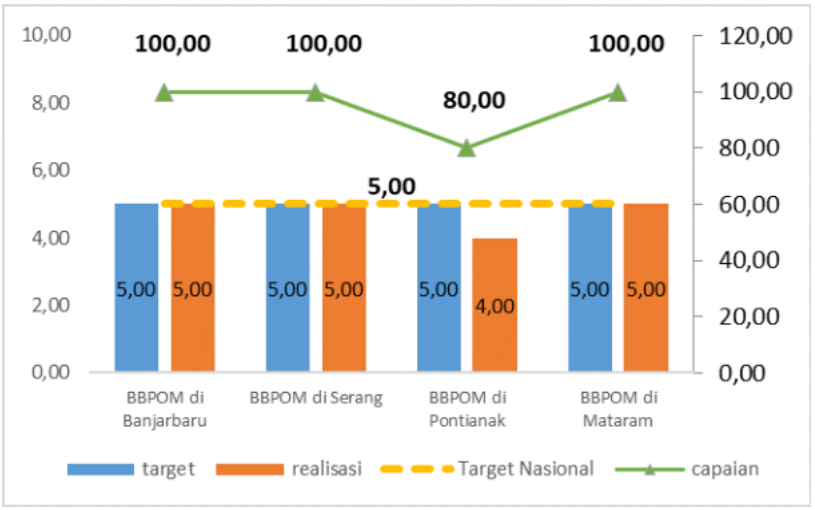
### c. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (2029)

**Tabel 3.136** Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029)

| Indikator | Realisasi 2025 | Target Renstra (2029) | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM | 5.00 | 5.00 | 100.00% | Tercapai |

Realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) UPT BPOM pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang optimal dengan capaian skor konversi sebesar **5** yang merupakan level konversi nilai tertinggi. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra yang ditetapkan pada angka **5**, maka indikator ini telah berhasil tercapai sepenuhnya atau sebesar **100%**.

### d. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN BALAI BESAR POM KLASTER 5




**Gambar 3.36** Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster

Pada tahun 2025, target indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM pada seluruh BBPOM dalam satu klaster ditetapkan sama, yaitu sebesar 5.

Berdasarkan capaian kinerja, BBPOM di Mataram, BBPOM di Serang, dan BBPOM di Banjarbaru ketiganya mencapai target masing-masing dan target nasional dengan realisasi sebesar 5, sedangkan BBPOM di Pontianak tidak mencapai target dengan realisasi 4.

### e. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Realisasi NKA BBPOM di Mataram tahun 2025 dapat mencapai target disebabkan karena realisasi nilai IKPA maupun EKA yang optimal. Optimalnya nilai IKPA antara lain disumbang oleh nilai revisi DIPA, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP serta nilai capaian output. Kelima aspek penilaian tersebut nilainya telah maksimal dengan capaian nilai 100%. Nilai EKA yang cukup optimal merupakan kontribusi dari nilai capaian output dan efisiensi penggunaan SBK dengan capaian nilai keduanya 100%. Selain itu efisiensi SBK juga memberikan kontribusi yang cukup tinggi dengan nilai 85,75 hal ini disebabkan karena capaian output perkara merupakan rincian output SBKK melebihi target. Pencapaian tersebut merupakan output dari komitmen yang tinggi dari pimpinan, ketua tim dan seluruh pengelola kegiatan dan anggaran sehingga perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta monitoring dan evaluasinya dapat terlaksana dengan baik.

Faktor keberhasilan hingga tahun 2025 didorong oleh penguatan tata kelola melalui monitoring kinerja bulanan dan akurasi pelaporan output pada aplikasi OMSPAN. Langkah strategis lainnya meliputi percepatan pengadaan melalui kontrak pra-DIPA, revisi anggaran yang responsif, serta

optimalisasi relaksasi indikator deviasi Halaman III DIPA. Selain itu, pengelolaan UP/TUP yang disiplin dan tepat waktu, peningkatan kompetensi SDM akuntabilitas, serta koordinasi intensif dengan Kanwil DJPb dan KPPN Mataram terkait langkah-langkah akhir tahun menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan akurasi penyerapan anggaran secara akuntabel.

### f. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

**Tabel 3.137** Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM Tahun 2025

| Indikator | Kendala/Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM | Sering terjadi ketidaksesuaian antara Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan dengan realisasi belanja aktual di lapangan, terutama pada kegiatan yang jadwalnya sangat bergantung pada pihak eksternal | Meningkatkan konsistensi antara perencanaan (Plan of Action), pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada halaman III DIPA. | Meningkatkan konsistensi antara perencanaan (Plan of Action), pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada halaman III DIPA. | TW 1 Tahun 2026 | T | - | - |

### g. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Beberapa upaya yang sudah dilakukan dalam rangka pencapaian nilai kerja anggaran diantaranya:

1. Melakukan monitoring dan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA, secara berkala (tiap triwulan) sesuai jadwal yang ditetapkan;
2. Pengawalan pelaporan data kinerja dan anggaran (capaian output) secara tepat waktu;

3. Menyusun dan merealisasikan anggaran berdasarkan POA dan RPD sesuai dengan target triwulan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan;
4. Percepatan pertanggungjawaban anggaran untuk kegiatan yang telah terlaksana dan pembayaran kontrak yang telah selesai pekerjaannya;
5. Melaksanakan proses GUP minimal sebesar 50% paling sedikit 2 kali setiap bulan untuk bulan Februari- November;
6. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara berkala setiap bulan untuk memastikan bahwa target seluruh RO dapat tercapai.
7. Penggunaan inovasi aplikasi Siproval dan E-Sapa

### h. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**Tabel 3.138** Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

| Indikator | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T | R | % | T | R | % | | | |
| Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 2,130,143,500 | 2,128,021,339 | 99.90 | **1.00** | **0.00** | 100 % (Efisien) |

Indikator Nilai Kinerja Anggaran menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya yang sangat baik. Dengan pagu anggaran sebesar Rp 2,130,143,500 dan realisasi sebesar Rp 2,128,021,339, dengan capaian kinerja 99,90%. Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sepenuhnya efektif dan berdampak untuk pencapaian indikator maupun sasaran

Hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,00 dan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0,00 menunjukkan bahwa pencapaian output yang melebihi target. Secara keseluruhan, capaian kinerja dinilai **100% (Efisien)**, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian sasaran organisasi.

## 8.4 INDEKS MANAJEMEN RISIKO UPT BPOM

Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.

Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

**Tabel 3.139** Tabel Kategori Tingkat Maturitas

| Kategori Tingkat Maturitas | Karakteristik |
|---|---|
| *Risk Naive* | Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan |
| *Risk Aware* | Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat |
| *Risk Defined* | Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi. |
| *Risk Managed* | Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan |
| *Risk Enabled* | Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan |

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

**Cara Perhitungan dan Formula**

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

**Tabel 3.140** Tingkat Maturitas

| Menuju Tingkat Maturitas | Skor Total | Nilai Maturitas | Tingkat Maturitas |
|---|---|---|---|
| *Risk Naive* | 0-16 | 1 | - |
| *Risk Aware* | 17-32 | 2 | Peningkatan *Risk Naive* menuju *Risk Aware* |
| *Risk Defined* | 33-48 | 3 | Peningkatan *Risk Aware* menuju *Risk Defined* |

| Menuju Tingkat Maturitas | Skor Total | Nilai Maturitas | Tingkat Maturitas |
|---|---|---|---|
| *Risk Managed* | 49-64 | 4 | Peningkatan *Risk Defined* menuju *Risk Managed* |
| *Risk Enabled* | 65-80 | 5 | Peningkatan *Risk Managed* menuju *Risk Enabled* |

Cara perhitungan level maturitas

Skor Maturitas = Skor Total : 16

Keterangan:

a. Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
b. Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

### a. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

**Tabel 3.141** Target, realisasi dan %capaian Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

| Sasaran kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | 3,05 | 2,96 | 97,38% | Baik |

Pada Tahun 2025, target Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM Mataram ditetapkan sebesar 3,05, yang berada pada kategori transisi dari *Risk Aware* menuju *Risk Defined*. Sementara itu, realisasi yang dicapai adalah sebesar 2,97, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 97,38% dari target yang ditetapkan dengan kriteria “Baik”.

Selisih sebesar 0,08 poin dari target mengindikasikan bahwa secara umum implementasi manajemen risiko telah berjalan dengan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, *diperlukan* langkah perbaikan berkelanjutan, antara lain melalui peningkatan kualitas identifikasi dan mitigasi risiko, penguatan koordinasi lintas fungsi, serta peningkatan monitoring dan evaluasi secara berkala.

### b. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN 2024

Realisasi Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator kinerja baru di periode renstra 2025-2029.

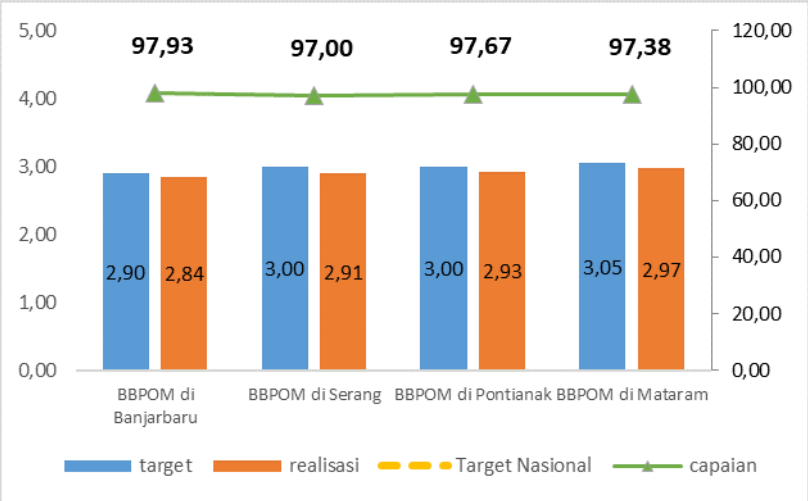
### c. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (2029)

**Tabel 3.142** Perbandingan Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM BPOM Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (2029)

| Indikator | Realisasi 2025 | Target Renstra (2029) | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | 2.97 | 3.25 | 91.38% | Akan Tercapai |

Berdasarkan realisasi indikator Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM tahun 2025 sebesar 2,97, maka target akhir renstra tercapai sebesar 91,38% dengan kategori akan tercapai.

### d. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN BALAI BESAR POM KLASTER 5




**Gambar 3.37** Perbandingan Target, Realisasi dan %Capaian Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM Tahun 2025 dengan BBPOM lain dalam Satu Klaster

Berdasarkan grafik di atas, seluruh BBPOM dalam satu klaster tidak mencapai target internal dan target nasional yang ditetapkan. Realisasi Nilai Manajemen Risiko BBPOM di Mataram (2,97) lebih tinggi dibandingkan BBPOM di Banjarbaru (2,84), BBPOM di serang (2,91), dan BBPOM di Pontianak (2,93).

### e. ANALISIS PENYEBAB KEGAGALAN ATAU PENURUNAN KINERJA

Belum tercapainya target Indeks Manajemen Risiko Tahun 2025 (realisasi 2,97 dari target 3,05) disebabkan oleh beberapa aspek yang masih memerlukan penguatan dalam implementasi manajemen risiko di unit kerja.

Pertama, meskipun unit kerja telah mengidentifikasi isu internal dan eksternal, belum seluruh isu strategis dijadikan dasar dalam proses identifikasi dan reviu risiko, sehingga terdapat potensi risiko yang belum terpetakan secara komprehensif.

Kedua, walaupun selera risiko telah ditetapkan dan proses penilaian risiko telah dilaksanakan, masih ditemukan kelemahan dalam penyusunan dokumen manajemen risiko. Beberapa peristiwa risiko (risk event) belum dirumuskan secara spesifik dan masih menggunakan narasi umum, sehingga mempengaruhi ketepatan analisis dan kualitas pengukuran risiko.

Ketiga, penetapan kriteria kemungkinan dan dampak telah ditetapkan oleh pimpinan, namun belum seluruh risiko didukung dengan kertas kerja justifikasi penentuan skor risiko. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya akuntabilitas dan ketelusuran dalam proses penilaian risiko.

Keempat, rencana tindak pengendalian (RTP) untuk risiko residual dengan tingkat risiko tinggi memang telah disusun, namun pada beberapa kasus, tindakan mitigasi yang dirumuskan masih serupa dengan pengendalian yang telah berjalan (existing control). Hal ini menyebabkan efektivitas penurunan tingkat risiko residual belum maksimal.

Kelima, belum dilakukan eskalasi risiko kepada level yang lebih tinggi terhadap risiko yang melampaui selera risiko atau yang belum dapat dikendalikan hingga tingkat yang dapat diterima, baik melalui aplikasi SAPA APIP maupun pelaporan formal. Ketiadaan mekanisme eskalasi ini menunjukkan bahwa tata kelola risiko belum sepenuhnya terintegrasi secara vertikal.

Keenam, walaupun proses identifikasi risiko telah melibatkan seluruh fungsi, belum terdapat dokumentasi yang memadai atas peran aktif dan masukan Ketua Tim dalam implementasi manajemen risiko. Hal ini menunjukkan bahwa aspek penguatan komitmen dan pengawasan internal masih perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko telah berjalan namun belum sepenuhnya konsisten, terdokumentasi secara memadai, dan terintegrasi secara optimal. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan capaian indeks maturitas belum mencapai target yang ditetapkan, meskipun secara umum telah menunjukkan kemajuan yang signifikan.

### f. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

**Tabel 3.143** Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM Tahun 2025

| Indikator | Kendala/ Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | Beberapa isu internal dan eksternal termasuk iprogram/ndikator baru belum dilakukan identifikasi risiko | Update isu internal dan eksternal serta IKSK/program baru serta risikonya diidentifikasi | Melakukan identifikasi risiko Seluruh isu internal dan eksternal serta IKSK/program baru | TW 1 Tahun 2026 | T | - | - |
| | Pedoman penentuan level dan dampak risiko belum spesifik untuk tiap2 fungsi/kegiatan | Update Pedoman penentuan level dan dampak risiko | Melakukan Penyempurnaan Manajemen risiko khususnya Pedoman penentuan level dan dampak risiko | TW 1 Tahun 2026 | T | - | - |

### g. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Beberapa program dan kegiatan telah berkontribusi positif terhadap capaian Indeks Manajemen Risiko Tahun 2025, antara lain:

1. Pelaksanaan Identifikasi dan Penilaian Risiko Secara Berkala yang melibatkan seluruh fungsi dilakukan 2 kali dalam setahun.
2. Penetapan dan komunikasi selera risiko oleh pimpinan.
3. Penyusunan dan monitoring Rencana Tindak Pengendalian (RTP) terhadap risiko residual dengan level tinggi (≥16) menunjukkan adanya komitmen dalam mengurangi tingkat risiko ke level yang dapat diterima.
4. Penilaian level risiko telah ditetapkan oleh pimpinan unit kerja sehingga proses skoring memiliki acuan yang seragam.
5. Sosialisasi manuritas manajemen risiko pada seluruh pegawai
6. Peningkatan Kompetensi manajemen risiko seluruh pegawai melalui aplikasi ideas.

## h. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**Tabel 3.144** Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Indikator Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

| Indikator | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T | R | % | T | R | % | | | |
| Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | 3.05 | 2.97 | 97.34 | 2,130,143,500 | 2,128,021,339 | 99.90 | **0.97** | **-0.03** | 75 % (Tidak Efisien) |

Berdasarkan hasil analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, indikator Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM menunjukkan capaian yang dikategorikan "Tidak Efisien" dengan tingkat efisiensi hanya sebesar 75%. Hal ini didasarkan pada realisasi output sebesar 2,97 dari target 3,05 atau setara dengan 97,34%. Di sisi lain, penyerapan input anggaran sangat tinggi, yakni mencapai Rp2,128,021,339 dari total pagu Rp2,130,143,500 atau sebesar 99,90%. Kesenjangan antara penyerapan anggaran yang hampir maksimal dengan capaian output yang belum memenuhi target menghasilkan Indeks Efisiensi (IE) sebesar 0,97 dan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar -0,03. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penggunaan sumber daya anggaran belum berkorelasi optimal terhadap peningkatan nilai akuntabilitas kinerja organisasi.




*Halaman ini sengaja dikosongkan*

### 3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

**Tabel 3.145** Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil evaluasi Sebelumnya

| No | Indikator | Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya | Rekomendasi TW Sebelumnya | Rencana Tindak Lanjut TW sebelumnya | Status | Progres TL Rekomendasi | Timeline | Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) | Kode Risiko | Peristiwa Resiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Jumlah sampel obat tradisional kategori kasus sulit diprediksi, sampai saat ini baru terealisasi 4 dari 17 sampel yang ditargetkan dan di prediksi tidak akan tercapai sesuai target hingga akhir tahun | melakukan usulan perubahan perencanaan sampling sampel obat tradisional dengan mengalihkan 13 sisa sampel kategori kasus ke kategori sampel yang lain | Bersurat ke Ke Deputi II untuk mengajukan perubahan perencanaan sampling | Selesai | - | - | Y | S-15 | Tidak tercapainya target pemeriksaan sampel OMKA sesuai standar |

| No | Indikator | Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya | Rekomendasi TW Sebelumnya | Rencana Tindak Lanjut TW sebelumnya | Status | Progres TL Rekomendasi | Timeline | Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) | Kode Risiko | Peristiwa Resiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Proses perbaikan ICP sampai dengan pertengahan Juni sehingga terjadi antrian sampel dari bulan sebelumnya yang belum selesai diuji khususnya paramater logam berat | Perbaikan instrumen ICP segera diselesaikan dan pengujian menggunakan metoda analisa alternatif | Perbaikan instrumen ICP segera diselesaikan dan pengujian menggunakan metoda analisa alternatif | Selesai | - | - | Y | O-25 | Alat laboratorium tidak dapat diperbaiki oleh tim I-CONIC |

| No | Indikator | Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya | Rekomendasi TW Sebelumnya | Rencana Tindak Lanjut TW sebelumnya | Status | Progres TL Rekomendasi | Timeline | Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) | Kode Risiko | Peristiwa Resiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capaian sampling belum sesuai renlak dimana target sampel UMKM belum dapat disampling karena kerusakan ICP MS, sampling UMKM akan dijadwalkan diselesaikan pada bulan November (karena perbaikan ICP dijadwalkan selesai pada pertengahan Oktober) | Penyesuaian renlak sampling sampel UMKM | Pelaksanaan sampling sampel UMKM akan dijadwalkan setelah perbaikan ICPMS (November) | Selesai | - | - | T | - | - |

| No | Indikator | Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya | Rekomendasi TW Sebelumnya | Rencana Tindak Lanjut TW sebelumnya | Status | Progres TL Rekomendasi | Timeline | Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) | Kode Risiko | Peristiwa Resiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT | Sampel yang dikirim oleh Dinas Kesehatan jumlahnya tidak mencukupi untuk menguji sesuai dengan MA | Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan atau SPPG untuk menyediakan jumlah atau volume sampel yang cukup untuk pengujian secara kimia maupun mikrobiologi agar penyebab KLB dapat diketahui | Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan atau SPPG untuk menyediakan jumlah atau volume sampel yang cukup untuk pengujian secara kimia maupun mikrobiologi agar penyebab KLB dapat diketahui | Selesai | - | - | Y | SDM-19 | Parameter Uji tidak seluruhnya dilakukan pengujian sesuai standar |

| No | Indikator | Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya | Rekomendasi TW Sebelumnya | Rencana Tindak Lanjut TW sebelumnya | Status | Progres TL Rekomendasi | Timeline | Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) | Kode Risiko | Peristiwa Resiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Meningkatnya jumlah sampel KLB yang berasal dari Makanan MBG sehingga berdampak terhadap jumlah media atau kit uji konfirmasi untuk sampel rutin | Mengusulkan tambahan anggaran untuk pengadaan media atau kit ke PPK/KPA | Mengusulkan tambahan anggaran untuk pengadaan media atau kit ke PPK/KPA | Selesai | - | - | T | - | - |
| 5. | Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| No | Indikator | Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya | Rekomendasi TW Sebelumnya | Rencana Tindak Lanjut TW sebelumnya | Status | Progres TL Rekomendasi | Timeline | Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) | Kode Risiko | Peristiwa Resiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | koordinasi dengan lintas sektor berjalan cukup baik | Melakukan koordinasi secara rutin dengan lintas sektor baik dalam rangka DAK maupun pengawasan Obat dan Makanan secara daring maupun luring sehingga pengawasan dapat berjalan efektif. | Melakukan koordinasi secara rutin dengan lintas sektor baik dalam rangka DAK maupun pengawasan Obat dan Makanan secara daring maupun luring sehingga pengawasan dapat berjalan efektif. | Selesai | - | - | T | - | - |

| No | Indikator | Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya | Rekomendasi TW Sebelumnya | Rencana Tindak Lanjut TW sebelumnya | Status | Progres TL Rekomendasi | Timeline | Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) | Kode Risiko | Peristiwa Resiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | koordinasi dengan lintas sektor berjalan cukup baik | Melakukan komunikasi yang intensif baik secara formal maupun informal dalam pembahasan feedback tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana Obat dan Makanan. | Melakukan komunikasi yang intensif baik secara formal maupun informal dalam pembahasan feedback tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana Obat dan Makanan. | Selesai | - | - | T | - | - |

| No | Indikator | Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya | Rekomendasi TW Sebelumnya | Rencana Tindak Lanjut TW sebelumnya | Status | Progres TL Rekomendasi | Timeline | Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) | Kode Risiko | Peristiwa Resiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Terdapat tindak lanjut di bulan berjalan yang masih dalam timeline pembuatan CAPA, sehingga belum seluruhnya ditindaklanjuti oleh pelaku usaha | Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, untuk sarana yang belum mengirimkan CAPA, petugas bersangkutan telah membuat surat kembali untuk dapat mengirimkan CAPA serta membuka konsultasi secara online melalui nomor WA khusus konsultasi pemeriksaan | Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, untuk sarana yang belum mengirimkan CAPA, petugas bersangkutan telah membuat surat kembali untuk dapat mengirimkan CAPA serta membuka konsultasi secara online melalui nomor WA khusus konsultasi pemeriksaan | Selesai | - | - | Y | S-17 | Pelaku usaha belum seluruhnya mengirimkan Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan (CAPA) terkait surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana |

| No | Indikator | Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya | Rekomendasi TW Sebelumnya | Rencana Tindak Lanjut TW sebelumnya | Status | Progres TL Rekomendasi | Timeline | Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) | Kode Risiko | Peristiwa Resiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | produksi/distribusi. |

| No | Indikator | Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya | Rekomendasi TW Sebelumnya | Rencana Tindak Lanjut TW sebelumnya | Status | Progres TL Rekomendasi | Timeline | Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) | Kode Risiko | Peristiwa Resiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Terdapat sarana yang notabene UMKM sudah habis masa berlaku produknya namun pelaku usaha tidak melakukan perpanjangan dengan berbagai alasan dan kendala sehingga sarana tidak memenuhi syarat | koordinasi dengan fungsi sertifikasi untuk di lakukan pendampingan perpanjangan izin edar produk | Melakukan koordinasi dengan fungsi sertifikasi untuk di lakukan pendampingan perpanjangan izin edar produk | Selesai | - | - | T | - | - |

| No | Indikator | Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya | Rekomendasi TW Sebelumnya | Rencana Tindak Lanjut TW sebelumnya | Status | Progres TL Rekomendasi | Timeline | Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) | Kode Risiko | Peristiwa Resiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Terdapat sarana yang tidak melakukan produksi sementara sedangkan izin edar masih lama berlakunya antara lai disebabkan karena keterbatasan bahan baku, kehabisan modal sehingga sarana tidak dapat diperiksa | Perlu dilakukan data ulang sarana | Melakukan data ulang sarana | Selesai | - | - | T | - | - |

| No | Indikator | Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya | Rekomendasi TW Sebelumnya | Rencana Tindak Lanjut TW sebelumnya | Status | Progres TL Rekomendasi | Timeline | Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) | Kode Risiko | Peristiwa Resiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | berdasarkan hasil monev terdapat petugs yang salah dalam menentukan tindak lanjut sehingga mempengaruhi hasil perhitungan capaian | Peningkatan pengetahuan petugas tentang pedoman tindak lanjut | melakukan sosialisasi kepada petugas terkait pedoman tindak lanjut | Selesai | - | - | Y | SDM-09 | Kurangnya kompetensi petugas pemeriksa |

| No | Indikator | Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya | Rekomendasi TW Sebelumnya | Rencana Tindak Lanjut TW sebelumnya | Status | Progres TL Rekomendasi | Timeline | Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) | Kode Risiko | Peristiwa Resiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | Petugas sering menemukan kesulitan saat melakukan pengecekan iklan yang disetujui di Asrot karena belum tercantum pada Asrot, sehingga dari hasil evaluasi pusat sampai dengan bulan Agustus 2025 kesesuaian >90% | Meningkatkan komunikasi secara personal dengan evaluator pusat | Meningkatkan komunikasi secara personal dengan evaluator pusat | Selesai | - | - | T | - | - |

| No | Indikator | Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya | Rekomendasi TW Sebelumnya | Rencana Tindak Lanjut TW sebelumnya | Status | Progres TL Rekomendasi | Timeline | Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) | Kode Risiko | Peristiwa Resiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar | Keterbatasan anggaran sampling penandaan produk tembakau dan rokok elektronik, karena di perencanaan awal hanya untuk pembelian produk tembakau | Melakukan kontrol pembelian bahan pengawasan sehingga tidak melebihi anggaran | Melakukan kontrol pembelian bahan pengawasan sehingga tidak melebihi anggaran | Selesai | - | - | - | - | - |
| 13. | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| No | Indikator | Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya | Rekomendasi TW Sebelumnya | Rencana Tindak Lanjut TW sebelumnya | Status | Progres TL Rekomendasi | Timeline | Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) | Kode Risiko | Peristiwa Resiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | Beberapa sampel tidak tersedia di pasaran | Koordinasi dengan Inspeksi untuk dialokasikan pembelian Via Distributor untuk item obat yang tidak tersedia dipasaran. | Melakukan koordinasi dengan Inspeksi untuk dialokasikan pembelian Via Distributor untuk item obat yang tidak tersedia dipasaran. | Selesai | - | - | T | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Baku pembanding tertentu juga belum tersedia di infalabs dan UPT terkendala dengan anggaran untuk pembelian mandiri. Selain baku pembanding juga suku cadang alat belum tersedia | Koordinasi dengan distributor baku pembanding untuk pengadaan baku yang tidak tersedia di Infalabs (ethyl | Melakukan koordinasi dengan distributor baku pembanding untuk pengadaan baku yang tidak tersedia di Infalabs (ethylparahydroxy benzoate, N-phenylcarbazole, tetrabutil hidroperoksida, tetrabutil amonium bisulfat, dibucaine hydro chloride) dan menyediakan anggaran untuk pembelian baku pembanding maupun suku cadang | Selesai | - | - | T | - | - |

| No | Indikator | Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya | Rekomendasi TW Sebelumnya | Rencana Tindak Lanjut TW sebelumnya | Status | Progres TL Rekomendasi | Timeline | Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) | Kode Risiko | Peristiwa Resiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| No | Indikator | Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya | Rekomendasi TW Sebelumnya | Rencana Tindak Lanjut TW sebelumnya | Status | Progres TL Rekomendasi | Timeline | Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) | Kode Risiko | Peristiwa Resiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | koordinasi dengan pemerintah daerah belum optimal | Penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk dengan mengusulkan agar sekolah yang menjadi lokus intervensi ditetapkan sebagai percontohan melalui SK Kepala Daerah. Selain itu, keterlibatan Dinas Pendidikan, Kanwil Kementerian Agama dan Dinas Kesehatan dalam berbagai kegiatan juga perlu ditingkatkan guna memastikan program berjalan lebih optimal | Membuat surat ke Pemda dan menyiapkan draft SK | Belum Selesai | Masih dalam bentuk draft SK | TW 1 2026 | T | - | - |

| No | Indikator | Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya | Rekomendasi TW Sebelumnya | Rencana Tindak Lanjut TW sebelumnya | Status | Progres TL Rekomendasi | Timeline | Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) | Kode Risiko | Peristiwa Resiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Setelah intervensi selesai, beberapa sekolah mengalami penurunan aktivitas kader keamanan pangan karena adanya mutasi guru pembina atau pergantian pengelola kantin. | Untuk menjaga keberlanjutan aktivitas kader keamanan pangan pasca-intervensi, BBPOM di Mataram melaksanakan penguatan ulang secara daring atau luring pada sekolah yang mengalami pergantian kader, disertai pembekalan dengan materi kader keamanan pangan. | Menyelenggarakan refreshment kader sekolah secara luring atau daring untuk membentuk Kader Keamanan Pangan Sekolah yang kompeten dalam memastikan keberlanjutan implementasi Program PJAS Aman. | Selesai | - | - | T | - | - |

| No | Indikator | Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya | Rekomendasi TW Sebelumnya | Rencana Tindak Lanjut TW sebelumnya | Status | Progres TL Rekomendasi | Timeline | Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) | Kode Risiko | Peristiwa Resiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | Jumlah desa pangan aman | Tidak semua pemerintah desa memiliki pemahaman dan prioritas yang sama terhadap program Desa Pangan Aman, sehingga integrasi ke dalam pedoman penggunaan Dana Desa belum berjalan optimal. | Menyelaraskan kegiatan Desa Pangan Aman secara penuh dengan program nasional percepatan penurunan stunting di daerah lokus dan program strategis pemerintah lainnya, agar mendapat dukungan prioritas dari pemerintah daerah. | Melaksanakan asistensi kepada pemerintah desa dan membentuk serta memberikan pelatihan bagi kader desa di luar tahapan desa pangan aman, diintegrasikan dengan kegiatan yang berjalan di Kelurahan | - | - | - | T | - | - |

| No | Indikator | Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya | Rekomendasi TW Sebelumnya | Rencana Tindak Lanjut TW sebelumnya | Status | Progres TL Rekomendasi | Timeline | Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) | Kode Risiko | Peristiwa Resiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | program pasar pangan aman belum direplikasi secara mandiri oleh Pemda | Mendorong pemerintah daerah melakukan replikasi kegiatan ke pasar lain yang belum mendapat intervensi program dari BBPOM di Mataram melalui SK Kepala Daerah beserta alokasi anggarannya untuk pengadaan rapid test kit, dll | Membuat surat ke Pemda dan menyiapkan draft SK | Belum Selesai | Masih dalam bentuk draft SK | TW 1 2026 | T | - | - |

| No | Indikator | Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya | Rekomendasi TW Sebelumnya | Rencana Tindak Lanjut TW sebelumnya | Status | Progres TL Rekomendasi | Timeline | Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) | Kode Risiko | Peristiwa Resiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Salah satu indikator utama program adalah replikasi oleh pemerintah daerah, namun belum seluruh daerah melakukan hal tersebut. | Salah satu indikator utama program adalah replikasi oleh pemerintah daerah, namun belum seluruh daerah melakukan hal tersebut. | Membuat surat ke Pemda dan menyiapkan draft SK | Belum Selesai | Masih dalam bentuk draft SK | TW 1 2026 | T | - | - |
| 21. | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau | Implementasi inovasi Gemilang Pro-UMKM belum dilakukan secara digital | Memperkuat inovasi Gemilang Pro-UMKM dengan digitalisasi sehingga pemantauan pelaksanaan pendampingan menjadi lebih mudah | Merencanakan pengembangan subsite | Belum Selesai | Identifikasi fitur yang akan dimasukkan dalam subsite telah diidentifikasi. | TW 2 2026 | T | - | - |

| No | Indikator | Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya | Rekomendasi TW Sebelumnya | Rencana Tindak Lanjut TW sebelumnya | Status | Progres TL Rekomendasi | Timeline | Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) | Kode Risiko | Peristiwa Resiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IP CPPOB pangan olahan | Belum seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Lombok terbangun jejaring sinergitas dengan unsur pentahelix | Memperluas jejaring sinergitas dengan unsur pentahelix yang ada di masing-masing kabupaten/kota | Melakukan koordinasi lintas sektor dengan unsur pentahelix di Kabupaten/Kota | Belum Selesai | Koordinasi baru dilakukan ke Kabupaten Lombok Barat dan Kab Lombok Timur | TW 2 2026 | T | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target progres tahapan pendampingan dapat tercapai namun capaian jumlah UMKM yang memenuhi belum tercapai untuk seluruh komoditi. UMKM yang telah didampingi terlalu tergantung ke fasilitator dalam pengajuan permohonan sedangkan desk secara daring belum efektif untuk menyelesaikan pengajuan permohonan | Akan dilakukan desk secara luring dengan memanggil pelaku usaha ke kantor untuk monitoring progres dan tindak lanjut kendala yang dihadapi pelaku usaha | Melakukan desk dengan pelaku usaha untuk pengajuan permohonan dan evaluasi permohonan terutama untuk Pangan Olahan dimana dokumen persyaratan telah lengkap disusun | Selesai | - | - | Y | S-23 | Pelaku usaha kesulitan dalam penyusunan dokumen standar yang dipersyaratkan |

| No | Indikator | Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya | Rekomendasi TW Sebelumnya | Rencana Tindak Lanjut TW sebelumnya | Status | Progres TL Rekomendasi | Timeline | Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) | Kode Risiko | Peristiwa Resiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | Peningkatan kompetensi petugas belum seluruhnya dilakukan dan belum efektif karena masih online | Peningkatan kompetensi personel di fungsi penindakan di Mataram terutama terkait dengan cybercrime, pembentukan/ pembinaan jaringan serta kemampuan komunikasi untuk pengungkapan perkara sampai pada aktor intelektualnya | Meningkatan kompetensi petugas baik dengan mengirim petugas atau mendatangkan narasumber yang kompeten terkait Cybercrime, Tukbinjar dan komunikasi | Selesai | - | - | Y | SDM-16 | pelaksanaan Patroli siber terhadap kejahatan obat dan mkanan di media daring kurang Optimal (Penerapan Teknik investigasi kurang mutahir dibandingkan dengan kejahatan berbasis daring |

| No | Indikator | Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya | Rekomendasi TW Sebelumnya | Rencana Tindak Lanjut TW sebelumnya | Status | Progres TL Rekomendasi | Timeline | Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) | Kode Risiko | Peristiwa Resiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | dalam bidang obat dan makanan) |

| No | Indikator | Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya | Rekomendasi TW Sebelumnya | Rencana Tindak Lanjut TW sebelumnya | Status | Progres TL Rekomendasi | Timeline | Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) | Kode Risiko | Peristiwa Resiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Penggalangan kepada stakeholders yang dilakukan sangat terbatas | Penguatan penggalangan kepada stakeholders untuk mendapatkan informasi kejahatan obat dan makanan | Melakukan penggalanagan yang sifatnya luas, komprehensif dan menyasar stakeholder untuk mendpatkan informasi yang dibutuhkan dalam pengungkapan kejahatan obat dan makanan | Selesai | - | - | Y | S-27 | Stakeholder tidak berkenan digalang |

| No | Indikator | Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya | Rekomendasi TW Sebelumnya | Rencana Tindak Lanjut TW sebelumnya | Status | Progres TL Rekomendasi | Timeline | Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) | Kode Risiko | Peristiwa Resiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. | Indeks Pelayanan Publik UPT | Monev peningkatan dan pemenuhan sarana pelayanan publik sesuai standar belum dilakukan secara berkala | Melakukan monev secara berkala untuk peningkatan dan pemenuhan sarana pelayanan publik sesuai standar | Melakukan Monev peningkatan dan pemenuhan sarana pelayanan publik sesuai standar TW4 2025 | Selesai | - | - | - | - | - |

| No | Indikator | Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya | Rekomendasi TW Sebelumnya | Rencana Tindak Lanjut TW sebelumnya | Status | Progres TL Rekomendasi | Timeline | Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) | Kode Risiko | Peristiwa Resiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | rencana tindak lanjut untuk SKM secara mandiri belum dirumuskan per-bulan | Merumuskan rencana tindak lanjut untuk SKM secara mandiri (per-bulan) sebagai tahapan-tahapan pendek untuk menuju hasil utama yang ingin diperbaiki dalam jangka panjang, sehingga proses penyelesaian TL dapat selesai 100% pada bulan berikutnya | Merumuskan rencana tindak lanjut untuk SKM secara mandiri bulan Oktober-Desember 2025 | Selesai | - | - | T | - | - |

| No | Indikator | Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya | Rekomendasi TW Sebelumnya | Rencana Tindak Lanjut TW sebelumnya | Status | Progres TL Rekomendasi | Timeline | Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) | Kode Risiko | Peristiwa Resiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM | capaian komponen pengungkit dan komponen hasil belum maksimal | Meningkatkan komitmen pimpinan dan koordinasi dari setiap Pokja RB untuk mendukung peningkatan capaian komponen pengungkit dan komponen hasil secara maksimal | Melaksanakan capacity building | Selesai | - | - | T | - | - |

| No | Indikator | Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya | Rekomendasi TW Sebelumnya | Rencana Tindak Lanjut TW sebelumnya | Status | Progres TL Rekomendasi | Timeline | Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) | Kode Risiko | Peristiwa Resiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan ZI belum optimal | Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan ZI secara berkala dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim Penilai Internal | Monev TW 4 | Selesai | - | - | T | | |
| 26. | Nilai AKIP UPT BPOM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| No | Indikator | Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya | Rekomendasi TW Sebelumnya | Rencana Tindak Lanjut TW sebelumnya | Status | Progres TL Rekomendasi | Timeline | Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) | Kode Risiko | Peristiwa Resiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. | Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM | Nilai aspek efisiensi EKA yaitu efisiensi SBKK/SBKU: 0 | Nilai EKA Meningkatkan aspek nilai efisiensi yaitu efisiensi anggaran khususnya Rincian Output (RO) SBKK tetap dalam rentang 100-120% | Melakukan Monev untuk menjaga Nilai aspek efisiensi EKA yaitu efisiensi SBKK/SBKU dalam rentang 100-120% | Selesai | - | - | T | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nilai IKPA 99,81 | Nilai IKPA<br>- Meningkatkan konsistensi antara perencanaan (Plan of Action), pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada halaman III DIPA.<br>- Meningkatkan monitoring pelaksanaan Ganti Uang Persediaan (GUP) sehingga GUP dilaksanakan minimal 1 bulan (30 hari) dihitung dari GUP terakhir.<br>- Menjaga penyerapan anggaran tiap jenis belanja tiap triwulan | Melakukan Monev bulanan untuk memastikan agar seluruh parameter pendukung Nilai IKPA sd akhir 2025 diperoleh maksimal | Selesai | - | - | T | - | - |

| No | Indikator | Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya | Rekomendasi TW Sebelumnya | Rencana Tindak Lanjut TW sebelumnya | Status | Progres TL Rekomendasi | Timeline | Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) | Kode Risiko | Peristiwa Resiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. | Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

### 3.3. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Laporan Kinerja tahun 2024 dan Laporan Kinerja Interim Triwulan I, II dan III tahun 2025 telah dijadikan acuan untuk perbaikan secara terus menerus guna peningkatan kinerja baik melalui informasi kinerja maupun rekomendasi tindak lanjutnya antara lain:

1. Perbaikan pada dokumen perencanaan melalui pertimbangan atau reviu pencapaian kinerja selanjutnya agar tercapai secara optimal dan realistis sesuai situasi kondisi yang berkembang. Hal ini ditindaklanjuti dengan penetapan target kinerja yang lebih baik melalui proses usulan revisi atas target beberapa indikator kinerja BBPOM di Mataram antara lain telah dilakukan reviu dan revisi target kinerja pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) bulan Juni untuk indikator Indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman, Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan, Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar, dan Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan

2. Revisi Perjanjian Kinerja termasuk revisi RAPK kedua pada bulan Agustus tahun 2025 karana adanya penambahan indikator kinerja baru, yaitu Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar, Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT, dan Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman, serta penyesuaian target beberapa IKSK yang capaiannya telah melebihi 110% berdasarkan data Monev Triwulan 2 Tahun 2025;

3. Telah dilakukan tindak lanjut rekomendasi pada Laporan Kinerja Tahun 2024 dan Laporan Kinerja interim TW 1, 2 dan 3 Tahun 2025 sehingga terjadi peningkatan kinerja di akhir tahun 2025.

4. Pemanfaatan informasi kinerja juga digunakan untuk melakukan penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mendukung pencapaian target melalui revisi rencana pelaksanaan kegiatan dan revisi anggaran baik revisi DIPA maupun POK sampai akhir tahun 2025 untuk meningkatkan efektifitas dan peningkatan kinerja serta efisiensi penggunaan anggaran.

### 3.4. Realisasi anggaran

BBPOM di Mataram pada Tahun Anggaran 2025 memperoleh anggaran sebesar Rp 20.815.994.000 sesuai DIPA awal, yang didanai melalui APBN dan tercantum dalam SP DIPA-063.01.2.432960/2025 tanggal 02 Desember 2024.

Sehubungan dengan arahan Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024 tentang efisiensi belanja Perjalanan Dinas dan Non Quick Win Tahun 2025, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan telah memblokir anggaran melalui sistem pada aplikasi SAKTI.

Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Utama BPOM RI Nomor : B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 04 Februari 2025 hal Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025, selanjutnya BBPOM di Mataram melakukan revisi pemblokiran mandiri sehingga total anggaran yang dapat dimanfaatkan sebesar Rp 14.236.747.000,00 (68,39%) dengan rincian belanja pegawai Rp 5.987.925.000,00 (100%), belanja barang Rp 4.529.822.000,00 (41,72%) serta belanja modal Rp 3.719.000.000,00 (93,69%).

Pada Triwulan III Tahun 2025 menindaklanjuti surat Sekretaris Utama Nomor TKU.02.03.2.04.25.238 tentang Pencadangan Anggaran Untuk Pemenuhan Belanja Pegawai TA 2025 dan berdasarkan hasil penyerapan realisasi anggaran Semester I, dilakukan Revisi Optimalisasi Anggaran antar satker sehingga total Pagu BBPOM di Mataram menjadi sebesar Rp 20.670.330.000 dengan rincian untuk Belanja Pegawai Rp 5.677.601.000, Belanja Barang sebesar Rp 11.100.245.000 dan Belanja Modal sebesar Rp 3.892.484.000. Namun dengan adanya blokir anggaran sehingga total pagu yang bisa digunakan sebesar Rp 17.075.617.000.

Pada Triwulan IV Tahun 2025, telah dilakukan revisi berupa pembukaan seluruh blokir anggaran pada Rincian Output (RO) BAH.001 terkait Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT. Melalui revisi ini, alokasi anggaran yang dapat dimanfaatkan semula sebesar Rp24.030.000,00 meningkat menjadi Rp126.033.000,00 sesuai dengan pagu yang ditetapkan, sehingga total pagu yang bisa digunakan pada Tahun 2025 sebesar Rp 17.177.620.000.

**Tabel. 3.146 Realisasi anggaran berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2025**

| NO | JENIS BELANJA | PAGU DIPA (Rp) | PAGU Setelah blokir (Rp) | REALISASI (Rp) | Sisa anggaran (Rp) | %REALISASI Terhadap Pagu Dipa (Rp) | %REALISASI Terhadap Pagu Setelah Blokir (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BELANJA PEGAWAI | 5.677.601.000 | 5.677.601.000 | 5.669.945.119 | 7.655.881 | 99,87% | 99,87% |
| 2. | BELANJA BARANG | 11.100.245.000 | 7.858.212.000 | 7.856.868.253 | 1.343.747 | 70,78% | 99,98% |
| 3. | BELANJA MODAL | 3.892.484.000 | 3.641.807.000 | 3.640.898.998 | 908.002 | 93,54% | 99,98% |
| **TOTAL** | | **20.670.330.000** | **17.177.620.000** | **17.167.712.370** | **9.907.630** | **83,05%** | **99,94%** |

Pengelolaan anggaran BBPOM di Mataram senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Keberhasilan penyerapan anggaran ini tidak terlepas dari komitmen kuat pimpinan, pengelola anggaran, penanggung jawab kegiatan, serta seluruh pegawai BBPOM di Mataram untuk melaksanakan setiap program secara tepat waktu. Hal ini didukung oleh strategi identifikasi dini terhadap kegiatan yang berpotensi tidak terlaksana untuk segera direvisi ke kegiatan produktif lainnya. Selain itu, pemanfaatan evaluasi bulanan terhadap capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), termasuk masukan dari pihak eksternal seperti Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB, menjadi instrumen vital dalam perbaikan kinerja berkelanjutan. Dengan sinergi tersebut, BBPOM di Mataram berhasil menjaga stabilitas pengelolaan keuangan yang akuntabel dan efisien hingga tahun 2025.

**Tabel 3.147** Realisasi Anggaran Rincian Output Tahun 2025

| No. | Program/Kegiatan/Ouput | | Volume | | | Anggaran | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2025 | Realisasi | Capaian/ Progress (%) | Pagu awal (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
| a | b | | c | d | e= (d/c*100) | f | g | h= (g/f*100) |
| 1 | AEA.001 | Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT | **14** | 14 | 100.00 | 43,300,000 | 43,283,500 | 99,96 |
| 2 | BAH.001 | Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh BB/BPOM | **925** | 1,100 | 118.92 | 126,033,000 | 125,992,008 | 99,97 |

| No. | Program/Kegiatan/Ouput | | Volume | | | Anggaran | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2025 | Realisasi | Capaian/ Progress (%) | Pagu awal (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
| a | b | | c | d | e= (d/c*100) | f | g | h= (g/f*100) |
| 3 | BDC.001 | Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE | **2,100** | 2,101 | 100.05 | 705,125,000 | 705,116,180 | 100,00 |
| 4 | BKB.001 | Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | **1** | 1 | 100.00 | 87,625,000 | 87,510,493 | 100,00 |
| 5 | BMB.001 | Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT | **35** | 37 | 105.71 | 30,718,000 | 30,717,981 | 99,87 |
| 6 | CAB.002 | Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia | **1** | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CAN.001 | Perangkat pengolah data dan komunikasi | **8** | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PDD.001 | Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | **1** | 1 | 100.00 | 1,335,853,000 | 1335735983 | 99,99 |
| 9 | QCD.U52 | PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM MATARAM | **6** | 7 | 116.67 | 735,132,000 | 734995060 | 99,98 |
| 10 | QDB.001 | Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman | **13** | 13 | 100.00 | 27,330,000 | 27320000 | 99,96 |
| 11 | QDB.002 | Desa Pangan Aman | **4** | 4 | 100.00 | 50,990,000 | 50982000 | 99,98 |
| 12 | QDB.003 | Pasar Pangan aman berbasis komunitas | **1** | 1 | 100.00 | 20,115,000 | 20114800 | 100,00 |
| 13 | QDC 001 | Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans | **45** | 45 | 100.00 | 4,450,000 | 4448000 | 99,96 |
| 14 | QDG.001 | UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT | **30** | 30 | 100.00 | 21,360,000 | 21320000 | 99,81 |

| No. | Program/Kegiatan/Ouput | | Volume | | | Anggaran | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2025 | Realisasi | Capaian/ Progress (%) | Pagu awal (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
| a | b | | c | d | e= (d/c*100) | f | g | h= (g/f*100) |
| 15 | QIA.001 | Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT | **446** | 456 | 102.24 | 565,681,000 | 565674943 | 100,00 |
| 16 | QIA.005 | Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT | **992** | 995 | 100.30 | 694,660,000 | 694553368 | 99,98 |
| 17 | QIC.001 | Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksaoleh UPT | **46** | 48 | 104.35 | 64,830,000 | 64827260 | 100,00 |
| 18 | QIC.003 | Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang Diperiksaoleh UPT | **5** | 5 | 100.00 | 7,651,000 | 7648400 | 99,97 |
| 19 | QIC.004 | Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | **353** | 379 | 107.37 | 582,011,000 | 581998534 | 100,00 |
| 20 | RAB.001 | Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | **1** | 1 | 100.00 | 3,641,807,000 | 3640898998 | 99,98 |
| 21 | EBA 956 | Layanan BMN | **1** | 1 | 100.00 | 3,047,000 | 3046804 | 99,99 |
| 22 | EBA.994 | Layanan Perkantoran | **1** | 1 | 100.00 | 8,429,902,000 | 8421528058 | 99,90 |

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa Balai Besar POM di Mataram menunjukkan kinerja yang sangat optimal sepanjang tahun 2025, di mana seluruh Rincian Output (RO) berhasil mencapai atau melampaui target yang ditetapkan. Dari total 22 kategori output yang dikelola, capaian tertinggi dicatatkan oleh RO BAH.001 (Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik) yang berhasil mencapai 118,92%, dengan realisasi sebanyak 1.100 dokumen dari target awal 925. Selain itu, Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Mataram (QCD.U52) juga melampaui target dengan capaian 116,67%.

Sebanyak 20 output lainnya, termasuk program strategis seperti Desa Pangan Aman (QDB.002), Sekolah dengan PJAS Aman (QDB.001), dan Pasar Pangan Aman (QDB.003), berhasil terealisasi tepat

100% sesuai target yang direncanakan. Keberhasilan fisik ini didukung oleh penyerapan anggaran yang sangat tinggi dan presisi, dengan rata-rata realisasi anggaran di atas 99,9% untuk hampir seluruh lini kegiatan.

Secara khusus, program Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE (BDC.001) menyerap anggaran terbesar senilai Rp705.116.180 (realisasi 100%). Tingginya sinkronisasi antara capaian fisik yang mencapai target 100% dengan realisasi anggaran yang rata-rata mencapai 99,9% mencerminkan perencanaan dan eksekusi program yang sangat efektif serta efisien di lingkungan BBPOM di Mataram selama tahun 2025.

Persentase capaian realisasi anggaran tertinggi pada rincian output BDC.001, BKB.001, QDB.003, QIA.005, QIC.001, QIC.004 dengan realisasi sebesar 100% dan realisasi terendah pada rincian output QDG.001 deangan realisasi sebesar 99,81%.

Terdapat 2 Rincian Ourput yang seluruh anggarannya di blokir sampai akhir tahun 2025 yaitu Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia (CAB.002) dan Perangkat pengolah data dan informasi (CAN.001).

Realisasi anggaran berdasarkan Indikator Kinerja dan Sasaran Kegiatan BBPOM di Mataram Tahun 2025 seperti ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 3.148** Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja dan Sasaran Kinerja BBPOM di Mataram Tahun 2025

| No | Sasaran Kegiatan / Indikator | Kinerja/Output | | | Anggaran | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
| a | b | c | d | e=(d/c*100) | f | g | h= (g/f*100) |
| 1 | **Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT** | | | **107,75** | **6.889.292.000** | **6.888.137.086** | **99,98** |

| No | Sasaran Kegiatan / Indikator | Kinerja/Output | | | Anggaran | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
| a | b | c | d | e=(d/c*100) | f | g | h= (g/f*100) |
| | 1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 89,00 | 100,00 | 112,36 | 659.927.000 | 659.825.700 | 99,98 |
| | 2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO | 26,00 | 31,11 | 119,65 | 4.450.000 | 4.448.000 | 99,96 |
| | 3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 92,00 | 99,71 | 108,38 | 212.130.375 | 212.128.104 | 100,00 |
| | 4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 141.420.250 | 141.418.736 | 100,00 |
| | 5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 85,00 | 100,00 | 117,65 | 141.420.250 | 141.418.736 | 100,00 |

| No | Sasaran Kegiatan / Indikator | Kinerja/Output | | | Anggaran | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
| a | b | c | d | e=(d/c*100) | f | g | h= (g/f*100) |
| | 6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 98,80 | 99,40 | 100,61 | 16.207.500 | 16.206.815 | 100,00 |
| | 7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 91,00 | 100,00 | 109,89 | 16.207.500 | 16.206.815 | 100,00 |
| | 8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 85,00 | 92,68 | 109,04 | 16.207.500 | 16.206.815 | 100,00 |
| | 9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 96,00 | 98,57 | 102,68 | 291.005.500 | 290.999.267 | 100,00 |

| No | Sasaran Kegiatan / Indikator | Kinerja/Output | | | Anggaran | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
| a | b | c | d | e=(d/c*100) | f | g | h= (g/f*100) |
| | 10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 91,00 | 97,33 | 106,96 | 218.254.125 | 218.249.450 | 100,00 |
| | 11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | 89,60 | 99,48 | 111,03 | 16.207.500 | 16.206.815 | 100,00 |
| | 12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar | 92,00 | 94,40 | 102,61 | 34733000 | 34727668 | 99,98 |
| | 13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | 100,00 | 105,69 | 105,69 | 72751375 | 72749817 | 100,00 |
| | 14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai | 81,70 | 89,70 | 109,79 | 4,977,660,000 | 4,976,634,981 | 100,00 |

| No | Sasaran Kegiatan / Indikator | Kinerja/Output | | | Anggaran | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
| a | b | c | d | e=(d/c*100) | f | g | h= (g/f*100) |
| | Standar Kemampuan Laboratorium | | | | | | |
| | 15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman | 20,00 | 20,00 | 100,00 | 70,710,125 | 70,709,368 | 99,97 |
| **2** | **Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi** | | | **100,00** | **7,651,000** | **7,648,400** | **99,97** |
| | 16. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 63,00 | 63,00 | 100,00 | 7,651,000 | 7,648,400 | 99,97 |
| **3** | **Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT** | | | **101,19** | **834,278,000** | **834,250,961** | **100,00** |
| | 17. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan | 88,57 | 92,79 | 104,76 | 735,843,000 | 735,834,161 | 100,00 |

| No | Sasaran Kegiatan / Indikator | Kinerja/Output | | | Anggaran | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
| a | b | c | d | e=(d/c*100) | f | g | h= (g/f*100) |
| | Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | | | | | | |
| | 18. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | 13 | 13,00 | 100,00 | 27,330,000 | 27,320,000 | 99,96 |
| | 19. Jumlah desa pangan aman | 4 | 4,00 | 100,00 | 50,990,000 | 50,982,000 | 99,98 |
| | 20.Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | 1 | 1,00 | 100,00 | 20,115,000 | 20,114,800 | 100,00 |
| **4** | **Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu** | | | **112,04** | **21,360,000** | **21,320,000** | **99,81** |
| | 21. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau | 14,04 | 15,73 | 112,04 | 21,360,000 | 21,320,000 | 99,81 |

| No | Sasaran Kegiatan / Indikator | Kinerja/Output | | | Anggaran | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
| a | b | c | d | e=(d/c*100) | f | g | h= (g/f*100) |
| | IP CPPOB pangan olahan | | | | | | |
| 5 | **Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT** | | | **101,71** | **73 5,132,000** | **734,9 95,060** | **99,98** |
| | 22. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | 92,00 | 93,57 | 101,71 | 73 5,132,000 | 734,9 95,060 | 99,98 |
| 6 | **Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT** | | | **108,89** | **43, 300,000** | **43,28 3,500** | **99,96** |
| | 23. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | 90,00 | 98,00 | 108,89 | 43, 300,000 | 43,28 3,500 | 99,96 |
| 7 | **Layanan Publik UPT yang prima** | | | **105,11** | **126,033,000** | **125,992,008** | **99,97** |

| No | Sasaran Kegiatan / Indikator | Kinerja/Output | | | Anggaran | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
| a | b | c | d | e=(d/c*100) | f | g | h= (g/f*100) |
| | 24. Indeks Pelayanan Publik UPT | 4,7 | 4,94 | 105,11 | 12 6,033,000 | 125,9 92,008 | 99,97 |
| 8 | **Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal** | | | **101,03** | **8,520,574,000** | **8,512,085,356** | **99,90** |
| | 25. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM | 90,00 | 90,93 | 101,03 | 2,130,143,500 | 2,128, 021,339 | 99,90 |
| | 26. Nilai AKIP UPT BPOM | 83,9 | 82,55 | 98,39 | 2,130,143,500 | 2,128, 021,339 | 99,90 |
| | 27. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM | 5,00 | 5,00 | 100,00 | 2,130,143,500 | 2,128, 021,339 | 99,90 |
| | 28. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | 3,05 | 2,97 | 97,34 | 2,130,143,500 | 2,128, 021,339 | 99,90 |

Pagu anggaran yang digunakan yaitu pagu anggaran yang dapat dimanfaatkan selama Tahun 2025. Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran masing-masing sasaran kegiatan seluruhnya

diatas 99%. Realisasi anggaran tertinggi adalah pada sasaran kegiatan-3 “Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT” dengan capaian realisasi anggaran sebesar 100,0%. Sedangkan realisasi anggaran terendah adalah pada sasaran kegiatan-4 yaitu “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu” dengan realisasi anggaran 99,81%.

Adapaun uraian realisasi anggaran tiap sasaran kegiatan sebagai berikut **:**

1. Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan pagu anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 6,889,292,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 6,888,137,086 dengan capaian 99,98%;
2. Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi dengan pagu anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 7,651,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 7,648,400 dengan capaian 99,97%;
3. Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja UPT dengan pagu anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 834,278,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 834,250,961dengan capaian 100,00%;
4. Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu dengan pagu anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 21,360,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 21,320,000 dengan capaian 99,81%;
5. Sasaran Kegiatan 5 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT dengan pagu anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 735,132,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 734,995,060 dengan capaian 99,98%;
6. Sasaran Kegiatan 6 Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Yang Efektif di wilayah kerja UPT dengan pagu anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 43,300,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 43,283,500 dengan capaian 99,96%;
7. Sasaran Kegiatan 7 Layanan Publik UPT yang Prima dengan pagu anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 126,033,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 125,992,008 dengan capaian 99,97%;
8. Sasaran Kegiatan 8 Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal dengan pagu anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 8,520,574,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 8,512,085,356 dengan capaian 99,90%.

## ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi dari pada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\%\ Capaian\ Output}{\%\ Capaian\ Input}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\%\ Rencana\ Capaian\ Output}{\%\ Rencana\ Capaian\ Input} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika IE > SE, maka kegiatan dianggap efisien
Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

**Tabel 3.149** Tingkat Efisiensi

| No | Tingkat Efisiensi | Capaian |
|---|---|---|
| 1 | <0 | Tidak Efisien |
| 2 | 0 – 0,2 | 100% (efisien) |
| 3 | 0,21 – 0,4 | 95% (efisien) |
| 4 | 0,41 – 0,6 | 92% (efisien) |
| 5 | 0,61 – 0,8 | 90% (efisien) |
| 6 | 0,81 – 1,0 | 88% (efisien) |
| 7 | 1,01 – 1,2 | 86% (tidak efisien) |
| 8 | 1,21 – 1,4 | 84% (tidak efisien) |
| 9 | 1,41 – 1,6 | 80% (tidak efisien) |
| 10 | 1,61 – 1,8 | 78% (tidak efisien) |
| 11 | >1,81 | 75% (tidak efisien) |

Perhitungan efisiensi anggaran dilakukan berdasarkan pada rasio antara capaian output dan input (anggaran yang dikeluarkan). Perhitungan efisiensi anggaran masing-masing kegiatan (Rincian Output) dan sasaran kegiatan selengkapnya terdapat pada lampiran 5 dan 6.

**Tabel 3.150** Nilai Efisiensi Masing-masing Sasaran Kegiatan BBPOM di Mataram Tahun 2025

| No | Indikator | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian TE | KESIMPULAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T | R | % | T | R | % | | | | |
| **Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT** | | | | **107.75** | **6,889,292,000** | **6,888,137,086** | **99.98** | **1.08** | **0.08** | **100 %** | Efisien |
| 1 | Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 89.00 | 100.00 | 112.36 | 659,927,000 | 659,825,700 | **99.98** | **1.12** | **0.12** | **100 %** | Efisien |
| 2 | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO | 26.00 | 31.11 | 119.65 | 4,450,000 | 4,448,000 | **99.96** | **1.20** | **0.20** | **100 %** | Efisien |
| 3 | Persentase sampel Pangan Olahan berisiko | 92.00 | 99.71 | 108.38 | 212,130,375 | 212,128,104 | **100.00** | **1.08** | **0.08** | **100 %** | Efisien |

| No | Indikator | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian TE | KESIMPULAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T | R | % | T | R | % | | | | |
| | yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | | | | | | | | | | |
| 4 | Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 141,420,250 | 141,418,736 | **100.00** | **1.00** | **0.00** | **100 %** | Efisien |
| 5 | Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 85.001, 2 | 100.00 | 117.65 | 141,420,250 | 141,418,736 | **100.00** | **1.18** | **0.18** | **100 %** | Efisien |
| 6 | Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 98.8 | 99.40 | 100.61 | 16,207,500 | 16,206,815 | **100.00** | **1.01** | **0.01** | **100 %** | Efisien |
| 7 | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 91.00 | 100.00 | 109.89 | 16,207,500 | 16,206,815 | **100.00** | **1.10** | **0.10** | **100 %** | Efisien |
| 8 | Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa | 85.00 | 92.68 | 109.04 | 16,207,500 | 16,206,815 | **100.00** | **1.09** | **0.09** | **100 %** | Efisien |

| No | Indikator | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian TE | KESIMPULAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T | R | % | T | R | % | | | | |
| | dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | | | | | | | | | | |
| 9 | Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 96.00 | 98.57 | 102.68 | 291,005,500 | 290,999,267 | **100.00** | **1.03** | **0.03** | **100 %** | Efisien |
| 10 | Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 91.00 | 97.33 | 106.96 | 218,254,125 | 218,249,450 | **100.00** | **1.07** | **0.07** | **100 %** | Efisien |
| 11 | Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | 89.6 | 99.48 | 111.03 | 16,207,500 | 16,206,815 | **100.00** | **1.11** | **0.11** | **100 %** | Efisien |
| 12 | Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar | 92.00 | 94.40 | 102.61 | 34,733,000 | 34,727,668 | **99.98** | **1.03** | **0.03** | **100 %** | Efisien |
| 13 | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | 100.00 | 105.69 | 105.69 | 72,751,375 | 72,749,817 | **100.00** | **1.06** | **0.06** | **100 %** | Efisien |

| No | Indikator | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian TE | KESIMPULAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T | R | % | T | R | % | | | | |
| 14 | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 81.7 | 89.70 | 109.79 | 4,977,660,000 | 4,976,634,981 | **100.00** | **1.10** | **0.10** | **100 %** | Efisien |
| 15 | Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 70,710,125 | 70,709,368 | **99.97** | **1.00** | **0.00** | **100 %** | Efisien |
| **Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi** | | | | **100.00** | **7,651,000** | **7,648,400** | **99.97** | **1.00** | **0.00** | **100 %** | Efisien |
| 16 | Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 63.00 | 63.00 | 100.00 | 7,651,000 | 7,648,400 | **99.97** | **1.00** | **0.00** | **100 %** | Efisien |
| **Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT** | | | | **101.19** | **834,278,000** | **834,250,961** | **100.00** | **1.01** | **0.01** | **100 %** | Efisien |
| 17 | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 88.57 | 92.79 | 104.76 | 735,843,000 | 735,834,161 | 100.00 | **1.05** | **0.05** | **100 %** | Efisien |

| No | Indikator | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian TE | KESIMPULAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T | R | % | T | R | % | | | | |
| 18 | Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | 13.00 | 13.00 | 100.00 | 27,330,000 | 27,320,000 | 99.96 | **1.00** | **0.00** | **100 %** | Efisien |
| 19 | Jumlah desa pangan aman | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 50,990,000 | 50,982,000 | 99.98 | **1.00** | **0.00** | **100 %** | Efisien |
| 20 | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 20,115,000 | 20,114,800 | 100.00 | **1.00** | **0.00** | **100 %** | Efisien |
| **Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu** | | | | **112.04** | **21,360,000** | **21,320,000** | **99.81** | **1.12** | **0.12** | **100 %** | Efisien |
| 21 | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | 14.04 | 15.73 | 112.04 | 21,360,000 | 21,320,000 | 99.81 | **1.12** | **0.12** | **100 %** | Efisien |
| **Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT** | | | | **101.71** | **735,132,000** | **734,995,060** | **99.98** | **1.02** | **0.02** | **100 %** | Efisien |
| 22 | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan | 92.00 | 93.57 | 101.71 | 735,132,000 | 734,995,060 | 99.98 | **1.02** | **0.02** | **100 %** | Efisien |

| No | Indikator | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian TE | KESIMPULAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T | R | % | T | R | % | | | | |
| | Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | | | | | | | | | | |
| **Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT** | | | | **108.89** | **43,300,000** | **43,283,500** | **99.96** | **1.09** | **0.09** | **100 %** | Efisien |
| 23 | Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | 90.00 | 98.00 | 108.89 | 43,300,000 | 43,283,500 | 99.96 | **1.09** | **0.09** | **100 %** | Efisien |
| **Layanan Publik UPT yang prima** | | | | **105.11** | **126,033,000** | **125,992,008** | **99.97** | **1.05** | **0.05** | **100 %** | Efisien |
| 24 | Indeks Pelayanan Publik UPT | 4.7 | 4.94 | 105.11 | 126,033,000 | 125,992,008 | 99.97 | **1.05** | **0.05** | **100 %** | Efisien |
| **Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal** | | | | **101.03** | **8,520,574,000** | **8,512,085,356** | **99.90** | **1.01** | **0.01** | **100 %** | Efisien |
| 25 | Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM | 90.00 | 90.93 | 101.03 | 2,130,143,500 | 2,128,021,339 | 99.90 | **1.01** | **0.01** | **100 %** | Efisien |
| 26 | Nilai AKIP UPT BPOM | 83.9 | 82.55 | 98.39 | 2,130,143,500 | 2,128,021,339 | 99.90 | **0.98** | **-0.02** | **75 %** | Tidak Efisien |
| 27 | Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 2,130,143,500 | 2,128,021,339 | 99.90 | **1.00** | **0.00** | **100 %** | Efisien |

| No | Indikator | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian TE | KESIMPULAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T | R | % | T | R | % | | | | |
| 28 | Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | 3.05 | 2.97 | 97.34 | 2,130,143,500 | 2,128,021,339 | 99.90 | **0.97** | **-0.03** | **75 %** | Tidak Efisien |
| | TOTAL | | | 105 | 17,177,620,000 | 17,167,712,371 | 99.94 | **1.05** | **0.05** | **100 %** | Efisien |

Dari 8 sasaran kegiatan yang diukur, diperoleh hasil bahwa **8 sasaran kegiatan efisien** dan tidak ada sasaran yang tidak efisien. Tingkat Efisiensi (TE) sasaran tertinggi tercatat sebesar **0,12** (pada sasaran pendampingan UMKM) dan terendah sebesar **0,00** (pada sasaran pengawasan pangan fortifikasi). Sasaran kegiatan yang diidentifikasi seluruhnya tercapai dengan tingkat efisiensi 100%.

Sementara itu, dari 28 indikator kinerja yang diukur, terdapat **26 indikator** dengan hasil efisien dan **2 indikator** tidak efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator tertinggi adalah **0,20** (pada persentase fasyankes yang telah melaporkan KTD/ESO) dan terendah mencapai **-0,03** (pada Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM). Ketidakefisienan pada sejumlah indikator, yaitu Nilai AKIP dan Indeks Manajemen Risiko, disebabkan oleh capaian output yang tidak mencapai target (di bawah 100%) namun diiringi dengan realisasi anggaran yang sangat tinggi, masing-masing sebesar **99,98%** dan **100%**. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan pada indikator tata kelola tersebut masih sangat fokus pada penyerapan anggaran, namun belum optimal dalam mendongkrak capaian indikator kinerja secara efektif.

Secara keseluruhan, penggunaan anggaran Tahun 2025 menunjukkan hasil yang efisien dengan nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar **1,05**, Tingkat Efisiensi (TE) sebesar **0,05**, dan Capaian Tingkat Efisiensi sebesar **100%**. Data ini mencerminkan bahwa meskipun terdapat titik lemah pada beberapa indikator tata kelola, secara umum kegiatan yang dilaksanakan telah berjalan efisien dan berdampak positif terhadap pencapaian target organisasi. Dengan total realisasi anggaran sebesar **Rp17.167.712.370 (99,94%)**, UPT BPOM mampu menghasilkan kinerja yang optimal melalui pelaksanaan program yang efisien.

Analisa untuk tingkat efisiensi anggaran masing-masing sasaran kegiatan sebagai berikut:

a. Tingkat efisiensi pada sasaran kegiatan pertama “Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah UPT” sebesar 0,08 dangan persen capaian Tingkat efisiensi sebesar 100% dengan Kesimpulan efisien. Upaya yang telah

dilakukan untuk mendukung capaian ini adalah pemanfaatan anggaran untuk pelaksanaan sampling, pengawasan iklan dan pengadaan reagensia dan media mikrobiologi, operasional laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan, tindak lanjut pengawasan, advokasi dan koordinasi dengan *stakeholders*, pengadaan alat laboratorium, perbaikan dan perawatan alat laboratorium, pengadaan suku cadang alat laboratorium peningkatan kompetensi personil pengawas dan penguji. Kegiatan-kegiatan tersebut memberikan dampak signifikan terhadap tercapainya target indikator maupun sasaran kegiatan. Hal ini dibuktikan dengan seluruh target kinerja pada sasaran ini tercapai.

Sehubungan dengan adanya Surat Menteri Keuangan nomor S-37/MK.02/202 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/ Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 yang diikuti dengan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan POM nomor BPR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025 tentang Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025, BBPOM di Mataram telah melakukan revisi untuk melakukan pemblokiran anggaran yang berkaitan dengan pengawasan.

Adanya dinamika pelaksanaan anggaran sepanjang Triwulan 2, melalui adanya Surat Edaran dari Sekretaris Utama Badan POM nomor: B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2025 tentang Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025, dimana UPT dapat melakukan pengajuan relaksasi blokir untuk beberapa RO fungsi pengawasan salah satunya adalah terkait pengawasan sarana dan sampling. Sehingga, menindaklanjuti surat tersebut BBPOM di Mataram melakukan buka blokir 100%. Anggaran tersebut selanjutnya telah dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan yang mendukung pengawasan sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan, sampling sediaan farmasi dan pangan olahan serta pengadaan reagensia dan media mikrobiologi untuk pengujian sampel.

b. Tingkat efisiensi pada sasaran kegiatan kedua “Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi” Sebesar 0,00 dengan persen capaian Tingkat efisiensi sebesar 100% dengan kesimpulan Efisien. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi dan sampling pangan fortifikasi serta monitoring CAPA hasil pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi. Kegiatan-kegiatan tersebut memberikan dampak signifikan terhadap tercapainya target indikator maupun sasaran kegiatan. Hal ini dibuktikan dengan seluruh target kinerja pada sasaran ini tercapai.

Sehubungan dengan adanya Surat Menteri Keuangan nomor S-37/MK.02/202 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/ Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 yang diikuti dengan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan POM nomor BPR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025 tentang Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi

Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025, BBPOM di Mataram telah melakukan revisi untuk melakukan pemblokiran anggaran yang berkaitan dengan pengawasan.

Adanya dinamika pelaksanaan anggaran sepanjang Triwulan 2, melalui adanya Surat Edaran dari Sekretaris Utama Badan POM nomor: B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2025 tentang Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025, dimana UPT dapat melakukan pengajuan relaksasi blokir untuk beberapa RO fungsi pengawasan salah satunya adalah terkait pengawasan sarana. Sehingga, menindaklanjuti surat tersebut BBPOM di Mataram melakukan buka blokir 100%. Anggaran tersebut selanjutnya telah dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan yang mendukung pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi .

c. Tingkat efisiensi pada sasaran kegiatan ketiga yaitu “Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT”, sebesar 0,01 dangan persen capaian Tingkat efisiensi sebesar 100% dengan Kesimpulan efisien. Hal ini disebabkan karena anggaran yang digunakan telah optimal dalam pencapaian *output* yang dihasilkan. Adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah membuat BBPOM Mataram melakukan langkah strategis dengan memindahkan lokus intervensi ke kota/kabupaten yang lebih dekat yaitu Kota Mataram sehingga tidak membutuhkan anggaran yang besar serta dilakukan simplikasi tahapan namun tidak mengurangi esensi dan target intervensi Realisasi anggaran telah digunakan untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tahapan advokasi, sosialisasi keamanan pangan , bimtek kader dan bimtek komunitas desa, penyuluhan komunitas pasar, serta sosialisasi ke pengunjung pasar, anggaran juga digunakan untuk menunjang berbagai layanan informasi, seperti pengaduan masyarakat, penyebaran edukasi, serta publikasi kinerja melalui berbagai kanal, termasuk media sosial, media online, media cetak, media elektronik, hingga media luar ruang serta kegiatan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) bersama Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat yaitu Ketua Komisi IX DPR RI dan KIE rutin lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut memberikan dampak signifikan terhadap tercapainya target indikator maupun sasaran kegiatan. Hal ini dibuktikan dengan seluruh target kinerja pada sasaran ini tercapai.

d. Tingkat efisiensi pada sasaran kegiatan keempat “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu”, sebesar 0,12 dangan persen capaian Tingkat efisiensi sebesar 100% dengan Kesimpulan efisien. Hal ini disebabkan karena anggaran yang digunakan telah optimal dalam pencapaian *output* yang dihasilkan. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan pemeriksaan sarana dalam rangka pendampingan UMKM untuk memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan, koordinasi/advokasi dengan instansi terkait, tindak lanjut pengawasan pengaduan, pendampingan UMKM (Gemilang Pro UMKM). Selain itu, karena terdapat penyesuaian anggaran yang terdampak efisiensi, BBPOM di Mataram melakukan strategi dengan mengoptimalkan layanan dan fasilitas dari BBPOM di Mataram seperti bimbingan teknis, sosialisasi, konsultasi secara langsung pelaku usaha yang datang ke kantor,

mengoptimalkan pelayanan di Mall Pelayanan Publik, implementasi inovasi Berugak Virtual, ataupun melalui wadah yang disediakan oleh BBPOM Mataram (nomor *whatsapp, email*, media social). Pendampingan secara intensif dan konsisten juga sangat berperan sehingga kualitas UMKM di Nusa Tenggara Barat semakin meningkat dan dapat membuka jalan untuk semakin dikenal secara nasional maupun global. Kegiatan-kegiatan tersebut telah memberikan dampak terhadap peningkatan pendampingan UMKM ditunjukkan dengan tercapainya target indikator maupun sasaran kegiatan.

Sehubungan dengan adanya Surat Menteri Keuangan nomor S-37/MK.02/202 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/ Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 yang diikuti dengan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan POM nomor BPR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025 tentang Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025, BBPOM di Mataram telah melakukan revisi untuk melakukan pemblokiran anggaran yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan UMKM.

e. Tingkat efisiensi pada sasaran kegiatan kelima yaitu “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Mataram”, sebesar 0,02 dengan persen capaian Tingkat efisiensi sebesar 100% dengan Kesimpulan efisien. Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung adalah pemanfaatan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan intelijen, operasi penindakan, dan pemberkasan berkas perkara. Selain itu dilakukan kolaborasi dengan fungsi infokom dengan melakukan kegiatan penggalangan pelaku usaha kosmetik di seluruh kabupaten/kota di pulau Lombok. Kegiatan-kegiatan tersebut memberikan dampak signifikan terhadap tercapainya target indikator maupun sasaran kegiatan. Hal ini dibuktikan dengan realisasi perkara melebihi yang ditargetkan yaitu 7 (tujuh) perkara dari target 6 (enam) perkara, serta seluruh target kinerja pada sasaran ini tercapai.

   Sehubungan dengan adanya Surat Menteri Keuangan nomor S-37/MK.02/202 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/ Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 yang diikuti dengan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan POM nomor BPR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025 tentang Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025, BBPOM di Mataram telah melakukan revisi untuk melakukan pemblokiran anggaran yang berkaitan dengan penyidikan perkara.

   Adanya dinamika pelaksanaan anggaran sepanjang Triwulan 2, melalui adanya Surat Edaran dari Sekretaris Utama Badan POM nomor: B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2025 tentang Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025, dimana UPT dapat melakukan pengajuan relaksasi blokir untuk beberapa RO fungsi pengawasan dan penyidikan salah satunya adalah terkait penyidikan perkara. Sehingga, menindaklanjuti surat tersebut

BBPOM di Mataram melakukan buka blokir 100%. Anggaran tersebut selanjutnya telah dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kegiatan yang mendukung penyidikan perkara.

f. Tingkat efisiensi pada sasaran kegiatan keenam yaitu "Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Mataram", sebesar 0,09 dangan persen capaian Tingkat efisiensi sebesar 100% dengan Kesimpulan efisien. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan patrol siber dan profiling kejahatan Obat dan makanan serta penyusunan analisis kejahatan. Sehubungan dengan adanya Surat Menteri Keuangan nomor S-37/MK.02/202 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/ Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 yang diikuti dengan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan POM nomor BPR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025 tentang Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025, BBPOM di Mataram telah melakukan revisi untuk melakukan pemblokiran anggaran yang berkaitan dengan analisis kejahatan Obat dan Makanan.

   BBPOM di Mataram terus beradaptasi dalam menyikapi kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran. Tanpa dukungan anggaran yang optimal, BBPOM di Mataram melakukan strategi dengan mengoptimalkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana yang telah tersedia untuk diarahkan kepada kegiatan patrol siber dan penyusunan analisis kejahatan, yang menunjang ketercapaian target kinerja. Strategi tersebut memberikan dampak signifikan terhadap tercapainya target indikator maupun sasaran kegiatan. Hal ini dibuktikan dengan seluruh target kinerja pada sasaran ini tercapai.

g. Tingkat efisiensi pada sasaran kegiatan ketujuh "Layanan Publik UPT yang Prima", sebesar 0,05 dengan persen capaian Tingkat efisiensi sebesar 100% dengan Kesimpulan efisien. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan Pelayanan publik antara lain kegiatan pendampingan dalam rangka sertifikasi sarana produksi/ distribusi Obat dan Makanan yang dilaksanakan melalui audit dalam rangka penerbitan sertifikat izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (IP CPPOB), Cara Produksi Obat Tradisional Yang Baik (CPOTB), dan Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) serta pelaksanaan reviu atas kebijakan pelayanan BBPOM di Mataram oleh masing-masing fungsi pelayanan publik yaitu fungsi sertifikasi, fungsi pengujian dan fungsi informasi komunikasi.

   Upaya yang dilakukan sebagai upaya pencapaian tingkat efisiensi antara lain melalui pemutakhiran layanan informasi BBPOM di Mataram baik secara offline melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen maupun secara online melalui subsite dan media sosial yang disertai dengan peningkatan publikasi dan edukasi terkait Obat dan Makanan. Selain itu, langkah yang dilakukan yaitu mengoptimalkan implementasi inovasi Berugak virtual. Strategi tersebut memberikan dampak signifikan terhadap tercapainya efisiensi anggaran serta target indikator

maupun sasaran kegiatan. Hal ini dibuktikan dengan seluruh target kinerja pada sasaran ini tercapai.

Sehubungan dengan adanya Surat Menteri Keuangan nomor S-37/MK.02/202 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/ Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 yang diikuti dengan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan POM nomor BPR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025 tentang Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025, BBPOM di Mataram telah melakukan revisi untuk melakukan pemblokiran anggaran yang berkaitan dengan sertifikasi layanan publik.
Adanya dinamika pelaksanaan anggaran sepanjang Triwulan 4 Tahun 2025, melalui adanya Surat Edaran dari Sekretaris Utama Badan POM nomor: PR.05.03.2.10.25.634 tanggal 23 Oktober 2025 tentang Pelaksanaan Revisi Pembukaan Blokir Anggaran TA 2025, dimana UPT dapat melakukan pengajuan relaksasi blokir untuk RO BAH Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan. BBPOM di Mataram melakukan buka blokir 100%. Anggaran tersebut selanjutnya telah dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kegiatan audit dalam rangka penerbitan sertifikat izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (IP CPPOB), Cara Produksi Obat Tradisional Yang Baik (CPOTB), dan Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB);

h. Tingkat efisiensi pada sasaran kegiatan kedelapan “Terwujudnya Tata kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal”, sebesar 0,01 dengan persen capaian Tingkat efisiensi sebesar 100% dengan Kesimpulan efisien. Anggaran yang dipergunakan pada sasaran ini merupakan anggaran dengan proporsi terbesar dibandingkan anggaran pada sasaran lainnya. Anggaran ini dipergunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, operasional perkantoran, pertemuan koordinasi/advokasi, pertemuan, penyusunan laporan kinerja, laporan tahunan, penyusunan renstra 2025-2029, dan rapat evaluasi, serta pelaksanaan Manajemen Risiko UPT BPOM. Selain itu, digunakan juga untuk pemenuhan kebutuhan dalam pengelolaan kegiatan melalui dukungan pengadaan dan pemeliharaan peralatan fasilitas perkantoran yang dimanfaatkan untuk media publikasi kegiatan dan memberikan rasa nyaman dalam penyelenggaraan kegiatan di lingkungan kantor baik terhadap internal maupun eksternal.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya dalam menghadapi dinamika efisiensi anggaran BBPOM di Mataram melakukan beberapa kali revisi anggaran yang bertujuan untuk mendukung kebijakan pemerintah dan pencapaian target kinerja, penguatan kapasitas SDM dan koordinasi maupun konsultasi terkait pengelolaan anggaran.

Realisasi anggaran **99,94%** dibandingkan dengan realisasi kinerja sebesar **105,00%** menunjukkan adanya **EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI** penggunaan dana dengan **Capaian Tingkat Efisiensi sebesar 100%**

Sepanjang Tahun 2025, dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya, secara berkelanjutan melakukan langkah-langkah strategis antara lain:

1. Optimalisasi Metode Pelaksanaan Kegiatan

   Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, dan pendampingan dilakukan melalui metode *hybrid* maupun daring untuk menekan biaya perjalanan dinas, akomodasi, dan konsumsi. Selain itu, pemanfaatan platform digital dalam penyampaian materi serta interaksi dengan peserta/pengguna layanan terus ditingkatkan guna memperluas jangkauan kegiatan dan meningkatkan efektivitas dengan biaya yang lebih hemat.

2. Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Administrasi Perkantoran
   Penggunaan sistem *e-office* dalam proses administrasi dan dokumentasi kegiatan diterapkan untuk mengurangi kebutuhan pencetakan, penggandaan dokumen, serta penyimpanan arsip fisik. Pemanfaatan teknologi digital juga bertujuan untuk memangkas waktu bekerja serta arsip dapat terdokumentasi dengan baik dan tertelusur. Pemanfaatan teknologi dilakukan dengan pemanfaatan Aplikasi yang dibangun internal BBPOM di Mataram maupun dari BPOM yang telah menerapkan SPBE (Registrasi Pangan, e-Sertifikasi Badan POM, SIASN, ASROT. Aplikasi internal BBPOM di Mataram terintegrasi pada aplikasi “Si Mandalika”.
   Digitalisasi komunikasi dan koordinasi internal juga didorong guna meminimalkan pelaksanaan rapat tatap muka yang memerlukan dukungan anggaran tambahan. Digitalisasi komunikasi dan koordinasi internal juga didorong guna meminimalkan pelaksanaan rapat tatap muka yang memerlukan dukungan anggaran tambahan.
3. Kegiatan pertemuan di luar kantor dilaksanakan secara selektif dan hanya untuk kebutuhan yang bersifat mendesak serta memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kinerja. Setiap program yang dijalankan diprioritaskan pada kegiatan yang memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi anggaran
4. Sisa anggaran dari kegiatan yang telah mencapai target output dialokasikan kembali untuk mendukung program lain yang memiliki kontribusi lebih besar terhadap pencapaian kinerja. Selain itu, dilakukan pemantauan realisasi anggaran secara berkala untuk memastikan penggunaan dana tetap efisien dan terhindar dari pemborosan

5. Kolaborasi dengan instansi pemerintah dan akademisi juga dimanfaatkan dalam penyelenggaraan kegiatan melalui skema *sharing resources* guna menekan beban anggaran. Di samping itu, pelibatan komunitas dan mitra strategis dalam pelaksanaan program edukasi dan sosialisasi seperti Tim penggerak PKK, gerakan pramuka dilakukan agar kegiatan lebih efektif dengan biaya yang lebih terjangkau
6. Optimalisasi Peningkatan Kompetensi bagi ASN BBPOM di Mataram secara daring melalui IDEAS (Integrated development and Training Information System) BPOM sehingga mendukung pegawai belajar kapanpun dan dimanapun dengan data hasil pembelajaran tercatat sebagai capaian pembelajaran

*Halaman ini sengaja dikosongkan*



Inges Solah!

Informatif - Gesit - Solutif - Ramah

# BAB IV
# PENUTUP

# BAB IV PENUTUP

## 4.1. KESIMPULAN

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari periode Rencana Strategis 2025-2029. Evaluasi capaian kinerja tahun 2025 didasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Terdapat 22 kegiatan utama (Rincian Output) untuk menunjang pencapaian 8 sasaran kegiatan dan 28 indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK). Dari 8 sasaran kegiatan yang ditetapkan, 6 sasaran memperoleh kategori “Sangat Baik”, sementara 2 sasaran lainnya berada pada kategori “Baik.” BBPOM di Mataram pada Tahun 2025 memperoleh Nilai Kinerja Organisasi sebesar 104,39% dengan kriteria “Istimewa”.

Dari total 28 IKSK yang diukur pencapaiannya pada Tahun 2025, terdapat 14 indikator yang capaiannya dengan kriteria “Sangat Baik”, 9 indikator dengan kriteria “Baik”, serta 5 indikator dengan kriteria ‘’Tidak Dapat Disimpulkan’’. Persentase capaian target indikator kinerja BBPOM di Mataram berada dalam rentang 97,38% hingga 119,65%. Capaian terendah tercatat pada Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM, sementara capaian tertinggi diperoleh dari Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO. Data ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, BBPOM di Mataram telah mengoptimalkan kinerjanya dalam mencapai target kegiatan tahun 2025.

Hasil capaian tiap sasaran kegiatan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan rata-rata capaian sebesar 106,38%.
- Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi dengan capaian 100,00%.
- Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT dengan rata-rata capaian 101,19%.
- Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu dengan capaian sebesar 110,00%.
- Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT dengan capaian sebesar 101,71%.
- Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif diwilayah kerja UPT dengan capaian sebesar 108,89%.
- Layanan Publik UPT yang Prima dengan capaian sebesar 105,11%.

- Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal dengan capaian sebesar 99,20%.

Realisasi capaian 28 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. 14 (empat belas) Indikator dengan kriteria Sangat Baik (dengan notifikasi biru dan capaian 100% < x ≤ 110%) terdiri dari :
    1. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan realisasi 99,71 % atau tercapai 108,38% dari target 92%.
    2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder realisasi 99,40 % atau tercapai 100,61% dari target 98,8%.
    3. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan realisasi 100,00 % atau tercapai 109,89% dari target 91%.
    4. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan realisasi 92,68 % atau tercapai 109,04% dari target 85%.
    5. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan realisasi 98,57 % atau tercapai 102,68% dari target 96%.
    6. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan realisasi 97,33 % atau tercapai 106,96% dari target 91%.
    7. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar realisasi 94,40 % atau tercapai 102,61% dari target 92%.
    8. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT realisasi 105,69 % atau tercapai 105,69% dari target 100%.
    9. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium realisasi 89,70 % atau tercapai 109,79% dari target 81,70%.
    10. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT realisasi 92,79 atau tercapai 104,76% dari target 88,57%.
    11. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT realisasi 93,57 atau tercapai 101,71% dari target 92%.
    12. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar realisasi 98,00 atau tercapai 108,89% dari target 90%.
    13. Indeks Pelayanan Publik UPT realisasi 4,94 atau tercapai 105,11% dari target 4,70%.
    14. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM realisasi 90,93 atau tercapai 101,03% dari target 90,00.

2. 9 (sembilan) Indikator dengan kriteria Baik (dengan notifikasi hijau dan capaian 90% < x ≤ 100%) terdiri dari :
    . Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT realisasi 100,00 % atau tercapai 100,00% dari target 100,00%.
    a. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman realisasi 20,00 % atau tercapai 100,00% dari target 20,00%.
    b. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan realisasi 63,00 % atau tercapai 100,00% dari target 63,00%.
    c. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan realisasi 13 atau tercapai 100,00% dari target 13.
    d. Jumlah desa pangan aman realisasi 4 atau tercapai 100,00% dari target 4.
    e. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas realisasi 1 atau tercapai 100,00% dari target 1.
    f. Nilai AKIP UPT BPOM realisasi 82,55 atau tercapai 98,39% dari target 83,90.
    g. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM realisasi 5 atau tercapai 100,00% dari target 5.
    h. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM realisasi 2,97 atau tercapai 97,38% dari target 3.05.
3. 5 (lima) Indikator dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan (dengan notifikasi abu-abu dan capaian ≥ 110%) terdiri dari :
    1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan realisasi 100,00 % atau tercapai 112,36% dari target 89%.
    2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO realisasi 31,11 % atau tercapai 119,66% dari target 26%.
    3. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan realisasi 100,00 % atau tercapai 117,65% dari target 85%.
    4. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan realisasi 99,48 % atau tercapai 111,03% dari target 96,60%.
    5. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan realisasi 15,73 atau tercapai 112,04% dari target 14,04.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, **BBPOM di Mataram** memperoleh alokasi anggaran APBN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp20.815.994.000. Sejalan dengan arahan Presiden terkait efisiensi belanja perjalanan dinas dan program *non quick win*, anggaran tersebut sempat mengalami

pemblokiran yang cukup besar sehingga dana yang dapat dimanfaatkan berkurang menjadi Rp14.236.747.000 (68,39%).

Selanjutnya pada bulan Maret 2025 dilakukan Relaksasi Pemanfaatan Efisiensi Anggaran TA 2025, dengan pemanfaatan kembali blokir anggaran pada Rincian Output (RO) sebesar Rp 2.984.534.000,00 sehingga dana yang dapat dimanfaatkan bertambah menjadi Rp17.221.281.000 (82,73%).

Pada Triwulan III dilakukan revisi melalui optimalisasi antar satuan kerja untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai serta menyesuaikan realisasi Semester I. Revisi tersebut menetapkan total pagu menjadi Rp20.670.330.000 dengan dana efektif sebesar Rp17.075.617.000. Selanjutnya, pada Triwulan IV dilakukan pembukaan blokir untuk rincian output layanan publik (BAH.001), sehingga total anggaran final yang dapat digunakan pada tahun 2025 menjadi Rp17.177.620.000.

Secara umum, pengelolaan anggaran Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang efisien dengan Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,05, Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0,05, dan capaian efisiensi 100%. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah berjalan efektif serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian indikator dan target yang ditetapkan. Dengan sumber daya yang tersedia, BBPOM di Mataram mampu menghasilkan kinerja optimal melalui pemanfaatan anggaran yang efisien dan tepat sasaran.

Meski demikian, beberapa kendala masih dihadapi, antara lain keterbatasan sumber daya dan dukungan teknis, dinamika kebijakan nasional yang memengaruhi target capaian, serta penyesuaian anggaran akibat pemblokiran selama tahun berjalan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, telah dilakukan reviu dan penyesuaian target Rincian Output (RO) maupun target IKSK dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 agar lebih realistis, tindak lanjut atas seluruh rekomendasi periode sebelumnya, serta pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi sebagai dasar perbaikan kinerja. Laporan Kinerja ini juga dijadikan rujukan utama dalam penyusunan perencanaan periode berikutnya agar kebijakan, program, dan target yang dirumuskan semakin efektif, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kinerja.

Melalui pemantauan berkala terhadap indikator yang belum mencapai target maupun yang melampaui 110%, penyesuaian kebijakan berbasis evaluasi kinerja, serta optimalisasi sumber daya dan anggaran, diharapkan BBPOM di Mataram dapat terus meningkatkan mutu pengawasan Obat dan makanan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

## 4.2. SARAN

Berdasarkan hasil capaian kinerja Tahun 2025, diperlukan langkah-langkah strategis guna mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Berbagai kendala dan permasalahan yang menyebabkan sejumlah indikator belum mencapai target maupun yang melampaui 110% dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan” perlu menjadi perhatian utama dalam perumusan strategi peningkatan kinerja tahun mendatang.

Untuk mendukung upaya tersebut, beberapa langkah perbaikan yang dapat dilakukan yaitu::

1. Meningkatkan ketepatan dan kualitas perencanaan kegiatan serta anggaran melalui penyusunan target dan alokasi anggaran berbasis kajian risiko pada setiap Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), sehingga deviasi capaian dapat diminimalkan dan target yang ditetapkan lebih terukur, realistis, serta didukung data historis dan proyeksi yang akurat.
2. Memperkuat kualitas perencanaan kinerja dengan menjadikan hasil evaluasi Tahun 2025 sebagai dasar dalam penyusunan rencana kegiatan dan penetapan target kinerja Tahun 2026, dengan fokus pada efektivitas pelaksanaan program dan peningkatan capaian yang terukur.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala agar kendala dapat terdeteksi lebih awal dan langkah korektif dapat segera dilakukan sebelum berakhirnya tahun anggaran.
4. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi perbaikan dan rencana aksi yang tercantum dalam Analisis Akuntabilitas pada masing-masing indikator guna memastikan pelaksanaan yang konsisten, efektif, dan berkelanjutan.
5. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola kinerja, khususnya dalam aspek teknis pengukuran kinerja dan analisis capaian, sehingga kualitas pelaporan serta interpretasi data menjadi lebih akurat dan komprehensif.

*Halaman ini sengaja dikosongkan*



Inges Solah!

Informatif - Gesit - Solutif - Ramah

# LAMPIRAN

# LAMPIRAN

## 1. PERJANJIAN KINERJA

### a. Perjanjian Kinerja Awal

BADAN POM

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**BALAI BESAR POM DI MATARAM**
**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : YOSEF DWI IRWAN PRAKASA |
| Jabatan | : Kepala Balai Besar POM di Mataram |

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

| | |
|---|---|
| Nama | : TARUNA IKRAR |
| Jabatan | : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI |

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 12 February 2025

| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
|---|---|
| Kepala Balai Besar POM di Mataram | Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI |
| YOSEF DWI IRWAN PRAKASA | TARUNA IKRAR |

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**BALAI BESAR POM DI MATARAM**

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET |
|---|---|---|---|
| 1. | 01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 86.5 Persentase |
| | | 02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO | 26 Persentase |
| | | 03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 85 Persentase |
| | | 04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT | 100 Persentase |
| | | 05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 85 Persentase |
| | | 06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 98.8 Persentase |
| | | 07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 91 Persentase |
| | | 08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 85 Persentase |
| | | 09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 96 Persentase |
| | | 10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 75 Persentase |
| | | 11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | 84.2 Persentase |
| 2. | 02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi | 01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 63 Persentase |
| 3. | 03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 81.7 Nilai |
| 4. | 04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT | 01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 88.57 Nilai |
| | | 02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | 13 Nilai |

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET |
|---|---|---|---|
| | | 03 - Jumlah desa pangan aman | 4 Persentase |
| | | 04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | 1 Persentase |
| 5. | 05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu | 01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | 87.3 Persentase |
| 6. | 06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | 01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | 92 Persentase |
| 7. | 07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | 01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | 90 Persentase |
| 8. | 08 - Layanan Publik UPT yang prima | 01 - Indeks Pelayanan Publik UPT | 4.7 Nilai |
| 9. | 09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | 01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM | 90 Nilai |
| | | 02 - Nilai AKIP UPT BPOM | 83.9 Nilai |
| | | 03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM | 5 Nilai |
| | | 04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | 3.05 Nilai |

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 20.815.994.000 (Dua Puluh Miliar Delapan Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah)

| NO. | KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|---|---|
| 1. | DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia | 10.807.869.000 |
| 2. | WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM | 10.008.125.000 |

Mataram, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar POM di Mataram

YOSEF DWI IRWAN PRAKASA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

**b. Perjanjian Kinerja Revisi kesatu kedua**

BADAN POM

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**BALAI BESAR POM DI MATARAM**
**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : YOSEF DWI IRWAN PRAKASA |
| Jabatan | : Kepala Balai Besar POM di Mataram |

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

| | |
|---|---|
| Nama | : TARUNA IKRAR |
| Jabatan | : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI |

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 29 August 2025

| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
|---|---|
| Kepala Balai Besar POM di Mataram | Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI |
| YOSEF DWI IRWAN PRAKASA | TARUNA IKRAR |

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**BALAI BESAR POM DI MATARAM**

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET |
|---|---|---|---|
| 1. | 01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 89 Persentase |
| | | 02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO | 26 Persentase |
| | | 03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 92 Persentase |
| | | 04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar | 100 Persentase |
| | | 05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 85 Persentase |
| | | 06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 98.8 Persentase |
| | | 07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 91 Persentase |
| | | 08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 85 Persentase |
| | | 09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 96 Persentase |
| | | 10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 91 Persentase |
| | | 11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | 89.6 Persentase |
| | | 12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar | 92 Persentase |
| | | 13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | 100 Persentase |
| | | 14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 81.7 Nilai |
| | | 15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman | 20 Persentase |
| 2. | 02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi | 01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 63 Persentase |
| 3. | 04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT | 01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 88.57 Nilai |
| | | 02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | 13 Nilai |

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET |
|---|---|---|---|
| | | 03 - Jumlah desa pangan aman | 4 Persentase |
| | | 04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | 1 Persentase |
| 4. | 05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu | 01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | 14.04 Persentase |
| 5. | 06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | 01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | 92 Persentase |
| 6. | 07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | 01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | 90 Persentase |
| 7. | 08 - Layanan Publik UPT yang prima | 01 - Indeks Pelayanan Publik UPT | 4.7 Nilai |
| 8. | 09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | 01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM | 90 Nilai |
| | | 02 - Nilai AKIP UPT BPOM | 83.9 Nilai |
| | | 03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM | 5 Nilai |
| | | 04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | 3.05 Nilai |

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 20,670,330,000 (Dua Puluh Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

| NO. | KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|---|---|
| 1. | DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia | 10,730,676,000 |
| 2. | WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM | 9,939,654,000 |

Mataram, 29 August 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar POM di Mataram

YOSEF DWI IRWAN PRAKASA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

## 2. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

### a. RAPK Awal

BADAN POM

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**BALAI BESAR POM DI MATARAM**
**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| 1. | 01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 694.660.000 |
| | | 02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO | | | | | | | | | | | | 26 | 45.700.000 |
| | | 03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 212.130.375 |
| | | 04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 212.130.375 |
| | | 05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 141.420.250 |
| | | 06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | | 7 | 10 | 20 | 25 | 35 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 98.8 | 16.207.500 |
| | | 07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 16.207.500 |
| | | 08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 16.207.500 |
| | | 09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 291.005.500 |
| | | 10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 291.005.500 |
| | | 11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 16.207.500 |
| 2. | 02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana | 01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan | | | | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 7.651.000 |

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| | Produksi Pangan Fortifikasi | ditindaklanjuti sesuai ketentuan | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | | | 81 | 81 | 81 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.7 | 5.055.530.000 |
| 4. | 04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT | 01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | | | 88.57 | 88.57 | 88.57 | 88.57 | 88.57 | 88.57 | 88.57 | 88.57 | 88.57 | 88.57 | 238.478.000 |
| | | 02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | | | 5 | 25 | 45 | 65 | 65 | 65 | 65 | 100 | 100 | 13 | 562.510.000 |
| | | 03 - Jumlah desa pangan aman | | | 5 | 25 | 45 | 75 | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 4 | 665.544.000 |
| | | 04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | | | 5 | 20 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 100 | 100 | 1 | 150.255.000 |
| 5. | 05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu | 01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | | 10 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 87.3 | 93.032.000 |
| 6. | 06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | 01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | | 2.5 | 9.1 | 11.67 | 23.33 | 25.83 | 37.5 | 40 | 49.17 | 65.83 | 80 | 92 | 735.132.000 |
| 7. | 07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | 01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | 4.16 | 8.33 | 12.5 | 16.66 | 20.83 | 25 | 29.16 | 33.33 | 37.5 | 41.66 | 45.83 | 90 | 152.822.000 |
| 8. | 08 - Layanan Publik UPT yang prima | 01 - Indeks Pelayanan Publik UPT | | | | | | | | | | | | 4.7 | 126.033.000 |
| 9. | 09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | 01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM | | | | | | | | | | | | 90 | 2.769.031.250 |
| | | 02 - Nilai AKIP UPT BPOM | | | | | | | | | | | | 83.9 | 2.769.031.250 |
| | | 03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM | | | | | | | | | | | | 5 | 2.769.031.250 |

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| | | 04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | | | | | | | | | | | | 3.05 | 2.769.031.250 |
| | | | | | | | | | | | | | | **Total** | 20.815.994.000 |

Mataram, 12 February 2025

Kepala Balai Besar POM di Mataram

YOSEF DWI IRWAN PRAKASA

## b. RAPK Akhir

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI MATARAM
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| 1. | 01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 659.927.000 |
| | | 02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO | | | | | | | | | | | | 26 | 45.700.000 |
| | | 03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 212.130.375 |
| | | 04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 141.420.250 |
| | | 05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 141.420.250 |
| | | 06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | | 7 | 10 | 20 | 25 | 35 | 50 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 16.207.500 |
| | | 07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 16.207.500 |
| | | 08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 16.207.500 |
| | | 09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 291.005.500 |
| | | 10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 218.254.125 |
| | | 11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 16.207.500 |
| | | 12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar | | | | | | | | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 34.733.000 |

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| | | 13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | | | | | | | | | | | | 100 | 72.751.375 |
| | | 14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | | | 81 | 81 | 81 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.7 | 4.978.337.000 |
| | | 15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman | | | | | | | | | | | | 20 | 70.710.125 |
| 2. | 02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi | 01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | | | | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 7.651.000 |
| 3. | 05 - Meningkatnya efektivitas KIE | 01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | | | 88.57 | 88.57 | 88.57 | 88.57 | 88.57 | 88.57 | 88.57 | 88.57 | 88.57 | 88.57 | 848.478.000 |
| | | 02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | | | 5 | 25 | 49 | 49 | 54 | 54 | 85 | 85 | 100 | 13 | 262.510.000 |
| | | 03 - Jumlah desa pangan aman | | | 5 | 25 | 37 | 47 | 57 | 57 | 80 | 80 | 100 | 4 | 355.544.000 |
| | | 04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | | | 5 | 25 | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 150.255.000 |
| 4. | 06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | 01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | | 10 | 15 | 25 | 45 | 55 | 60 | 65 | 75 | 80 | 90 | 14.04 | 93.032.000 |
| 5. | 07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | 01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | | 2.5 | 9.1 | 9.17 | 14.17 | 27.5 | 35 | 60.83 | 68.33 | 80 | 85 | 92 | 735.132.000 |
| 6. | - | 01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | 4.16 | 8.33 | 12.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 | 152.822.000 |
| | | 01 - Indeks Pelayanan Publik UPT | | | | | | | | | | | | 4.7 | 126.033.000 |

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| | | 01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM | | | | | | | | | | | | 90 | 2.751.913.500 |
| | | 02 - Nilai AKIP UPT BPOM | | | | | | | | | | | | 83.9 | 2.751.913.500 |
| | | 03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM | | | | | | | | | | | | 5 | 2.751.913.500 |
| | | 04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | | | | | | | | | | | | 3.05 | 2.751.913.500 |
| | | | | | | | | | | | | | | **Total** | 20.670.330.000 |

Mataram, 29 August 2025

Kepala Balai Besar POM di Mataram

Yosef Dwi Irwan Prakasa

## 3. RENCANA KERJA TAHUNAN

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM
Jl. Catur Warga No. Mataram 83121 Nusa Tenggara Barat
Telp. (0370) 621926, ULPK : 087871500533, Informasi Pengujian : 087864374887
BADAN POM
Email : bpom_mataram@pom.go.id; bpom_mtrm@yahoo.com ; Website : mataram.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM
NOMOR HK.02.02.14A.09.25.119 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM,

Menimbang :

a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram pada Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Tahun 2026.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM TAHUN 2026.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Tahun 2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2026.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 7 Oktober 2025

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT

DAN MAKANAN DI MATARAM,



YOGI ABASO MATARAM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM
NOMOR HK.02.02.14A.09.25.119 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM TAHUN 2026

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM TAHUN 2026

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET |
|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 90.25 |
| | | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO | 27 |
| | | Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 93 |
| | | Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar | 100 |
| | | Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 87 |
| | | Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 98.9 |
| | | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 93 |
| | | Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 88 |
| | | Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi | 96.88 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET |
|---|---|---|---|
| | | yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | |
| | | Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 92 |
| | | Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | 91 |
| | | Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar | 93 |
| | | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | 100 |
| | | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 85.7 |
| | | Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman | 40 |
| | | Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 81 |
| 2 | Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi | Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 63 |
| 3 | Meningkatnya efektivitas KIE | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 89.45 |
| | | Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | 16 |
| | | Jumlah desa pangan aman | 6 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET |
|---|---|---|---|
| | | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | 1 |
| 4 | Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan | 30.90 |
| 5 | Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | 94 |
| 6 | Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | 91 |
| 7 | Layanan Publik UPT yang Prima | Indeks Pelayanan Publik UPT | 4.75 |
| 8 | Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal | Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM | 90.25 |
| | | Nilai AKIP UPT BPOM | 83.95 |
| | | Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM | 5 |
| | | Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | 3.10 |

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM,

YOGI ABASO MATARAM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**4. Capaian Output (Rincian Output) Kegiatan dan Realisasi Anggaran Tahun 2025**

| No. | Program/Kegiatan/Ouput | | Volume | | | Anggaran | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2025 | Realisasi | Capaian/ Progress (%) | Pagu awal (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
| a | b | | c | d | e= (d/c*100) | f | g | h= (g/f*100) |
| 1 | AEA.001 | Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT | **14** | 14 | 100.00 | 43,300,000 | 43,283,500 | 99,96 |
| 2 | BAH.001 | Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh BB/BPOM | **925** | 1,100 | 118.92 | 126,033,000 | 125,992,008 | 99,97 |
| 3 | BDC.001 | Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE | **2,100** | 2,101 | 100.05 | 705,125,000 | 705,116,180 | 100,00 |
| 4 | BKB.001 | Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | **1** | 1 | 100.00 | 87,625,000 | 87,510,493 | 100,00 |
| 5 | BMB.001 | Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT | **35** | 37 | 105.71 | 30,718,000 | 30,717,981 | 99,87 |
| 6 | CAB.002 | Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia | **1** | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CAN.001 | Perangkat pengolah data dan komunikasi | **8** | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PDD.001 | Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | **1** | 1 | 100.00 | 1,335,853,000 | 1335735983 | 99,99 |

| No. | Program/Kegiatan/Ouput | | Volume | | | Anggaran | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2025 | Realisasi | Capaian/ Progress (%) | Pagu awal (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
| a | b | | c | d | e= (d/c*100) | f | g | h= (g/f*100) |
| 9 | QCD.U52 | PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM MATARAM | **6** | 7 | 116.67 | 735,132,000 | 734995060 | 99,98 |
| 10 | QDB.001 | Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman | **13** | 13 | 100.00 | 27,330,000 | 27320000 | 99,96 |
| 11 | QDB.002 | Desa Pangan Aman | **4** | 4 | 100.00 | 50,990,000 | 50982000 | 99,98 |
| 12 | QDB.003 | Pasar Pangan aman berbasis komunitas | **1** | 1 | 100.00 | 20,115,000 | 20114800 | 100,00 |
| 13 | QDC 001 | Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans | **45** | 45 | 100.00 | 4,450,000 | 4448000 | 99,96 |
| 14 | QDG.001 | UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT | **30** | 30 | 100.00 | 21,360,000 | 21320000 | 99,81 |
| 15 | QIA.001 | Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT | **446** | 456 | 102.24 | 565,681,000 | 565674943 | 100,00 |
| 16 | QIA.005 | Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT | **992** | 995 | 100.30 | 694,660,000 | 694553368 | 99,98 |
| 17 | QIC.001 | Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksaoleh UPT | **46** | 48 | 104.35 | 64,830,000 | 64827260 | 100,00 |

| No. | Program/Kegiatan/Ouput | | Volume | | | Anggaran | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2025 | Realisasi | Capaian/ Progress (%) | Pagu awal (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
| a | b | | c | d | e= (d/c*100) | f | g | h= (g/f*100) |
| 18 | QIC.003 | Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang Diperiksaoleh UPT | **5** | 5 | 100.00 | 7,651,000 | 7648400 | 99,97 |
| 19 | QIC.004 | Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | **353** | 379 | 107.37 | 582,011,000 | 581998534 | 100,00 |
| 20 | RAB.001 | Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | **1** | 1 | 100.00 | 3,641,807,000 | 3640898998 | 99,98 |
| 21 | EBA 956 | Layanan BMN | **1** | 1 | 100.00 | 3,047,000 | 3046804 | 99,99 |
| 22 | EBA.994 | Layanan Perkantoran | **1** | 1 | 100.00 | 8,429,902,000 | 8421528058 | 99,90 |

**5. Nilai Efisiensi masing-masing indikator kinerja dan Sasaran Kegiatan Tahun 2025**

| No | Indikator | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian TE | KESIMPULAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T | R | % | T | R | % | | | | |
| **Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT** | | | | **107.75** | **6,889,292,000** | **6,888,137,086** | **99.98** | **1.08** | **0.08** | **100 %** | Efisien |
| 1 | Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 89.00 | 100.00 | 112.36 | 659,927,000 | 659,825,700 | **99.98** | **1.12** | **0.12** | **100 %** | Efisien |
| 2 | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO | 26.00 | 31.11 | 119.65 | 4,450,000 | 4,448,000 | **99.96** | **1.20** | **0.20** | **100 %** | Efisien |
| 3 | Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 92.00 | 99.71 | 108.38 | 212,130,375 | 212,128,104 | **100.00** | **1.08** | **0.08** | **100 %** | Efisien |
| 4 | Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 141,420,250 | 141,418,736 | **100.00** | **1.00** | **0.00** | **100 %** | Efisien |

| No | Indikator | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian TE | KESIMPULAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T | R | % | T | R | % | | | | |
| 5 | Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 85.00 | 100.00 | 117.65 | 141,420,250 | 141,418,736 | **100.00** | **1.18** | **0.18** | **100 %** | Efisien |
| 6 | Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 98.8 | 99.40 | 100.61 | 16,207,500 | 16,206,815 | **100.00** | **1.01** | **0.01** | **100 %** | Efisien |
| 7 | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 91.00 | 100.00 | 109.89 | 16,207,500 | 16,206,815 | **100.00** | **1.10** | **0.10** | **100 %** | Efisien |
| 8 | Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 85.00 | 92.68 | 109.04 | 16,207,500 | 16,206,815 | **100.00** | **1.09** | **0.09** | **100 %** | Efisien |

| No | Indikator | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian TE | KESIMPULAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T | R | % | T | R | % | | | | |
| 9 | Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 96.00 | 98.57 | 102.68 | 291,005,500 | 290,999,267 | **100.00** | **1.03** | **0.03** | **100 %** | Efisien |
| 10 | Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 91.00 | 97.33 | 106.96 | 218,254,125 | 218,249,450 | **100.00** | **1.07** | **0.07** | **100 %** | Efisien |
| 11 | Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | 89.6 | 99.48 | 111.03 | 16,207,500 | 16,206,815 | **100.00** | **1.11** | **0.11** | **100 %** | Efisien |
| 12 | Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar | 92.00 | 94.40 | 102.61 | 34,733,000 | 34,727,668 | **99.98** | **1.03** | **0.03** | **100 %** | Efisien |
| 13 | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | 100.00 | 105.69 | 105.69 | 72,751,375 | 72,749,817 | **100.00** | **1.06** | **0.06** | **100 %** | Efisien |

| No | Indikator | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian TE | KESIMPULAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T | R | % | T | R | % | | | | |
| 14 | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 81.7 | 89.70 | 109.79 | 4,977,660,000 | 4,976,634,981 | **100.00** | **1.10** | **0.10** | **100 %** | Efisien |
| 15 | Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 70,710,125 | 70,709,368 | **99.97** | **1.00** | **0.00** | **100 %** | Efisien |
| **Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi** | | | | **100.00** | **7,651,000** | **7,648,400** | **99.97** | **1.00** | **0.00** | **100 %** | Efisien |
| 16 | Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 63.00 | 63.00 | 100.00 | 7,651,000 | 7,648,400 | **99.97** | **1.00** | **0.00** | **100 %** | Efisien |

| No | Indikator | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian TE | KESIMPULAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T | R | % | T | R | % | | | | |
| **Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT** | | | | **101.19** | **834,278,000** | **834,250,961** | **100.00** | **1.01** | **0.01** | **100 %** | Efisien |
| 17 | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 88.57 | 92.79 | 104.76 | 735,843,000 | 735,834,161 | 100.00 | **1.05** | **0.05** | **100 %** | Efisien |
| 18 | Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | 13.00 | 13.00 | 100.00 | 27,330,000 | 27,320,000 | 99.96 | **1.00** | **0.00** | **100 %** | Efisien |
| 19 | Jumlah desa pangan aman | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 50,990,000 | 50,982,000 | 99.98 | **1.00** | **0.00** | **100 %** | Efisien |
| 20 | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 20,115,000 | 20,114,800 | 100.00 | **1.00** | **0.00** | **100 %** | Efisien |
| **Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu** | | | | **112.04** | **21,360,000** | **21,320,000** | **99.81** | **1.12** | **0.12** | **100 %** | Efisien |

| No | Indikator | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian TE | KESIMPULAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T | R | % | T | R | % | | | | |
| 21 | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | 14.04 | 15.73 | 112.04 | 21,360,000 | 21,320,000 | 99.81 | **1.12** | **0.12** | **100 %** | Efisien |
| **Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT** | | | | **101.71** | **735,132,000** | **734,995,060** | **99.98** | **1.02** | **0.02** | **100 %** | Efisien |
| 22 | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | 92.00 | 93.57 | 101.71 | 735,132,000 | 734,995,060 | 99.98 | **1.02** | **0.02** | **100 %** | Efisien |
| **Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT** | | | | **108.89** | **43,300,000** | **43,283,500** | **99.96** | **1.09** | **0.09** | **100 %** | Efisien |

| No | Indikator | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian TE | KESIMPULAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T | R | % | T | R | % | | | | |
| 23 | Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | 90.00 | 98.00 | 108.89 | 43,300,000 | 43,283,500 | 99.96 | **1.09** | **0.09** | **100 %** | Efisien |
| **Layanan Publik UPT yang prima** | | | | **105.11** | **126,033,000** | **125,992,008** | **99.97** | **1.05** | **0.05** | **100 %** | Efisien |
| 24 | Indeks Pelayanan Publik UPT | 4.7 | 4.94 | 105.11 | 126,033,000 | 125,992,008 | 99.97 | **1.05** | **0.05** | **100 %** | Efisien |
| **Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal** | | | | **101.03** | **8,520,574,000** | **8,512,085,356** | **99.90** | **1.01** | **0.01** | **100 %** | Efisien |
| 25 | Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM | 90.00 | 90.93 | 101.03 | 2,130,143,500 | 2,128,021,339 | 99.90 | **1.01** | **0.01** | **100 %** | Efisien |
| 26 | Nilai AKIP UPT BPOM | 83.9 | 82.55 | 98.39 | 2,130,143,500 | 2,128,021,339 | 99.90 | **0.98** | **-0.02** | **75 %** | Tidak Efisien |
| 27 | Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 2,130,143,500 | 2,128,021,339 | 99.90 | **1.00** | **0.00** | **100 %** | Efisien |

| No | Indikator | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian TE | KESIMPULAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T | R | % | T | R | % | | | | |
| 28 | Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | 3.05 | 2.97 | 97.34 | 2,130,143,500 | 2,128,021,339 | 99.90 | **0.97** | **-0.03** | **75 %** | Tidak Efisien |
| | TOTAL | | | 105 | 17,177,620,000 | 17,167,712,371 | 99.94 | **1.05** | **0.05** | **100 %** | Efisien |

6. Nilai Efisiensi masing-masing Kegiatan/Rincian Output (RO) Triwulan IV 2025

| No | KRO | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian TE | KESIMPULAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T | R | % | T | R | % | | | | |
| 1 | AEA.001 | **14** | 14 | 100.00 | 43,300,000 | 43283500 | 99.96 | **1.00** | **0.00** | **100 %** | **Efisien** |
| 2 | BAH.001 | **925** | 1,100 | 118.92 | 126,033,000 | 125992008 | 99.97 | **1.19** | **0.19** | **100 %** | **Efisien** |
| 3 | BDC.001 | **2,100** | 2,101 | 100.05 | 705,125,000 | 705116180 | 100.00 | **1.00** | **0.00** | **100 %** | **Efisien** |
| 4 | BKB.001 | **1** | 1 | 100.00 | 87,625,000 | 87510493 | 99.87 | **1.00** | **0.00** | **100 %** | **Efisien** |
| 5 | BMB.001 | **35** | 37 | 105.71 | 30,718,000 | 30717981 | 100.00 | **1.06** | **0.06** | **100 %** | **Efisien** |
| 6 | CAB.002 | **1** | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | **0.00** | **-1.00** | **75 %** | **Anggaran di Blokir** |
| 7 | CAN.001 | **8** | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | **0.00** | **-1.00** | **75 %** | **Anggaran di Blokir** |
| 8 | PDD.001 | **1** | 1 | 100.00 | 1,335,853,000 | 1335735983 | 99.99 | **1.00** | **0.00** | **100 %** | **Efisien** |
| 9 | QCD.U52 | **6** | 7 | 116.67 | 735,132,000 | 734995060 | 99.98 | **1.17** | **0.17** | **100 %** | **Efisien** |
| 10 | QDB.001 | **13** | 13 | 100.00 | 27,330,000 | 27320000 | 99.96 | **1.00** | **0.00** | **100 %** | **Efisien** |

| No | KRO | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian TE | KESIMPULAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T | R | % | T | R | % | | | | |
| 11 | QDB.002 | **4** | 4 | 100.00 | 50,990,000 | 50982000 | 99.98 | **1.00** | **0.00** | **100 %** | **Efisien** |
| 12 | QDB.003 | **1** | 1 | 100.00 | 20,115,000 | 20114800 | 100.00 | **1.00** | **0.00** | **100 %** | **Efisien** |
| 13 | QDC 001 | **45** | 45 | 100.00 | 4,450,000 | 4448000 | 99.96 | **1.00** | **0.00** | **100 %** | **Efisien** |
| 14 | QDG.001 | **30** | 30 | 100.00 | 21,360,000 | 21320000 | 99.81 | **1.00** | **0.00** | **100 %** | **Efisien** |
| 15 | QIA.001 | **446** | 456 | 102.24 | 565,681,000 | 565674943 | 100.00 | **1.02** | **0.02** | **100 %** | **Efisien** |
| 16 | QIA.005 | **992** | 995 | 100.30 | 694,660,000 | 694553368 | 99.98 | **1.00** | **0.00** | **100 %** | **Efisien** |
| 17 | QIC.001 | **46** | 48 | 104.35 | 64,830,000 | 64827260 | 100.00 | **1.04** | **0.04** | **100 %** | **Efisien** |
| 18 | QIC.003 | **5** | 5 | 100.00 | 7,651,000 | 7648400 | 99.97 | **1.00** | **0.00** | **100 %** | **Efisien** |
| 19 | QIC.004 | **353** | 379 | 107.37 | 582,011,000 | 581998534 | 100.00 | **1.07** | **0.07** | **100 %** | **Efisien** |
| 20 | RAB.001 | **1** | 1 | 100.00 | 3,641,807,000 | 3640898998 | 99.98 | **1.00** | **0.00** | **100 %** | **Efisien** |
| 21 | EBA 956 | **1** | 1 | 100.00 | 3,047,000 | 3046804 | 99.99 | **1.00** | **0.00** | **100 %** | **Efisien** |

| No | KRO | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian TE | KESIMPULAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T | R | % | T | R | % | | | | |
| 22 | EBA.994 | **1** | 1 | 100.00 | 8,429,902,000 | 8421528058 | 99.90 | **1.00** | **0.00** | **100 %** | **Efisien** |
| | TOTAL | 251.00 | 262.00 | 102.78 | 17,177,620,000 | 17,167,712,370 | 99.94 | **1.03** | **0.03** | **100 %** | **Efisien** |

## 7. NILAI SASARAN KEGIATAN (NSS) DAN NILAI PENCAPAIAN KINERJA ORGANISASI (NKO) Tahun 2025

| NO | SASARAN KEGIATAN | NO | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2025 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET TAHUN 2025 | TARGET BULAN | REALISASI | %Capaian thd Target bulan n | Kategori Capaian IKU / IKSK | % CAPAIAN koreksi | KATEGORI CAPAIAN IKU /SS |
| Nilai Kinerja Orhganisasi (NPSS) | | | | | | | | | 104.39% | Sangat Baik |
| 1 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 1 | Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 89 | 89.00 | 100.00 | 112.36% | Tidak Dapat disimpulkan | 110.00% | 106.38% Sangat Baik |
| 1 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 2 | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO | 26 | 26.00 | 31.11 | 119.66% | Tidak Dapat disimpulkan | 110.00% | |
| 1 | Meningkatnya efektivitas | 3 | Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang | 92 | 92.00 | 99.71 | 108.38% | Sangat Baik | 108.38% | |

| NO | SASARAN KEGIATAN | NO | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2025 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET TAHUN 2025 | TARGET BULAN | REALISASI | %Capaian thd Target bulan n | Kategori Capaian IKU / IKSK | % CAPAIAN koreksi | KATEGORI CAPAIAN IKU /SS | |
| | pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | | ditindaklanjuti sesuai ketentuan | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 4 | Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT | 100 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Baik | 100.00% | | |
| 1 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan | 5 | Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 85 | 85.00 | 100.00 | 117.65% | Tidak Dapat disimpulkan | 110.00% | | |

| NO | SASARAN KEGIATAN | NO | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2025 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET TAHUN 2025 | TARGET BULAN | REALISASI | %Capaian thd Target bulan n | Kategori Capaian IKU / IKSK | % CAPAIAN koreksi | KATEGORI CAPAIAN IKU /SS | |
| | Olahan di wilayah kerja UPT | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 6 | Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 98.8 | 98.80 | 99.40 | 100.61% | Sangat Baik | 100.61% | | |
| 1 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 7 | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 91 | 91.00 | 100.00 | 109.89% | Sangat Baik | 109.89% | | |
| 1 | Meningkatnya efektivitas | 8 | Persentase sarana produksi Pangan Olahan | 85 | 85.00 | 92.68 | 109.04% | Sangat Baik | 109.04% | | |

| NO | SASARAN KEGIATAN | NO | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2025 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET TAHUN 2025 | TARGET BULAN | REALISASI | %Capaian thd Target bulan n | Kategori Capaian IKU / IKSK | % CAPAIAN koreksi | KATEGORI CAPAIAN IKU /SS | |
| | pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | | yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 9 | Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 96 | 96.00 | 98.57 | 102.68% | Sangat Baik | 102.68% | | |
| 1 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan | 10 | Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 91 | 91.00 | 97.33 | 106.96% | Sangat Baik | 106.96% | | |

| NO | SASARAN KEGIATAN | NO | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2025 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET TAHUN 2025 | TARGET BULAN | REALISASI | %Capaian thd Target bulan n | Kategori Capaian IKU / IKSK | % CAPAIAN koreksi | KATEGORI CAPAIAN IKU /SS | |
| | Olahan di wilayah kerja UPT | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 11 | Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | 89.6 | 89.60 | 99.48 | 111.03% | Tidak Dapat disimpulkan | 110.00% | | |
| 1 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 12 | Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar | 92 | 92.00 | 94.40 | 102.61% | Sangat Baik | 102.61% | | |

| NO | SASARAN KEGIATAN | NO | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2025 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET TAHUN 2025 | TARGET BULAN | REALISASI | %Capaian thd Target bulan n | Kategori Capaian IKU / IKSK | % CAPAIAN koreksi | KATEGORI CAPAIAN IKU /SS | |
| 1 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 13 | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | 100 | 100.00 | 105.69 | 105.69% | Sangat Baik | 105.69% | | |
| 1 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 14 | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 81.7 | 81.70 | 89.70 | 109.79% | Sangat Baik | 109.79% | | |
| 1 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi | 15 | Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian | 20 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | Baik | 100.00% | | |

| NO | SASARAN KEGIATAN | NO | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2025 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET TAHUN 2025 | TARGET BULAN | REALISASI | %Capaian thd Target bulan n | Kategori Capaian IKU / IKSK | % CAPAIAN koreksi | KATEGORI CAPAIAN IKU /SS | |
| | dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | | Kabupaten/Kota Pangan Aman | | | | | | | | |
| 2 | Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi | 16 | Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 63 | 63.00 | 63.00 | 100.00% | Baik | 100.00% | 100.00% | Baik |
| 3 | Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT | 17 | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 88.57 | 88.57 | 92.79 | 104.76% | Sangat Baik | 104.76% | 101.19% | Sangat Baik |
| 3 | Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT | 18 | Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | 13 | 13.00 | 13.00 | 100.00% | Baik | 100.00% | | |
| 3 | Meningkatnya efektivitas KIE di | 19 | Jumlah desa pangan aman | 4 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | Baik | 100.00% | | |

| NO | SASARAN KEGIATAN | NO | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2025 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET TAHUN 2025 | TARGET BULAN | REALISASI | %Capaian thd Target bulan n | Kategori Capaian IKU / IKSK | % CAPAIAN koreksi | KATEGORI CAPAIAN IKU /SS | |
| | masing-masing wilayah kerja UPT | | | | | | | | | | |
| 3 | Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT | 20 | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | 1 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Baik | 100.00% | | |
| 4 | Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu | 21 | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | 14.04 | 14.04 | 15.73 | 112.04% | Tidak Dapat disimpulkan | 110.00% | 110.00% | Sangat Baik |
| 5 | Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan | 22 | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | 92 | 92.00 | 93.57 | 101.71% | Sangat Baik | 101.71% | 101.71% | Sangat Baik |

| NO | SASARAN KEGIATAN | NO | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2025 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET TAHUN 2025 | TARGET BULAN | REALISASI | %Capaian thd Target bulan n | Kategori Capaian IKU / IKSK | % CAPAIAN koreksi | KATEGORI CAPAIAN IKU /SS | |
| | Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | | | | | | | | | | |
| 6 | Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | 23 | Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | 90 | 90.00 | 98.00 | 108.89% | Sangat Baik | 108.89% | 108.89% | Sangat Baik |
| 7 | Layanan Publik UPT yang prima | 24 | Indeks Pelayanan Publik UPT | 4.7 | 4.70 | 4.94 | 105.11% | Sangat Baik | 105.11% | 105.11% | Sangat Baik |
| 8 | Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | 25 | Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM | 90 | 90.00 | 90.93 | 101.03% | Sangat Baik | 101.03% | 99.20% | Baik |

| NO | SASARAN KEGIATAN | NO | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2025 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET TAHUN 2025 | TARGET BULAN | REALISASI | %Capaian thd Target bulan n | Kategori Capaian IKU / IKSK | % CAPAIAN koreksi | KATEGORI CAPAIAN IKU /SS | |
| 8 | Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | 26 | Nilai AKIP UPT BPOM | 83.9 | 83.90 | 82.55 | 98.39% | Baik | 98.39% | | |
| 8 | Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | 27 | Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM | 5 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | Baik | 100.00% | | |
| 8 | Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | 28 | Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | 3.05 | 3.05 | 2.970 | 97.38% | Baik | 97.38% | | |

## 8. KERTAS KERJA REALISASI MASING-MASING INDIKATOR KINERJA

### a. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti sesuai ketentuan

| Kode Indikator | Nama Indikator | Bulan | Target Sampel Sediaan Farmasi | Target Indikator (%) | % Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | % Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (Bobot 60%) | % Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | % Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Realisasi (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti | Januari | 53,00 | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 1 | Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti | Februari | 81,00 | 86,50 | 100,00 | 96,47 | 97,50 | 98,60 | 98,14 |
| 1 | Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti | Maret | 97,00 | 86,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti | April | 279,00 | 86,50 | 99,74 | 95,26 | 98,57 | 97,47 | 97,76 |
| 1 | Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti | Mei | 430,00 | 86,50 | 100,00 | 94,58 | 93,04 | 95,00 | 95,66 |
| 1 | Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti | Juni | 570,00 | 86,50 | 100,00 | 96,54 | 96,57 | 95,99 | 97,27 |
| 1 | Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti | Juli | 698,00 | 86,50 | 96,27 | 98,70 | 98,94 | 99,73 | 98,41 |
| 1 | Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti | Agustus | 810,00 | 89,00 | 95,78 | 98,31 | 98,87 | 97,36 | 97,58 |
| 1 | Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti | September | 894,00 | 89,00 | 97,41 | 98,71 | 98,98 | 98,54 | 98,41 |
| 1 | Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti | Oktober | 958,00 | 89,00 | 100,00 | 99,88 | 99,84 | 100,00 | 99,93 |
| 1 | Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti | November | 988,00 | 89,00 | 100,00 | 100,00 | 99,81 | 100,00 | 99,95 |
| 1 | Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti | Desember | 992,00 | 89,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

**b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD_ESO ke BPOM**

| Kode Unit Kerja | Nama Unit Kerja | Kode Indikator | Nama Indikator | Bulan | Target Indikator (%) | jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan | jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM | Realisasi (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 2 | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM | Januari | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 2 | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM | Februari | 2,22 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 2 | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM | Maret | 4,44 | 3,00 | 45,00 | 6,67 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 2 | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM | April | 6,67 | 4,00 | 45,00 | 8,89 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 2 | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM | Mei | 8,89 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 2 | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM | Juni | 11,11 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 2 | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM | Juli | 13,33 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 2 | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM | Agustus | 15,56 | 5,00 | 45,00 | 11,11 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 2 | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM | September | 17,78 | 10,00 | 45,00 | 22,22 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 2 | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM | Oktober | 22,22 | 11,00 | 45,00 | 24,44 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 2 | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM | November | 24,44 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 2 | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM | Desember | 26,67 | 14,00 | 45,00 | 31,11 |

c. **Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

| Kode Unit Kerja | Nama Unit Kerja | Kode Indikator | Nama Indikator | Bulan | Target Sampel Pangan Olahan | Target Indikator (%) | Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%) | Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%) | Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%) | Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%) | Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%) | Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot 20%) | Realisasi (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 3 | Persentase sampel Pa | Januari | 7 | 85,00 | 50,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 3 | Persentase sampel Pa | Februari | 16 | 85,00 | 73,08 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 94,62 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 3 | Persentase sampel Pa | Maret | 23 | 85,00 | 94,02 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,80 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 3 | Persentase sampel Pa | April | 61 | 85,00 | 75,17 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 95,03 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 3 | Persentase sampel Pa | Mei | 108 | 85,00 | 80,65 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 96,13 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 3 | Persentase sampel Pa | Juni | 161 | 85,00 | 85,38 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 97,08 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 3 | Persentase sampel Pa | Juli | 216 | 85,00 | 83,20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 93,81 | 100,00 | 96,02 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 3 | Persentase sampel Pa | Agustus | 270 | 92,00 | 89,38 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 95,68 | 100,00 | 97,44 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 3 | Persentase sampel Pa | September | 327 | 92,00 | 91,16 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,13 | 100,00 | 98,05 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 3 | Persentase sampel Pa | Oktober | 374 | 92,00 | 89,36 | 99,02 | 100,00 | 100,00 | 99,08 | 100,00 | 97,58 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 3 | Persentase sampel Pa | November | 400 | 92,00 | 93,74 | 99,18 | 100,00 | 100,00 | 98,90 | 100,00 | 98,47 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 3 | Persentase sampel Pa | Desember | 410 | 92,00 | 99,43 | 99,29 | 100,00 | 100,00 | 99,68 | 100,00 | 99,71 |

### d. Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

| Kode Unit Kerja | Nama Unit Kerja | Kode Indikator | Nama Indikator | Bulan | Target Indikator (%) | % Pemenuhan Target Sampel PIRT (Bobot 20%) | % Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%) | % Ketepatan pengambilan kesimpulan (Bobot 20%) | % Ketepatan waktu pengambilan sampel (Bobot 10%) | % Ketepatan waktu pelaporan (Bobot 10%) | % Tindak lanjut sampel PIRT (Bobot 20%) | Realisasi (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makana | 5 | Persentase Sampel PIRT Ber | Januari | 85,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makana | 5 | Persentase Sampel PIRT Ber | Februari | 85,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makana | 5 | Persentase Sampel PIRT Ber | Maret | 85,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makana | 5 | Persentase Sampel PIRT Ber | April | 85,00 | 76,47 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 95,29 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makana | 5 | Persentase Sampel PIRT Ber | Mei | 85,00 | 82,65 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 96,53 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makana | 5 | Persentase Sampel PIRT Ber | Juni | 85,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makana | 5 | Persentase Sampel PIRT Ber | Juli | 85,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makana | 5 | Persentase Sampel PIRT Ber | Agustus | 85,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makana | 5 | Persentase Sampel PIRT Ber | September | 85,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makana | 5 | Persentase Sampel PIRT Ber | Oktober | 85,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makana | 5 | Persentase Sampel PIRT Ber | November | 85,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makana | 5 | Persentase Sampel PIRT Ber | Desember | 85,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

e. **Persentase Keputusan_Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder**

| Kode Unit Kerja | Nama Unit Kerja | Kode Indikator | Nama Indikator | Bulan | Target Indikator (%) | % Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha | % Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor | Realisasi (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 6 | Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawa | Januari | 0,00 | 16,67 | 0,00 | 8,33 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 6 | Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawa | Februari | 7,00 | 20,00 | 0,00 | 10,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 6 | Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawa | Maret | 10,00 | 23,53 | 0,00 | 11,76 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 6 | Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawa | April | 20,00 | 32,00 | 16,67 | 24,33 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 6 | Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawa | Mei | 25,00 | 27,78 | 25,00 | 26,39 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 6 | Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawa | Juni | 35,00 | 33,33 | 40,00 | 36,67 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 6 | Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawa | Juli | 50,00 | 95,92 | 91,30 | 93,61 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 6 | Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawa | Agustus | 98,80 | 98,25 | 100,00 | 99,12 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 6 | Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawa | September | 98,80 | 98,46 | 100,00 | 99,23 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 6 | Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawa | Oktober | 98,80 | 97,14 | 100,00 | 98,57 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 6 | Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawa | November | 98,80 | 97,50 | 100,00 | 98,75 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 6 | Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawa | Desember | 98,80 | 98,81 | 100,00 | 99,40 |

**f. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan**

| Kode Unit Kerja | Nama Unit Kerja | Kode Indikator | Nama Indikator | Bulan | Target Indikator | % Sarprod Obat | % Sarprod OBA | % Sarprod SK | % Sarprod Kosmetik | % Sarprod SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan M | 7 | Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi | Januari | 91,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | 100,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan M | 7 | Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi | Februari | 91,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | 100,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan M | 7 | Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi | Maret | 91,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | 100,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan M | 7 | Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi | April | 91,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | 100,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan M | 7 | Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi | Mei | 91,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 | 100,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan M | 7 | Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi | Juni | 91,00 | #DIV/0! | 100,00 | #DIV/0! | 100,00 | 100,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan M | 7 | Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi | Juli | 91,00 | #DIV/0! | 100,00 | #DIV/0! | 100,00 | 100,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan M | 7 | Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi | Agustus | 91,00 | #DIV/0! | 100,00 | #DIV/0! | 100,00 | 100,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan M | 7 | Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi | September | 91,00 | #DIV/0! | 100,00 | #DIV/0! | 93,75 | 96,88 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan M | 7 | Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi | Oktober | 91,00 | #DIV/0! | 100,00 | #DIV/0! | 100,00 | 100,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan M | 7 | Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi | November | 91,00 | #DIV/0! | 100,00 | #DIV/0! | 100,00 | 100,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan M | 7 | Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi | Desember | 91,00 | #DIV/0! | 100,00 | #DIV/0! | 100,00 | 100,00 |

### g. Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

| Kode Unit Kerja | Nama Unit Kerja | Kode Indikator | Nama Indikator | Bulan | Target Indikator | Jumlah sarana yang diperiksa tepat waktu | jumlah sarana yang diperiksa | % Ketepatan waktu | Jumlah sarana yang ditindaklanjuti dengan tepat | Jumlah sarana yang diperiksa2 | % Ketepatan tindak lanjut | Jumlah sarana yang diberikan grading dengan tepat | jumlah sarana yang diperiksa 2 | % Evaluasi Ketepatan Grading | % Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat d | 8 | Persentase Sarana P | Januari | | 4,00 | 4,00 | 100,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat d | 8 | Persentase Sarana P | Februari | 85,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat d | 8 | Persentase Sarana P | Maret | 85,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat d | 8 | Persentase Sarana P | April | 85,00 | 7,00 | 9,00 | 77,78 | 9,00 | 9,00 | 100,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00 | 92,59 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat d | 8 | Persentase Sarana P | Mei | 85,00 | 11,00 | 13,00 | 84,62 | 13,00 | 13,00 | 100,00 | 13,00 | 13,00 | 100,00 | 94,87 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat d | 8 | Persentase Sarana P | Juni | 85,00 | 18,00 | 20,00 | 90,00 | 18,00 | 20,00 | 90,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 | 93,33 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat d | 8 | Persentase Sarana P | Juli | 85,00 | 22,00 | 24,00 | 91,67 | 21,00 | 24,00 | 87,50 | 24,00 | 24,00 | 100,00 | 93,06 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat d | 8 | Persentase Sarana P | Agustus | 85,00 | 25,00 | 27,00 | 92,59 | 24,00 | 27,00 | 88,89 | 27,00 | 27,00 | 100,00 | 93,83 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat d | 8 | Persentase Sarana P | September | 85,00 | 29,00 | 32,00 | 90,63 | 29,00 | 32,00 | 90,63 | 32,00 | 32,00 | 100,00 | 93,75 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat d | 8 | Persentase Sarana P | Oktober | 85,00 | 33,00 | 36,00 | 91,67 | 32,00 | 36,00 | 88,89 | 36,00 | 36,00 | 100,00 | 93,52 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat d | 8 | Persentase Sarana P | November | 85,00 | 37,00 | 40,00 | 92,50 | 35,00 | 40,00 | 87,50 | 40,00 | 40,00 | 100,00 | 93,33 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat d | 8 | Persentase Sarana P | Desember | 85,00 | 37,00 | 41,00 | 90,24 | 36,00 | 41,00 | 87,80 | 41,00 | 41,00 | 100,00 | 92,68 |

**h. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

| Kode Unit Kerja | Nama Unit Kerja | Kode Indikator | Nama Indikator | Bulan | Target | % Sardis Obat | % Sardis OBA | % Sardis SK | % Sardis Kosmetik | % Sardis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 9 | Persentase sarana d | Januari | 96,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 94,44 | 98,61 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 9 | Persentase sarana d | Februari | 96,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 96,67 | 99,17 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 9 | Persentase sarana d | Maret | 96,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 96,77 | 99,19 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 9 | Persentase sarana d | April | 96,00 | 97,06 | 100,00 | 100,00 | 97,30 | 98,59 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 9 | Persentase sarana d | Mei | 96,00 | 98,08 | 100,00 | 100,00 | 97,78 | 98,96 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 9 | Persentase sarana d | Juni | 96,00 | 96,43 | 100,00 | 100,00 | 98,04 | 98,62 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 9 | Persentase sarana d | Juli | 96,00 | 96,53 | 100,00 | 100,00 | 99,18 | 98,93 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 9 | Persentase sarana d | Agustus | 96,00 | 96,97 | 100,00 | 100,00 | 98,59 | 98,89 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 9 | Persentase sarana d | September | 96,00 | 97,39 | 100,00 | 100,00 | 98,65 | 99,01 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 9 | Persentase sarana d | Oktober | 96,00 | 95,95 | 100,00 | 100,00 | 98,77 | 98,68 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 9 | Persentase sarana d | November | 96,00 | 94,75 | 100,00 | 100,00 | 98,80 | 98,39 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 9 | Persentase sarana d | Desember | 96,00 | 95,45 | 100,00 | 100,00 | 98,81 | 98,57 |

i. **Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan**

| Kode Unit Kerja | Nama Unit Kerja | Kode Indikator | Nama Indikator | Bulan | Target | Jumlah Sarana yang Diperiksa | Target Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai Renlak | % Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa | Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan | Jumlah Sarana yang Diperiksa 2 | % Ketepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%) | Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Dilaporkan Tepat Waktu | Jumlah Sarana yang Diperiksa 3 | % Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 10%) | % Sardis PO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dar | 10 | Persentase sarana d | Januari | 75 | 5 | 5 | 20,00 | 5 | 5 | 70,00 | 5 | 5 | 10,00 | 100,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dar | 10 | Persentase sarana d | Februari | 75 | 23 | 23 | 20,00 | 23 | 23 | 70,00 | 23 | 23 | 10,00 | 100,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dar | 10 | Persentase sarana d | Maret | 75 | 50 | 50 | 20,00 | 50 | 50 | 70,00 | 50 | 50 | 10,00 | 100,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dar | 10 | Persentase sarana d | April | 75 | 56 | 56 | 20,00 | 56 | 56 | 70,00 | 56 | 56 | 10,00 | 100,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dar | 10 | Persentase sarana d | Mei | 75 | 65 | 62 | 20,97 | 65 | 65 | 70,00 | 65 | 65 | 10,00 | 100,97 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dar | 10 | Persentase sarana d | Juni | 75 | 71 | 68 | 20,88 | 68 | 71 | 67,04 | 71 | 71 | 10,00 | 97,92 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dar | 10 | Persentase sarana d | Juli | 75 | 77 | 74 | 20,81 | 73 | 77 | 66,36 | 77 | 77 | 10,00 | 97,17 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dar | 10 | Persentase sarana d | Agustus | 91 | 83 | 80 | 20,00 | 79 | 83 | 66,63 | 83 | 83 | 10,00 | 96,63 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dar | 10 | Persentase sarana d | September | 91 | 91 | 86 | 20,00 | 86 | 91 | 66,15 | 91 | 91 | 10,00 | 96,15 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dar | 10 | Persentase sarana d | Oktober | 91 | 99 | 94 | 20,00 | 94 | 99 | 66,46 | 99 | 99 | 10,00 | 96,46 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dar | 10 | Persentase sarana d | November | 91 | 108 | 103 | 20,00 | 103 | 108 | 66,76 | 108 | 108 | 10,00 | 96,76 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dar | 10 | Persentase sarana d | Desember | 91 | 131 | 121 | 20,00 | 126 | 131 | 67,33 | 131 | 131 | 10,00 | 97,33 |

**j. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan**

| Kode Unit Kerja | Nama Unit Kerja | Kode Indikator | Nama Indikator | Bulan | Target | % Iklan Obat | % Iklan Kos | % Iklan OBA | % Iklan SK | % Iklan PO | % Iklan SF dan PO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dar | 11 | Persentase Ikla | Januari | 84,2 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 96,82 | 99,36 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dar | 11 | Persentase Ikla | Februari | 84,2 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,55 | 99,91 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dar | 11 | Persentase Ikla | Maret | 84,2 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,78 | 99,96 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dar | 11 | Persentase Ikla | April | 84,2 | 100,00 | 100,00 | 98,10 | 94,87 | 99,89 | 98,57 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dar | 11 | Persentase Ikla | Mei | 84,2 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 97,78 | 99,91 | 99,54 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dar | 11 | Persentase Ikla | Juni | 84,2 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 97,35 | 99,47 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dar | 11 | Persentase Ikla | Juli | 84,2 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 97,74 | 99,55 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dar | 11 | Persentase Ikla | Agustus | 89,6 | 100,00 | 99,44 | 100,00 | 100,00 | 97,79 | 99,45 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dar | 11 | Persentase Ikla | September | 89,6 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,22 | 99,64 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dar | 11 | Persentase Ikla | Oktober | 89,6 | 100,00 | 100,00 | 99,66 | 100,00 | 98,41 | 99,61 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dar | 11 | Persentase Ikla | November | 89,6 | 100,00 | 100,00 | 99,67 | 98,96 | 98,50 | 99,42 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dar | 11 | Persentase Ikla | Desember | 89,6 | 100,00 | 100,00 | 99,67 | 99,07 | 98,68 | 99,48 |

k. **Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar**

| No | UPT | Target Label 2025 | Realisasi Pemenuhan Jumlah | | Realisasi Pemenuhan Waktu | | Target IKU (%) | Realisasi IKU (%) | Capaian IKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Akumulasi Realisasi Jumlah | % Jumlah | Akumulasi Laporan tepat waktu | % Laporan tepat waktu | | | |
| 1 | BBPOM ACEH | 204 | 204 | 100,0% | 187 | 91,67% | 80,0% | 95,8% | 119,8% |
| 2 | BBPOM BANDUNG | 204 | 208 | 102,0% | 170 | 83,33% | 80,0% | 92,6% | 115,8% |
| 3 | BBPOM BANJARBARU | 204 | 204 | 100,0% | 170 | 83,33% | 91,0% | 91,7% | 100,7% |
| 4 | BBPOM DENPASAR | 204 | 208 | 102,0% | 179 | 87,75% | 92,0% | 94,9% | 103,1% |
| 5 | BBPOM JAKARTA | 204 | 204 | 100,0% | 165 | 80,88% | 85,0% | 90,4% | 106,4% |
| 6 | BBPOM JAYAPURA | 204 | 225 | 110,3% | 147 | 72,06% | 91,0% | 91,2% | 100,2% |
| 7 | BBPOM BANDAR LAMPUNG | 204 | 204 | 100,0% | 172 | 84,31% | 91,0% | 92,2% | 101,3% |
| 8 | BBPOM MAKASSAR | 204 | 191 | 93,6% | 97 | 47,55% | 80,0% | 70,6% | 88,2% |
| 9 | BBPOM MANADO | 204 | 214 | 104,9% | 120 | 58,82% | 91,0% | 91,0% | 99,9% |
| 10 | BBPOM MATARAM | 204 | 208 | 102,0% | 177 | 86,76% | 92,0% | 94,4% | 102,6% |
| 11 | BBPOM MEDAN | 204 | 210 | 102,9% | 86 | 42,16% | 90,0% | 72,5% | 80,7% |
| 12 | BBPOM PADANG | 204 | 208 | 102,0% | 190 | 93,14% | 90,0% | 97,5% | 108,4% |
| 13 | BBPOM PALANGKARAYA | 204 | 207 | 101,5% | 175 | 85,80% | 91,0% | 93,6% | 102,9% |
| 14 | BBPOM PALEMBANG | 204 | 295 | 144,6% | 125 | 61,27% | 91,0% | 102,9% | 113,1% |
| 15 | BBPOM PEKAN BARU | 204 | 208 | 102,0% | 170 | 83,33% | 91,0% | 92,6% | 101,8% |

## I. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

| Kode Indikator | Nama Indikator | Bulan | Target Indikator (%) | % Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A) (Bobot 25%) | % Pelaksanaan Bimtek (B) (Bobot 25%) | % Pelaksanaan Advokasi (C) (Bobot 25%) | % Pelaksanaan Publikasi (D) (Bobot 25%) | Realisasi (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | Januari | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | Februari | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | Maret | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | April | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | Mei | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | Juni | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | Juli | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | Agustus | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | September | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | Oktober | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | November | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | Desember | 100,00 | 122,78 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 105,69 |

**m. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman**

| Kode Indikator | Nama Indikator | Bulan | Target Indikator (%) | Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman | Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT | Realisasi (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Ka | Januari | - | - | - | - |
| 30 | Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Ka | Februari | - | - | - | - |
| 30 | Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Ka | Maret | - | - | - | - |
| 30 | Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Ka | April | - | - | - | - |
| 30 | Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Ka | Mei | - | - | - | - |
| 30 | Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Ka | Juni | - | - | - | - |
| 30 | Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Ka | Juli | - | - | - | - |
| 30 | Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Ka | Agustus | - | - | - | - |
| 30 | Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Ka | September | - | - | - | - |
| 30 | Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Ka | Oktober | - | - | - | - |
| 30 | Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Ka | November | - | - | - | - |
| 30 | Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Ka | Desember | 20,00 | 1,00 | 5,00 | 20,00 |

**n. Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan**

| Kode Unit Kerja | Nama Unit Kerja | Kode Indikator | Nama Indikator | Bulan | Target | Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT | % Cakupan Sarprod Fortif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 12 | Persentase Ca | Januari | 0 | 0 | 8 | 0,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 12 | Persentase Ca | Februari | 0 | 0 | 8 | 0,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 12 | Persentase Ca | Maret | 0 | 0 | 8 | 0,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 12 | Persentase Ca | April | 3 | 3 | 8 | 37,50 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 12 | Persentase Ca | Mei | 3 | 3 | 8 | 37,50 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 12 | Persentase Ca | Juni | 3 | 3 | 8 | 37,50 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 12 | Persentase Ca | Juli | 3 | 3 | 8 | 37,50 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 12 | Persentase Ca | Agustus | 5 | 5 | 8 | 63 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 12 | Persentase Ca | September | 5 | 5 | 8 | 63 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 12 | Persentase Ca | Oktober | 5 | 5 | 8 | 63 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 12 | Persentase Ca | November | 5 | 5 | 8 | 63 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ma | 12 | Persentase Ca | Desember | 5 | 5 | 8 | 63 |

## o. Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

| No | Komponen | Januari | | sd Pebruari | | sd Maret | | sd April | | sd Mei | | sd Juni | | sd Juli | | sd Agustus | | sd September | | sd Oktober | | sd Nopember | | sd Desember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Skala 4 | Skala 100 | Skala 4 | Skala 100 | Skala 4 | Skala 100 | Skala 4 | Skala 100 | Skala 4 | Skala 100 | Skala 4 | Skala 100 | Skala 4 | Skala 100 | Skala 4 | Skala 100 | Skala 4 | Skala 100 | Skala 4 | Skala 100 | Skala 4 | Skala 100 | Skala 4 | Skala 100 |
| 1 | **Survey Tatap Muka** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Narasumber/Petugas | | | | | 4 | 100 | 3,988 | 99,689 | 3,991 | 99,773 | 3,991 | 99,773 | 3,991 | 99,773 | 3,993 | 99,811 | 3,748 | 93,704 | 3,74 | 93,589 | 3,74 | 93,589 | 3,74 | 93,589 |
| | - Konten/Informasi | | | | | 4 | 100 | 3,981 | 99,534 | 3,986 | 99,659 | 3,986 | 99,659 | 3,986 | 99,659 | 3,987 | 99,686 | 3,665 | 91,62 | 3,66 | 91,575 | 3,66 | 91,575 | 3,66 | 91,575 |
| | - Pemahaman Audiens | | | | | 4 | 100 | 3,891 | 97,283 | 3,891 | 97,273 | 3,891 | 97,273 | 3,891 | 97,273 | 3,902 | 97,547 | 3,467 | 86,67 | 3,46 | 86,560 | 3,46 | 86,560 | 3,46 | 86,560 |
| | - Manfaat | | | | | 4 | 100 | 3,975 | 99,379 | 3,982 | 99,546 | 3,982 | 99,546 | 3,982 | 99,546 | 3,979 | 99,481 | 3,698 | 92,454 | 3,69 | 92,339 | 3,69 | 92,339 | 3,69 | 92,339 |
| | Indeks Tatap Muka | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4 | 100 | 3,95875 | 98,97125 | 3,9625 | 99,06275 | 3,9625 | 99,06275 | 3,9625 | 99,06275 | 3,96525 | 99,13125 | 3,6445 | 91,112 | 3,638 | 91,016 | 3,638 | 91,016 | 3,638 | 91,016 |
| | Jumlah Responden | | | | | 21 | | 161 | | 220 | | 220 | | 220 | | 265 | | 540 | | 545 | | 545 | | 545 | |
| 2 | Survey Media | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Sumber Informasi | | | | | 3,779 | 94,477 | 3,779 | 94,477 | 3,779 | 94,477 | 3,779 | 94,477 | 3,803 | 95,066 | 3,803 | 95,066 | 3,886 | 97,159 | 3,9 | 97,604 | 3,9 | 97,604 | 3,9 | 97,604 |
| | - Konten/Informasi | | | | | 3,721 | 93,023 | 3,721 | 93,023 | 3,721 | 93,023 | 3,721 | 93,023 | 3,693 | 92,325 | 3,693 | 92,325 | 3,821 | 95,518 | 3,86 | 96,546 | 3,86 | 96,546 | 3,86 | 96,546 |
| | - Pemahaman Audiens | | | | | 3,349 | 83,721 | 3,349 | 83,721 | 3,349 | 83,721 | 3,349 | 83,721 | 3,145 | 78,618 | 3,145 | 78,618 | 3,504 | 87,595 | 3,63 | 90,868 | 3,63 | 90,868 | 3,63 | 90,868 |
| | - Manfaat | | | | | 3,535 | 88,372 | 3,535 | 88,372 | 3,535 | 88,372 | 3,535 | 88,372 | 3,388 | 84,704 | 3,388 | 84,704 | 3,633 | 90,814 | 3,73 | 93,264 | 3,73 | 93,264 | 3,73 | 93,264 |
| | Indeks Media | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3,596 | 89,89825 | 3,535 | 89,89825 | 3,535 | 89,89825 | 3,596 | 89,89825 | 3,50725 | 87,67825 | 3,50725 | 87,67825 | 3,711 | 92,7715 | 3,78 | 94,570 | 3,78 | 94,570 | 3,78 | 94,570 |
| | Jumlah Responden | | | | | 43 | | 43 | | 43 | | 43 | | 76 | | 76 | | 132 | | 193 | | 193 | | 193 | |
| | **Total Responden** | **0** | | **0** | | **64** | | **204** | | **263** | | **263** | | **296** | | **341** | | **672** | | **738** | | **738** | | **738** | |
| | **Indeks Rata-rata** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **3,798** | **94,95** | **3,75** | **94,43** | **3,75** | **94,48** | **3,78** | **94,48** | **3,73** | **93,37** | **3,74** | **93,40** | **3,68** | **91,94** | **3,70875** | **92,7931** | **3,70875** | **92,7931** | **3,70875** | **92,7931** |
| | **Target Indeks** | | 88,57 | | 88,57 | | 88,57 | | 88,57 | | 88,57 | | 88,57 | | 88,57 | | 88,57 | | 88,57 | | 88,57 | | 88,57 | | 88,57 |
| | **%Capaian** | | **#DIV/0!** | | **#DIV/0!** | | **107,20** | | **106,62** | | **106,67** | | **106,67** | | **105,42** | | **105,46** | | **103,81** | | **104,7681** | | **104,7681** | | **104,7681** |

### p. Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

| Kode Unit Kerja | Nama Unit Kerja | Kode Indikator | Nama Indikator | Bulan | Target | Advokasi Lintas Sektor Program SAPA | Sosialisasi Keamanan Pangan | Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk | Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang | Pengawalan | Realisasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | 15 | Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembud | Januari | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | 15 | Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan | Februari | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | 15 | Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan | Maret | 5 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | 15 | Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan | April | 25 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | 15 | Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan | Mei | 49 | 25,00 | 10,77 | 13,46 | 0,00 | 0,00 | 49,23 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | 15 | Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan | Juni | 49 | 25,00 | 10,77 | 13,46 | 0,00 | 0,00 | 49,23 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | 15 | Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan | Juli | 54 | 25,00 | 10,77 | 13,46 | 0,00 | 5,00 | 54,23 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | 15 | Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan | Agustus | 54 | 25,00 | 10,77 | 13,46 | 0,00 | 5,00 | 54,23 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | 15 | Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan | September | 85 | 25,00 | 20,00 | 25,00 | 10,77 | 5,00 | 85,77 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | 15 | Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan | Oktober | 85 | 25,00 | 20,00 | 25,00 | 13,46 | 5,00 | 88,46 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | 15 | Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan | November | 100 | 25,00 | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 5,00 | 100,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | 15 | Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan | Desember | 13 | | | | | | 13,00 |

### q. Jumlah Desa Pangan Aman

| Kode Unit Kerja | Nama Unit Kerja | Kode Indikator | Nama Indikator | Bulan | Target | Advokasi | Pelatihan kader | Bimtek komunitas | Monev | Pengawalan | Realisasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan | 16 | Jumlah Desa Pangan Aman | Januari | | | | | | | 0,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan | 16 | Jumlah Desa Pangan Aman | Februari | | | | | | | 0,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan | 16 | Jumlah Desa Pangan Aman | Maret | 5 | 5,00 | | | | | 5,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan | 16 | Jumlah Desa Pangan Aman | April | 25 | 25,00 | | | | | 25,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan | 16 | Jumlah Desa Pangan Aman | Mei | 37 | 25,00 | 12,50 | 5,00 | | | 42,50 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan | 16 | Jumlah Desa Pangan Aman | Juni | 47 | 25,00 | 12,50 | 10,00 | | | 47,50 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan | 16 | Jumlah Desa Pangan Aman | Juli | 57 | 25,00 | 12,50 | 10,00 | | 10 | 57,50 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan | 16 | Jumlah Desa Pangan Aman | Agustus | 57 | 25,00 | 12,50 | 10,00 | | 10 | 57,50 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan | 16 | Jumlah Desa Pangan Aman | September | 80 | 25,00 | 25,00 | 20,00 | | 10 | 80,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan | 16 | Jumlah Desa Pangan Aman | Oktober | 80 | 25,00 | 25,00 | 20,00 | | 10 | 80,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan | 16 | Jumlah Desa Pangan Aman | November | 100 | 25,00 | 25,00 | 20,00 | 20,00 | 10 | 100,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan | 16 | Jumlah Desa Pangan Aman | Desember | 4 | | | | | | 4,00 |

### r. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 2025

| Kode Unit Kerja | Nama Unit Kerja | Kode Indikator | Nama Indikator | Bulan | Target | Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar | Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar | Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar | Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi | Pengawalan | Realisasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | 17 | Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas | Januari | 0 | | | | | | 0,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | 17 | Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas | Februari | 0 | | | | | | 0,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | 17 | Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas | Maret | 5 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | 17 | Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas | April | 25 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | 17 | Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas | Mei | 70 | 25,00 | 25,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | 17 | Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas | Juni | 70 | 25,00 | 25,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | 17 | Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas | Juli | 80 | 25,00 | 25,00 | 20,00 | 20,00 | 10,00 | 100,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | 17 | Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas | Agustus | 100 | 25,00 | 25,00 | 20,00 | 20,00 | 10,00 | 100,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | 17 | Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas | September | 100 | 25,00 | 25,00 | 20,00 | 20,00 | 10,00 | 100,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | 17 | Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas | Oktober | 100 | 25,00 | 25,00 | 20,00 | 20,00 | 10,00 | 100,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | 17 | Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas | November | 100 | 25,00 | 25,00 | 20,00 | 20,00 | 10,00 | 100,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | 17 | Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas | Desember | 1 | | | | | | 1,00 |

s. **Persentase UMKM memperoleh rekomendasi sertifikat CP OBA, Kos dan_atau IP-CPPOB**

| Kode Unit Kerja | Nama Unit Kerja | Kode Indikator | Nama Indikator | Bulan | Target Indikator | % UMKM Pangan Olahan | % UMKM OBA | % UMKM Kosmetik | Realisasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14A | Balai Besar POM | 18 | Persentase UMKM yang didampingi dan memperol | Januari | 0 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| 14A | Balai Besar POM | 18 | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh reko | Februari | 5 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 8,33 |
| 14A | Balai Besar POM | 18 | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh reko | Maret | 15 | 520,00 | 10,00 | 20,00 | 18,33 |
| 14A | Balai Besar POM | 18 | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh reko | April | 25 | 760,00 | 10,00 | 20,00 | 26,33 |
| 14A | Balai Besar POM | 18 | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh reko | Mei | 45 | 1720,00 | 70,00 | 100,00 | 63,00 |
| 14A | Balai Besar POM | 18 | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh reko | Juni | 55 | 1865,00 | 70,00 | 130,00 | 68,83 |
| 14A | Balai Besar POM | 18 | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh reko | Juli | 60 | 1925,00 | 70,00 | 100,00 | 69,83 |
| 14A | Balai Besar POM | 18 | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh reko | Agustus | 65 | 1945,00 | 70,00 | 140,00 | 71,83 |
| 14A | Balai Besar POM | 18 | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh reko | September | 75 | 2010,00 | 70,00 | 160,00 | 74,67 |
| 14A | Balai Besar POM | 18 | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh reko | Oktober | 80 | 2200,00 | 70,00 | 180,00 | 81,67 |
| 14A | Balai Besar POM | 18 | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh reko | November | 90 | 2445,00 | 90,00 | 180,00 | 90,50 |
| 14A | Balai Besar POM | 18 | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh reko | **Desember** | 14,04 | **25,00** | **1,00** | **2,00** | **15,73** |

**t. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

| Kode Unit Kerja | Nama Unit Kerja | Kode Indikator | Nama Indikator | Bulan | Target Perkara Tahun Berjalan | Target Perkara Carry Over | Realisasi Perkara Tahun Berjalan (SPDP) | Realisasi Perkara Carry Over (SPDP) | Nilai Realisasi SPDP | Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap I) | Realisasi Perkara Carry Over (Tahap I) | Nilai Realisasi Tahap I | Realisasi Perkara Tahun Berjalan (P21) | Realisasi Perkara Carry Over (P21) | Nilai Realisasi P21 | Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap II) | Realisasi Perkara Carry Over (Tahap II) | Nilai Realisasi Tahap II | % Keberhasilan Perkara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat | 19 | Persentase Keb | Januari | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat | 19 | Persentase Keb | Februari | 6 | 0 | 1 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,50 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat | 19 | Persentase Keb | Maret | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,17 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat | 19 | Persentase Keb | April | 6 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,55 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 9,17 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat | 19 | Persentase Keb | Mei | 6 | | 2 | 0 | 0,3 | 1 | 0 | 0,55 | | 0 | 0 | | | 0 | 14,17 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat | 19 | Persentase Keb | Juni | 6 | | 3 | 0 | 0,45 | 1 | 0 | 0,55 | | 0 | 0 | 1 | | 1 | 33,33 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat | 19 | Persentase Keb | Juli | 6 | | | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,65 | 1 | 0 | 0,85 | 1 | | 1 | 58,33 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat | 19 | Persentase Keb | Agustus | 6 | | | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,65 | | 0 | 0 | 2 | | 2 | 60,83 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat | 19 | Persentase Keb | September | 6 | | 1 | 0 | 0,15 | 2 | 0 | 1,1 | 1 | 0 | 0,85 | 2 | | 2 | 68,33 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat | 19 | Persentase Keb | Oktober | 6 | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,1 | | 0 | 0 | 4 | | 4 | 85,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat | 19 | Persentase Keb | November | 6 | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,1 | | 0 | 0 | 4 | | 4 | 85,00 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat | 19 | Persentase Keb | Desember | 7 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,55 | | 0 | 0 | 6 | | 6 | 93,57 |

u. **Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT**

| Kode Unit | Nama Unit | Bulan s.d. TW IV (Jan - Des) | Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Kendala | Rekomendasi |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | Januari | | | | |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | Februari | 100 | | | |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | Maret | 100 | | | |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | April | 100 | 100 | Tidak ada sampel kasus KLB pada bulan April | |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | Mei | 100 | 100 | Sampel yang dikirim ke BBPOM di Mataram bukan merupakan sampel penyebab keracunan | Dinas Kesehatan agar menwajibkan Ka SPPG untuk selalu menerapkan retain sampel setiap kali menyiapkan makanan MBG |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | Juni | 100 | 100 | | |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | Juli | 100 | 100 | | |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | Agustus | 100 | 100 | | |

| Kode Unit | Nama Unit | Bulan s.d. TW IV (Jan - Des) | Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Kendala | Rekomendasi |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | September | 100 | 100 | 1. Sampel yang dikirim oleh Dinas Kesehatan jumlahnya tidak mencukupi untuk menguji sesuai dengan MA<br>2. Meningkatnya jumlah sampel KLB yang berasal dari Makanan MBG sehingga berdampak terhadap jumlah media atau kit uji konfirmasi untuk sampel rutin | 1. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan atau SPPG untuk menyediakan jumlah atau volume sampel yang cukup untuk pengujian secara kimia maupun mikrobiologi agar penyebab KLB dapat diketahui<br>2. Menyedianakn anggaran untuk pengadaan media atau kit |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | Oktober | 100 | 100 | | |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | November | 100 | 100 | | |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | Desember | 100 | 100 | | |
| | | | | | | |

v. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

| Kode Unit | Nama Unit | Bulan s.d. TW IV (Jan - Des) | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Kendala | Rekomendasi |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | Januari | | | | |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | Februari | | | | |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | Maret | 81 | 83,9 | Terbatasnya anggaran dan ketersediaan sampel obat untuk pemenuhan sampel dalam rangka pemenuhan Standar Ruang Lingkup | Menyusunan daftar prioritas pengadaan reagen/media berdasarkan urgensi dan frekuensi penggunaan, verifikasi sampel dilakukan sekaligus dengan pengujian sampel rutin, Peningkatan kompetensi melalui pelatihan secara daring atau diseminasi hasil pelatihan, serta menetapkan penyusunan timeline verifikasi metode. |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | April | 81 | 83,9 | | |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | Mei | 81 | 83,9 | | |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | Juni | 81,25 | 85,6 | | |

| Kode Unit | Nama Unit | Bulan s.d. TW IV (Jan - Des) | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Kendala | Rekomendasi |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | Juli | 81,25 | 85,6 | | |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | Agustus | 81,25 | 85,6 | | |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | September | 81,5 | 87,1 | 1. Beberapa sampel tidak tersedia di pasaran<br>2. Baku pembanding tertentu juga belum tersedia di infalabs dan UPT terkendala dengan anggaran untuk pembelian mandiri. Selain baku pembanding juga suku cadang alat belum tersedia | 1. Koordinasi dengan Inspeksi untuk dialokasikan pembelian Via Distributor untuk item obat yang tidak tersedia dipasaran.<br>2. Koordinasi dengan distributor baku pembanding untuk pengadaan baku yang tidak tersedia di Infalabs (ethyl parahydroxybenzoate, N-phenylcarbazole, tetrabutil hidroperoksida, tetrabutil amonium bisulfat, dibucaine hydro chloride) dan menyediakan anggaran untuk pembelian baku pembanding maupun suku cadang. |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | Oktober | 81,7 | 89,7 | | |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | November | 81,7 | 89,7 | | |

| Kode Unit | Nama Unit | Bulan s.d. TW IV (Jan - Des) | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Kendala | Rekomendasi |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | Desember | 81,7 | 89,7 | | |

**w. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**

| Kode Unit | Nama Unit | Bulan s.d. TW IV (Jan - Des) | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Kendala | Rekomendasi |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | Januari | | | | |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | Februari | | | | |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | Maret | 88,57 | 94,95 | Rendahnya tingkat literasi atau pendidikan masyarakat menjadi salah astu penyebab rendahnya pemahaman terhadap pesan KIE, terutama jika menggunakan bahasa yang terlalu teknis atau formal.<br><br>Minimnya anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan KIE secara rutin dan KIE dengan memanfaatka seni tradisional seperti wayang dsb | Menggunakan media visual seperti gambar, infografik, video singkat, atau ilustrasi yang mudah dipahami, terutama untuk kelompok yang kesulitan membaca.<br><br>Meibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, atau kader lokal untuk menyampaikan pesan dalam gaya bertutur atau ceramah yang akrab di masyarakat. |

| Kode Unit | Nama Unit | Bulan s.d. TW IV (Jan - Des) | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Kendala | Rekomendasi |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | April | 88,57 | 94,43 | Sebagian peserta KIE Tomas datang terlambat mengkuti kegiatan sosialisasi<br><br>Beberapa tempat pelaksanaan kegiatan KIE Tomas kurang representatif<br><br>Rendahnya tingkat literasi atau pendidikan masyarakat menjadi salah satu penyebab rendahnya pemahaman terhadap pesan KIE, terutama jika menggunakan bahasa yang terlalu teknis atau formal. | Lebih intesive melakukan koordinasi dengan TA Tomas untuk kelancaran pelaksanaan KIE |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | Mei | 88,57 | 94,48 | Akses informasi terbatas di daerah terpencil atau sulit dijangkau, sehingga pemanfaatan media digital yang belum optimal.<br><br>Keterbatasan anggaran untuk kegiatan sosialisasi, penyuluhan, atau media kampanye. | Integrasi KIE dalam kegiatan lintas sektor/ormas/ organisasi profesi |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | Juni | 88,57 | 94,48 | Masyarakat kurang antusias atau enggan mengikuti kegiatan KIE karena dianggap tidak menarik atau | Melibatkan tokoh masyarakat, kader, atau relawan lokal agar penyampaian pesan lebih diterima dan dipercaya oleh masyarakat. |

| Kode Unit | Nama Unit | Bulan s.d. TW IV (Jan - Des) | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Kendala | Rekomendasi |
| | | | | | tidak relevan dengan kebutuhan mereka. | |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | Juli | 88,57 | 93,37 | Anggaran kegiatan KIE terbatas | Jalin kerja sama dengan LSM, CSR perusahaan, Perguruan Tinggi atau komunitas lokal untuk mendukung pendanaan dan sumber daya. |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | Agustus | 88,57 | 93,4 | Keterbatasan akses informasi di wilayah yang jauh dari pusat kota, sehingga pemanfaatan media digital belum berjalan maksimal. | Perlu penguatan integrasi KIE melalui kolaborasi dengan kegiatan lintas sektor, organisasi masyarakat, maupun organisasi profesi. |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | September | 88,57 | 91,94 | Tingkat pemahaman masyarakat dalam pengisian survei kurang memadai | Menjelaskan tata cara pengisian survei sebelum mengambil data survei |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | Oktober | 88,57 | | | |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | November | 88,57 | | | |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | Desember | 88,57 | | | |

x. **Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar**

| Kode Unit | Nama Unit | Bulan s.d. TW IV (Jan - Des) | Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Kendala | Rekomendasi |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | Januari | 4,16 | 4,16 | Tidak ada kendala walaupun Adanya edaran terkait self blokir dan efisiensi anggaran serta desk perubahan target yang belum disepakati namun tercapai berkat adanya komitmen dari petugas yg melaksanakn patroli siber, verifikasi hasil patroli siber (profiling) walaupun minim anggaran | Melaksanakan kegiatan sesuai target dan melaksanakan Monitoring evaluasi tahapan pelaksanaan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | Februari | 8,33 | 8,33 | Tidak ada kendala walaupun Adanya efisiensi anggaran namun tercapai berkat adanya komitmen dari petugas yg melaksanakn patroli siber, verifikasi hasil patroli siber (profiling) walaupun dengan anggaran yang terbatas | Pelaksaan kegiatan patroli siber dan profiling walaupun dengan anggaran terbatas dan memnfaatkan jaringa yang ada untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | Maret | 12,5 | 12,5 | Keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi akun AEA | adanya buka Blokir RO AEA atau menggunakan anggaran QCD untuk pelaksaan kegiatan patrolii siber, verifikasi data hasil patroli siber dan profiling |

| Kode Unit | Nama Unit | Bulan s.d. TW IV (Jan - Des) | Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Kendala | Rekomendasi |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | April | 50 | 50 | - Keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi akun AEA<br>- Kurang cermat dalam penetapan target RAPK yang rendah, sehingga %capaian kinerja sangat tinggi | - pelaksanaan patrol siber khususnya verifikasi data hasil patroli siber dan profiling dapat dilakukan bersama-sama dengan kegiatan penyelidikan pada rincian output (RO) perkara yang seluruh anggarannya telah dapat digunakan Kembali<br>- Melakukan penyesuaian target RAPK mulai TW2 2025 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | Mei | 50 | 50 | Kurang cermat dalam penetapan target RAPK yang rendah, sehingga %capaian kinerja sangat tinggi | Melakukan penyesuaian target RAPK mulai TW2 2025 |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | Juni | 50 | 50 | | |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | Juli | 50 | 50 | | |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | Agustus | 50 | 50 | | |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | September | 50 | 50 | | |

| Kode Unit | Nama Unit | Bulan s.d. TW IV (Jan - Des) | Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Kendala | Rekomendasi |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | Oktober | 50 | 50 | | |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | November | 50 | 50 | | |
| 14A | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram | Desember | 90 | 98 | kurang cermat dalam penetapan target RAPK, arget sudah ditetpkan Pusat, | adanya penyesuaian target dan dalam penetapan cermat melihat trend capaian serta mengusulkan kepada pusat agar formula perhitungan bisa direview |

## 9. INDEKS PELAYANAN PUBLIK UPT

**LEMBAR PENILAIAN PEMANTAUAN KINERJA**
**DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BPOM TAHUN 2025**

**UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK : BALAI BESAR POM DI MATARAM**

| Formulir | Kode | Aspek | Bobot | Indeks Per Aspek |
|---|---|---|---|---|
| F02 | I | Kebijakan Pelayanan | 24% | 4,79 |
| | II | Profesionalisme SDM | 25% | 5 |
| | III | Sarana Prasarana | 18% | 5 |
| | IV | Sistem Informasi Pelayanan Publik | 11% | 4,7 |
| | V | Konsultasi dan Pengaduan | 10% | 5 |
| | VI | Inovasi | 12% | 5 |
| | Indeks Formulir F02 | | 4,92 | |
| | Indeks Formulir F03 | | 5 | |
| Indeks Pelayanan Publik | | | 4,94 | |

## 10. NILAI PEMBANGUNAN ZI UPT BPOM

| PENILAIAN | | | Bobot | Aspek Pemenuhan | Aspek Reform | Total Nilai | Keterangan (diisi MS/TMS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A.** | **Komponen Pengungkit** | | 60,00 | | | | |
| | I. | Manajemen Perubahan | 8,00 | 3,24 | 4,00 | 7,24 | **MS** |
| | II. | Penataan Tatalaksana | 7,00 | 2,56 | 2,92 | 5,48 | **MS** |
| | III. | Penataan Sistem Manajemen SDM | 10,00 | 4,43 | 4,25 | 8,68 | **MS** |
| | IV. | Penguatan Akuntabilitas | 10,00 | 4,15 | 3,96 | 8,11 | **MS** |
| | V. | Penguatan Pengawasan | 15,00 | 5,81 | 7,50 | 13,31 | **MS** |
| | VI. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 10,00 | 4,48 | 4,00 | 8,48 | **MS** |
| **TOTAL PENGUNGKIT** | | | | | | **51,28** | |
| **B.** | **Komponen Hasil** | | 40,00 | | | | |
| | I. | Birokrasi Bersih dan Akuntabel | 22,50 | | | 22,41 | |
| | | 1. Nilai Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK) | 17,50 | | | 17,41 | **MS** |
| | | 2. Capaian Kinerja lebih baik | 5,00 | | | 5,00 | **MS** |
| | II. | Pelayanan Publik yang Prima | 17,50 | | | 17,24 | |
| | | Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) | 17,50 | | | 17,24 | **MS** |
| **TOTAL HASIL** | | | | | | **39,65** | |
| **NILAI PMPZI** | | | | | | **90,93** | |

**11. Nilai AKIP UPT BPOM**

Nilai Hasil Evaluasi SAKIP pada Balai Besar POM di Mataram Tahun 2025

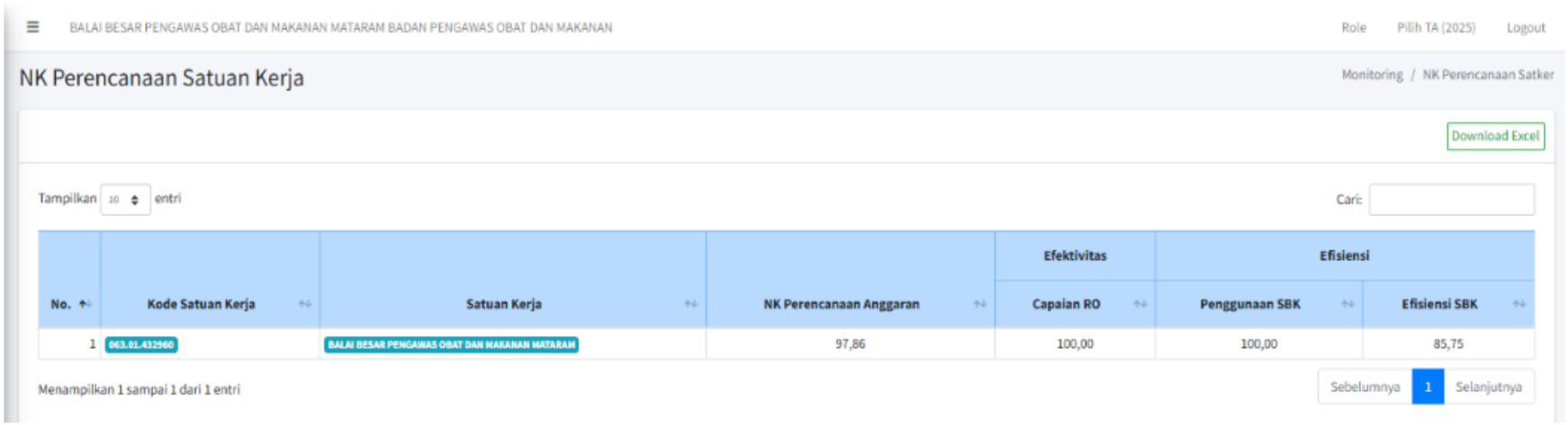
| No | Komponen | Bobot | Nilai | | Keterangan (Kenaikan/Penurunan Nilai) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | |
| 1. | Perencanaan Kinerja | 24 | 20,16 | 20,16 | 0,00 |
| 2. | Pengukuran Kinerja | 24 | 20,16 | 20,16 | 0,00 |
| 3. | Pelaporan Kinerja | 12 | 9,72 | 10,08 | +0,36 |
| 4. | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 20 | 16,20 | 16,80 | +0,60 |
| 5. | Capaian Kinerja | 20 | 17,65 | 15,35 | -2,30 |
| **Nilai Hasil Evaluasi** | | **100** | **83,89** | **82,55** | **-1,34** |
| **Predikat** | | | **A** | **A** | **Tetap** |

**12. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM**

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) TA 2025 _09/01/26



Nilai EKA (perencanaan Anggaran)



Nilai IKPA (Pelaksanaan Anggaran)

| Uraian Satker | Keterangan | Kualitas Perencanaan Anggaran | | Kualitas Pelaksanaan Anggaran | | | | Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran | Nilai Total | Konversi Bobot | Dispensasi SPM (Pengurang) | Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Revisi DIPA | Deviasi Halaman III DIPA | Penyerapan Anggaran | Belanja Kontraktual | Penyelesaian Tagihan | Pengelolaan UP dan TUP | Capaian Output | | | | |
| BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MATARAM | Nilai | 100,00 | 94,08 | 99,90 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,09 | 100% | 0.00 | 99.09 |
| | Bobot | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 25 | | | | |
| | Nilai Akhir | 10,00 | 14,11 | 19,98 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 25,00 | | | | |
| | Nilai Aspek | 97.04 | | 99.98 | | | | 100.00 | | | | |

**Cara Perhitungan dan Formula**

Nilai Kinerja Anggaran =

(Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran:

| Nilai | Kategori | Konversi NIlai |
|---|---|---|
| 0 s.d. 50 | Sangat Kurang | 1 |
| 50,01 s.d. 60 | Kurang | 2 |
| 60,01 s.d. 80 | Cukup | 3 |
| 80,01 s.d. 90 | Baik | 4 |
| 90,01 s.d. 100 | Sangat Baik | 5 |

## a. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

**Tabel 3.** Target, realisasi dan %capaian Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

| Sasaran kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | %Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM | 5 | 5.00 | 100.00% | Baik |

**13. INDEKS MANAJEMEN RISIKO UPT BPOM**

| Uraian | Nilai 2024 | Nilai 2025 | Naik/(Turun) |
|---|---|---|---|
| Jumlah Nilai | 47,5 | 47,5 | 0 |
| Nilai Maturitas | 2,969 | 2,969 | 0,000 |
| Tingkat Maturitas | *Risk Aware* | *Risk Aware* | |